

PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2023 PERUBAHAN RKPD

TAHUN 2023



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN 2023



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

21. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
22. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 (Periode Efektif 2016-2025) (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 72);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 2);
31. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);
32. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 380);
33. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 79 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 79 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 446);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
10. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Dasar Pemerintah Daerah.
11. Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RAPBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah rancangan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
19. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
20. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
 - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan;
 - b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c) penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam Perubahan RKPD Tahun 2023;
 - d) penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah;

- (2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2023 perlu memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati dengan Ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2023 dijadikan:

- a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. pedoman Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan PPAS;
- c. landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
- d. bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan RKPD 2023 disusun berpedoman pada:

- a. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026; dan
- b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II Tahun 2023.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 4 Agustus 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

JON EDWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 459

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-01
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-04
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-09
1.4 Maksud dan Tujuan	I-17
1.4.1 Maksud	I-17
1.4.2 Tujuan	I-17
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-18
 BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023	
2.1 Evaluasi RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-02
2.1.1 Evaluasi Kinerja Indikator Pembangunan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 .	II-02
2.1.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-09
2.1.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 .	II-12
2.1.4 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-21
2.1.5 Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-28
2.2 Permasalahan Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2023	II-139
2.2.1 Permasalahan Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-140
2.2.2 Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-141
2.2.3 Rekomendasi	II-146

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1	Kerangka Ekonomi Daerah	III-01
3.1.1	Perkembangan Kinerja Ekonomi Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	III-02
3.1.2	Perkembangan Kinerja Sosial Ekonomi Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	III-17
3.1.3	Kerangka Ekonomi Daerah sampai dengan Akhir Tahun 2023	III-23
3.1.4	Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2023	III-31
3.2	Kerangka Keuangan Dearah	III-32
3.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2023	III-34
3.2.2	Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2023	III-39
3.2.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2023	III-47

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-01
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-11
4.2.1	Program Prioritas Daerah	IV-31
4.2.2	Dukungan Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	IV-44
4.2.3	Dukungan Terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-50
4.3	Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat	IV-55

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1	Program dan Kegiatan Prioritas Daerah	V-20
5.2	Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan	V-34

BAB VI. PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sasaran Makro RKPD Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-02
Tabel 2.2.	Pencapaian Indikator Kinerja Utama RKPD Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....	II-09
Tabel 2.3.	Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....	II-12
Tabel 2.4.	Pencapaian SPM Bidang Pendidikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-21
Tabel 2.5.	Pencapaian SPM Bidang Kesehatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-22
Tabel 2.6.	Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-24
Tabel 2.7.	Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-25
Tabel 2.8.	Pencapaian SPM Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-26
Tabel 2.9.	Pencapaian SPM Bidang Sosial sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-27
Tabel 2.10.	Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023.....	II-29
Tabel 2.11.	Skala Nilai Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-46
Tabel 2.12.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Pesisir Barat	II-48
Tabel 2.13.	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023 ...	II-141
Tabel 3.1.	PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)	III-03
Tabel 3.2.	Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (dalam %).	III-06
Tabel 3.3.	PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)...	III-08
Tabel 3.4.	PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)...	III-09

Tabel 3.5.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK) Tahun 2018-2022	III-13
Tabel 3.6.	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	III-14
Tabel 3.7.	Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung Terhadap Total PDRB Tahun 2018 – 2022 (Persen).....	III-21
Tabel 3.8.	Sasaran Makro Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023	III-31
Tabel 3.9.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2023	III-37
Tabel 3.10.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat APBD TA 2022	III-37
Tabel 3.11.	Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2023.....	III-38
Tabel 3.12.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan II Tahun 2023	III-45
Tabel 3.13.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat APBD TA 2022.....	III-45
Tabel 3.14.	Target Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2023.....	III-46
Tabel 3.15.	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan II Tahun 2023	III-49
Tabel 3.16.	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat APBD TA 2022	III-50
Tabel 3.17.	Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2023.....	III-51
Tabel 4.1.	Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026.....	IV-6
Tabel 4.2.	Matrik Sandingan Antara Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023 dengan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026.....	IV-13
Tabel 4.3.	Tema dan Prioritas Pembangunan Perubahan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat.....	IV-18
Tabel 4.4.	Sinkronisasi Tema dan Prioritas Pembangaunan Perubahan RKPD Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat.	IV-19
Tabel 4.5.	Keselarasan Target Sasaran Makro Antara Pemerintah Pusat, Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2023.....	IV-20
Tabel 4.6.	DaftarProyek Strategis Nasional di Provinsi Lampung....	IV-21

Tabel 4.7.	Hubungan antara Misi dan Arah Kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dengan Prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023	IV-23
Tabel 4.8.	Isu Strategis dan Arah Kebijakan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023	IV-26
Tabel 4.9.	Program Prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Perubahan RKPD Tahun 2023.....	IV-32
Tabel 4.10.	Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 terhadap Pencapaian Tujuan SDGs Kabupaten Pesisir Barat.....	IV-45
Tabel 4.11.	Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 terhadap Pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Barat.....	IV-52
Tabel 4.12.	Arah Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pembangunan RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037	IV-59
Tabel 5.1.	Pagu Indikatif Urusan Daerah dan Program Prioritas Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2023	V-03
Tabel 5.2.	Sinkronisasi Program Kabupaten Pesisir Barat dengan Program Prioritas Nasional Perubahan Tahun 2023.....	V-16
Tabel 5.3.	Sinkronisasi Program Kabupaten Pesisir Barat dengan Program Prioritas Provinsi Lampung Perubahan Tahun 2023	V-18
Tabel 5.4.	Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2023	V-21
Tabel 5.5.	Prioritas Daerah, Sasaran Daerah dan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2023.....	V-34
Tabel 5.6.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023.....	V-37

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Gambar 2.1.	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Semester I Tahun 2023	II-03
Gambar 2.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota se Provinsi Lampung Tahun 2022	II-04
Gambar 2.3.	PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2022	II-05
Gambar 2.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2022	II-06
Gambar 2.5.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2022	II-07
Gambar 2.6.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2022	II-08
Gambar 2.7.	Capaian Kinerja Indeks Gini Kabupaten Pesisir Barat Semester I Tahun 2023.....	II-10
Gambar 2.8.	Indeks Gini Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2022	II-09
Gambar 3.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	III-11
Gambar 3.2.	PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah).....	III-15
Gambar 3.3.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	III-18
Gambar 3.4.	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022.....	III-18
Gambar 3.5.	Indeks Gini Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022.	III-20
Gambar 3.6.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022.....	III-22
Gambar 3.7.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan II Tahun 2023	III-36
Gambar 3.8.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan II Tahun 2023	III-44
Gambar 3.9.	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan II Tahun 2023	III-48

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan berdasarkan pada peran, fungsi dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang baik secara kualitas maupun kuantitas merupakan salah satu tolok ukur awal dalam penilaian keberhasilan pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004) adalah landasan hukum utama bagi pemerintah pusat maupun daerah di bidang perencanaan pembangunan. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan turut melibatkan peran aktif dari masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Permendagri No. 86 Tahun 2017) mengamanatkan bahwa

perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan prioritas pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan dalam sisa tahun anggaran berjalan. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2023 berikut Pemutakhirannya dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 berikut Perubahannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 serta RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 dalam hal untuk mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Dokumen Perubahan RKPD memiliki peran yang sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, terlebih dalam kondisi penyesuaian perubahan kerangka ekonomi dan fiskal daerah dalam sisa pelaksanaan tahun perencanaan dan penganggaran. Dokumen perencanaan ini merupakan penjabaran dari rencana strategis ke dalam rencana operasional. Perubahan RKPD menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis ke dalam rencana operasional yang dapat diimplementasikan ke dalam program/kegiatan/sub kegiatan masing-masing perangkat daerah dilingkup pemerintah daerah. Dokumen perencanaan tahunan ini juga mengarahkan pada proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Perubahan RKPD juga menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (Perubahan RKA-Perangkat Daerah), Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan RAPBD) dan Rancangan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah.

Berikutnya Perubahan RKPD menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pemerintahan daerah (i) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (ii) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (iii) Urusan Pilihan; (iv) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (v) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (vi) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (vii) Unsur Kewilayahan (viii) Unsur Pemerintahan Umum serta instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan, target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan ini juga dapat menjadi acuan bagi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKJP) serta diharapkan dapat menyediakan informasi bagi pemenuhan penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) maupun penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP).

Perubahan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan tentunya harus bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika serta perubahan kondisi di daerah, walaupun sebagai dokumen perencanaan tetap harus memiliki kerangka-kerangka yang dapat diukur dan rasional. Perubahan RKPD dapat diubah dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Permenadagri No. 86 Tahun 2017 seperti hal-hal di bawah ini:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran (SilPA) sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 ini pada dasarnya dilakukan berlandaskan pada:

- a. Perubahan kerangka keuangan daerah menyebabkan terjadi perubahan dan/atau penyesuaian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2023 ini.

- b. Perubahan struktur perekenomian daerah menyebabkan terjadinya perubahan target-target pada Renja Perangkat Daerah dikarenakan menyesuaikan dengan kerangka ekonomi daerah yang mengalami koreksi;
- c. Untuk memenuhi ketentuan peraturan, yaitu: (i) Peraturan Menteri Keuangan nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan (ii) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, maka diperlukan penataan belanja untuk dapat memenuhi ketentuan pemenuhan belanja yang berasal dari DAU untuk Bidang Pendidikan, DAU Bidang Kesehatan dan DAU Bidang Pekerjaan Umum;

Perubahan RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiran maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu/plafon indikatif yang bersumber pada APBD maupun sumber-sumber lain pendapatan yang sah yang ditempuh dengan tetap mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan pada uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan demi terciptanya tertib dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran baik di tingkat Perangkat Daerah dan juga Pemerintah Daerah, maka Kabupaten Pesisir Barat menyusun dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 sebagai pedoman dalam penyempurnaan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat pada sisa Tahun Anggaran 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
22. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 (Periode Efektif 2016-2025) (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 72);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 2);
31. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021

- Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);
32. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 380);
33. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 79 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 79 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 446);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan pada Pasal 264 dan 264 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dokumen RKPD bersama dengan dokumen RPJPD dan RPJMD daerah adalah merupakan dokumen dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya memperhatikan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan APBD. Maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat menjadi landasan dalam penyusunan KUPA dan PPPAS APBD TA 2023 dan pada akhirnya akan menjadi dasar dalam menyusun Perubahan RAPBD TA 2023 ini.

Secara garis besar Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 berpedoman pada sejumlah dokumen perencanaan dari tingkat nasional maupun tingkat daerah, yaitu sebagai berikut:

1. RPJMN Tahun 2020-2024

RPJM Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 berlampirkan 4 (empat) dokumen, yaitu: (i) Lampiran I yang memuat Narasi RPJMN Tahun 2020-2024; (ii) Lampiran II yang memuat Proyek Prioritas Strategis RPJMN Tahun 2020-2024; (iii) Lampiran III yang memuat Matrik Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024; (iv) Lampiran IV yang memuat Arah Pembangunan Wilayah RPJMN Tahun 2020-2024.

RPJM Nasional tersebut menjadi acuan awal dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pesisir Barat, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan/regional. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

2. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

RPJMD Provinsi Lampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 adalah merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah terpilih pada saat kampanye yang secara garis besar menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Lampung sehingga dapat menjadi pedoman penyusunan RKPD serta perencanaan penganggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Visi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 diarahkan untuk menuju Rakyat Lampung Berjaya dengan tujuan pembangunan menciptakan Aman, Berbudaya, Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera. Visi tersebut didukung dengan 6 Misi Pembangunan, yaitu:

1. Menciptakan Kehidupan yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman dan Damai;
2. Mewujudkan “*Good Governance*” untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Kaum Difabel;
4. Mengembangkan Infrastruktur guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah;
5. Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan;
6. Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama.

Secara umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung diarahkan untuk menyusun perencanaan untuk: (i) menciptakan kehidupan yang aman dan damai; (ii) mewujudkan *good governance* dan pelayanan publik; (iii) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengupayakan perlindungan anak, perempuan dan penyandang disabilitas; (iv) mengembangkan infrastruktur dan konektivitas wilayah; (v) membangun ekonomi masyarakat; dan (vi) mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3. RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025

RPJPD Kabupaten Pesisir Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun 2005 hingga Tahun 2025. Pelaksanaan RPJPD 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. Visi pembangunan jangka

panjang daerah (20 tahun) Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut “Pesisir Barat Madani dan Sejahtera 2025”. Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah RPJPD Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Membangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas Dasar Wilayah dalam Skala Mantab, Tanggap Bencana, dan Berwawasan Lingkungan.
2. Membangun Struktur Perekonomian yang Kuat dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal.
3. Membangun Pesisir Barat yang Asri dan Lestari.
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing.
5. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Demokratis, Berbudaya, dan Tentram dengan Mengedepankan Supremasi Hukum.
6. Membangun Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*good and clean governance*).

RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 diarahkan pada pencapaian beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Membangun prasaran, sarana & utilitas dasar wilayah dalam skala mantap, tanggap bencana dan berwawasan lingkungan;
- b. Membangun infrastruktur perekonomian yang kuat dan berkelanjutan berbasis pariwisata, sumber daya alam dan kearifan lokal;
- c. Membangun pesisir barat yang asri dan lestari;
- d. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berdaya saing;
- e. Membangun kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya dan tentram dengan mengedepankan supremasi hukum;

4. RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan dan merupakan penjabaran dari periode kedua RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Barat dan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholders* di Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026.

RPJMD disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pesisir Barat, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Pesisir Barat dengan setidaknya dapat menjawab empat pertanyaan dasar (1) kemana Kabupaten Pesisir Barat akan diarahkan pengembangannya dan tujuan yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana cara mencapai tujuan yang hendak dicapai; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai; (4) mekanisme pengendalian dan evaluasi RPJMD 2021-2026.

Visi RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Pesisir Barat Yang Amanah, Maju Dan Sejahtera” dapat diformulasikan dengan misi-misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing.
2. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif Untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan.
3. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan.
4. Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal.
5. Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga.

5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

Dalam proses penyusunan RKPD wajib melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan indikasi program pada RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037. Sinkronisasi perlu dijaga dalam upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan pola ruang. Sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam proses penggunaan lahan serta dalam upaya menjaga keseimbangan pertumbuhan wilayah sehingga mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah di daerah.

Penataan ruang Kabupaten Pesisir Barat bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat sebagai destinasi pariwisata berbasis industri pertanian dan kelautan yang memperhatikan aspek kearifan lokal dan kelestarian lingkungan dengan kebijakan penataan ruang, terdiri atas :

- a. pengembangan pariwisata berbasis wisata alam dan budaya dengan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. pengembangan sistem permukiman yang berhirarki dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan dan pengembangan sistem prasarana wilayah;
- c. pengembangan kawasan minapolitan dengan pengelolaan sumber daya lokal berbasis pengelolaan komoditas unggulan melalui proses industrialisasi modern yang ramah lingkungan;
- d. pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan agroindustri yang kompetitif dan terintegrasi antar sektor;
- e. perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai fungsi masing-masing dengan memperhatikan kearifan lokal; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan negara.

Proses sinkronisasi termasuk dalam mengintegrasikan sasaran dan arah kebijakan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang memuat rencana:

1. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

6. Rencana Pembangunan Sektoral

RKPD perlu memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya yang menjadi suplemen dan/atau readiness bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, Beberapa dokumen perencanaan sektoral antara lain dokumen (i) Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD SDG's), (ii) Pengaturan dan penetapan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian/Lembaga dan diterapkan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat yang melaksanakan 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, (iii) Stategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2025, (iv) Rencana induk Kelitbangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022-2026 dan (v) dokumen perencanaan sektoral lainnya yang dapat memberikan panduan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026. Renstra Perangkat daerah berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam lima tahun demi menunjang visi, misi dan arah kebijakan dari Bupati Pesisir Barat tahun 2021-2026.

Renstra juga menjadi dokumen perencanaan yang memuat target-target kinerja dari masing-masing perangkat daerah yang dirumuskan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang disusun berdasarkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan menjawab target-target pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan.

8. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 dan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan basis data bahan penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 berdasarkan pada pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan hingga pada triwulan II Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 352 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Berikutnya berdasarkan pada Pasal 353 ayat (1), Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan materi dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD yang akan disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 yang digunakan dalam penentuan Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) dari masing-masing urusan pemerintahan daerah yang diampu oleh Perangkat Daerah;
- b. Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang digunakan dalam proses perumusan program dan kegiatan tahunan yang berisi dengan tolok ukur, indikator kinerja sasaran dan juga pagu anggaran dalam tahun berjalan;
- c. Mengacu pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu/plafon indikatif dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, sesuai dengan rencana program prioritas dan tema pembangunan pada rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2023;
- d. Mengacu pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode triwulan II Tahun 2023 sebagaimana yang terangkum pada Bab II Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk

tercapainya sasaran dari Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023; dan

- e. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada sisa tahun berjalan (tahun perencanaan 2023).

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah untuk kurun waktu pelaksanaan sisa tahun 2023.

1.4.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Nota Pengantar Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2023 dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2023 yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Nota Kesepakatan Perubahan PPAS antara DPRD Kabupaten Pesisir Barat dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya program dan kegiatan tersebut akan dijabarkan dalam Perubahan RKA-Perangkat Daerah, Perubahan RAPBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2023 dan DPPA TA 2023;

- b. Menjadi pedoman/acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional Perangkat Daerah dalam sisa waktu pelaksanaan tahun 2023;
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan Urusan pemerintahan daerah, yaitu (i) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (ii) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (iii) Urusan Pilihan; (iv) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (v) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (vi) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (vii) Unsur Kewilayahan (viii) Unsur Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan daerah (yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya) dalam melalui capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahun 2023;
- e. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD Tahun 2023, Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023;
- f. Menyediakan informasi bagi penyusunan dokumen-dokumen, kajian dan/atau laporan terkait perencanaan pembangunan dan penganggaran Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada relevansinya.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika yang diatur dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Pada subbab ini tidak perlu semua peraturanperundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturanperundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan Perubahan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi hasil triwulan II Tahun 2023 memberikan gambaran mengenai capaian yang telah diraih oleh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan selama tahun 2023 berdasarkan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan APBD Tahun 2023.

2.1. Evaluasi RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Mencakup gambaran kinerja dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2023. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dari kinerja pemerintah daerah.

Berikutnya, juga mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan RKPD tahun 2023 yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah.

2.2. Permasalahan Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2023

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan pelaksanaan dari Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Pada sub bab ini juga memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam proses peningkatan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada sisa tahun 2023.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Mengemukakan kondisi ekonomi daerah dengan merujuk pada pencapaian kinerja daerah sampai dengan Triwulan II tahun perubahan RKPD, termasuk membandingkan dengan kondisi ekonomi nasional, regional. Berikutnya memberikan gambaran mengenai potensi dan juga tantangan ekonomi pada tahun perubahan RKPD.

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah pada Perubahan RKPD.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada perubahan RKPD tahun (n) berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun (n) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD dan/atau Renstra Perangkat Daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD pada periode pelaksanaan Perubahan RKPD tahun (n).

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun perubahan (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan

dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana perubahan (n).

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan triwulan ii kedudukan tahun rencana perubahan (RKPD) dalam upaya pencapaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Memuat program prioritas daerah dalam upaya mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

5.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan

Memuat rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan Tahun 2023 untuk mencapai prioritas dan sasaran daerah tahun 2023.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan Perubahan RKPD diperlukan sinergisitas dan sinkronisasi yang profesional dan proposional di jajaran pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II

TAHUN 2023

Evaluasi kinerja pembangunan pada triwulan II Tahun 2023, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah ditentukan dalam kurun waktu satu semester (Triwulan I dan II) tahun 2023 sebagai salah satu syarat dalam penyusunan Perubahan RKPD serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Banyak hal yang perlu dinilai untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat memberikan hasil dan capaian yang terbaik dalam pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Barat serta Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023.

Pengukuran atau evaluasi secara triwulan atas target-target yang ditetapkan dilakukan untuk melihat tren capaian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan hingga akhir pelaksanaan ditahun anggaran dimaksud. Dengan dasar tersebut, beberapa komponen indikator menjadi alat ukur dalam melakukan evaluasi yang dimaksud. Evaluasi kinerja pembangunan ini dilakukan terhadap indikator sektoral, realisasi keuangan daerah dan indikator kinerja pembangunan selama Triwulan II sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pada akhirnya, proses pengendalian dan evaluasi dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan terhadap dinamika yang dihadapi sehingga mampu memberikan rekomendasi yang efektif dan efisien dengan pendekatan struktural dan sistematis agar target-target yang telah ditetapkan mampu terealisasi. Rekomendasi juga dapat memberikan gambaran terkait dengan perubahan terhadap pencapaian target-target kinerja daerah dan perangkat daerah.

2.1 Evaluasi RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

2.1.1 Evaluasi Kinerja Indikator Pembangunan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Penetapan sasaran indikator makro pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pencapaian target-target pembangunan yang terangkum dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Berikut target sasaran makro yang terangkum dalam RKPD Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Makro RKPD Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Sasaran RKPD 2023	capaian sampai dengan Triwulan II
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,4 – 3,9	2,88 *
2	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rupiah	28,60 – 29,04	32,46 *
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,80-3,00	3,73 *
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	13,65	13,84 *
5	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	64,31	64,30 *
6	Indeks Gini	Poin	0,32	0,29 *

Sumber: RKPD Tahun 2023, Bappelitbangda (diolah)
*data tahun 2022

Berdasarkan pada tabel diatas, bahwa data capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 tidak tersedia atau belum dirilis oleh instansi yang berwenang mengeluarkan data capaian, dalam hal ini BPS Provinsi Lampung dan/atau BPS Kabupaten Pesisir Barat. Sehingga data-data capaian yang disajikan masih menggunakan data capaian pada tahun 2022 yang lalu. Namun demikian, berdasarkan pada data capaian tersebut dapat memberikan gambaran terhadap gambaran perkembangan dari capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2023 mendatang berdasarkan pada tren series.

Lebih lanjut, analisis yang akan dipergunakan mempergunakan data capaian dari Pemerintah Provinsi Lampung. Sebagaimana disampaikan diawal bahwa data-data untuk Kabupaten Pesisir Barat tidak tersedia. Asumsinya analisis dengan menggunakan data capaian Provinsi Lampung sedikit banyak memberikan gambaran tentang kondisi di daerah.

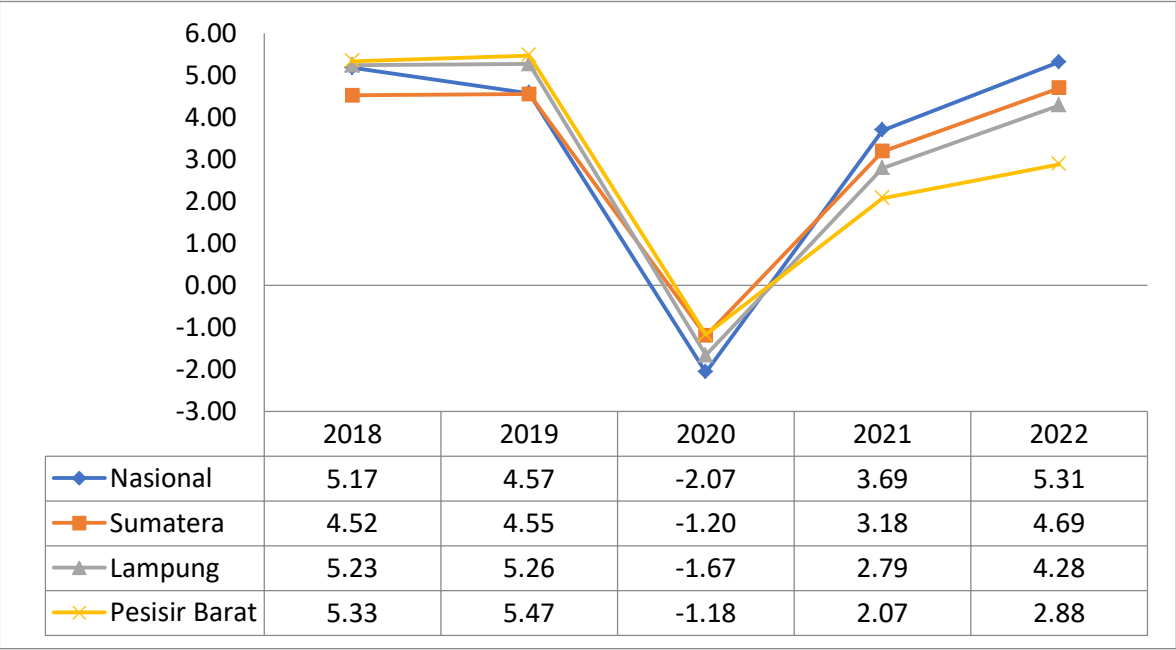
Gambaran mengenai capaian kinerja makro pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 sebesar 2.88% tersebut masih berada di bawah Provinsi Lampung yang mencatatkan nilai 4.28% serta regional Sumatera dengan capaian pertumbuhan 4.69%. Selanjutnya bila dilihat dari sisi nasional, maka capaian Pesisir Barat memiliki selisih 2.43% dari nasional yang tercatat sebesar 5.31%.

Merujuk pada kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2023 tumbuh positif 4,96% (yoy) meski melambat jika dibandingkan 5,05% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan positif kinerja perekonomian Lampung pada triwulan laporan didorong oleh peningkatan kinerja seluruh komponen permintaan domestik. Di tengah meningkatnya permintaan domestik, kinerja beberapa lapangan usaha (LU) utama tumbuh melambat, a.l. Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, dan Transportasi, sehingga mendorong peningkatan impor untuk memenuhi permintaan pada triwulan laporan. Perkembangan tersebut menyebabkan kinerja net ekspor berkontraksi semakin dalam dan menahan kinerja perekonomian yang lebih baik pada triwulan laporan.

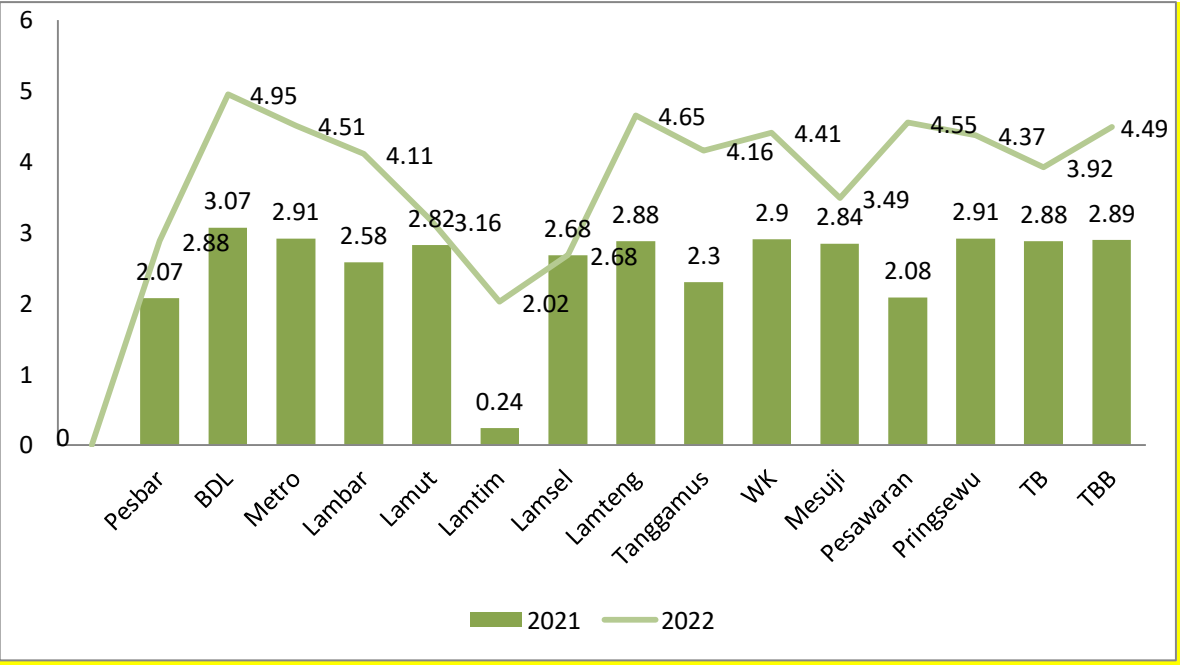
Gambar 2.1 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat hingga Semester I Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Lebih lanjut, bila melihat pada capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2022 berada pada urutan ke-13 di atas Kabupaten Lampung Timur yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 2.02% dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 2.68%. Capaian tertinggi pada 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung oleh Kota Bandar Lampung dengan nilai 4.95% dan Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai 4.65%. Daerah yang lebih maju seperti Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah yang telah mengandalkan perdagangan dan jasa (sektor ekonomi modern daerah perkotaan) sebagai penyumbang PDRB dirasakan lebih cepat melakukan *recovery* dan kembali menghidupkan perekonomian daerahnya pasca Pandemi Covid-19.

Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2022



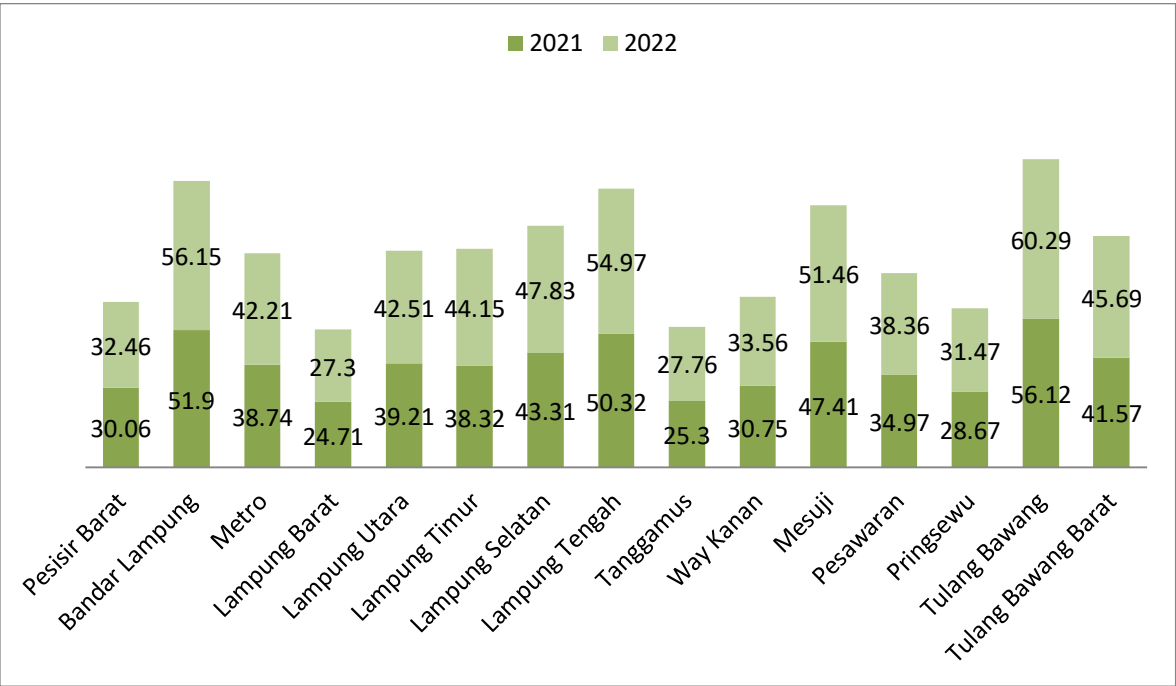
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

2. PDRB Perkapita ADHB

PDRB Perkapita berdasarkan nilai ADHB untuk Kabupaten Pesisir Barat untuk tahun 2022 sebesar 32.46 (juta rupiah) masih berada di bawah Provinsi Lampung senilai 45.10 (juta rupiah) dan nasional yang mencatatkan hampir dua kali lipat pada angka 7100 (juta rupiah). Sementara itu, bila melihat dengan capaian dari 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, data PDRB Perkapita kabupaten Pesisir Barat berada pada urutan 11, dengan Kabupaten Tulang Bawang sebagai daerah tertinggi senilai 60.29 (juta rupiah) dan Kota Bandar Lampung dengan nilai 56.15 (juta rupiah).

Sementara itu, Kabupaten Lampung Barat dengan capaian terendah senilai 27.30 (juta rupiah) disusul oleh Kabupaten Tanggamus dengan nilai 27,76 (dalam juta rupiah). Rendahnya nilai PDRB Perkapita di Kabupaten Pesisir Barat disebabkan pada masih rendahnya struktur perekonomian daerah, dan hanya mengandalkan pada sektor-sektor tradisional seperti pertanian, kehutanan dan perikanan.

Gambar 2.3 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

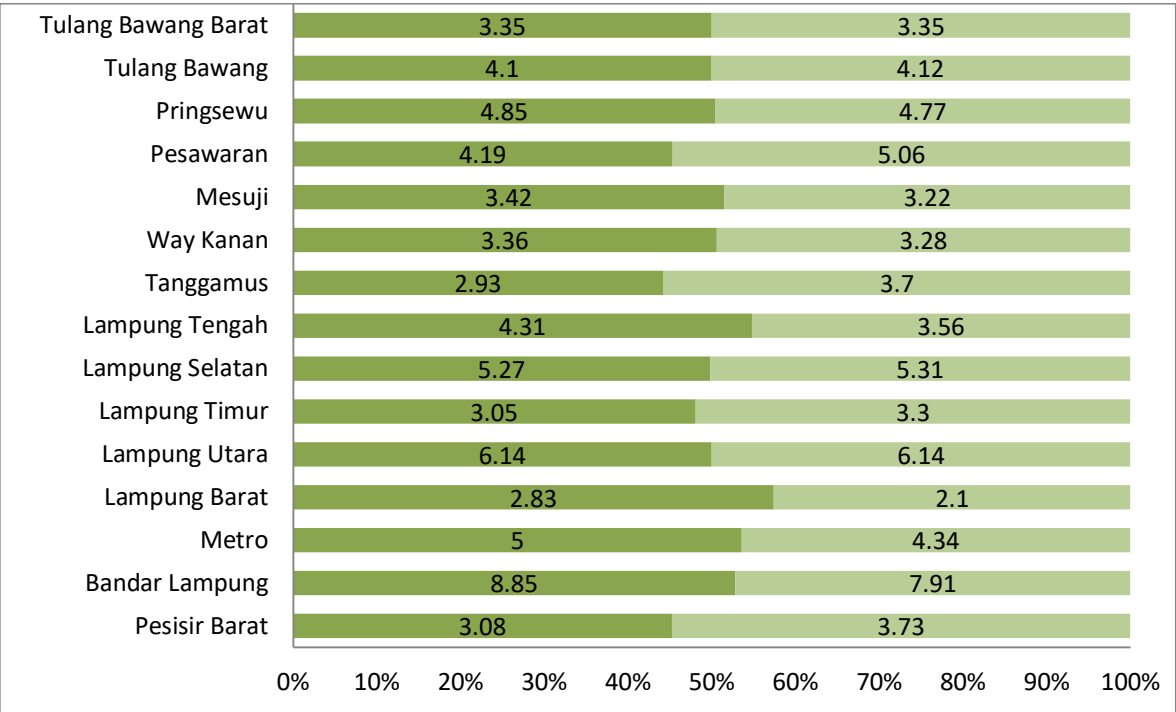
3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian dari TPT Kabupaten Pesisir Barat senilai 3,73% berada lebih rendah atau lebih baik dari Provinsi Lampung dengan nilai 4,52%. Capaian 3,73% dan 4,52% tersebut juga lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional yang berada pada angka 5,86%. Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Februari 2023 secara umum cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 2022. Jumlah angkatan kerja berdasarkan Sakernas pada Februari 2023 sebanyak 5.003,1 ribu orang, naik 32,1 ribu orang dibanding Februari 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,44 persen poin. Sementara nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 4,18 persen, turun 0,13 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022. Jumlah Penduduk yang bekerja sebanyak 4.794,0 ribu orang, meningkat sebanyak 37,2 ribu orang dari Februari 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (3,38 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (1,55

persen poin). Sebanyak 3,59 juta orang (74,89 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 3,65 persen poin dibanding Februari 2022. Persentase setengah penganggur turun sebesar 0,50 persen poin dan persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 0,86 persen poin dibandingkan Februari 2022. Terdapat 20,5 ribu orang (0,30 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19.

Sementara itu, untuk level Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung nilai Kabupaten Pesisir Barat berada pada urutan ke-7. Dengan Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah terbaik dengan nilai 2.10% serta Kota Bandar Lampung dengan nilai TPT tertinggi senilai 7,91%.

Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2022



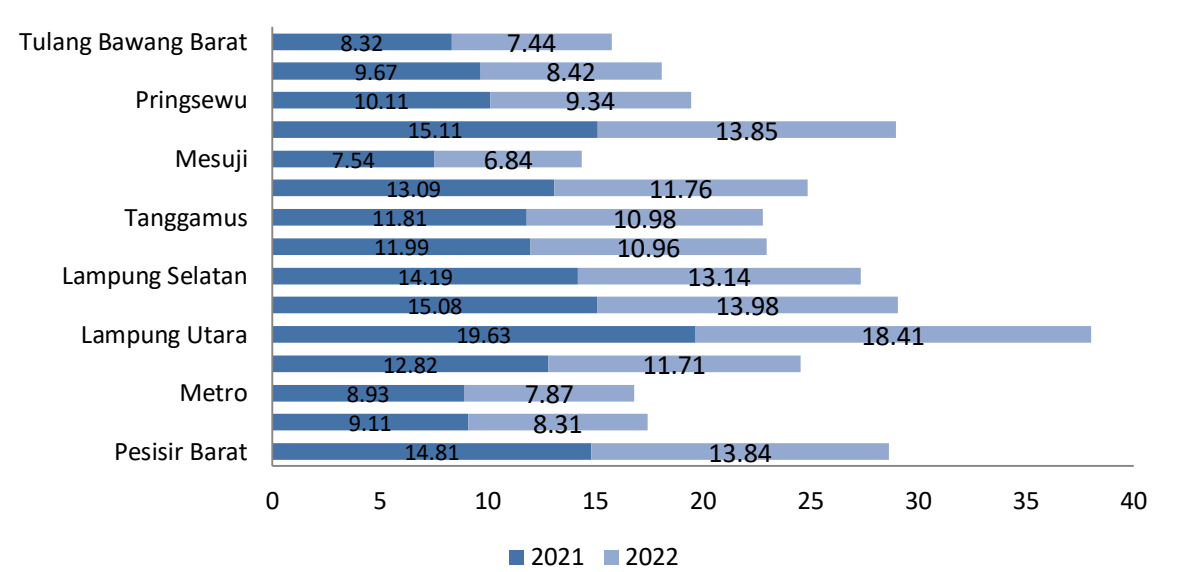
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

4. Tingkat Kemiskinan

Untuk tahun 2022, tingkat kemiskinan daerah Kabupaten Pesisir Barat tercatat sebesar 13.84%, jauh melebihi data Provinsi Lampung pada angka 11,57%. Angka capaian Kabupaten Pesisir Barat dan Provinsi Lampung ini masih diatas dari Nasional yang mencatat sebanyak 9,54% jumlah penduduk miskin di Indonesia. Capaian tahun 2022 yang lalu memberikan gambaran bagaimana kemungkinan pencapaian target untuk tahun 2023. Diperlukan usaha-usaha yang lebih nyata dan konkrit bila melihat kondisi pencapaian yang jauh dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan data 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat dengan capaian 13,84% berada pada urutan ke 12, capaian terendah oleh Kabupaten Lampung Utara dengan persentase 18,41%. Sementara itu, Kabupaten Mesuji merupakan daerah terbaik dalam sisi tingkat kemiskinan untuk tahun 2022 dengan persentase penduduk miskin hanya sebanyak 6.84%. Masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat lebih disebabkan pada belum meratanya sumber-sumber produksi, distribusi dan konsumsi di masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam mengakses pekerjaan yang juga terbatas. Keterbatasan sarana dan prasarana masyarakat juga merupakan salah satu penyebab masih tingginya angka kemiskinan.

Gambar 2.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2022



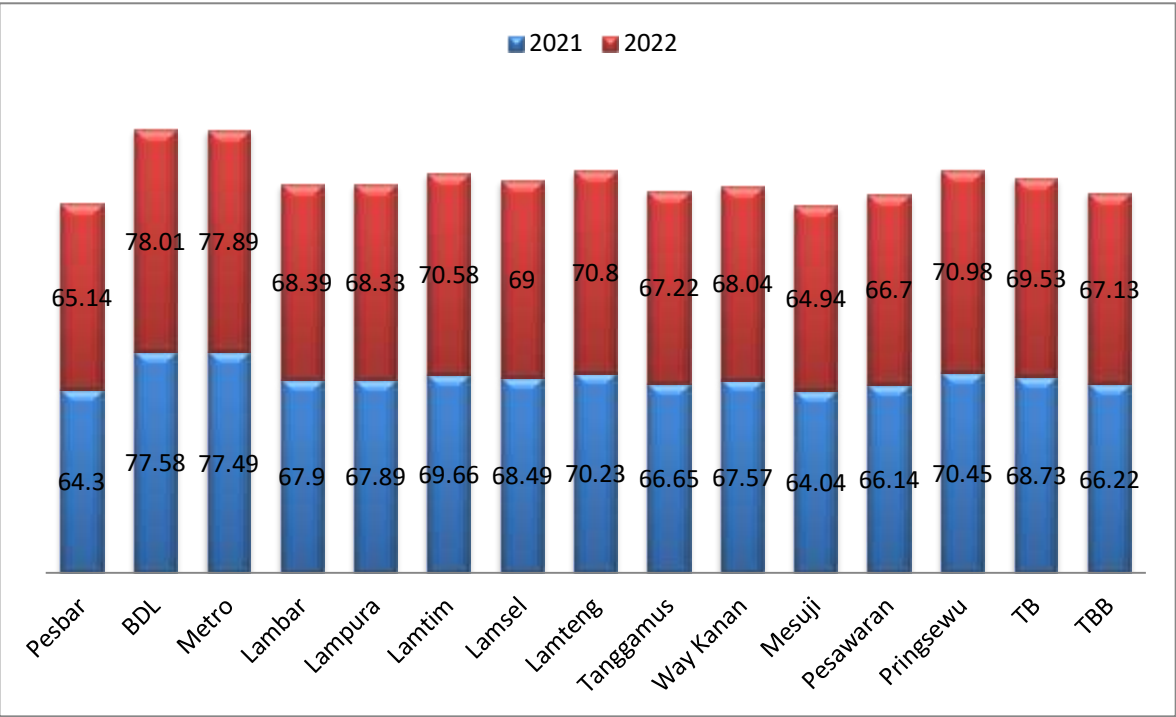
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

5. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian data IPM untuk Kabupaten Pesisir Barat tahun 2022 senilai 65,14 masih berada dibawah Provinsi Lampung yang tercatat 70,45 dan nasional dengan nilai 72,91. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk tahun 2022 Kabupaten Pesisir Barat masih berada pada urutan ke-14 dengan Kabupaten Mesuji sebagai daerah terendah dengan nilai 64,94. Daerah terbaik untuk IPM di Provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung dengan nial 78,01 dan Kota Metro dengan nilai 77,89. Masih rendahnya nilai IPM Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan masih rendahnya derajat status pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kurangnya akses pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utamanya. Ketersediaan infrastruktur serta kondisi geografis daerah turut mempengaruhi

kesulitan masyarakat dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Terlebih dari sisi kemampuan daya beli masyarakat yang belum bisa bersaing dengan daerah lain.

Gambar 27 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2022

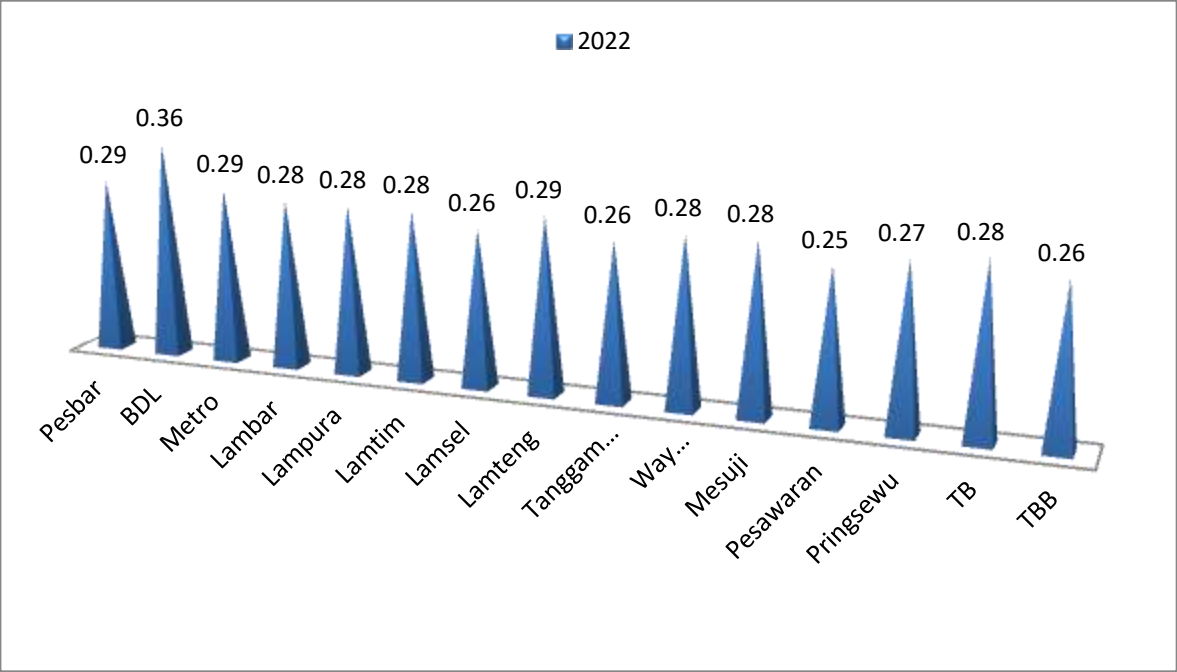


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

6. Indeks Gini

Gini rasio Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 tercatat sebesar 0.29. Nilai tersebut masih lebih baik bila dibandingkan dengan capaian kinerja provinsi dan nasional dengan nilai Provinsi Lampung dengan nilai capaian 0.31 dan nasional yang berada pada angka 0.38. Capain pada tahun 2022, untuk perbandingan dengan 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat berada pada urutan ke 12, dengan Kabupaten Pesawaran menjadi kabupaten dengan capaian terbaik 0,25. Sementara itu, Kota Bandar Lampung merupakan Kota dengan nilai terendah dengan capaian 0.36. Ketimpangan pendapatan di daerah lebih disebabkan pada kondisi struktur ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya merata. Jumlah penduduk miskin dan juga jumlah pengangguran turut mempengaruhi capaian ini.

Gambar 2.6 Indeks Gini Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

2.1.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan pada RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi target utama bagi kepala daerah selama kurun waktu periode RPJMD yang dibagi menjadi 5 (lima) tahun RKPD. Berikut target Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam RKPD Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama RKPD Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian s.d. TW II 2023
Misi I Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing					
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	64.31	65.14*
Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saig Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	2. Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2.80-3.20	3.73*

Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	3. Terwujudnya Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94.29	93.54*
Misi II Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan					
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	1. Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	41.50	39.53*
	2. Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Daya Air Yang Sehat Dan Aman	Persen	40.00	20.10
	3. Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	53.00	56.10*
	4. Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	73.87	71.06*
	5. Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana	Angka	180.71	189.70*
Misi III Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan					
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.40-3.90	2.88*
	2. Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	28,60-29.04	32.46*
	3. Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	100.51	104.34*
	4. Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	Angka	0.32	0.29*

	5. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Tingkat Kemiskinan Daerah	Persen	13.65	13.84*
Misi IV Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal					
Meningkatkan Pariwisata Daerah yang Berdaya Saing	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Persen	21.00	11.64
Misi V Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga					
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Angka	77.00	39.97
	2. Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Nilai SAKIP	Huruf/ Predikat	CC	CC*
	3. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	Opini BPK	Huruf/ Predikat	WTP	WTP*
	4. Meningkatnya Pembangunan di Desa/Pekon	Indeks Desa Membangun	Angka	0.6700	0,6636*

Sumber: RKPD Tahun 2023, Bappelitbangda (diolah)
*data tahun 2022

Berdasarkan pada tabel diatas, beberapa data realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 tidak tersedia atau belum dirilis oleh instansi yang berwenang mengeluarkan data capaian, dalam hal ini BPS. Sehingga data-data capaian yang disajikan masih menggunakan data capaian pada tahun 2022 yang lalu. Namun demikian, berdasarkan pada data capaian tersebut dapat memberikan gambaran terhadap gambaran perkembangan dari capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2023 mendatang.

Secara umum, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 beberapa sasaran pembangunan daerah telah mencapai target sasaran. Namun demikian, disisi lain beberapa sasaran juga belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Diperlukan komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai rangkaian pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah.

2.1.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan pada evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2023 juga didapatkan perhitungan terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan indikator pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan 40 Urusan Pemerintahan Daerah dan dilaksanakan oleh 39 Perangkat Daerah. Capaian IKD tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	Pendidikan			
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.07	8.53*
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.05	12.13*
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	72.00	25.00
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	92.10	46.81
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	70.25	41.48
6	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan dasar	Persen	80.77	50.30
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar	Persen	92.07	54.85
8	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	59.14	49.97
9	Tingkat Partisipasi Anak Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD	Persen	98.85	100
10	Tingkat Partisipasi Anak Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan SMP	Persen	91.05	81.48
11	Angka Putus Sekolah	Persen	0.22	1.55
12	Angke Melek Huruf (AMH)	Persen	92.05	97.81
13	Rasio Guru SD terhadap Siswa	Rasio	1 : 13	1 : 12
14	Rasio Guru SMP terhadap Siswa	Rasio	1 : 13	1 : 8
2	Kesehatan			
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	63.68	63.99*
2	Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6.40	0.75
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Kasus	12	10
4	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kasus	5	6
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	94.65
6	Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100	73.9
7	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen	100	98.4
8	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Persen	57.14	100
9	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	6	2
10	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kasus	12	3
11	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	90	83.30
12	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Persen	0.40	0.49
13	Insidensi TB per 100.000 penduduk	Persen	20.11	115.04

14	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	Persen	23.20	94.00
15	<i>Treatment coverage</i> pada pasien TB	Persen	100	40
16	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen	100	98
17	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Unit	11	1
18	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	Persen	100	35
19	Persentase Sarana Produksi UKOT	Persen	100	47
20	Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk	Angka	1.34	0.16
21	Rasio Perawat per 100.000 penduduk	Angka	11.24	12.30
22	Rasio Bidan per 100.000 penduduk	Angka	12.24	22.80
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Persentase Ruang Terbuka Lahan Hijau	Persen	4.60	4.36
2	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	54.65	80
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Km	654.08	197.83
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	70.00	18.06
5	Panjang jaringan irigasi primer kewenangan daerah yang dibangun	Km	40.00	1.00
6	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	Persen	40.00	32.60
7	Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	Persen	5.00	0.93
8	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap	Persen	60.00	69.00
9	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Persen	40.00	18.06
10	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persen	35.00	18.06
11	Ketersediaan Dokumen Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Peta Analog dan Peta Digital	Dok	1	1
12	Ketersediaan dokumen RDTR Kecamatan	Dok	0	1
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1	Jumlah Titik Kawasan Kumuh	Lokasi	60	28
2	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana Sarana Umum	Persen	40.00	86.07
3	Persentase Rumah Susun Sewa Terpelihara	Persen	100	100
4	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	0
5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persen	13.00	18.18
6	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100	100
7	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Ha	0.5	0.0
8	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana Umum	Persen	41.32	77.77
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
1	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang Tertangani	Persen	100	100
2	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	100

3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100	100
4	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	15
6	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persen	100	75
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100
8	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	Persen	100	100
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100
11	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Daerah	Persen	100	100
6	Sosial			
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	28.16	24.77
2	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	7.55	5.65
3	Persentase (%) Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	100	13.07
4	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	Persen	100	0
5	Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100
6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	Persen	85.79	97.00
1	Tenaga Kerja			
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	73.04	71.21*
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan)	Persen	62.00	60.00
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Predikat	Madya	Pratama
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	1.11	0.79
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	0.039	0.294
4	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Tertangani	Persen	47.02	40
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	0.095	0.367*
6	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100	40
7	Cakupan Anak korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100	100
8	Persentase ARG pada Belanja APBD	Persen	0.011	0.070

9	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100
3	Pangan			
1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor (Angka)	84.98	84.18*
2	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	28.000	28.342*
3	Ketersedian Energi per kapita	(kkal/kap/hari)	2,400.00	2,621.12*
4	Ketersedian Protein per kapita	(gr/kap/hari)	63.00	66.98*
5	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	60.00	83.53*
4	Pertanahan			
1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	53.00	50.63
2	Persentase penerbitan Izin lokasi	Persen	100	100
3	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reformasi Agraria	Kepala Keluarga	5.000	0.000
4	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Ha	10.50	2.13
5	Lingkungan Hidup			
1	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	Angka	87.57	50*
2	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	Angka	58.54	89.06*
3	hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	74.86	73.93*
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	20.00
5	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	Persen	3.00	1.00
6	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	Persen	52.09	37.00
7	Persentase jumlah pengurangan timbulan sampah	Persen	5.30	6.00
8	Persentase jumlah penanganan timbulan sampah	Persen	19.23	15.8
9	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	Persen	5.00	4.36
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil			
1	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	100
2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Status	Sudah	Sudah
3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	98.00	99.32
4	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persen	94.00	98.78
5	Persentase penduduk yang ber-Kartu Keluarga (KK)	Persen	70.00	92.83
6	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	40.00	36.82
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1	Persentase PKK Aktif	Persen	100	100

2	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100
3	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Aktif	BUMDes	91	73
4	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persen	100	100
5	Persentase Desa/Pekon yang muatan RPJMDes-nya sesuai dengan RPJMD Kabupaten	Persen	100	100
6	Persentase Desa Tertinggal	Persen	41.34	12.07*
7	Persentase Desa Mandiri	Persen	2.59	0.86*
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2.19	3.30*
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	76.57	42.7
3	Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out KB)	Persen	16.00	7.83
4	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	81.78	45.04
5	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Angka	52.69	65.00*
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0.98	0.72*
7	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	58.00	52.36*
8	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	76.40	42.70
9	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	9.30	10.11
10	Persentase masyarakat yang terjangkau program bangsa kencana	Persen	50.00	28.00
11	Angka Kelahiran Remaja umur 15-49 tahun (age spicific fertility rate /ASFR 15-19)	Angka	24	28.6
12	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	22.00	20.00
13	Persentase Bayi Umur Dua Tahun yang Stunting	Persen	23.00	0.49*
14	Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikuti BKB	Persen	27.00	35.00
9	Perhubungan			
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	Predikat	sangat baik	baik
2	Jumlah rekomendasi uji KIR angkutan umum	Jumlah	60	30
3	Persentase prasarana yang memenuhi standar dalam kondisi baik	Persen	80.00	50.00
4	Persentase Penggunaan Moda Transportasi Umum	Persen	72.50	45.00
5	Persentase sarana perhubungan dalam kondisi baik	Persen	40.00	65.00
6	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	90.00	85.00
7	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan Roda 4	Persen	18.00	100
10	Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	Persen	95.00	80.10
2	Presentase aplikasi IT dan aplikasi E - government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	Persen	80.00	100
3	Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	Persen	90.00	100
4	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen	20.00	13.00

5	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	Persen	70.00	12.00
6	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	Persen	70.00	21.00
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah			
1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	50.00	45.55
2	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Jumlah	300	6,283
12	Penanaman Modal			
1	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	16.49	64.53*
2	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	5.55	100*
3	Jumlah/nilai investasi PMA dan PMDN	Juta Rupiah (Rp)	379.669	617,775*
4	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/ Per usahaan	190 orang/ per usahaan	130 orang/Per usahana
5	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	20.50	10.36
6	Rasio tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan	Persen	80.00	100
7	Persentase terpenuhinya regulasi/kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta penerapan Online Single Submission (OSS)	Persen	100	100
8	Persentase penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG)	Persen	100	100
9	Persentase penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman berakohol (SIUP MB)	Persen	80.00	100
10	Rasio jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100
11	Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan	Laporan	5	5
13	Kepemudaan dan Olahraga			
1	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi	Orang	5	79
2	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	34	86
3	Persentase wirausaha muda	Persen	1.24	19.00
4	Peningkatan pelatih yang Bersertifikasi	Persen	14.86	75.00
5	Atlet Berprestasi	Jumlah	22	79
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	1.24	0.22
7	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	44.29	15
8	Jumlah Wirausahaan Muda Mandiri	Jumlah	150	70
9	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	7.00	2.00
14	Statistik			
1	Data dan Infirmasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	Dok	2	0
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100
15	Persandian			
1	Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	Persen	100	100

16	Kebudayaan			
1	Persentase Kesenian Budaya yang Dilestarikan	Persen	8.00	100
17	Perpustakaan			
1	Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Angka	0.05	0.001
2	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	2.38	0.06
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	Jumlah	164	160
18	Kearsipan			
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	25.00	40.00
2	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	51	342
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	70.00	25.00
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	80.00	50.00
1	Kelautan dan Perikanan			
1	Produksi perikanan tangkap	Ton	14.136	6.700
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	218.92	108.00
3	Angka konsumsi ikan	Kg/kap/Th	40.85	20.60
4	Cakupan bina kelompok nelayan	Jumlah	245	216
2	Pariwisata			
1	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	1.74	1.98*
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	8	6
3	Kontribusi PAD sektor pariwisata	Persen	2.78	1.58
4	Rata-rata Belanja Wisatawan Domestik	Rupiah/Kunjungan	1.350.000	900.000
5	Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	Rupiah/Kunjungan	8.200.000	7,000,000
6	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	334	209
7	Jumlah wisatawan domestik	Orang	394,041	45,000
8	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestic	Persen	21,00	12,75
9	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	Persen	21.00	2544,44
10	Jumlah akomodasi pariwisata (hotel/losmen)	Jumlah	69	82
3	Pertanian			
1	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	84.00	40.00
2	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	82.00	70.00
3	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton/Tahun	110.906	52.500
4	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton/Tahun	35.966	15.900
5	Jumlah Produksi Hewan Ternak	Ekor/Tahun	107.102	59.000

4	Perdagangan			
1	Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	Persen	70.00	n/a
2	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	Persen	11.55	14.68*
5	Perindustrian			
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	37.00	13.00
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	3.99	3.76*
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	20.00	20.00
4	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	Persen	1.95	1.13*
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	70.00	85.00
6	Transmigrasi			
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibina	Lokasi	1	2
1	Sekretariat Daerah			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	C	CC*
2	Tingkat Layanan Administrasi Umum	Persen	100	80
3	Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas	Persen	100	100
4	Rasio Elektrifikasi	Persen	85.00	70.11
5	Persentase Desa Teraliri Listrik	Persen	100	98.27
2	Sekretariat DPRD			
1	Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program- Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Status	Tersedia	Tersedia
2	Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Status	Tersedia	Tersedia
3	Tersedianya Rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Status	Tersedia	Tidak Tersedia
1	Perencanaan			
1	RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Status	Tersedia	Tersedia
2	RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Status	Tersedia	Tersedia
3	RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Status	Tersedia	Tersedia
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	94,78
6	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100
7	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra)	Persen	100	100
8	Persentase pencapaian target program pembangunan daerah	Persen	100	35.44

2	Keuangan			
1	Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan Perubahan RAPBD	Persen	100	50
2	Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah	Persen	100	100
3	Persentase ketercapaian target pendapatan daerah	Persen	95.37	38.17
4	Rasio PAD terhadap Pendapatan daerah	Persen	3.50	0.020
5	Rasio belanja modal terhadap total belanja Daerah	Persen	30.88	19.63
3	Kepegawaian			
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	Persen	9.15	11.70
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan	Persen	22.20	36.72
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen	71.75	70.50*
4	Pendidikan dan pelatihan			
1	Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum	Persen	100	100*
5	Penelitian dan Pengembangan			
1	Indeks Inovasi Pemerintah daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif*
2	Persentase Implementasi Rencana kelitbangan	Persen	85.70	42.50
3	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	80.00	42.00
4	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	100
5	Persentase kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persen	90.00	45.00
1	Inspektorat			
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	90.00	100
2	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pada objek pemeriksaan	Persen	80.00	100
3	Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP	Persen	100	100
4	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	persen	100	100
1	Kecamatan			
1	Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Pekon	Persen	100	80
2	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan/Pekon	Persen	80.00	90.00
3	Presentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal	Persen	100	100
1	Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	48.00	42.35
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	84.08	84.08*

3	Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen	75.00	50.00

Sumber: Bappelitbangda, 2023
*data 2022

2.1.4 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara, berikut pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan (6) Sosial.

Data yang disajikan merupakan data yang dihimpun melalui aplikasi e-SPM milik Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri hingga Triwulan II Tahun 2023. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah yang mengampu pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Berikut ditampilkan capaian SPM sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

1. SPM Urusan Pendidikan

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan hingga pada Semester I (triwulan II) Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Pencapaian SPM Bidang Pendidikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW II Tahun 2023 (%)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100	91,84
		Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa Berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100	91,48

2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100	83.26
		Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa Berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100	83.26
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100	54,00

Sumber : Dinas P dan K, 2023

Tabel di atas menunjukkan capaian SPM pada urusan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 yang secara total mencapai angka 76,25%. Keseluruhan angka capaian dari indikator pendidikan ini tentu saja menjadi catatan penting dalam proses peningkatan kualitas SDM dan pendidikan di daerah yang perlu melakukan akselerasi percepatan pencapaian target-target kinerja hingga selesainya tahun 2023. Permasalahan utama dari capaian SPM Pendidikan ini adalah belum optimalnya pelayanan pendidikan dikarenakan belum meratanya SDM Pendidikan secara proposional termasuk belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.

2. SPM Urusan Kesehatan

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan hingga pada Semester I (triwulan II) Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Pencapaian SPM Bidang Kesehatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW II Tahun 2023 (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	45,32
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	42,42
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	44,55

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW II Tahun 2023 (%)
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	71,01
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	43,94
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	21,66
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	62,67
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	18,84
9	Pelayanan Kesehatan Penderita <i>Diabetes Melitus</i>	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	81,76
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	80,66
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga <i>Tuberculosis</i>	Jumlah warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	75,62
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia <i>Human Immunodeficiency Virus</i>	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	55,76

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa secara umum capaian masing-masing indikator SPM pada Kesehatan belum mampu mencapai target 50% sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Gambaran total capaian SPM baru mencapai 23,42%.

Tentunya komitmen untuk peningkatan pelayanan kepada seluruh masyarakat di semua sektor wajib menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan urusan pemerintahan kesehatan. Permasalahan utama dalam proses pencapaian SPM Kesehatan yang belum memenuhi target hingga Triwulan II Tahun 2023 (minimal 50%) adalah masih rendahnya keterbukaan dan kemauan dari masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Hal ini tentunya berbanding lurus dengan masih belum optimalnya proses sosialisasi oleh unit layanan kesehatan di masyarakat dan juga tingginya biaya masyarakat dalam menuju fasilitas kesehatan terdekat.

3. SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga pada Semester I (triwulan II) Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	s.d. TW II Tahun 2023 (%)
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	20,10
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100	28,58

Sumber : Dinas PU dan PR, 2023

Untuk pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara umum hingga Triwulan II Tahun 2023 berada pada angka 12,14%. Hal ini masih dapat dimaklumi, dikarenakan pencapaian pekerjaan fisik baru akan selesai pada Triwulan IV. Namun demikian, usaha-usaha perbaikan kinerja dan peningkatan pendanaan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan utama dari pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat adalah pendanaan, dimana luasan daerah yang menjadi kewenangan tidak berbanding lurus dengan kemampuan daerah dalam membiayai seluruh pembangunan. Terlebih daerah lebih banyak mengandalkan pendanaan transfer untuk pembangunan infrastruktur.

4. SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hingga pada Semester I (triwulan II) Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7 Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW II Tahun 2023 (%)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100

Sumber : Dinas PR dan KP, 2023

Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, capaian untuk 2 (dua) indikator adalah 100%. Capaian ini perlu dipertahankan hingga selesainya triwulan IV tahun 2023.

5. SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh (i) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta (ii) Badan Penanggulangan Bencana Daerah hingga pada Semester I (triwulan II) Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8 Pencapaian SPM Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW II Tahun 2023 (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	100	6
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	26
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	13
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	12
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	10

Sumber : Satpol PP – Damkar dan BPBD, 2023

Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 baru mencapai target 26,33%. Sementara khusus untuk capaian pada sektor kebencanaan telah mencapai 95,47%. Pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan konsistensi dalam menjaga capaian indikator perlu terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah terlebih Kabupaten Pesisir Barat berada pada daerah rawan bencana. Masih relatif minimnya kemampuan pendanaan kembali menjadi masalah utama dari pelaksanaan urusan Trantibumlinmas. Ditambah lagi dengan masih minimnya jumlah sarana dan prasarana kebencanaan dan terbatasnya jumlah SDM bila dibandingkan dengan luasan wilayah yang menjadi kewenangan.

6. SPM Urusan Sosial

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial hingga pada Semester I (triwulan II) Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9 Pencapaian SPM Bidang Sosial sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW II Tahun 2023 (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	33,18
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	4,83
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	11,05
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	0
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100

Sumber : Dinas Sosial, 2023

Data pada pencapaian SPM Urusan Sosial hingga Triwulan II Tahun 2023 mencapai angka 69,06%. Permasalahan utama dari belum optimalnya pelayanan pada urusan sosial adalah pendananaan dan juga luasan daerah administratif yang menjadi kewenangan daerah serta masih minimnya jumlah SDM pelaksana urusan. Hal ini tentu saja wajib menjadi catatan bagi Dinas Sosial sebagai pengampu urusan dimaksud.

2.1.5 Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Hasil evaluasi RKPD sampai dengan Semester I (Triwulan I dan II) pada tahun 2023 ini bertujuan untuk:

1. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023;
2. Memperoleh gambaran capaian target kinerja (*outcome* dan *output*) dari masing-masing Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023, Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026;
3. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Semester I (triwulan I dan II) Tahun 2023;
4. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD pada tahun-tahun berikutnya pada umumnya dan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada khususnya.

Laporan evaluasi ini bersumber dari telaahan evaluasi hasil pelaksanaan Renja masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023 dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu semester anggaran (Januari-Juni Tahun 2023).

Berdasarkan data yang di dapat dari dokumen RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023, diperoleh jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah			Perangkat Daerah
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	Pendidikan	2	10	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	5	14	45	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum	10	23	41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	13	26	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3	6	21	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		2	9	29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	5	11	29	Dinas Sosial
7	Tenaga Kerja	4	10	19	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	15	30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
9	Pangan	4	10	25	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	Pertanahan	2	2	2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Lingkungan Hidup	4	8	22	Dinas Lingkungan Hidup
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	13	26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	9	26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	6	20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
15	Perhubungan	3	11	23	Dinas Perhubungan
16	Komunikasi dan Informatika	3	7	25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4	10	23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
18	Penanaman Modal	5	11	27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Kepemudaan dan Olahraga	3	13	31	Dinas Pemuda dan Olahraga

20	Statistik	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
21	Persandian	1	2	2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
22	Kebudayaan	2	2	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Perpustakaan	1	2	3	Sekretariat Daerah
24	Kearsipan	1	1	2	Sekretariat Daerah
25	Kelautan dan Perikanan	5	14	32	Dinas Perikanan
26	Pariwisata	4	10	25	Dinas Pariwisata
27	Pertanian	5	9	11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
28	Perdagangan	3	4	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
29	Perindustrian	1	1	2	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
30	Transmigrasi	1	1	1	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
31	Sekretariat Daerah	3	20	62	Bagian Kesejahteraan Rakyat
32	Sekretariat DPRD	2	15	31	Sekretariat DPRD
33	Perencanaan	3	13	43	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
34	Keuangan	3	13	46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		2	8	30	Badan Pendapatan Daerah
35	Kepegawaian	2	9	31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
36	Pendidikan dan Pelatihan	1	1	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
37	Penelitian dan Pengembangan	1	3	8	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
38	Inspektorat Daerah	3	11	37	Inspektorat
39	Kecamatan	2	6	20	Kec. Bangkunt
		2	7	20	Kec. Ngaras
		2	6	20	Kec. Ngambur
		2	6	20	Kec. Pesisir Selatan
		2	6	20	Kec. Krui Selatan
		1	7	16	Kec. Pesisir Tengah
		1	5	18	Kec. Way Krui
		1	5	17	Kec. Karya Penggawa
		2	6	20	Kec. Pesisir Utara
		2	6	20	Kec. Lemong
		2	6	20	Kec. Pulau Pisang

40	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		153	428	1132	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Laporan evaluasi ini bersumber dari telaahan evaluasi hasil pelaksanaan Renja masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023 dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu semester perencanaan dan anggaran (Juni 2023).

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD tahun 2023 ditunjukkan dengan capaian indikator pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 yang terbagi atas kelompok urusan pemerintahan daerah yang terbagi kedalam 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026.

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam evaluasi hasil RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dengan pemredikatan yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 91% ($91\% \leq 100\%$);
- Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 76% sampai dengan 90% ($76\% \leq 90\%$);
- Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 66% sampai dengan 75% ($66\% \leq 75\%$);
- Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 51% sampai dengan 65% ($51\% \leq 65\%$); dan
- Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 50% ($\leq 50\%$).

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut (dalam hal ini, secara umum asumsi pencapaian kinerja pada Semester I adalah 50%):

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja;
- (2) Hasil Sedang, Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup);
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah, Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berikut evaluasi hasil RKPD Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, sebagai berikut:

I. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023, dilakukan melalui 2 program; 10 kegiatan; dan 28 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan adalah Rendah dengan nilai 60,65% dan realisasi anggaran Sangat Rendah dengan nilai 47,82% sehingga perlu percepatan pencapaian target kinerja.

Secara umum tidak ditemukan permasalahan yang berarti dalam menyelesaikan target kinerja yang telah ditetapkan, dikarenakan capaian kinerja rata-rata akan tinggi di semester II, begitu pula dengan realisasi keuangan telah sesuai angkas yang telah direncanakan. Sedangkan DAK pada Sub Bidang PAUD, realisasi keuangan telah mencapai 94,98% akan tetapi capaian kinerja masih 0% karena masih dalam proses pembangunan fisik. Untuk DAK Sub Bidang SD realisasi fisik masih 0% dan realisasi keuangan 21,39%. Pada Sub Bidang SMP belum ada realisasi kinerja maupun keuangan. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (i) Melakukan peningkatan kompetensi SDM dan (ii) Percepatan proses administrasi dan perencanaan dengan tetap mematuhi dan memperhatikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan tahun 2023, dilakukan dengan 5 program; 14 kegiatan; dan 45 sub kegiatan oleh Dinas Kesehatan. Capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan adalah sebesar 37,53% (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar 28,88% (Sangat Rendah) hal ini disebabkan output kegiatan ada pada semester II sehingga perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya. Adapun rencana tindak lanjutnya adalah percepatan pencapaian kinerja dengan optimal, terutama untuk kegiatan-kegiatan DAK. Karena untuk DAK Penugasan Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting dan Sub Bidang Pengendalian Penyakit belum ada capaian kinerja maupun keuangan.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2023 dilaksanakan dengan 10 program; 23 kegiatan; dan 41 sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar 32,4% (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar 37,25% (Sangat Rendah) dikarenakan pembangunan fisik masih berjalan dan akan selesai di semester II. Pada DAK Bidang Jalan realisasi fisik telah mencapai 8,68% walaupun belum ada realisasi keuangan (0%), dan dibutuhkan percepatan pencapaian kinerja.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2023 dilaksanakan dengan 5 program; 13 kegiatan; dan 26 sub kegiatan oleh Dinaas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Capaian kinerja pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dinilai 48,11% dan realisasi keuangan juga masih dikategori Sangat Rendah dengan nilai 27,35%. Catatan yang didapat dari evaluasi laporan renja adalah, agar melakukan percepatan pencapaian target kinerja, mengingat output kegiatan akan tinggi di semester II.

Selain itu terdapat 1 (Satu) Program yang tidak dijalankan, yaitu Program Pengembangan Permukiman. Kemungkinan tidak tercapainya target kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan hal yang mungkin terjadi akibat tidak dilaksanakan program dimaksud.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2023 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dilaksanakan melalui 3 program; 6 kegiatan; dan 21 subkegiatan. Adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan II Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar adalah Sangat Rendah dengan nilai 52,32% (Rendah) dan realisasi keuangan adalah 46,22% (Sangat Rendah), disebabkan kondisi fiskal daerah yang berakibat pada arus kas tidak sesuai angkas yang direncanakan.

Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui 2 program; 9 kegiatan; dan 29 subkegiatan. Adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan II Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Sangat Rendah dengan nilai 27,99% dan realisasi keuangan adalah 26,42% (Sangat Rendah). Kondisi fiskal daerah juga yang mengakibatkan realisasi pada BPBD masih sangat rendah.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial tahun 2023 dilakukan melalui 5 program; 11 kegiatan; dan 29 subkegiatan. Capaian kinerja pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 33,97% dan realisasi keuangan dengan kategori Rendah pada nilai 30,87%. Ke depannya Dinas Sosial selaku pengampu Urusan Sosial harus meningkatkan kinerjanya. Faktor pendorong keberhasilan kinerja, menurut Dinas Sosial adalah kerjasama dan komunikasi yang baik antaraparatur, walau dirasa sumberdaya yang ada sekarang masih minim yang berkompeten, yang dianggap penghambat pencapaian kinerja. Selalu melakukan evaluasi, adalah tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya.

II. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja tahun 2023 dilaksanakan dengan 4 program; 10 kegiatan; dan 19 sub kegiatan melalui Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 36,92% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 39,32%. Mayoritas output kegiatan selesai di semester II, maka menyebabkan capaian pada semester I sangat rendah. Agar menjadi perhatian untuk percepatan pencapaian kinerja.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 dilaksanakan melalui 6 program; 15 kegiatan; dan 30 sub kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Capaian Kinerja Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 32,88% dan realisasi keuangan pada nilai 30,03%. Dengan tingkat capaian tersebut, catatan ke depannya adalah percepatan pencapaian target, karena output subkegiatan yang berupa laporan maupun dokumen yang akan selesai di semester II.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada tahun 2023 dilaksanakan melalui 4 program; 10 kegiatan; dan 25 sub kegiatan. Capaian Kinerja Urusan Wajib Pangan sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 32,53% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 38,1%. Rendahnya rata-rata capaian kinerja disebabkan keluaran yang berupa laporan masih dalam proses penyusunan dan akan selesai di akhir tahun. Serta jadwal pelaksanaan beberapa kegiatan akan dilaksanakan di semester II. Sehingga Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian sebagai penopang Urusan Pangan perlu memaksimalkan kinerja untuk mencapai target kinerja di tahun 2023.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada tahun 2023 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui 2 program; 2 kegiatan; dan 2 subkegiatan dengan capaian kinerja triwulan II Sangat Rendah yaitu 35% dan realisasi keuangan sebesar 17,46%. Faktor pendorong pencapaian kinerja adalah komitmen yang tinggi dari pimpinan dan semua aparatur untuk segera menyelesaikan kegiatan-kegiatan pada Urusan Pertanian. Diharapkan semangat tersebut terus dijaga demi percepatan pencapaian kinerja. Sedangkan yang menjadi penghambat adalah kondisi fiskal daerah yang berpengaruh pada capaian kinerja dan keuangan.

Pada dokumen APBD Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan tidak dilaksanakan. Keterbatasan kondisi fiskal daerah menyebabkan terhambatnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan penganggaran daerah. Kemungkinan tidak tercapainya target kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan hal yang mungkin terjadi.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2023 dilaksanakan melalui 4 program; 8 kegiatan; dan 22 sub kegiatan. Adapun capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan II adalah Rendah dengan nilai 60,31% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 57,09%. Dengan demikian diharapkan memaksimalkan peningkatan pencapaian kinerja dengan melakukan evaluasi setiap kegiatan agar lebih maksimal dalam pencapaian target yang ada. Namun rendahnya capaian di semester I sesuai dokumen perencanaan, dikarenakan keluaran akan terselesaikan di semester II.

Selain itu terdapat 3 (tiga) program yang tidak dilaksanakan di Tahun 2023, yaitu Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati); Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (PPLH); dan Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH. Terkait dengan tidak dilaksanakannya program tersebut dikarenakan faktor hambatan kondisi fiskal daerah yang terbatas sehingga tidak mampu mengakomodir program dimaksud.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 dilaksanakan melalui 5 program; 13 kegiatan; dan 26 subkegiatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 39,57% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 27,85%. Kondisi fiskal daerah menjadi penyebab pencapaian kinerja dan keuangan di semester I.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 dilaksanakan dengan 4 program; 9 kegiatan; dan 26 sub kegiatan. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 27,22% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 22,23%. Pada semester I capaian sangat rendah, dikarenakan kondisi fiskal daerah yang mempengaruhi arus kas tidak sesuai angkas. Dibutuhkan kerjasama dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon sebagai pengemban Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat mengoptimalkan pencapaian target.

8. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk tahun 2023 dilaksanakan dengan 4 program; 6

kegiatan; dan 20 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 19,66% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 16,73%. Rata-rata capaian yang sangat rendah dikarenakan beberapa keluaran yang akan selesai di semester II dan terkendala kondisi fiskal daerah yang mempengaruhi arus kas yang tidak dapat sesuai dengan perencanaan.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan oleh Dinas Perhubungan di tahun 2023 dilaksanakan dengan 3 program; 11 kegiatan; dan 23 subkegiatan. Capaian Kinerja Urusan Wajib Perhubungan sampai dengan triwulan II adalah Rendah dengan nilai 54,9% dan realisasi keuangan dengan kategori Rendah pada nilai 50,32%. Capaian yang masih rendah dikarenakan output kegiatan akan selesai di semester II.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di tahun 2023 dilaksanakan dengan 3 program; 7 kegiatan; dan 25 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 28,08% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 22,47%. Melakukan optimalisasi pencapaian target yang telah ditetapkan adalah rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada triwulan yang akan datang, mengingat keluaran kegiatan sebagian besar akan terealisasi di semester II.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023 dilaksanakan melalui 4 program; 10 kegiatan; dan 23 subkegiatan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 49,37% dan realisasi keuangan dengan kategori

Sangat Rendah pada nilai 48,49%. Rencana tindak lanjutnya adalah memaksimalkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja, dikarenakan sebagian besar target kinerja akan selesai di semester II.

12. Urusan Wajib Penanaman Modal

Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di tahun 2023 dilaksanakan melalui 5 program; 11 kegiatan; dan 27 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Wajib Penanaman Modal yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 27,5% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 24,47%. Dibutuhkan percepatan dalam pencapaian target kinerja, karena sebagian besar keluaran kegiatan berupa laporan akan selesai di semester II.

Pada APBD Didapati 1 (Satu) Program yang tidak dilaksanakan yaitu, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Keterbatasan anggaran daerah pada proses penyusunan dokumen anggaran menyebabkan program dimaksud tidak dapat dianggarkan. Hal ini tentunya menyebabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta target capaian indikator kinerja daerah sedikit banyak terganggu. Kemungkinan tidak tercapainya target kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan hal yang mungkin terjadi.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2023 dilaksanakan melalui 3 program; 13 kegiatan; dan 31 subkegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 31,53% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 30,0%. Diharapkan terus meningkatkan pencapaian kinerja dengan melakukan evaluasi setiap kegiatan agar lebih maksimal dalam pencapaian target yang ada, karena sesuai dengan perencanaan, keluaran kegiatan baru akan selesai di semester II. Sehingga capaian semester I masih pada kriteria sangat rendah.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada tahun 2023 dilaksanakan dengan 1 program; 1 kegiatan; dan 1 sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 10% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 20,82%. Permasalahan yang dialami adalah output yang menjadi target berupa dokumen, yang baru akan selesai di akhir tahun. Rencana tindak lanjutnya adalah memaksimalkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggaraan Urusan Persandian pada tahun 2023 dilaksanakan dengan 1 program; 2 kegiatan; dan 2 subkegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Adapun capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 40% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 27,85%. Permasalahan yang dialami adalah terjadinya kekurangan SDM yang kompeten, serta target kinerja baru akan terealisasi di semester II. Rencana tindak lanjutnya adalah memaksimalkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan tahun 2023 dilaksanakan dengan 2 program; 2 kegiatan; dan 2 sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sampai dengan triwulan II dengan predikat Sangat Rendah dengan nilai 0% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 17,96%. Hal ini dikarenakan belum terlaksananya festival seni dan budaya serta belum terdaftarnya objek cagar budaya. Agar pada triwulan berikutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memaksimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan tahun 2023 dilaksanakan dengan 1 program; 2 kegiatan; dan 3 subkegiatan. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan oleh Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 33,33% dikarenakan targetnya hingga akhir tahun, jadi capaian akan tinggi pada semester II dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 45,68%, telah sesuai perencanaan pada angkas.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan tahun 2023 dilaksanakan dengan 1 program; 1 kegiatan; dan 2 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan pada Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 50% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 22,26%. Hal ini dikarenakan kegiatan yang outputnya adalah dokumen, selesai di akhir tahun. Mengoptimalkan pencapaian kinerja adalah rencana tindak lanjut pada semester berikutnya.

III. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2023 dilaksanakan dengan 5 program; 14 kegiatan; dan 32 subkegiatan oleh Dinas Perikanan. Capaian kinerja Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan sampai dengan triwulan II adalah Rendah dengan nilai 61,77% dan realisasi keuangan dengan kategori Rendah pada nilai 60,03%. Capaian masih dalam kategori rendah, dikarenakan output kegiatan masih dalam proses, dan akan selesai di semester II.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata tahun 2023 dilaksanakan dengan 4 program; 10 kegiatan; dan 25 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata sampai dengan triwulan II adalah di kategori Sangat Rendah dengan nilai 48,9% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 39,48%. Hal ini ditunjang dengan *team work* yang baik dan SDM ASN yang kompeten. Akan tetapi

diperlukan percepatan pencapaian target kinerja, mengingat keluaran kegiatan direncanakan akan selesai di semester II.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Penyelenggaraan Urusan Pertanian tahun 2023 dilaksanakan dengan 5 program; 9 kegiatan; dan 11 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 46,4% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 39,99%. Capaian yang masih sangat rendah, dikarenakan keluaran kegiatan memang direncanakan dicapai pada semester II. Mengingat hal tersebut diharapkan optimal meningkatkan pencapaian kinerja dengan melakukan evaluasi setiap kegiatan agar lebih maksimal dalam pencapaian target yang ada.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan tahun 2023 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan 3 program; 4 kegiatan; dan 5 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan sampai dengan triwulan II adalah Rendah dengan nilai 60% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 30,7%, dikarenakan keluaran kegiatan akan dicapai pada semester II. Diperlukan kerjasama dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh aparatur dalam percepatan pencapaian target kinerja.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian tahun 2023 dilaksanakan dengan 1 program; 1 kegiatan; dan 2 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yang diampu oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian sampai dengan triwulan II adalah Sedang dengan nilai 66,22% dan realisasi keuangan 66,25% juga dipredikat Sedang. Diperlukan komitmen yang tinggi dari pengampu Urusan Perindustrian dalam pencapaian target kinerja. Pada APBD juga didapati 1 (Satu) Program yang terdapat di RPJMD tetapi tidak dilaksanakan, yaitu Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi tahun 2023 dilaksanakan dengan 1 program; 1 kegiatan; dan 1 subkegiatan. Adapun capaian

kinerja Urusan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 2,14% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 2,15%. Rendahnya capaian kinerja disebabkan targetnya baru akan didapat di akhir tahun. Selain itu, terdapat anggaran yang bersumber dari DID berupa pemberian mesin bajak dan pengupas pinang untuk diserahkan kepada masyarakat eks transmigrasi masih dalam proses penyelesaian.

Catatan lain adalah didapatnya 1 (Satu) Program yang tidak dilaksanakan yaitu Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Keterbatasan anggaran merupakan alasan utama tidak dilaksanakan program dimaksud. Kemungkinan tidak tercapainya target kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan hal yang mungkin terjadi.

IV. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah Tahun 2023 dilaksanakan dengan 3 program; 20 kegiatan; dan 62 subkegiatan. Capaian kinerja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 32,8% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 35,61%. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kegiatan yang didapat outputnya di akhir tahun. Rencana tindak lanjutnya adalah mengoptimalkan pencapaian kinerja sehingga mampu maksimal mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat DPRD Kabupaten tahun 2023 dilaksanakan dengan 2 program; 15 kegiatan; dan 31 subkegiatan. Capaian kinerja Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 46,55% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 41,58%. Capaian tersebut telah sesuai dengan perencanaan, dan akan tinggi di semester II, karena pencapaian target yang akan terealisasi di akhir tahun. Dengan demikian, secara umum perlu ditingkatkan capaiannya pada triwulan selanjutnya.

V. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan tahun 2023 dilaksanakan dengan 3 program; 13 kegiatan; dan 43 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 27,81% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 31,71%. Target kegiatan yang berupa dokumen di sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengemabangan Daerah sebagai penopang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, baru akan terealisasi di akhir tahun sehingga membawa dampak yang signifikan terhadap angka capaian kinerja di semester satu. Optimalisasi kinerja dan optimalisasi pencapaian target kinerja adalah tindak lanjut yang diperlukan dalam semester ke dua.

2. Keuangan

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan tahun 2023 dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan 2 program; 8 kegiatan; dan 30 subkegiatan dengan capaian kinerja sampai dengan triwulan II Sangat Rendah sebesar 28,62% dan realisasi keuangan Sangat Rendah sebesar 35,41%. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan 3 program; 13 kegiatan; dan 46 subkegiatan dengan Capaian kinerja Urusan Keuangan Sangat Rendah dengan nilai 28,91% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 22,03%. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam menyelesaikan kegiatan, serta kedisiplinan aparatur yang ada. Akan tetapi keterbatasan SDM yang ada dianggap sebagai penghambat pencapaian kinerja. Dari permasalahan tersebut, disimpulkan rencana tindak lanjutnya adalah penguatan kompetensi aparatur serta selalu melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang rutin di evaluasi. Sedangkan untuk permasalahan pada semester I secara umum disebabkan target kinerja yang akan dicapai pada semester II.

3. Kepegawaian

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun 2023 dilaksanakan dengan 2 program; 9 kegiatan; dan 31 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian sampai dengan triwulan II adalah berada pada kategori Sangat Rendah dengan nilai 23,61% dan

realisasi keuangan dengan kategori Rendah pada nilai 19,08%. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai penopang Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Manajemen Kepegawaian harus meningkatkan pencapaian kinerja, mengingat target kinerja akan dicapai pada semester II.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan di Tahun 2023 dilaksanakan dengan 1 program, 1 kegiatan dan 1 subkegiatan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun capaian kinerja hingga triwulan II adalah 0% dan 77,22% dengan kategori Tinggi. Capaian kinerja yang masih 0% dikarenakan diklat PIM yang masih dalam pelaksanaan dan prajabatan yang masih menunggu info jadwal dari BPSDM Provinsi Lampung.

5. Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 dilaksanakan dengan 1 program; 3 kegiatan; dan 8 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan triwulan II adalah berada pada kategori Sangat Rendah dengan nilai 0% dan realisasi keuangan dengan kategori Rendah pada nilai 19,85%. Capaian Kinerja sangat rendah dikarenakan output Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan adalah berupa Laporan akhir maupun dokumen Kajian.

VI. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat

Penyelenggaraan Urusan Pengawasan pada tahun 2023 dilaksanakan dengan 3 program; 11 kegiatan; dan 37 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Inspektorat sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 41,24% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 36,78%. Rendahnya capaian dikarenakan keluaran kegiatan yang baru akan selesai di semester II.

VII. Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan

1. Kecamatan

Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan yang diampu oleh 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023 dilaksanakan dengan 3 program; 11 kegiatan; dan 35 subkegiatan. Adapun capaian kinerja rata-rata dari 11 Kecamatan tersebut sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 38,31% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 20,54%. Capaian tersebut selain dikarenakan target yang direncanakan akan selesai di semester II, juga dipengaruhi oleh kondisi fiskal daerah.

VIII. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023 dilaksanakan dengan 6 program; 11 kegiatan; dan 28 subkegiatan. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 31,49% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 33,64%. Rencana tindak lanjutnya adalah mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian kinerja lebih optimal, karena sesuai perencanaan, target akan tercapai di semester II.

Berikut rekapitulasi hasil evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 berdasarkan urusan pemerintahan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Tabel 2.11 Skala Nilai Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Realisasi Capaian (%)	
		Kinerja	Anggaran
1	Pendidikan	60,65	47,82
2	Kesehatan	37,53	28,88
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	32,4	37,25
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	48,11	27,35
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	40,16	36,32
6	Sosial	33,97	30,87
7	Tenaga Kerja	36,92	39,32

8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	32,88	30,3
9	Pangan	32,53	38,1
10	Pertanahan	35	17,46
11	Lingkungan Hidup	60,31	57,09
12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	39,57	27,85
13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	27,22	22,23
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	19,66	16,73
15	Perhubungan	54,9	50,32
16	Komunikasi Dan Informatika	28,08	22,47
17	Dinas Koperasi, UKM	49,37	48,49
18	Penanaman Modal	27,5	24,47
19	Pemuda Dan Olahraga	31,53	30
20	Statistik	10	20,82
21	Persandian	40	27,85
22	Kebudayaan	0	17,96
23	Perpustakaan	33,33	45,68
24	Kearsipan	50	22,26
25	Perikanan	61,77	60,03
26	Pariwisata	48,9	39,48
27	Pertanian	46,4	39,99
28	Perdagangan	60	30,7
29	Perindustrian	66,22	66,25
30	Transmigrasi	2,14	2,15
31	Sekretariat Daerah	32,8	35,61
32	Sekretariat DPRD	46,55	41,58
33	Perencanaan	27,81	31,71
34	Keuangan	28,77	28,72
35	Kepegawaian	23,61	19,08
36	Pendidikan dan Pelatihan	0	77,22
37	Penelitian dan Pengembangan	0	19,85
38	Pengawasan	41,24	36,78
39	Kewilayahan	38,31	20,54
40	Kesatuan Bangsa Dan Politik	31,49	33,64
Rata-Rata Capaian		35,44	33,78

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Selanjutnya untuk penjabaran secara lengkap dalam bentuk matrik evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2023 hingga triwulan II ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Pesisir Barat

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Bidang Pendidikan																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95%	645,100,091,127	90%	140,007,420,725	90%	157,112,519,665	83.54%	117,382,112,085	92.8%	74.71%	83.5%	117,382,112,085	87.9%	18.2%	Dinas P dan K	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	32,877,747	100%	6,400,000	100%	29,200,000	0%	0	0%	0.00%	100.0%	0	100.0%	0.0%	Dinas P dan K	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7,192,007	2 Dokumen	1,400,000	2 Dokumen	24,200,000	Dokumen	0	0%	0.0%	2 Dokumen	0	20.0%	0.0%	Dinas P dan K	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	10 Dokumen	25,685,740	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	Dokumen	0	0%	0.0%	2 Dokumen	0	20.0%	0.0%	Dinas P dan K	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	619,542,934,116	100%	134,421,242,725	100%	149,433,908,665	100%	114,226,217,512	100%	76.44%	100%	114,226,217,512	100.0%	18.4%	Dinas P dan K	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	619,514,679,802	14 Bulan	134,415,742,725	14 Bulan	149,428,408,665	14 Bulan	114,220,717,512	100.00%	76.44%	1 Dokumen	114,220,717,512	1.7%	18.4%	Dinas P dan K	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun	5 Dokumen	12,842,870	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	100.00%	100.00%	2 Dokumen	2,500,000	40.0%	19.5%	Dinas P dan K	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	10 Dokumen	10,274,296	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	100.00%	100.00%	1 Dokumen	2,000,000	10.0%	19.5%	Dinas P dan K	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	5,137,148	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	100.00%	100.00%	2 Urusan	1,000,000	40.0%	19.5%	Dinas P dan K	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	2 Urusan	22,449,336,607	2 Urusan	4,885,000,000	2 Urusan	6,560,733,000	2 Urusan	2,468,100,000	100.00%	37.62%	.5 Tahun	2,468,100,000	25.0%	11.0%	Dinas P dan K	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	5 Tahun	22,449,336,607	1 Tahun	4,885,000,000	1 Tahun	6,560,733,000	.5 Tahun	2,468,100,000	50.00%	37.62%	.5 Tahun	2,468,100,000	10.0%	11.0%	Dinas P dan K	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100%	2,201,822,715	100%	524,556,000	100%	483,656,000	100%	523,454,373	100.00%	108.23%	100%	523,454,373	100.0%	23.8%	Dinas P dan K	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	5 Tahun	8,424,923	1 Tahun	1,640,000	1 Tahun	1,640,000	1.0 Tahun	1,606,500	100.00%	97.96%	1 Tahun	1,606,500	20.0%	19.1%	Dinas P dan K	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Propaganda , Pameran dan Publikasi	5 Kali	436,657,577	1 Kali	85,000,000	1 Kali	85,000,000	1 Kali	84,900,000	100.00%	99.88%	1 Kali	84,900,000	20.0%	19.4%	Dinas P dan K	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang cetak dan Pengadaan Serta terpenuhinya Kebutuhan Alat tulis kantor Rutin	60 Bulan	354,298,821	12 Bulan	94,916,000	12 Bulan	96,016,000	12 Bulan	94,391,520	100.00%	98.31%	12 Bulan	94,391,520	20.0%	26.6%	Dinas P dan K	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	60 Bulan	61,645,776	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	12,000,000	100.00%	40.00%	12 Bulan	12,000,000	20.0%	19.5%	Dinas P dan K	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan minum Kantor	55 Bulan	56,508,628	11 Bulan	11,000,000	11 Bulan	11,000,000	11 Bulan	11,000,000	100.00%	100.00%	11 Bulan	11,000,000	20.0%	19.5%	Dinas P dan K	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	60 Bulan	1,284,286,991	12 Bulan	320,000,000	12 Bulan	260,000,000	12 Bulan	319,556,353	100.00%	122.91%	12 Bulan	319,556,353	20.0%	24.9%	Dinas P dan K	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100%	430,914,246	100%	84,142,000	100%	204,542,000	100%	78,295,200	100.00%	38.28%	100%	78,295,200	100.0%	18.2%	Dinas P dan K	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	60 Bulan	110,962,396	12 Bulan	21,600,000	12 Bulan	42,000,000	12 Bulan	15,753,200	100.00%	37.51%	12 Bulan	15,753,200	20.0%	14.2%	Dinas P dan K	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Sewa Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas	60 Bulan	292,817,434	12 Bulan	57,000,000	12 Bulan	157,000,000	12 Bulan	57,000,000	100.00%	36.31%	12 Bulan	57,000,000	20.0%	19.5%	Dinas P dan K	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terciptanya Kebersihan Kantor	60 Bulan	27,134,416	12 Bulan	5,542,000	12 Bulan	5,542,000	12 Bulan	5,542,000	100.00%	100.00%	12 Bulan	5,542,000	20.0%	20.4%	Dinas P dan K	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100%	442,205,697	100%	86,080,000	100%	400,480,000	100%	86,045,000	100.00%	21.49%	100%	86,045,000	100.0%	19.5%	Dinas P dan K	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	60 Bulan	436,657,577	12 Bulan	85,000,000	12 Bulan	123,500,000	12 Bulan	84,965,000	100.00%	68.80%	12 Bulan	84,965,000	20.0%	19.5%	Dinas P dan K	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	5,548,120	12 Bulan	1,080,000	12 Bulan	276,980,000	12 Bulan	1,080,000	100.00%	0.39%	12 Bulan	1,080,000	20.0%	19.5%	Dinas P dan K	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	100%	226,291,051,127	100%	41,688,146,260	100%	69,745,121,384	64.08%	19,423,213,558	64.08%	27.85%	64.08%	19,423,213,558	64.1%	8.6%	Dinas P dan K	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka partisipasi kasar SD	93.57%	131,854,083,108	91.57%	28,158,429,260	91.57%	44,751,987,000	100.00%	12,726,478,008	100.00%	28.44%	100.00%	12,726,478,008	106.9%	9.7%	Dinas P dan K	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	25 Ruang	23,750,598,720	5 Ruang	8,663,527,010	34 Ruang	17,373,979,000	Ruang	984,278,108	0.00%	5.67%	5 Ruang	984,278,108	20.0%	4.1%	Dinas P dan K	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	48 Bulan	9,271,855,000			12 Bulan	9,271,855,000	6 Bulan	4,187,607,500	50.00%	45.16%					Dinas P dan K	
		Pengadaan Perlengkapan Siswa SD	Tersedianya perlengkapan Siswa SD	17,963 Siswa	929,585,250	17,963 Siswa	929,585,250							17,963 Siswa	929,585,250	100.0%	100.0%	Dinas P dan K	
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kegiatan	20 Kali	556,782,452	4 Kali	133,218,000	Kali	0	Kali	0	0.00%	0.00%	4 Kali	0	20.0%	0.0%	Dinas P dan K	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni SD	82.27%	96,895,261,687	80.27%	18,432,099,000	80.27%	17,986,980,000	99.87%	7,528,787,900	100.00%	41.86%	99.87%	7,528,787,900	#VALUE!	7.8%	Dinas P dan K	
		Koordinasi Perencanaan supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan SD	Terlaksananya Perencanaan supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan SD	16 Kali	450,000,000	Kali	0	4 Kali	119,173,000	1 Kali	25,804,500	25.00%	21.65%	99.87%	25,804,500	#VALUE!	5.7%	Dinas P dan K	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka partisipasi kasar SMP	92.16%	81,459,030,949	92.08%	10,929,108,000	92.08%	21,448,461,384	86.81%	4,752,684,500	#VALUE!	22.16%	86.81%	4,752,684,500	#VALUE!	5.8%	Dinas P dan K	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dibangun	25 Ruang	45,341,727,818	5 Ruang	2,507,820,000	7 Ruang	13,388,198,384	Ruang	1,068,461,250	0.00%	7.98%	5 Ruang	1,068,461,250	20.0%	2.4%	Dinas P dan K	
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya perlengkapan Siswa SMP	6,364 Siswa	329,337,000	6,364 Siswa	329,337,000	1 Sekolah	43,100,000	0 Sekolah	0			6,364 Siswa	329,337,000 Siswa	100.0%	100.0%	Dinas P dan K	
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kegiatan	20 Kali	485,169,369	4 Kali	96,840,000					0.00%	0.00%	4 Kali	96,840,000	20.0%	20.0%	Dinas P dan K	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	4 Kali	420,000,000			1 Kali	106,125,000	Kali	81,065,000	0.00%	0.00%	Kali	81,065,000	0.0%	19.3%	Dinas P dan K	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni SMP	70.75%	34,432,796,762	70.25%	7,995,111,000	70.25%	7,817,150,000	81.48%	3,590,775,750	100.00%	45.93%	81.48%	3,590,775,750	115.2%	10.4%	Dinas P dan K	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi Perencanaan supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan SMP	Terlaksananya Perencanaan supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan SMP	16 Kali	450,000,000			4 Kali	93,888,000	Kali	12,382,500	0.00%	13.19%	81.48%	12,382,500	5.1%	2.8%	Dinas P dan K	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka partisipasi kasar PAUD	75.00%	11,752,989,624	71.00%	2,327,609,000	71.00%	3,132,353,000	54.37%	1,760,391,050	#VALUE!	56.20%	54.37%	1,760,391,050	#VALUE!	15.0%	Dinas P dan K	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dibangun	10 Ruang	1,487,617,261	2 Ruang	283,839,000	1 Ruang	702,459,000	Ruang	576,636,050	0.00%	82.09%	2 Ruang	576,636,050	20.0%	38.8%	Dinas P dan K	
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya perlengkapan Peserta Disik PAUD	4 Sekolah	750,000,000	0 Sekolah	0	1 Sekolah	161,568,000	0 Sekolah	0	0.00%	0.00%	0 Siswa	0 Siswa	0.0%	0.0%	Dinas P dan K	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka Partisipasi Kasar PAUD	75.00%	9,195,372,363	71.00%	2,043,770,000	71.00%	2,192,510,000	54.37%	1,183,755,000	#VALUE!	53.99%	54.37%	1,183,755,000	#VALUE!	12.9%	Dinas P dan K	
		Sosialisasi dan Advokasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Bidang Pendidikan	4 Kali	320,000,000	Kali	0	1 Kali	75,816,000	Kali	0	0.00%	0.00%	0%	0	0.0%	0.0%	Dinas P dan K	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga negara dalam pendidikan kesetaraan	325 Orang	1,224,947,446	325 Orang	273,000,000	325 Orang	412,320,000	325 Orang	183,660,000	100.00%	44.54%	325 Orang	183,660,000	100.0%	15.0%	Dinas P dan K	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal /Kesetaraan	Jumlah PKBM	2 PKBM	1,224,947,446	2 PKBM	273,000,000	2 PKBM	412,320,000	2 PKBM	183,660,000	100.00%	44.54%	2 PKBM	183,660,000	100.0%	15.0%	Dinas P dan K	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2,237,841,350		267,000,000		350,559,000		30,011,450		8.56%		30,011,450	#DIV/0!		Dinas P dan K	
		Bidang Kebudayaan			2,237,841,350		267,000,000		350,559,000		30,011,450		8.56%		30,011,450	#DIV/0!		Dinas P dan K	
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang terlibat pertunjukan seni	40%	1,754,466,913			25.00%	267,000,000	0.00%	0	0.00%	0.00%	0%	0	0.0%	0.0%	Dinas P dan K	
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten kota	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	70%	1,754,466,913			55.00%	267,000,000	0.00%	0	0.00%	0.00%	.0 Objek	0	0.0%	0.0%	Dinas P dan K	
		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	50 Kali	483,374,437			2 Kali	267,000,000	2 Kali	0	0.00%	0.00%	2.0 Objek	0	#VALUE!	0.0%	Dinas P dan K	
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	40.00%	483,374,437	20%	267,000,000	20%	83,559,000	20%	30,011,450	100.00%	35.92%	20%	30,011,450	50.0%	6.2%	Dinas P dan K	
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota	Jumlah Objek Terdaftar	10 Objek	483,374,437	2 Objek	267,000,000	2 Objek	83,559,000	2 Objek	30,011,450	100.00%	35.92%	2.0 Objek	30,011,450	20.0%	6.2%	Dinas P dan K	
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	10 Objek	483,374,437	2 Objek	267,000,000	2 Objek	83,559,000	Objek	30,011,450	0.00%	35.92%	2.0 Objek	30,011,450	20.0%	6.2%	Dinas P dan K	
		Bidang Kesehatan		99	#REF!	99	Rp 69,118,983,419	98	Rp 102,296,742,557	56.9	Rp 22,936,014,055	58.1	22.4	57	Rp 22,936,014,055	57.5%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan (%)	95	Rp 173,418,609,547	95	Rp 25,633,038,436	90	Rp 34,361,458,360	56.9	Rp 14,741,190,326	63.3	42.9	57	Rp 14,741,190,326	59.9%	850.0%	Dinas Kesehatan	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kesehatan (%)	95	Rp 131,528,439	95	Rp 28,909,000	90	Rp 42,229,600	60.0	Rp 32,619,600	66.7	77.2	60	Rp 32,619,600	63.2%	2480.0%	Dinas Kesehatan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (dokumen)	5	Rp 40,311,411	5	Rp 12,005,600	1	Rp 19,220,000	0.0	Rp 9,610,000	0.0	50.0	0	Rp 9,610,000	0.0%	2383.9%	Dinas Kesehatan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	5	Rp 25,322,308	5	Rp 3,892,200	1	Rp 6,752,000	1.0	Rp 6,752,000	100.0	100.0	1	Rp 6,752,000	20.0%	2666.4%	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Akuntabilitas SKPD Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD Dokumen Rencana Kerja Tahunan dokumen Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (laporan)	20	Rp 65,894,720	20	Rp 13,011,200	1	Rp 16,257,600	1.0	Rp 16,257,600	100.0	100.0	1	Rp 16,257,600	5.0%	2467.2%	Dinas Kesehatan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Pada Dinas Kesehatan (%)	95	Rp 166,635,424,996	95	Rp 24,527,935,839	90	Rp 32,839,360,900	40.0	Rp 13,932,354,846	44.4	42.4	40	Rp 13,932,354,846	42.1%	836.1%	Dinas Kesehatan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (bulan)	70	Rp 166,607,567,926	70	Rp 24,522,435,839	14	Rp 32,827,310,900	8.0	Rp 13,932,354,846	57.1	42.4	8	Rp 13,932,354,846	11.4%	836.2%	Dinas Kesehatan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan (laporan)	5	Rp 12,663,687	5	Rp 2,500,000	1	Rp 4,750,000	0.0	Rp -	0.0	0.0	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulan /semesteran SKPD (laporan)	10	Rp 10,128,922	10	Rp 2,000,000	2	Rp 4,200,000	0.0	Rp -	0.0	0.0	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (laporan)	5	Rp 5,064,461	5	Rp 1,000,000	1	Rp 3,100,000	0.0	Rp -	0.0	0.0	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	95	Rp999,982,968	0	Rp -	0	Rp-	0	Rp-	0	Rp-	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Tenaga kerja kesehatan PNS yang dinilai (kategori)	5	Rp 577,951,271	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan pelatihan (%)	100	Rp 422,031,697	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	95	Rp 2,955,060,156	95	Rp 492,720,139	90	Rp 775,657,860	45.0	Rp 403,699,220	50.0	52.0	45	Rp 403,699,220	47.4%	1366.1%	Dinas Kesehatan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik (bulan)	60	Rp 28,188,794	60	Rp 5,534,800	12	Rp 6,122,600	6.0	Rp 3,144,300	50.0	51.4	6	Rp 3,144,300	10.0%	1115.4%	Dinas Kesehatan	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan (kegiatan)	5	Rp 126,611,536	4	Rp 25,000,000	1	Rp 120,000,000	1.0	Rp 65,000,000	100.0	54.2	1	Rp 65,000,000	20.0%	5133.8%	Dinas Kesehatan	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK, Cetak dan Penggandaan (bulan)	60	Rp 554,490,661	60	Rp 144,486,600	12	Rp 120,435,260	6.0	Rp 49,114,250	50.0	40.8	6	Rp 49,114,250	10.0%	885.8%	Dinas Kesehatan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU (bulan)	60	Rp 822,655,512	60	Rp 12,000,000	12	Rp 197,000,000	6.0	Rp 166,246,000	50.0	84.4	6	Rp 166,246,000	10.0%	2020.8%	Dinas Kesehatan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (bulan)	55	Rp 55,709,075	55	Rp 10,976,000	11	Rp 12,100,000	5.0	Rp 3,873,000	45.5	32.0	5	Rp 3,873,000	9.1%	695.2%	Dinas Kesehatan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor (dalam daerah dan Luar Daerah) (bulan)	60	Rp 1,367,404,578	60	Rp 294,723,339	12	Rp 320,000,000	6.0	Rp 116,321,670	50.0	36.4	6	Rp 116,321,670	10.0%	850.7%	Dinas Kesehatan	
		Pengadaan milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jumlah pengadaan mebel penunjang urusan pemerintah Daerah		Rp 857,725,000		Rp -	100	Rp 155,950,000	100.0	Rp 152,890,000		98.0		Rp 152,890,000	#DIV/0!	1782.5%	Dinas Kesehatan	
		Pengadaan Mebel	tersedianya jumlah mebel	300	Rp 857,725,000		Rp -	75	Rp 155,950,000	75.0	Rp 152,890,000	100.0	98.0			0.0%		Dinas Kesehatan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	95	Rp1,717,672,860	95	Rp 252,444,458	90	Rp202,631,000	45.0	Rp70,026,660	50.0	34.6	45	Rp 70,026,660	47.4%	407.7%	Dinas Kesehatan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan (bulan)	60	Rp 624,954,536	60	Rp 61,682,458	12	Rp 96,000,000	5.0	Rp 29,254,660	41.7	30.5	5	Rp 29,254,660	8.3%	468.1%	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sewa Kantor/Gudang/ Rumah Dinas/Kendaraan Operasional dan Kendaraan Dinas/Operasional (bulan)	60	Rp 1,048,343,511	60	Rp 182,000,000	12	Rp 97,000,000	6.0	Rp 36,000,000	50.0	37.1	6	Rp 36,000,000	10.0%	343.4%	Dinas Kesehatan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor (bulan)	60	Rp 44,374,813	60	Rp 8,762,000	12	Rp 9,631,000	7.0	Rp 4,772,000	58.3	49.5	7	Rp 4,772,000	11.7%	1075.4%	Dinas Kesehatan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	95	Rp 2,257,017,740	90	Rp 331,029,000	90	Rp 345,629,000	51.7	Rp 149,600,000	57.4	43.3	52	Rp 149,600,000	54.4%	662.8%	Dinas Kesehatan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara (unit)	75	Rp 2,071,658,452	75	Rp 295,029,000	15	Rp 309,029,000	6.0	Rp 132,800,000	40.0	43.0	6	Rp 132,800,000	8.0%	641.0%	Dinas Kesehatan	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor (%)	100	Rp 185,359,288	100	Rp 36,600,000	100	Rp 36,600,000	60.0	Rp 16,800,000	60.0	45.9	60	Rp 16,800,000	60.0%	906.3%	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (%)	100	Rp 282,323,919,795	100	Rp 42,864,953,401	100	Rp 61,863,017,257	32.7	Rp 6,293,707,659	32.7	10.2	33	Rp 6,293,707,659	32.7%	222.9%	Dinas Kesehatan	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 72,927,305,286	100	Rp 11,777,932,811	100	Rp 18,534,917,222	22.9	Rp 1,289,013,901	22.9	7.0	23	Rp 1,289,013,901	22.9%	176.8%	Dinas Kesehatan	
		Pengembangan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukung	Tersedianya dana untuk pengembangan Gedung RSUD Kabupaten (%)	100	Rp 3,132,035,744	0	Rp -	0	Rp -							0.0%		Dinas Kesehatan	
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah Dinas yang dibangun untuk tenaga kesehatan (unit)	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -							#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	100	Rp.			12	Rp 8,244,158,569	2.0	Rp 316,675,307					0.0%		Dinas Kesehatan	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana fasilitas kesehatan yang dipelihara (%)	100	Rp 8,179,926,700	100	Rp 4,620,077,350	100	Rp -							0.0%		Dinas Kesehatan	
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana fasilitas kesehatan yang Di bangun (%)	100	Rp 6,511,373,447	100	#REF!	100	Rp -							0.0%		Dinas Kesehatan	
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana yang dibeli (%)	100	Rp 10,445,328,237	100	Rp 2,698,148,000	100	Rp 1,336,632,000	0.0	Rp -	0.0	0.0	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan alat penunjang yang tersedia sesuai dengan kebutuhan (%)	100	Rp 19,373,746,149	100	Rp 479,167,229	100	Rp 3,450,020,394	40.0	Rp 420,351,994	40.0	12.2	40	Rp 420,351,994	40.0%	217.0%	Dinas Kesehatan	
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang tersedia sesuai dengan kebutuhan (faskes)	12	Rp 12,783,039,863	12	Rp 2,739,048,940	12	Rp 3,976,658,259	6.0	Rp -	50.0	0.0	6	Rp -	50.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang tersedia sesuai dengan kebutuhan (Fasyankes)	12	Rp 12,501,855,146	12	Rp 1,241,491,292	12	Rp 1,527,448,000	6.0	Rp 551,986,600	50.0	36.1	6	Rp 551,986,600	50.0%	441.5%	Dinas Kesehatan	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 206,797,209,111	100	Rp 30,851,891,750	100	Rp 42,909,498,112	38.8	Rp 4,939,021,258	38.8	11.5	39	Rp 4,939,021,258	38.8%	238.8%	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah peserta pelatihan penurunan AKI dan AKB dan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) (DAK Non Fisik) (RTK / Kasus)	20	Rp 6,729,853,902	19	Rp 293,487,900	15	Rp 1,217,856,400	7.0	Rp 462,106,000	46.7	37.9	7	Rp 462,106,000	35.0%	686.7%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap, Imunisasi Lanjutan, dan Investigasi KIPI (%)	100	Rp 347,769,201	100	Rp 71,908,400	100	Rp 539,721,400	40.0	Rp 205,573,000	40.0	38.1	40	Rp 205,573,000	40.0%	5911.2%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah peserta pelatihan (petugas)	165	Rp 161,042,543	165	Rp 27,604,000	33	Rp 165,420,500	0.0	Rp 8,138,000	0.0	4.9	0	Rp 8,138,000	0.0%	505.3%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kasus Gizi Buruk,Balita KEP,Bumil KEK,Bumil Anemia Berat Ditemukan Serta Di Tanggulangi (kasus)	75	Rp 664,351,634	73	Rp 414,651,900	26	Rp 2,478,378,050	15.0	Rp 54,319,150	57.7	2.2	15	Rp 54,319,150	20.0%	817.6%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa dengan rumah yang memiliki Jamban Sendiri (Pekon)	100	Rp 1,565,926,625	95	Rp 34,136,760	20	Rp 444,075,700	2.0	Rp 4,090,000	10.0	0.9	2	Rp 4,090,000	2.0%	26.1%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Media Promosi Kesehatan yang di gunakan (unit media)	1025	Rp 820,846,530	1070	Rp 33,750,000	220	Rp 794,346,900	80.0	Rp 139,930,200	36.4	17.6	80	Rp 139,930,200	7.8%	1704.7%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Sampel yang menjadi locus wabah/ KLB (%)	100	Rp 270,954,530	5	Rp 156,664,480	12	Rp 213,955,446	4.0	Rp 20,742,000	33.3	9.7	4	Rp 20,742,000	4.0%	765.5%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	jumlah jemaah haji (orang)	365	Rp 1,987,110,075	343	Rp 75,371,900	106	Rp 966,517,350	73.0	Rp 14,047,000	68.9	1.5	73	Rp 14,047,000	20.0%	70.7%	Dinas Kesehatan	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah Penderita Penyakit Menular Bersumber Hewan, Penyakit Menular Lainnya dan PTM (%)	100	Rp 1,402,965,481	100	Rp 371,688,550	100	Rp 2,954,153,541	20.0	Rp 64,538,400	20.0	2.2	20	Rp 64,538,400	20.0%	460.0%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI, Peserta Monev, Anggaran INA-CBGs, dan Non Kapitasi (bulan)	60	Rp 60,330,284,198	60	Rp 18,208,668,956	12	Rp 26,538,848,075	6.0	Rp 2,659,161,450	50.0	10.0	6	Rp 2,659,161,450	10.0%	440.8%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya dana pelayanan kesehatan kapitasi di Puskesmas Lemong (%)	100	Rp 7,488,079,462	100	Rp -	100	Rp -	0.0	Rp -	0.0	#DIV/0!	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya dana pelayanan kesehatan kapitasi di Puskesmas Pugung Tampak (%)	100	Rp 2,615,238,885	100	Rp -	100	Rp -	0.0	Rp -	0.0	#DIV/0!	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya dana pelayanan kesehatan kapitasi di Puskesmas Pulau Pisang (%)	100	Rp 1,302,274,689	100	Rp -	100	Rp -	0.0	Rp -	0.0	#DIV/0!	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya dana pelayanan kesehatan kapitasi di Puskesmas Karya Penggawa (%)	100	Rp 3,779,146,889	100	Rp -	100	Rp -	0.0	Rp -	0.0	#DIV/0!	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya dana pelayanan kesehatan kapitasi di Puskesmas Way Krui (%)	100	Rp 2,721,754,103	100	Rp -	100	Rp -	0.0	Rp -	0.0	#DIV/0!	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya dana pelayanan kesehatan kapitasi di Puskesmas Krui (%)	100	Rp 6,307,567,461	100	Rp -	100	Rp -	0.0	Rp -	0.0	#DIV/0!	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya dana pelayanan kesehatan kapitasi di Puskesmas Krui Selatan (%)	100	Rp 1,859,197,884	100	Rp -	100	Rp -	0.0	Rp -	0.0	#DIV/0!	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya dana pelayanan kesehatan kapitasi di Puskesmas Biha (%)	100	Rp 6,446,259,714	100	Rp -	100	Rp -	0.0	Rp -	0.0	#DIV/0!	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya dana pelayanan kesehatan kapitasi di Puskesmas Ngambur (%)	100	Rp 6,231,384,388	100	Rp -	100	Rp -	0.0	Rp -	0.0	#DIV/0!	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya dana pelayanan kesehatan kapitasi di Puskesmas Bengkunt (%)	100	Rp 2,917,974,341	100	Rp -	100	Rp -	0.0	Rp -	0.0	#DIV/0!	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya dana pelayanan kesehatan kapitasi di Puskesmas Bengkunt Belimbing (%)	100	Rp 17,763,026,765	100	Rp -	100	Rp -	0.0	Rp -	0.0	#DIV/0!	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah biaya operasional RS (%)	100	Rp 27,525,422,080	100	Rp 3,320,512,316	100	Rp 4,100,000,000	20.0	Rp 830,583,612	20.0	20.3	20	Rp 830,583,612	20.0%	301.8%	Dinas Kesehatan	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah biaya Operasional Puskesmas dan kegiatan BOK (Puskesmas)	11	Rp 38,596,290,908	11	Rp 7,552,034,285	11	Rp 2,070,700,000	5.0	Rp 446,113,446	45.5	0.0	5	Rp 446,113,446	45.5%	115.6%	Dinas Kesehatan	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah lokasi pendistribusian obat (fasyankes)	12	Rp 510,556,789	12	Rp 252,896,000	12	Rp 77,940,000	3.0	Rp 13,100,000	25.0	16.8	3	Rp 13,100,000	25.0%	256.6%	Dinas Kesehatan	
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah RSUD dan Puskesmas yang akan dilakukan akreditasi/Reakreditasi (Fasyankes)	30	Rp 6,239,984,829	16	Rp 2,291,200	6	Rp 292,561,000	0.0	Rp -	0.0	0.0	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kasus Wabah (dokumen)	5	Rp 211,945,205	5	Rp 36,224,850	1	Rp 55,023,750	0.0	Rp 16,579,000	0.0	30.1	0	Rp 16,579,000	0.0%	782.2%	Dinas Kesehatan	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (%)	100	Rp 2,599,405,398	100	Rp 235,128,840	100	Rp 418,601,923	36.4	Rp 65,672,500	36.4	15.7	36	Rp 65,672,500	36.4%	252.6%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tersedianya Penyusunan Data Cakupan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dalam Profil Kesehatan dan ASPAK (dokumen)	225	Rp 928,630,379	260	Rp 104,263,800	45	Rp 178,408,000	20.0	Rp 65,672,500	44.4	36.8	20	Rp 65,672,500	8.9%	707.2%	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Tersedianya Data Kesehatan Secara Terintegrasi di Tingkat Puskesmas dan Pustu Berdasarkan Aplikasi (dokumen)	50	Rp 1,670,775,019	10	Rp 130,865,040	10	Rp 240,193,923	0.0	Rp -	0.0	0.0	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan (%)	100	Rp 24,624,814,815	100	Rp 95,511,800	100	Rp 5,946,172,200	25.6	Rp 1,898,116,070	25.6	31.9	26	Rp 1,898,116,070	25.6%	770.8%	Dinas Kesehatan	
		Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 230,566,071	100	Rp 29,250,800	100	Rp 29,308,000	34.0	Rp 9,330,950	34.0	31.8	34	Rp 9,330,950	34.0%	404.7%	Dinas Kesehatan	
		Pengedalian Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	jumlah Perizinan Tenaga Kesehatan yang diperiksa (Dokumen)	1175	Rp 230,566,071	1135	Rp 29,250,800	235	Rp 29,308,000	80.0	Rp 9,330,950	34.0	31.8	80	Rp 9,330,950	6.8%	404.7%	Dinas Kesehatan	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 24,394,248,744	100	Rp 66,261,000	100	Rp 46,294,600	0.0	Rp 19,285,120	0.0	41.7	0	Rp 19,285,120	0.0%	7.9%	Dinas Kesehatan	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta penyediaan tenaga kontrak (Dokumen)	5	Rp 24,029,704,237	4	Rp 46,261,000	1	Rp 46,294,600	0.0	Rp 19,285,120	0.0	41.7	0	Rp 19,285,120	0.0%	8.0%	Dinas Kesehatan	
			Tersedianya gaji Tenaga Kontrak (bulan)	60		60	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	0.0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Tersedianya Dana Hibah Untuk Organisasi PPNI, IBI dan YJI (organisasi)	10	Rp 364,544,507	2	Rp 20,000,000	0	Rp -	0.0	Rp -	0.0	0.0	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 308,550,470	100	Rp -	100	Rp 5,870,569,600	42.9	Rp 1,869,500,000	42.9	33.2	43	Rp 1,869,500,000	42.9%	60589.8%	Dinas Kesehatan	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya Petugas Kesehatan Dan Kader Dalam Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Screening Hypotiroid Kongenital (SHK), dan Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG) (orang)	465	Rp 308,550,470	384	Rp -	14	Rp 5,870,569,600	6.0	Rp 1,869,500,000	42.9	33.2	6	Rp 1,869,500,000	1.3%	60589.8%	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tingkat Pengawasan dan Tindakanjut terhadap Perizinan Usaha (%)	100	#REF!	100	Rp 224,830,282	100	Rp 14,930,940	21.4	Rp 3,000,000	21.4	20.1	21	Rp 3,000,000	21.4%	#REF!	Dinas Kesehatan	
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (%)	100	Rp 20,075,904	100	Rp 17,829,000	100	Rp 14,930,940	21.4	Rp 3,000,000	21.4	20.1	21	Rp 3,000,000	21.4%	1494.3%	Dinas Kesehatan	
		Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diperiksa (apotek/toko obat)	70	Rp 20,075,904	11	Rp 17,829,000	14	Rp 14,930,940	3.0	Rp 3,000,000	21.4	20.1	3	Rp 3,000,000	4.3%	1494.3%	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (%)	100	Rp 10,566,763,146	100	Rp 300,649,500	100	Rp 111,163,800	0.0	Rp -	0.0	0.0	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (%)	100	Rp 10,566,763,146	100	Rp 300,649,500	100	Rp 111,163,800	0.0	Rp -	0.0	0.0	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (DAK Non Fisik BOK Kabupaten) (%)	100	Rp 10,566,763,146	100	Rp 300,649,500	100	Rp 111,163,800	0.0	Rp -	0.0	0.0	0	Rp -	0.0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
		Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 27,806,086,122	90	Rp 26,002,369,153	90	Rp 4,920,960,300	40	Rp 2,131,578,041	44	43.3163023		Rp 28,063,928,194	0.0%	10092.7%	Dinas PU dan PR	
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 117,184,869	90	Rp 56,117,390	90	Rp 24,480,000	13	Rp 3,535,000	14	14.4403595		Rp 59,652,390	0.0%	5090.5%	Dinas PU dan PR	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 61,410,000	4	Rp 27,899,950	1	Rp 15,000,000	-	Rp 3,535,000	-	24	4	Rp 31,434,950	80.0%	5118.9%	Dinas PU dan PR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Rp 55,774,869	4	Rp 28,217,440	1	Rp 9,480,000	-	Rp -	-	0	4	Rp 28,217,440	80.0%	5059.2%	Dinas PU dan PR	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 16,304,908,808	90	Rp 18,943,049,693	90	Rp 2,621,810,500	38	Rp 1,126,731,266	42	42.9753129		Rp 20,069,780,959	0.0%	12309.0%	Dinas PU dan PR	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	Rp 16,237,752,708	76	Rp 18,910,049,693	14	Rp 2,609,710,500	8	Rp 1,126,731,266	57	43.1745692	84	Rp 20,036,780,959	120.0%	12339.6%	Dinas PU dan PR	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Rp 30,525,500	4	Rp 15,000,000	1	Rp 5,500,000	-	Rp -	-	0	4	Rp 15,000,000	80.0%	4913.9%	Dinas PU dan PR	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	Rp 24,420,400	6	Rp 12,000,000	2	Rp 4,400,000	-	Rp -	-	0	6	Rp 12,000,000	60.0%	4913.9%	Dinas PU dan PR	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Rp 12,210,200	7	Rp 6,000,000	4	Rp 2,200,000	-	Rp -	-	0	7	Rp 6,000,000	140.0%	4913.9%	Dinas PU dan PR	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 759,763,234	90	Rp 253,503,500	90	Rp 204,000,000	33	Rp 75,858,400	37	37.1854902		Rp 329,361,900	0.0%	4335.1%	Dinas PU dan PR	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Rp 759,763,234	24	Rp 253,503,500	12	Rp 204,000,000	6	Rp 75,858,400	50	37.1854902	30	Rp 329,361,900	50.0%	4335.1%	Dinas PU dan PR	
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 864,761,160	90	Rp 300,400,000	90	Rp 83,000,000	90	Rp 77,895,000	100	93.8493976		Rp 349,900,000	0.0%	4046.2%	Dinas PU dan PR	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	186	Rp 364,761,160	93	Rp 253,503,500	70	Rp 33,000,000	70	Rp 28,395,000	100	86.0454545	163	Rp 281,898,500	87.6%	7728.3%	Dinas PU dan PR	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	60	Rp 500,000,000	36	Rp 300,400,000	12	Rp 50,000,000	6	Rp 49,500,000	50	99	42	Rp 349,900,000	70.0%	6998.0%	Dinas PU dan PR	
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 2,441,304,251	90	Rp 2,598,101,345	90	Rp 889,341,800	45	Rp 395,344,275	50	44.4535807		Rp 2,951,821,620	0.0%	12091.2%	Dinas PU dan PR	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	60	Rp 488,844,374	24	Rp 159,685,224	12	Rp 145,761,800	6	Rp 64,728,050	50	44.4067307	30	Rp 224,413,274	50.0%	4590.7%	Dinas PU dan PR	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	60	Rp 604,510,000	72	Rp 181,309,860	12	Rp 25,000,000	6	Rp -	50	0	78	Rp 181,309,860	130.0%	2999.3%	Dinas PU dan PR	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	60	Rp 553,315,414	72	Rp 384,780,680	12	Rp 143,580,000	6	Rp 51,220,250	50	35.6736662	78	Rp 436,000,930	130.0%	7879.8%	Dinas PU dan PR	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	Rp 150,000,000	72	Rp 505,697,000	12	Rp 360,000,000	6	Rp 136,895,000	50	38.0263889	78	Rp 642,592,000	130.0%	42839.5%	Dinas PU dan PR	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	Rp 595,000,000	72	Rp 1,325,004,581	12	Rp 215,000,000	6	Rp 142,500,975	50	66.2795233	78	Rp 1,467,505,556	130.0%	24664.0%	Dinas PU dan PR	
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 1,404,477,090	90	Rp 733,384,000	90	Rp 285,000,000	8	Rp 25,200,000	9	8.84210526		Rp 758,584,000	0.0%	5401.2%	Dinas PU dan PR	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	37	Rp 498,212,000	52	Rp 733,384,000	15	Rp 285,000,000	1	Rp 25,200,000	7	8.84210526	53	Rp 758,584,000	143.2%	15226.1%	Dinas PU dan PR	
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 2,379,421,008	90	Rp 1,151,305,380	90	Rp 318,468,000	45	Rp 175,415,600	50	55.0810756		Rp 1,326,720,980	0.0%	5575.8%	Dinas PU dan PR	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	Rp 427,357,000	72	Rp 328,857,000	12	Rp 43,018,000	6	Rp 23,318,000	50	54.2052164	78	Rp 352,175,000	130.0%	8240.8%	Dinas PU dan PR	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Rp 1,582,516,200	56	Rp 530,000,000	12	Rp 143,200,000	6	Rp 118,000,000	50	82.4022346	62	Rp 648,000,000	103.3%	4094.7%	Dinas PU dan PR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Rp 369,547,808	72	Rp 292,448,380	12	Rp 132,250,000	6	Rp 34,097,600	50	25.7826843	78	Rp 326,545,980	130.0%	8836.4%	Dinas PU dan PR	
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 3,534,265,700	90	Rp 1,966,507,845	90	Rp 494,860,000	45	Rp 251,598,500	50	50.8423595		Rp 2,218,106,345	0.0%	6276.0%	Dinas PU dan PR	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	60	Rp 1,813,214,700	72	Rp 1,048,527,845	12	Rp 359,860,000	6	Rp 182,740,500	50	50.7809982	78	Rp 1,231,268,345	130.0%	6790.5%	Dinas PU dan PR	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar	60	Rp 1,660,000,000	72	Rp 917,980,000	12	Rp 135,000,000	6	Rp 68,858,000	50	51.0059259	78	Rp 986,838,000	130.0%	5944.8%	Dinas PU dan PR	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah	50	Rp 45,269,103,738	30	Rp 32,649,130,915	35	Rp 2,542,487,606	30	Rp 729,654,367	86	28.6984434		Rp 21,901,855,892	0.0%	4838.1%	Dinas PU dan PR	
		PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah	50	Rp 22,634,551,869	30	Rp 29,302,447,632	35	Rp 2,287,952,306	30	Rp 683,444,067	86	29.8714298		Rp 12,453,127,382	0.0%	5501.8%	Dinas PU dan PR	
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Tersedianya Prasarana Pengaman Pantai	45	Rp 10,424,351,869	12	Rp 11,769,683,315	7	Rp 2,287,952,306	2	Rp 683,444,067	29	29.8714298	14	Rp 12,453,127,382	31.1%	11946.2%	Dinas PU dan PR	
		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 100 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah	50	Rp 22,634,551,869	30	Rp 3,346,683,283	35	Rp 254,535,300	30	Rp 46,210,300	86	18.1547707		Rp 9,448,728,510	0.0%	4174.5%	Dinas PU dan PR	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Tersedianya Jaringan Irigasi Yang Mantap	20	Rp 13,476,901,869	5	Rp 9,402,518,210	2	Rp 254,535,300	-	Rp 46,210,300	-	18.1547707	5	Rp 9,448,728,510	25.0%	7011.1%	Dinas PU dan PR	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman	45	Rp 11,898,748,636	37.5	Rp 7,276,500,025	40.0	Rp 600,000,000	37.5	Rp 57,516,000	94	9.586		Rp 6,160,942,560	0.0%	5177.8%	Dinas PU dan PR	
		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman	45	Rp 11,898,748,636	37.5	Rp 7,276,500,025	40.0	Rp 600,000,000	37.5	Rp 57,516,000	94	9.586		Rp 6,160,942,560	0.0%	5177.8%	Dinas PU dan PR	
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Minum	3,850	Rp 10,000,000,000	853	Rp 6,103,426,560	60	Rp 600,000,000	-	Rp 57,516,000	-	9.586	853	Rp 6,160,942,560	22.2%	6160.9%	Dinas PU dan PR	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	80	Rp 10,257,421,636	63.3	Rp 8,206,111,040	69.87	Rp 386,096,700	63.3	Rp 386,096,700	91	100		Rp 7,203,445,700	0.0%	7022.7%	Dinas PU dan PR	
		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	80	Rp 10,257,421,636	63.3	Rp 8,206,111,040	69.87	Rp 386,096,700	63.3	Rp 386,096,700	91	100		Rp 7,203,445,700	0.0%	7022.7%	Dinas PU dan PR	
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Tersedianya Sistem Pengolahan Air Limbah dan MCK	1,500	Rp 7,850,848,716	600	Rp 6,817,349,000	1	Rp 386,096,700	-	Rp 386,096,700	-	100	600	Rp 7,203,445,700	40.0%	9175.4%	Dinas PU dan PR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan	45	Rp 13,686,151,479	25	Rp 3,698,328,600	30	Rp 421,848,030	25	Rp 343,960,450	83	81.5365785		Rp 4,042,289,050	0.0%	2953.6%	Dinas PU dan PR	
		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan	45	Rp 13,686,151,479		Rp 3,698,328,600	30	Rp 421,848,030	25	Rp 343,960,450	83	81.5365785		Rp 4,042,289,050	0.0%	2953.6%	Dinas PU dan PR	
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tersedianya Drainase Untuk Mengalirkan Genangan Air	113	Rp 13,686,151,479	19	Rp 3,698,328,600	2	Rp 421,848,030	2	Rp 343,960,450	100	81.5365785	21	Rp 4,042,289,050	18.6%	2953.6%	Dinas PU dan PR	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap	90	Rp 513,119,588,315	55	Rp 315,148,812,560	60	Rp 65,585,205,681	55	Rp 28,449,067,452	92	43.3772634		Rp 343,597,880,012	0.0%	6696.3%	Dinas PU dan PR	
		PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap	90	Rp 513,119,588,315	55	Rp 315,148,812,560	60	Rp 65,585,205,681	55	Rp 28,449,067,452	92	43.3772634		Rp 343,597,880,012	0.0%	6696.3%	Dinas PU dan PR	
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Bangunan Gedung Pemerintah	90	Rp 513,119,588,316	55	Rp 315,148,812,560	15	Rp 65,585,205,681	-	Rp 28,449,067,452	-	43.3772634	55	Rp 343,597,880,012	61.1%	6696.3%	Dinas PU dan PR	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.5	Rp 19,191,194,876	4.70	Rp 816,397,650	5.00	Rp 805,559,000	4.7	Rp 805,559,000	94	100		Rp 1,621,956,650	0.0%	845.2%	Dinas PU dan PR	
		PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.5	Rp 19,191,194,876	4.70	Rp 816,397,650	5.00	Rp 805,559,000	4.70	Rp 805,559,000	94	100		Rp 1,621,956,650	0.0%	845.2%	Dinas PU dan PR	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau dan Tugu Batas	15	Rp 16,791,194,876	7	Rp 816,397,650	1	Rp 805,559,000	1	Rp 805,559,000	100	100	8	Rp 1,621,956,650	53.3%	966.0%	Dinas PU dan PR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	43	Rp 67,037,660,955	41	Rp 293,709,975,054	41.5	Rp 61,408,200,677	41	Rp 16,008,200,044	99	26.0685053		Rp 309,718,175,098	0.0%	46200.6%	Dinas PU dan PR	
		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kemantapan Jalan	43	Rp 67,037,660,955	41	Rp 293,709,975,054	41.5	Rp 61,408,200,677	41	Rp 16,008,200,044	99	26.0685053		Rp 309,718,175,098	0.0%	46200.6%	Dinas PU dan PR	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	5	Rp 4,273,570,000	6	Rp 3,080,982,200	12	Rp 2,004,658,600	6	Rp 1,008,604,200	50	50.3130159	12	Rp 4,089,586,400	240.0%	9569.5%	Dinas PU dan PR	
		Pembangunan Jalan	Tersedianya Ruas Jalan Untuk Transportasi Masyarakat	32	Rp 11,891,280,954	7	Rp 16,900,947,872	1	Rp 8,532,873,450	0	Rp 4,888,346,250	-	57.288395	7	Rp 21,789,294,122	22.2%	18323.8%	Dinas PU dan PR	
		Rekonstruksi Jalan	Tersedianya Ruas Jalan Dalam Kondisi Mantap	50	Rp 12,500,000,000	115	Rp 214,573,367,192	11.7	Rp 27,207,095,400	1	Rp 1,903,362,367	9	6.99583083	116	Rp 216,476,729,559	231.0%	173181.4%	Dinas PU dan PR	
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Dalam Kondisi Mantap	50	Rp 12,500,000,000	32	Rp 51,015,997,390	7.3	Rp 20,458,145,060	2	Rp 7,402,459,060	27	36.1834323	34	Rp 58,418,456,450	68.0%	46734.8%	Dinas PU dan PR	
		Pembangunan Jembatan	Tersedianya Jembatan Untuk transportasi Masyarakat	19	Rp 11,500,000,000	10	Rp 7,533,324,900	1	Rp 2,400,000,000	-	Rp -	-	0	10	Rp 7,533,324,900	52.6%	6550.7%	Dinas PU dan PR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Rehabilitasi Jembatan	Tersedianya Jembatan Untuk transportasi Masyarakat	17	Rp 11,022,300,000	3	Rp 605,355,500	2	Rp 805,428,167	2	Rp 805,428,167	100	100	5	Rp 1,410,783,667	29.4%	1279.9%	Dinas PU dan PR	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan	50	Rp 2,473,753,067	20	Rp 8,603,161,066	27.5	Rp 508,479,500	20	Rp 169,321,500	73	33.2995725	20	Rp 1,759,275,520	40.0%	7111.8%	Dinas PU dan PR	
		PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan	50	Rp 580,000,000	20	Rp 390,956,000	27.5	Rp 146,100,000	20	Rp -	73	0	20	Rp 390,956,000	40.0%	6740.6%	Dinas PU dan PR	
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlatihnya Tenaga Terampil Konstruksi	170	Rp 670,000,000	80	Rp 390,956,000	50	Rp 146,100,000	-	Rp -	-	0	80	Rp 390,956,000	47.1%	5835.2%	Dinas PU dan PR	
		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan	50	Rp 1,225,000,000	20	Rp 967,661,720	27.5	Rp 118,500,000	20	Rp 8,700,000	73	7.34177215	20	Rp 525,641,120	40.0%	4290.9%	Dinas PU dan PR	
		Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Tersedianya Dokumen Basic Price/Satuan Harga	5	Rp 590,000,000	6	Rp 516,941,120	1	Rp 118,500,000	-	Rp 8,700,000	-	7.34177215	6	Rp 525,641,120	120.0%	8909.2%	Dinas PU dan PR	
		PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan	50	Rp 668,753,066	20	Rp 7,244,543,346	27.5	Rp 243,879,500	20	Rp 160,621,500	73	65.8610092	20	Rp 842,678,400	40.0%	12600.7%	Dinas PU dan PR	
		Pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Pekerjaan Fisik Kabupaten	60	Rp 668,753,066	24	Rp 682,056,900	12	Rp 243,879,500	6	Rp 160,621,500	50	65.8610092	30	Rp 842,678,400	50.0%	12600.7%	Dinas PU dan PR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	Rp 1,641,374,395	20	Rp 6,562,486,446	25	Rp 1,871,949,800	20	Rp 176,129,020	80	9.40885381	20	Rp 6,738,615,466	40.0%	41054.7%	Dinas PU dan PR	
		PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	Rp 410,343,597	20	Rp 235,042,000	25	Rp 50,000,000	20	Rp 10,019,170	80	20.03834	20	Rp 245,061,170	40.0%	5972.1%	Dinas PU dan PR	
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	500	Rp 410,343,597	525	Rp 235,042,000	85	Rp 50,000,000	-	Rp 10,019,170	-	20.03834	525	Rp 245,061,170	105.0%	5972.1%	Dinas PU dan PR	
		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	Rp 410,343,597	20	Rp 2,405,125,616	25	Rp 951,949,800	20	Rp 34,398,620	80	3.61349096		Rp 2,439,524,236	0.0%	59450.8%	Dinas PU dan PR	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kajian dan Peta Potensi Wilayah Tata Guna Lahan	5	Rp 410,343,597	6	Rp 2,405,125,616	2	Rp 951,949,800	-	Rp 34,398,620	-	3.61349096	6	Rp 2,439,524,236	120.0%	59450.8%	Dinas PU dan PR	
		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	Rp 410,343,603	20	Rp 1,026,860,950	25	Rp 490,000,000	20	Rp 62,370,920	80	12.7287592		Rp 1,089,231,870	0.0%	26544.4%	Dinas PU dan PR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Optimal Kinerja Dalam Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Pesisir Barat	60	Rp 205,171,802	24	Rp 547,474,750	12	Rp 175,000,000	6	Rp 49,139,000	50	28.0794286	30	Rp 596,613,750	50.0%	29078.7%	Dinas PU dan PR	
		Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Web SITARU	60	Rp 205,171,802	24	Rp 479,386,200	12	Rp 315,000,000	6	Rp 13,231,920	50	4.20060952	30	Rp 492,618,120	50.0%	24010.0%	Dinas PU dan PR	
		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	Rp 410,343,597	20	Rp 2,895,457,880	25	Rp 380,000,000	20	Rp 69,340,310	80	18.24745	20	Rp 2,964,798,190	40.0%	72251.6%	Dinas PU dan PR	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kajian Wilayah Cepat Tumbuh dan Peta Investasi	5	Rp 410,343,597	3	Rp 2,895,457,880	1	Rp 380,000,000	-	Rp 69,340,310	-	18.24745	3	Rp 2,964,798,190	60.0%	72251.6%	Dinas PU dan PR	
		Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95.00	20,160,733,730.00	90.00	1,869,681,043.00	90.00	2,298,109,000.00	45.43	809,415,558.00	50.47	35.22	45.43	809,415,558.00	47.8%	4.0%	Dinas PR dan KP	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	95.00	22,500,000.00	90.00	4,397,850.00	90.00	4,398,000.00	45.00	2,108,000.00	50.00	47.93	45.00	2,108,000.00	47.4%	9.4%	Dinas PR dan KP	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.00	5,000,000.00	2.00	897,960.00	2.00	898,000.00	1.00	446,000.00	50.00	49.67	1.00	446,000.00	10.0%	8.9%	Dinas PR dan KP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.00	17,500,000.00	4.00	3,499,890.00	4.00	3,500,000.00	2.00	1,662,000.00	50.00	47.49	2.00	1,662,000.00	10.0%	9.5%	Dinas PR dan KP	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	95.00	17,152,477,730.00	90.00	1,276,669,612.00	90.00	1,771,177,400.00	48.21	621,848,203.00	53.57	35.11	48.21	621,848,203.00	50.8%	3.6%	Dinas PR dan KP	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70.00	17,119,977,730.00	14.00	1,270,374,362.00	14.00	1,764,877,400.00	8.00	620,439,203.00	57.14	35.15	8.00	620,439,203.00	11.4%	3.6%	Dinas PR dan KP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.00	10,000,000.00	1.00	1,998,900.00	1.00	2,000,000.00	0.50	-	50.00	-	0.50	-	10.0%	0.0%	Dinas PR dan KP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60.00	17,500,000.00	12.00	3,496,750.00	12.00	3,500,000.00	6.00	1,409,000.00	50.00	40.26	6.00	1,409,000.00	10.0%	8.1%	Dinas PR dan KP	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.00	5,000,000.00	2.00	799,600.00	1.00	800,000.00	0.50	-	50.00	-	0.50	-	5.0%	0.0%	Dinas PR dan KP	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	95.00	100,000,000.00	0.90	20,000,000.00	90.00	20,000,000.00	45.00	-	50.00	-	45.00	-	47.4%	0.0%	Dinas PR dan KP	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60.00	100,000,000.00	12.00	20,000,000.00	4.00	20,000,000.00	2.00	-	50.00	-	2.00	-	3.3%	0.0%	Dinas PR dan KP	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	95.00	1,402,000,000.00	90.00	307,543,298.00	90.00	275,369,600.00	44.77	104,866,105.00	49.74	38.08	44.77	104,866,105.00	47.1%	7.5%	Dinas PR dan KP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.00	50,000,000.00	12.00	9,066,200.00	12.00	4,809,600.00	6.00	-	50.00	-	6.00	-	10.0%	0.0%	Dinas PR dan KP	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5.00	125,000,000.00	1.00	24,999,850.00	1.00	25,000,000.00	0.50	-	-	-	0.50	-	10.0%	0.0%	Dinas PR dan KP	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60.00	250,000,000.00	12.00	50,145,498.00	12.00	50,160,000.00	6.00	23,986,000.00	50.00	47.82	6.00	23,986,000.00	10.0%	9.6%	Dinas PR dan KP	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	720.00	72,000,000.00	144.00	14,400,000.00	144.00	14,400,000.00	72.00	6,000,000.00	50.00	41.67	72.00	6,000,000.00	10.0%	8.3%	Dinas PR dan KP	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.00	55,000,000.00	11.00	11,000,000.00	11.00	11,000,000.00	5.00	4,000,000.00	45.45	36.36	5.00	4,000,000.00	9.1%	7.3%	Dinas PR dan KP	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	60.00	850,000,000.00	12.00	197,931,750.00	12.00	170,000,000.00	6.00	70,880,105.00	50.00	41.69	6.00	70,880,105.00	10.0%	8.3%	Dinas PR dan KP	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pendukung Kinerja	95.00	287,756,000.00	90.00	20,000,000.00	90.00	71,400,000.00	45.00	-	50.00	-	45.00	-	47.4%	0.0%	Dinas PR dan KP	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	60.00	287,756,000.00	4.00	20,000,000.00	9.00	71,400,000.00	4.50	-	50.00	-	4.50	-	7.5%	0.0%	Dinas PR dan KP	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	95.00	621,000,000.00	90.00	162,798,888.00	90.00	65,774,000.00	45.00	35,963,000.00	50.00	54.68	45.00	35,963,000.00	47.4%	5.8%	Dinas PR dan KP	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60.00	156,000,000.00	12.00	40,437,888.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	Dinas PR dan KP	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15.00	415,000,000.00	3.00	113,000,000.00	2.00	57,000,000.00	1.00	32,500,000.00	50.00	57.02	1.00	32,500,000.00	6.7%	7.8%	Dinas PR dan KP	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60.00	50,000,000.00	12.00	9,361,000.00	12.00	8,774,000.00	6.00	3,463,000.00	50.00	39.47	6.00	3,463,000.00	10.0%	6.9%	Dinas PR dan KP	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang dalam Kondisi Baik	95.00	575,000,000.00	90.00	78,271,395.00	90.00	89,990,000.00	45.00	44,630,250.00	50.00	49.59	45.00	44,630,250.00	47.4%	7.8%	Dinas PR dan KP	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10.00	320,000,000.00	2.00	60,511,395.00	2.00	64,000,000.00	1.00	38,750,250.00	50.00	60.55	1.00	38,750,250.00	10.0%	12.1%	Dinas PR dan KP	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	60.00	5,000,000.00	12.00	1,000,000.00	12.00	1,000,000.00	6.00	-	50.00	-	6.00	-	10.0%	0.0%	Dinas PR dan KP	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	80.00	250,000,000.00	12.00	16,760,000.00	16.00	24,990,000.00	8.00	5,880,000.00	50.00	23.53	8.00	5,880,000.00	10.0%	2.4%	Dinas PR dan KP	
		Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	90.00	1,316,389,656.00	86.00	156,079,398.00	87.00	189,850,000.00	41.89	40,810,060.00	48.15	21.50	41.89	40,810,060.00	46.5%	3.1%	Dinas PR dan KP	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau relokasi Program Kb/Kota	90.00	438,796,552.00	-	-	87.00	100,000,000.00	43.50	-	50.00	-	43.50	-	48.3%	0.0%	Dinas PR dan KP	
		Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Bagi Korrban Bencana Kabupaten/Kota yang terbangun	60.00	438,796,552.00	-	-	12.00	100,000,000.00	6.00	-	50.00	-	6.00	-	10.0%	0.0%	Dinas PR dan KP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Cakupan Pengelolaan Rumah Susun	60.00	438,796,552.00			12.00	23,052,000.00	6.00	-	50.00	-	6.00	-	10.0%	0.0%	Dinas PR dan KP	
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	60.00	438,796,552.00	-	-	12.00	23,052,000.00	6.00	-	50.00	-	6.00	-	10.0%	0.0%	Dinas PR dan KP	
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	90.00	438,796,552.00	12.00	156,079,398.00	87.00	66,798,000.00	41.89	40,810,060.00	48.15	61.09	41.89	40,810,060.00	46.5%	9.3%	Dinas PR dan KP	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	90.00	438,796,552.00	12.00	156,079,398.00	27.00	66,798,000.00	13.00	40,810,060.00	48.15	61.09	13.00	40,810,060.00	14.4%	9.3%	Dinas PR dan KP	
		Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	50.00	851,382,424.00	1.00	100,914,700.00	38.75	307,173,400.00	19.38	39,809,050.00	50.00	12.96	19.38	39,809,050.00	38.8%	4.7%	Dinas PR dan KP	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	6.00	851,382,424.00	1.00	100,914,700.00	2.00	307,173,400.00	1.00	39,809,050.00	50.00	12.96	1.00	39,809,050.00	16.7%	4.7%	Dinas PR dan KP	
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	6.00	425,691,212.00	-	-	1.00	124,430,000.00	0.50	5,501,000.00	50.00	4.42	0.50	5,501,000.00	8.3%	1.3%	Dinas PR dan KP	
		Penyusunan Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKPyang tersusun/terreview/terlegalisasi	6.00	425,691,212.00	1.00	100,914,700.00	2.00	182,743,400.00	1.00	34,308,050.00	50.00	18.77	1.00	34,308,050.00	16.7%	8.1%	Dinas PR dan KP	
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Permukiman yang tertata	60.00	425,691,212.00	-	-	8.00	211,132,000.00	4.00	14,412,950.00	50.00	6.83	4.00	14,412,950.00	6.7%	3.4%	Dinas PR dan KP	
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	21.00	425,691,212.00	-	-	8.00	211,132,000.00	4.00	14,412,950.00	50.00	6.83	4.00	14,412,950.00	19.0%	3.4%	Dinas PR dan KP	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Layak Huni Untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang diperbaiki	21.00	425,691,212.00	-	-	8.00	211,132,000.00	4.00	14,412,950.00	50.00	6.83	4.00	14,412,950.00	19.0%	3.4%	Dinas PR dan KP	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	60.00	5,984,406,692.00	4.00	746,926,400.00	40.00	787,462,905.00	20.00	782,629,905.00	50.00	99.39	20.00	782,629,905.00	33.3%	13.1%	Dinas PR dan KP	
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan Yang Sudah dilengkapi PSU	24.00	5,034,872,948.00	4.00	746,926,400.00	4.00	787,462,905.00	2.00	782,629,905.00	50.00	99.39	2.00	782,629,905.00	8.3%	15.5%	Dinas PR dan KP	
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan PSU yang menunjang Fungsi Hunian	24.00	5,034,872,948.00	4.00	746,926,400.00	1.00	787,462,905.00	0.50	782,629,905.00	50.00	99.39	0.50	782,629,905.00	2.1%	15.5%	Dinas PR dan KP	
		Bidang Pertanian																	
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rasio Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan lainnya	11,50	33,123,112,050.00	10.00	9,651,896,350.00	10.50	3,786,391,000.00	5.25	241,015,750.00	50.00	6.37	5.25	241,015,750.00	#VALUE!	0.7%	Dinas PR dan KP	
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Kerugian	11,50	33,123,112,050.00	10.00	9,651,896,350.00	10.50	3,786,391,000.00	5.25	241,015,750.00	50.00	6.37	5.25	241,015,750.00	#VALUE!	0.7%	Dinas PR dan KP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas Tanah	11,50	33,123,112,050.00	10.00	9,651,896,350.00	4.00	3,786,391,000.00	2.00	241,015,750.00	50.00	6.37	2.00	241,015,750.00	#VALUE!	0.7%	Dinas PR dan KP	
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Cakupan Pemanfaatan Tanah Kosong	9.50	1,752,548,326.00	0.80	136,671,950.00	1.85	153,780,000.00	0.37	43,919,750.00	20.00	28.56	0.37	43,919,750.00	3.9%	2.5%	Dinas PR dan KP	
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	9.50	1,752,548,326.00	0.80	136,671,950.00	1.85	153,780,000.00	0.37	43,919,750.00	20.00	28.56	0.37	43,919,750.00	3.9%	2.5%	Dinas PR dan KP	
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Sertifikat Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang diinventarisasi	235.00	1,752,548,326.00	64.00	136,671,950.00	80.00	153,780,000.00	16.00	43,919,750.00	20.00	28.56	16.00	43,919,750.00	6.8%	2.5%	Dinas PR dan KP	
		Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		95%	27,261,310,419	100	3,985,576,600	100	4,622,939,400	50%	1,997,817,039	43%	43%	50%		52.8%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	12,294,239,750	100	2,197,112,400	100	2,549,120,300	51%	1,112,380,110	44%	51%	51%	1,112,380,110	53.3%	9.0%	Satpol PP dan Damkar	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	9,569,018,936	100	1,807,045,400	100	2,063,439,400	46%	836,674,201	41%	41%	46%	836,674,201	0.5%	8.7%	Satpol PP dan Damkar	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedia gaji dan tunjangan asn	70	9,569,018,936	14	1,807,045,400	13	2,063,439,400	8	836,674,201	62%	41%	800%	836,674,201	11.4%	8.7%	Satpol PP dan Damkar	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	324,000,000	100	-	100	81,000,000	0%	-	0%	0%	0%	0	0.0%	0.0%	Satpol PP dan Damkar	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	324,000,000	1	-	1	81,000,000	1	-	100%	0%	1.00	0	25.0%	0.0%	Satpol PP dan Damkar	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	621,820,814	100	134,942,000	100	145,713,900	74%	100,265,180	1%	69%	74%	100,265,180	0.7%	16.1%	Satpol PP dan Damkar	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	52,627,600	0	-	12	13,156,900	6	6,960,900	50%	53%	6.00	6,960,900	12.5%	13.2%	Satpol PP dan Damkar	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedia bahan logistik pameran	1	125,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	100%	100%	1.00	25,000,000	100.0%	20.0%	Satpol PP dan Damkar	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak ,penggandaan dan alat tulis kantor	60	87,820,814	12	14,942,000	12	15,557,000	6	8,005,000	50%	51%	6.00	8,005,000	10.0%	9.1%	Satpol PP dan Damkar	
		Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja SPPD Luar Daerah dan Dalam Daerah	60	409,000,000	12	95,000,000	12	92,000,000	6	60,299,280	50%	66%	6.00	60,299,280	10.0%	14.7%	Satpol PP dan Damkar	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100	717,000,000	100	111,897,000	100	111,897,000	78%	87,015,729	1%	78%	78%	87,015,729	0.8%	12.1%	Satpol PP dan Damkar	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja listrik dan internet	60	58,000,000	12	9,600,000	12	9,600,000	6	3,422,729	50%	36%	6.00	3,422,729	10.0%	5.9%	Satpol PP dan Damkar	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapana Kantor	tersedia sewa gedung kantor, sewa rumah dinas dan sewa mobil dinas sekretaris	60	630,000,000	12	101,000,000	12	101,000,000	6	83,000,000	50%	82%	6.00	83,000,000	10.0%	13.2%	Satpol PP dan Damkar	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	peralatan kebersihan dan iuran kebersihan kantordan sewa mobil dinas sekretaris	60	29,000,000	12	1,297,000	12	1,297,000	6	593,000	50%	46%	6.00	593,000	10.0%	2.0%	Satpol PP dan Damkar	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100	1,062,400,000	100	143,228,000	100	147,070,000	62%	88,425,000	1%	60%	62%	88,425,000	0.6%	8.3%	Satpol PP dan Damkar	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja pemelahaaraan kendaraan dinas	60	1,045,000,000	12	143,228,000	12	142,720,000	6	85,425,000	50%	60%	6.00	85,425,000	10.0%	8.2%	Satpol PP dan Damkar	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	17,400,000	12	-	1	4,350,000	1	3,000,000	100%	69%	1.00	3,000,000	25.0%	17.2%	Satpol PP dan Damkar	
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	persentase gangguan tribum yang terselesaikan	100	11,305,381,808	100	1,245,684,200	100	1,554,259,100	49%	612,139,600	0%	39%	49%	612,139,600	0.5%	5.4%	Satpol PP dan Damkar	
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan	100	10,505,000,000	100	1,190,237,200	100	1,509,957,200	50%	590,591,200	0%	39%	50%	590,591,200	0.5%	5.6%	Satpol PP dan Damkar	
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)	Terlaksana Piket Pengamanan Kantor /rumah dinas, pengawalan pejabat vvip dan pengamanan trantibum	60	10,407,000,000	12	1,177,137,200	12	1,496,857,200	6	585,471,200	50%	39%	6.00	585,471,200	10.0%	5.6%	Satpol PP dan Damkar	
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksana pengamanan Idul fitri dan Natal Tahun Baru	40	68,000,000	8	8,000,000	8	8,000,000	4	5,120,000	50%	64%	4.00	5,120,000	10.0%	7.5%	Satpol PP dan Damkar	
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedia ganti rugi atas dampak penegakan perda dan perkada	5	30,000,000	12	5,100,000	1	5,100,000	0	-	0%	0%	0.00	0	0.0%	0.0%	Satpol PP dan Damkar	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase gangguan tribum yang terselesaikan	100	490,000,000	100	46,297,000	100	35,151,900	40%	18,546,400	0%	53%	0.40	18,546,400	0.4%	3.8%	Satpol PP dan Damkar	
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	pengawasan dan monitoring atas penegakan perda	60	490,000,000	12	46,297,000	12	35,151,900	6	18,546,400	50%	53%	6.00	18,546,400	10.0%	3.8%	Satpol PP dan Damkar	
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	persentase gangguan tribum yang terselesaikan	100	310,381,808	100	9,150,000	100	9,150,000	100	3,002,000	100%	33%	100.00	3,002,000	100.0%	1.0%	Satpol PP dan Damkar	
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	terlaksana operasional dan kesekretariatian PPNS	60	310,381,808	12	9,150,000	12	9,150,000	6	3,002,000	50%	33%	6.00	3,002,000	10.0%	1.0%	Satpol PP dan Damkar	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pemadam dan penyelamatan kebakaran	100	3,661,688,861	100	542,780,000	100	519,560,000	50%	273,297,329	1%	53%	50%	273,297,329	0.5%	7.5%	Satpol PP dan Damkar	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan pemadam dan penyelamatan kebakaran	100	3,661,688,861	12	542,780,000	100	519,560,000	50%	273,297,329	1%	53%	50%	273,297,329	0.5%	7.5%	Satpol PP dan Damkar	
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksana operasional pemadaman kebakaran	60	3,661,688,861	12	542,780,000	12	519,560,000	6	273,297,329	50%	53%	6.00	273,297,329	10.0%	7.5%	Satpol PP dan Damkar	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11= 10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	95%	9,000,310,409	83%	1,889,978,780	100%	2,595,986,900	41%	1,052,892,803	41%	41%	123%	2,942,871,583	129.9%	32.7%	BPBD	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu	15	31,697,123	100%	5,800,000	100%	5,800,000	26%	1,500,000	26%	26%	126%	7,300,000	8.4%	23.0%	BPBD	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	7,500,000	2	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	100%	100%	3	3,000,000	30.0%	40.0%	BPBD	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	3,700,000	1	700,000	1	700,000	0	-	0%	0%	1	700,000	20.0%	18.9%	BPBD	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	3,700,000	1	700,000	1	700,000	0	-	0%	0%	1	700,000	20.0%	18.9%	BPBD	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	3,700,000	1	700,000	1	700,000	0	-	0%	0%	1	700,000	20.0%	18.9%	BPBD	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	3,500,000	1	700,000	1	700,000	0	-	0%	0%	1	700,000	20.0%	20.0%	BPBD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	9,597,123	1	1,500,000	2	1,500,000	0	-	0%	0%	1	1,500,000	10.0%	15.6%	BPBD	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan yang Ada	100%	5,592,364,628	80%	1,422,572,563	100%	2,026,986,900	41%	836,549,043	41%	41%	122%	2,259,121,606	121.6%	40.4%	BPBD	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	5,578,664,628	14	1,419,822,563	14	2,023,486,900	8	836,549,043	57%	41%	22	2,256,371,606	31.4%	40.4%	BPBD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	5,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	0	-	0%	0%	1	1,000,000	20.0%	20.0%	BPBD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	80	3,700,000	18	750,000	18	1,500,000	0	-	0%	0%	18	750,000	22.5%	20.3%	BPBD	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	0	-	0%	0%	1	1,000,000	20.0%	20.0%	BPBD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	50,000,000	0%	-	100%	30,000,000	6%	1,920,000	6%	6%	6%	1,920,000	6.4%	3.8%	BPBD	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14	50,000,000	0	-	12	30,000,000	4	1,920,000	33%	6%	4	1,920,000	28.6%	3.8%	BPBD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	65	1,009,000,000	98%	186,935,440	100%	196,093,000	28%	55,627,300	28%	28%	126%	242,562,740	1.9%	24.0%	BPBD	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	54,000,000	12	8,178,040	1	11,326,600	1	5,329,800	47%	47%	13	13,507,840	21.7%	25.0%	BPBD	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	125,000,000	1	21,000,000	1	25,000,000	0	-	0%	0%	1	21,000,000	20.0%	16.8%	BPBD	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	75,000,000	12	13,873,000	1	16,763,000	1	5,203,000	31%	31%	13	19,076,000	21.7%	25.4%	BPBD	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50	60,000,000	10	12,000,000	10	12,000,000	10	4,000,000	33%	33%	20	16,000,000	40.0%	26.7%	BPBD	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	55,000,000	11	11,000,000	11	11,000,000	4	4,000,000	36%	36%	15	15,000,000	27.3%	27.3%	BPBD	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	640,000,000	12	120,884,400	12	120,003,400	5	37,094,500	42%	31%	17	157,978,900	28.3%	24.7%	BPBD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	611,898,658	88%	101,970,777	100%	139,687,000	60%	83,816,460	60%	60%	148%	185,787,237	148.0%	30.4%	BPBD	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	83,844,000	12	9,602,777	12	13,080,000	5	4,516,460	42%	35%	17	14,119,237	28.3%	16.8%	BPBD	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	460,000,000	3	81,500,000	3	107,000,000	2	79,000,000	67%	74%	5	160,500,000	8.3%	34.9%	BPBD	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	68,054,658	12	10,868,000	12	19,607,000	5	300,000	2%	2%	17	11,168,000	28.3%	16.4%	BPBD	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100%	1,705,350,000	88%	172,700,000	100%	197,420,000	37%	73,480,000	37%	37%	125%	246,180,000	124.9%	14.4%	BPBD	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	272,500,000	1	40,500,000	1	38,920,000	1	17,480,000	45%	45%	2	57,980,000	200.0%	21.3%	BPBD	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	1,143,600,000	14	99,200,000	14	108,500,000	14	24,000,000	22%	22%	28	123,200,000	200.0%	10.8%	BPBD	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	154,250,000	12	18,000,000	10	25,000,000	4	7,000,000	40%	28%	16	25,000,000	26.7%	16.2%	BPBD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	135,000,000	12	15,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	100%	100%	14	40,000,000	700.0%	29.6%	BPBD	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penanggulangan bencana daerah	100%	2,728,500,200	97%	221,944,500	100%	677,500,000	27%	182,299,825	27%	27%	124%	404,244,325	123.8%	14.8%	BPBD	
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	321,948,200	0%	-	100%	79,522,000	25%	20,182,875	25%	25%	25%	20,182,875	25.4%	6.3%	BPBD	
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	15	321,948,200	0	-	30	79,522,000	0	20,182,875	0%	25%	0	20,182,875	0.0%	6.3%	BPBD	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	1,349,848,800	99%	168,654,500	100%	377,207,000	26%	99,280,950	26%	26%	125%	267,935,450	125.0%	19.8%	BPBD	
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	25	722,350,400	5	122,289,000	2	215,559,000	0	65,417,750	0%	30%	5	187,706,750	20.0%	26.0%	BPBD	
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah paket bahan material	60	627,498,400	12	46,365,500	12	161,648,000	3	33,863,200	25%	21%	15	80,228,700	25.0%	12.8%	BPBD	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	1,056,703,200	92%	53,290,000	100%	220,771,000	28%	62,836,000	28%	28%	121%	116,126,000	120.9%	11.0%	BPBD	
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	15	460,890,000	3	23,290,000	10	98,271,000	5	33,616,250	50%	34%	8	56,906,250	53.3%	12.3%	BPBD	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60	595,813,200	12	30,000,000	10	122,500,000	4	29,219,750	40%	24%	16	59,219,750	26.7%	9.9%	BPBD	
		Bidang Sosial																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	10,366,724,768	84%	1,749,294,956	100%	2,507,458,100	46%	1,140,902,291	46%	45.50	84%	1,746,851,956	84.0%	1685.1%	Dinas Sosial	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	32,000,000	100%	6,400,000	100%	6,400,000	50%	2,134,000	50%	33.34	100%	6,400,000	100.0%	2000.0%	Dinas Sosial	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	10	7,000,000	2	1,400,000	2	1,400,000	1	742,000	50%	53.00	100%	1,400,000	10.0%	2000.0%	Dinas Sosial	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	25,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	1	1,392,000	50%	27.84	100%	5,000,000	10.0%	2000.0%	Dinas Sosial	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	8,703,221,754	79%	1,242,275,690	100%	2,047,870,100	41%	884,056,329	41%	43.17	79%	1,242,275,690	79.0%	1427.4%	Dinas Sosial	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	8,675,721,754	14	1,236,775,690	14	2,042,370,100	7	884,056,329	50%	43.29	79%	1,236,775,690	1.1%	1425.6%	Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	12,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	0	-	0%	-	100%	2,500,000	20.0%	2000.0%	Dinas Sosial	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya laporan keuangan semester	5	10,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	0	-	0%	-	100%	2,000,000	20.0%	2000.0%	Dinas Sosial	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	0	-	0%	-	100%	1,000,000	20.0%	2000.0%	Dinas Sosial	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100%	372,001,014	100%	228,546,761	100%	221,398,000	48%	113,436,400	48%	51.24	100%	226,103,761	100.0%	6078.0%	Dinas Sosial	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	125,000,000	12	2,443,000	1	25,000,000	0	-	0%	-	0%	24,987,600	0.0%	1999.0%	Dinas Sosial	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	187,001,014	1	24,987,600	12	53,398,000	6	25,482,000	50%	47.72	100%	38,229,250	1.7%	2044.3%	Dinas Sosial	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan undangan	Jumlah SKHU	60	60,000,000	12	38,229,250	12	12,000,000	6	5,000,000	50%	41.67	100%	12,000,000	1.7%	2000.0%	Dinas Sosial	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	55,000,000	12	12,000,000	11	11,000,000	5	5,000,000	45%	45.45	100%	11,000,000	1.8%	2000.0%	Dinas Sosial	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	845,000,000	11	11,000,000	12	120,000,000	6	77,954,400	50%	64.96	100%	139,886,911	1.7%	1655.5%	Dinas Sosial	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100%	453,000,000	12	139,886,911	100%	26,000,000	33%	7,500,000	33%	28.85	100%	15,000,000	100.0%	331.1%	Dinas Sosial	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	58	453,000,000	100%	15,000,000	6	26,000,000	2	7,500,000	33%	28.85	100%	15,000,000	1.7%	331.1%	Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100%	924,225,000	2	15,000,000	100%	112,720,000	50%	80,985,562	50%	71.85	100%	173,481,986	100.0%	1877.1%	Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	120,000,000	100%	173,481,986	12	15,000,000	6	4,685,562	50%	31.24	100%	13,780,986	1.7%	1148.4%	Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	60	785,000,000	12	13,780,986	12	97,000,000	6	76,000,000	50%	78.35	100%	157,000,000	1.7%	2000.0%	Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	19,225,000	12	157,000,000	12	720,000	6	300,000	50%	41.67	100%	2,701,000	1.7%	1404.9%	Dinas Sosial	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100%	806,502,000	12	2,701,000	100%	93,070,000	50%	52,790,000	50%	56.72	100%	83,590,519	100.0%	1036.5%	Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	10	398,792,000	100%	83,590,519	2	58,400,000	1	36,435,000	50%	62.39	100%	53,420,519	10.0%	1339.6%	Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	20	335,960,000	2	53,420,519	4	24,920,000	2	14,480,000	50%	58.11	100%	22,420,000	5.0%	667.3%	Dinas Sosial	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	71,750,000	4	22,420,000	12	9,750,000	6	1,875,000	50%	19.23	100%	7,750,000	1.7%	1080.1%	Dinas Sosial	
		Program Pemberdayaan Sosial	Terdatanya Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	100%	1,553,029,692	12	7,750,000	100%	205,177,000	100%	55,180,000	100%	26.89	100%	191,212,500	100.0%	1231.2%	Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas bagi PSKS	100%	1,553,029,692	100%	63,986,000	100%	205,177,000	50%	55,180,000	50%	26.89	100%	191,212,500	100.0%	1231.2%	Dinas Sosial	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	tersedianya operasional TKSK dan PSM	645	1,553,029,692	100%	63,986,000	12	205,177,000	6	55,180,000	50%	26.89	100%	191,212,500	0.2%	1231.2%	Dinas Sosial	
		Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Sosial	100%	16,771,568,200	56%	63,986,000	100%	3,952,109,000	56%	1,545,577,000	56%	39.11	56%	2,427,904,300	56.0%	1447.6%	Dinas Sosial	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang menerima bantuan	100%	473,315,000	100%	54,290,000	100%	165,000,000	17%	27,960,500	17%	16.95	100%	54,290,000	100.0%	1147.0%	Dinas Sosial	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan nya diluar panti	130	216,870,000	26	20,571,000	26	82,045,000	0	8,486,000	0%	10.34	100%	20,571,000	0.8%	948.5%	Dinas Sosial	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	285	256,445,000	12	33,719,000	12	70,584,000	0	14,474,500	0%	20.51	100%	33,719,000	0.4%	1314.9%	Dinas Sosial	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah ODGJ yang dilayani dengan Bimbingan Sosial	50	180,000,000	10	9,696,000	10	12,371,000	5	5,000,000	50%	40.42	97%	9,696,000	1.9%	538.7%	Dinas Sosial	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/Aids dan Nafza di Luar Panti sosial	Persentase PMKS yang tertangani	100%	16,298,253,200	56%	2,373,614,300	100%	3,787,109,000	56%	1,517,616,500	56%	40.07	56%	2,373,614,300	56.0%	1456.4%	Dinas Sosial	
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah pelayanan data	5000	1,520,836,000	500	102,235,000	500	98,850,000	200	32,995,500	40%	33.38	100%	102,235,000	0.0%	672.2%	Dinas Sosial	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya Fasilitas Santunan Kematian	12	90,417,200	12	5,859,300	12	10,859,000	6	2,621,000	50%	24.14	100%	5,859,300	8.3%	648.0%	Dinas Sosial	
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	tersedianya Hibah bantuan sosial	6235	14,687,000,000	948	2,265,520,000	2879	3,677,400,000	948	1,482,000,000	33%	40.30	54%	2,265,520,000	0.0%	1542.5%	Dinas Sosial	
		Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesi	tersedianya Hibah	90	3,025,000,000	10	515,000,000	20	405,000,000	0	-	0%	-	54%	2,265,520,000	0.6%	7489.3%	Dinas Sosial	
		Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	tersedianya bantuan sosial	6145	11,662,000,000	938	1,750,520,000	2859	3,272,400,000	2404	1,482,000,000	84%	45.29	54%	2,265,520,000	0.0%	1942.7%	Dinas Sosial	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	cakupan perlindungan dan jaminan perlindungan sosial daerah	100%	2,118,183,115	97%	188,003,620	100%	213,339,000	23%	69,689,500	23%	32.67	97%	188,003,620	97.0%	887.6%	Dinas Sosial	
		Pengelolaan Data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran dan data terpadu penanggulangan kemiskinan	100%	2,118,183,115	97%	188,003,620	100%	213,339,000	23%	69,689,500	23%	32.67	97%	188,003,620	97.0%	887.6%	Dinas Sosial	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	tersedianya laporan data fakir miskin	5	1,281,805,382	1	107,895,000	1	130,043,000	1	47,214,500	100%	36.31	100%	107,895,000	20.0%	841.7%	Dinas Sosial	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	60	836,377,733	12	80,108,620	12	83,296,000	2	22,475,000	17%	26.98	93%	80,108,620	1.6%	957.8%	Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Penanganan Bencana	Cakupan pemenuhan pasca Bencana	100%	573,625,420	100%	41,687,000	100%	51,687,000	17%	16,922,500	17%	32.74	100%	41,687,000	100.0%	726.7%	Dinas Sosial	
		Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	100%	573,625,420	100%	41,687,000	100%	51,687,000	17%	16,922,500	17%	32.74	100%	41,687,000	100.0%	726.7%	Dinas Sosial	
		koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Meningkatnya Fungsi Taruna Siaga Bencana	60	573,625,420	12	41,687,000	12	51,687,000	2	16,922,500	17%	32.74	100%	41,687,000	1.7%	726.7%	Dinas Sosial	
		Bidang Tenaga Kerja		100%	#REF!	90%	#REF!	90%	#REF!	90%	#REF!	100.00	#REF!	90%	#REF!	90.0%	#REF!	Dinas Trans, Naker	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	12,828,964,489	90%	1,517,513,894	90%	2,085,903,300	90%	925,237,726	100.00	44.36	90%	925,237,726	90.0%	9792.1%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	50,750,000	100%	7,499,900	100%	7,500,000	50%	3,144,000	50.00	42	50%	3,144,000	50.0%	1218.0%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	10	20,750,000	2	2,499,900	2	2,500,000	1	1,144,000	50.00	45.76	1	1,144,000	10.0%	551.3%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	10	30,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	1	2,000,000	50.00	40	1	2,000,000	10.0%	666.7%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	7,546,754,500	100%	1,154,559,225	100%	1,684,099,800	47%	755,452,741	47.06	44.86	47%	755,452,741	47.1%	3699.0%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	70	7,492,254,500	14	1,144,559,225	14	1,674,099,800	8	750,705,741	57.14	44.84	8	750,705,741	11.4%	1002.0%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	5	19,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	0	-	0.00	0	0	-	0.0%	0.0%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	5	18,500,000	1	5,000,000	1	5,000,000	0	2,747,000	0.00	55	0	2,747,000	0.0%	1484.9%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	5	16,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	0	2,000,000	0.00	80	0	2,000,000	0.0%	1212.1%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	1,277,434,124	100%	178,750,506	100%	196,803,500	40%	85,814,850	39.66	43.60	40%	85,814,850	39.7%	2520.9%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	60	36,630,181	12	5,062,600	-	-	0	-	0.00	0	0	-	0.0%	0.0%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	5	168,000,000	1	24,987,600	1	25,000,000	0	-	0.00	0	0	-	0.0%	0.0%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	60	154,803,943	12	25,853,500	12	26,403,500	6	9,000,000	50.00	34.09	6	9,000,000	10.0%	581.4%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	50	114,000,000	10	12,000,000	10	14,400,000	6	6,000,000	60.00	41.67	6	6,000,000	12.0%	526.3%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	55	82,000,000	11	11,000,000	11	11,000,000	5	4,000,000	45.45	36.36	5	4,000,000	9.1%	487.8%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	60	722,000,000	12	99,846,806	12	120,000,000	6	66,814,850	50.00	55.68	6	66,814,850	10.0%	925.4%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	140,000,000	100%	24,761,000	100%	56,000,000	0%	-	0.00	0	0%	-	0.0%	0.0%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	20	140,000,000	4	24,761,000	4	56,000,000	0	-	0.00	0	0	-	0.0%	0.0%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	666,736,194	100%	92,655,633	100%	74,500,000	33%	44,996,000	33.33	60.40	33%	44,996,000	33.3%	1171.3%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	60	112,700,194	12	10,637,633	-	-	0	-	0.00	0	0	-	0.0%	0.0%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	60	524,000,000	12	78,000,000	12	72,000,000	6	44,000,000	50.00	61.11	6	44,000,000	10.0%	839.7%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	60	30,036,000	12	4,018,000	12	2,500,000	6	996,000	50.00	40	6	996,000	10.0%	331.6%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	471,250,000	100%	59,287,630	100%	67,000,000	27%	35,830,135	26.92	53.48	27%	35,830,135	26.9%	1182.9%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	10	365,000,000	2	49,037,630	2	60,000,000	1	34,630,135	50.00	57.72	1	34,630,135	10.0%	948.8%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	60	51,250,000	12	5,250,000	12	7,000,000	6	1,200,000	50.00	17	6	1,200,000	10.0%	234.1%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	60	55,000,000	12	5,000,000	-	-	-	-	0.00	0	0	-	0.0%	0.0%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,21	1,495,599,861	3%	44,288,750	2.8%	545,000,000	2.6%	500,000,000	92.86	91.74	2.6%	500,000,000	#VALUE!	3343.1%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,21	227,000,000	3%	44,288,750	2.8%	545,000,000	2.6%	500,000,000	92.86	91.74	2.6%	500,000,000	#VALUE!	22026.4%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,21	227,000,000	3%	44,288,750	2.8%	545,000,000	2.6%	500,000,000	92.86	91.74	2.6%	500,000,000	#VALUE!	22026.4%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Kerja	75,51	425,000,000	72.71%	74,999,439	73.04%	73,000,000	33.67%	33,651,300	46.10	46	33.67%	33,651,300	#VALUE!	791.8%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tingkat Partisipasi Kerja	75,51	425,000,000	72.71%	74,999,439	73.04%	73,000,000	33.67%	33,651,300	46.10	46	33.67%	33,651,300	#VALUE!	791.8%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tingkat Partisipasi Kerja	75,51	425,000,000	72.71%	74,999,439	73.04%	73,000,000	33.67%	33,651,300	46.10	46	33.67%	33,651,300	#VALUE!	791.8%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	80%	802,093,538	60%	89,432,350	60%	45,000,000	0%	-	0.00	0	0	-	0.0%	0.0%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	80%	423,747,266	60%	41,284,500	0%	-	0%	-	0.00	0	0	-	0.0%	0.0%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	80%	423,747,266	60%	41,284,500		-		-	0.00	0	0	-	0.0%	0.0%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	80%	378,346,272	60%	48,147,850	65%	45,000,000	0%	-	0.00	0	0%	-	0.0%	0.0%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	80%	189,173,136	60%	48,147,850	0%	-	0%	0	0.00	0%	0%	-	0.0%	0.0%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	80%	189,173,136	0%	-	65%	45,000,000	0%	0	0.00	0	0%	-	0.0%	0.0%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Bidang Perindustrian			-														-
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	45%	2,941,421,772	35%	133,816,263	37%	984,744,500	25%	780,065,500	66.22	79.22	25%	780,065,500	54.4%	2652.0%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	45%	2,941,421,772	35%	133,816,263	37%	984,744,500	25%	780,065,500	66.22	79.22	25%	780,065,500	54.4%	2652.0%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	45%	980,473,924	0%	0	37%	770,124,500	33%	687,181,000	89.19	89.23	33%	687,181,000	73.3%	7008.7%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasana Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	45%	980,473,924	35%	133,816,263	37%	-	0	-	0.00	0	0	-	0.0%	0.0%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	45%	980,473,924	0%	0	37%	214,620,000	16%	92,884,500	43.24	43.28	16%	92,884,500	35.6%	947.3%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Bidang Transmigrasi																	-
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	44,00%	503,420,314	42,03%	233,052,000	42.03%	440,452,000	0.9%	9,460,000	2.14	2.15	0.9%	9,460,000	#VALUE!	187.9%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	44,00%	503,420,314	42,03%	233,052,000	42.03%	440,452,000	0.9%	9,460,000	2.14	2.15	0.9%	9,460,000	#VALUE!	187.9%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	44,00%	503,420,314	42,03%	233,052,000	42.03%	440,452,000	0.9%	9,460,000	2.14	2.15	0.9%	9,460,000	#VALUE!	187.9%	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian	-
		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	-
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100	24,037,773,766	100	7,811,028,597	100	4,247,324,400	40.68	1,678,597,993	40.68	40	140.68	9,489,626,590	140.7%	3947.8%	DP3AKB	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	99,496,000	100	33,800,000	100	22,824,000	42.11	9,612,000	42.11	42	142.11	43,412,000	142.1%	4363.2%	DP3AKB	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	12	18,800,000	4	18,800,000	2	1,400,000	2	1,400,000	100	100	6	20,200,000	50.0%	10744.7%	DP3AKB	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	4	16,424,000	-	-	1	4,106,000	1	4,106,000	100	100	1	4,106,000	25.0%	2500.0%	DP3AKB	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	16,424,000	-	-	1	4,106,000	-	-	0	0	-	-	0.0%	0.0%	DP3AKB	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	4	16,424,000	-	-	1	4,106,000	1	4,106,000	100	100	1	4,106,000	25.0%	2500.0%	DP3AKB	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	16,424,000	-	-	1	4,106,000	-	-	0	0	-	-	0.0%	0.0%	DP3AKB	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	12	15,000,000	4	15,000,000	2	5,000,000	0	-	0	-	4	15,000,000	33.3%	10000.0%	DP3AKB	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan keuangan Tepat Waktu	100	7,901,554,294	100	5,607,499,212	100	3,608,930,400	41.49	1,497,269,393	41.49	41	141.49	7,104,768,605	141.5%	8991.6%	DP3AKB	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	84	7,886,501,744	28	5,592,999,212	14	3,603,430,400	8	1,497,269,393	57.1428571	42	36	7,090,268,605	42.9%	8990.4%	DP3AKB	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	6	8,660,250	2	7,500,000	1	2,500,000	0	-	0	-	2	7,500,000	33.3%	8660.3%	DP3AKB	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	108	2,928,200	2	4,000,000	18	2,000,000	0	-	0	-	2	4,000,000	1.9%	13660.3%	DP3AKB	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	3,464,100	2	3,000,000	1	1,000,000	0	-	0	-	2	3,000,000	33.3%	8660.3%	DP3AKB	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100	691,975,401	100	602,506,345	100	172,442,000	29.38	50,655,100	29.38	29	129.38	653,161,445	129.4%	9439.1%	DP3AKB	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	100	14,910,823	100	12,950,000	100	4,225,000	57	2,425,000	57	57	157	15,375,000	157.0%	10311.3%	DP3AKB	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	6	61,602,500	1	25,000,000	1	25,000,000	0	-	0	-	1	25,000,000	16.7%	4058.3%	DP3AKB	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK	72	121,699,653	12	109,927,200	12	33,217,000	6	16,496,500	50	50	18	126,423,700	25.0%	10388.2%	DP3AKB	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SKHU	60	29,569,200	10	36,000,000	12	12,000,000	5	5,000,000	41.6666667	42	15	41,000,000	25.0%	13865.8%	DP3AKB	
		Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	66	38,105,100	11	34,000,000	11	11,000,000	4	4,000,000	36.3636364	36	15	38,000,000	22.7%	9972.4%	DP3AKB	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	72	426,088,125	12	384,629,145	12	87,000,000	6	22,733,600	50	26	18	407,362,745	25.0%	9560.5%	DP3AKB	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	790,179,360	100	572,372,900	100	121,140,000	0	-	0	-	100	572,372,900	100.0%	7243.6%	DP3AKB	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	100	187,383,020	12	57,332,300	100	121,140,000	0	-	0	-	12	57,332,300	12.0%	3059.6%	DP3AKB	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100	536,553,320	100	457,708,300	100	144,888,000	49.24	71,340,000	49.24	49	149.24	529,048,300	149.2%	9860.1%	DP3AKB	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	72	66,243,020	12	57,332,300	12	19,200,000	6	6,796,000	50	35	18	64,128,300	25.0%	9680.8%	DP3AKB	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	28	454,222,700	28	386,000,000	12	122,000,000	6	62,500,000	50	51	34	448,500,000	121.4%	9874.0%	DP3AKB	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	72	16,087,600	12	14,376,000	12	3,688,000	6	2,044,000	50	55	18	16,420,000	25.0%	10206.6%	DP3AKB	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik	100	649,226,910	100	537,141,840	100	177,100,000	28.08	49,721,500	28.08	28	128.08	586,863,340	128.1%	9039.4%	DP3AKB	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	28	606,728,210	28	497,891,840	28	170,100,000	9	48,721,500	32.1428571	29	37	546,613,340	132.1%	9009.2%	DP3AKB	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Pra Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	72	42,498,700	12	39,250,000	12	7,000,000	6	1,000,000	50	14	18	40,250,000	25.0%	9470.9%	DP3AKB	
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responship Gender	100	1,202,266,128		93,477,600	100	770,645,000	2.22	17,092,000	2.22	2	2.22	110,569,600	2.2%	919.7%	DP3AKB	
		Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan Peserta dalam Penyusunan GAP/GBS (Gender Analysis Pathway/Gender Budget Statement) di Kabupaten Pesisir Barat (Kali)	100	20,645,000		-	100	20,645,000	29.26	6,040,000	29.26	29	29.26	6,040,000	29.3%	2925.6%	DP3AKB	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan kabupaten/Kota	11	20,645,000		-	11	20,645,000	3	6,040,000	27	29	3	6,040,000	27.3%	2925.6%	DP3AKB	DID
		Pemberdayaan Perempuan Bidang politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Keterampilan dan Perekonomian 15 Kelompok Usaha Kepala Rumah Tangga Perempuan di Kabupaten Pesisir Barat	100	1,098,075,000		93,477,600	100	750,000,000	1.47	11,052,000	1.47	1	1.47	104,529,600	1.5%	951.9%	DP3AKB	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan Kabupaten/Kota	15	1,098,075,000	5	93,477,600	15	750,000,000	-	11,052,000	0	1	5	104,529,600	33.3%	951.9%	DP3AKB	DID
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Terbentuk Dalam Kelompok Usaha Rumahan	100	146,410,000		143,962,550	100	-	0	-	0	-	0	143,962,550	0.0%	9832.8%	DP3AKB	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan kelompok Usaha Rumahan dengan Memanfaatkan Limbah Rumah Tangga	20	146,410,000	10	143,962,550					0	-	10	143,962,550	50.0%	9832.8%	DP3AKB	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100	695,818,390		99,270,000	100	101,947,000	59.44	60,596,000	59.44	59	59.44	159,866,000	59.4%	2297.5%	DP3AKB	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100	139,719,063		99,270,000	100	27,351,000	0	-	0	-	0	99,270,000	0.0%	7105.0%	DP3AKB	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang Terlayani dan Mendapatkan Pendampingan	10	139,719,063	7	13,216,000	10	27,351,000	0	-	0	-	7	13,216,000	70.0%	945.9%	DP3AKB	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Data Serta Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan TPPO	100	149,786,215		367,410,000	100	74,596,000	81.23	60,596,000	81.23	81	81.23	428,006,000	81.2%	28574.5%	DP3AKB	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM yang Mendapatkan Pelatihan SIMFONI PPA dan Manajemen Kasus	2	149,786,215	2	99,270,000	2	74,596,000	2	60,596,000	100	81	4	159,866,000	200.0%	10672.9%	DP3AKB	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	100	1,300,826,171		367,410,000	100	750,000,000	0	-	0	-	0	367,410,000	0.0%	2824.4%	DP3AKB	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	1,098,075,000		367,410,000	100	750,000,000	0	-	0	-	0	367,410,000	0.0%	3345.9%	DP3AKB	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya 15 Kelompok Usaha Peningkatan Pendapat Keluarga Akseptor	15	1,098,075,000	15	-	15	750,000,000	-	-	0	-	15	-	100.0%	0.0%	DP3AKB	DID
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Terhadap Anak	100	2,268,917,864		367,410,000	100	329,355,000	29.08	95,779,150	29.08	29	29.08	463,189,150	29.1%	2041.5%	DP3AKB	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengetahuan tentang Pemenuhan Hak Anak Menuju Kabupaten Layak Anak	100	475,765,000		367,410,000	100	329,355,000	29.08	95,779,150	29.08	29	29.08	463,189,150	29.1%	9735.7%	DP3AKB	
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	800	329,355,000		-	800	329,355,000	29.08	95,779,150	3.635	29	29.08	95,779,150	3.6%	2908.1%	DP3AKB	
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Evaluasi Layak Anak	800	146,410,000	1	367,410,000					0	-	1	367,410,000	0.1%	25094.6%	DP3AKB	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Pendampingan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	100	1,104,849,994		150,450,000	100	336,853,000	20.38	68,665,000	20.38	20	20.38	219,115,000	20.4%	1983.2%	DP3AKB	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersampainya Informasi tentang Kekerasan Terhadap Anak	100	220,273,845		150,450,000	100	109,700,000	0	- 0		- 0		150,450,000	0.0%	6830.1%	DP3AKB	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Informasi tentang Kekerasan Terhadap Anak	700	220,273,845	700	150,450,000	700	109,700,000		- 0		- 0	700	150,450,000	100.0%	6830.1%	DP3AKB	
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Anak yang Terlayani	100	371,316,257		132,105,600	100	227,153,000	100	68,665,000	100	30	100	200,770,600	100.0%	5407.0%	DP3AKB	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Menjadi Pemdamping Pengaduan Pada Taingkat Pekon dan Kelurahan	560	371,316,257	560	132,105,600	560	227,153,000	175	68,665,000	31.25	30	735	200,770,600	131.3%	5407.0%	DP3AKB	
		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju pertumbuhan Penduduk	11	631,826,399		91,207,600	11	208,200,000	11	15,000,000	100	7	11	106,207,600	100.0%	1681.0%	DP3AKB	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian penduduk Cakupan Daerah kabipaten/ Kota	Tersedianya Indikator Program bangga Kencana Dalam Kebijakan Pembangunan	100	417,034,600		91,207,600	100	208,200,000	7.2	15,000,000	7.2	7	7.2	106,207,600	7.2%	2546.7%	DP3AKB	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12	64,200,000	12	- 12		64,200,000	0	- 0		- 12		- 100.0%	0.0%		DP3AKB	
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Indikator Program bangga Kencana Dalam Kebijakan Pembangunan	11	6,911,800	11	2,805,000				0		- 11		2,805,000	100.0%	4058.3%	DP3AKB	
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	11	84,000,000	11	- 11		84,000,000	0	- 0		- 11		- 100.0%	0.0%		DP3AKB	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengelohan dan Pelaporan Data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB	11	326,122,800	11	88,402,600	11	60,000,000	4	15,000,000	36.3636364	25	15	103,402,600	136.4%	3170.7%	DP3AKB	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate	100	22,104,832,046	100	5,458,834,627	100	2,643,395,000	23.96	633,409,100	23.96	24	123.96	6,092,243,727	124.0%	2756.1%	DP3AKB	
		Pelaksanaan advokasi, komukasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Program KKBPK	100	2,700,311,022	100	1,389,497,645	100	934,500,000	13.73	197,991,100	13.73	21	113.73	1,587,488,745	113.7%	5878.9%	DP3AKB	
		Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	90,780,438	2	4,375,000	2	80,000,000	0	10,987,000	0	14	2	15,362,000	16.7%	1692.2%	DP3AKB	
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Program KKBPK	3300	61,602,500	550	25,000,000				0		- 550		25,000,000	16.7%	4058.3%	DP3AKB	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik serta media Luar Ruang	66	324,064,024	11	237,855,200	11	150,000,000	0	- 0	- 0	- 0	11	237,855,200	16.7%	7339.8%	DP3AKB	
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan Mekanisme Opeasional Program bangsa kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya	66	565,839,560	11	171,551,000	11	143,000,000	4	42,696,000	36.3636364	30	15	214,247,000	22.7%	3786.4%	DP3AKB	
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai penyuluhan Bangsa kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10	1,479,460,500	10	910,829,445	12	481,500,000	4	108,900,000	33.3333333	23	14	1,019,729,445	140.0%	6892.6%	DP3AKB	
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	66	178,564,000	11	39,887,000	11	80,000,000	5	35,408,100	45.4545455	44	16	75,295,100	24.2%	4216.7%	DP3AKB	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tercapainya Operasional dan Terbinanya Kader PPKBD Kabupaten Pesisir Barat		1,547,666,240		1,132,800,000		388,000,000		-		- 0		1,132,800,000	#DIV/0!	7319.4%	DP3AKB	
		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan Oleh PKB/ PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa kencana	100	152,000,000	11	-	76	152,000,000	0	- 0		- 11		-	11.0%	0.0%	DP3AKB	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat pedesaan (IMP)	100	1,395,666,240	11	1,132,800,000	100	236,000,000	0	- 0		- 11		1,132,800,000	11.0%	8116.6%	DP3AKB	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang program Keluarga Berencana untuk Pelayanan KB yang Berkualitas serta Pencatatan dan pelaporan From F2KB dari Faskes atau klinik	12	3,118,346,500	100	2,180,128,582	100	877,895,000	32.06	281,418,000	32.06	32	132.06	2,461,546,582	1100.5%	7893.8%	DP3AKB	
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terwujudnya Pendistribusian Alkon Ke Fasilitas Kesehatan	12	45,006,140	12	32,148,000	12	11,700,000	3	2,400,000	25	21	15	34,548,000	125.0%	7676.3%	DP3AKB	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	11	1,344,430,300	11	799,426,200	11	529,948,000	6	279,018,000	54.5454545	53	17	1,078,444,200	154.5%	8021.6%	DP3AKB	
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	9	1,623,313,000	10	1,341,982,132	9	246,913,000	0	- 0		- 10		1,341,982,132	111.1%	8266.9%	DP3AKB	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Meningkatnya pengetahuan Masyarakat tentang Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	3300	20,763,060	11	6,572,250	550	4,500,000	0	- 0	- 0	- 0	11	6,572,250	0.3%	3165.4%	DP3AKB	
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Dukungan Operasional KB Bergerak	1720	84,834,000	1720	- 1720	84,834,000	0	- 0	- 0	- 0	- 1720	- 100.0%	0.0%			DP3AKB	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kader dan Kelompok Kerja (POKJA) yang Terbentuk dan Terbina di Kampung KB	100	1,633,160,300	100	756,408,400	100	443,000,000	34.76	154,000,000	34.76	35	134.76	910,408,400	134.8%	5574.5%	DP3AKB	
		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya	28	434,000,000	100	- 28	434,000,000	9	154,000,000	32.1428571	35	109	154,000,000	389.3%	3548.4%	DP3AKB		
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	28	9,000,000	100	- 30	9,000,000	0	- 0	- 0	- 100	- 357.1%	0.0%			DP3AKB		
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terlaksananya pembentukan Kelompok Kerja dan Pembeinaan Kader Pokja di Kampung KB	118	1,190,160,300	100	756,408,400	-			0	- 100	756,408,400	84.7%	6355.5%			DP3AKB	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	100	1,734,665,278		249,340,000	100	1,275,472,000	23.23	296,324,000	23.23	23	23.23	545,664,000	23.2%	3145.6%	DP3AKB	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Forum Generasi Berencana, Kelompok BKB-HI, Forum Asosiasi Kelompok UPPKS dan Kader Poktan PKB dan PPKBD yang Mendapatkan pembinaan tentang Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga serta Tim pendamping Keluarga yang Mendapatkan Biaya Operasional	100	2,052,250,326		249,340,000	100	1,275,472,000	23.23	296,324,000	23.23	23	23.23	545,664,000	23.2%	2658.9%	DP3AKB	
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	360,000,000			20	360,000,000	0	- 0	- 0	- 0	- 0.0%	0.0%			DP3AKB	
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader UPPKA yang Di Bina	100	71,272,000			88	71,272,000	88	43,064,000	100	60	88	43,064,000	88.0%	6042.2%	DP3AKB	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Tim pendamping keluarga (TPK) yang mendapatkan Biaya Operasional	100	2,052,250,326	402	249,340,000	10	844,200,000	3	253,260,000	30	30	405	502,600,000	405.0%	2449.0%	DP3AKB	
		NON URUSAN (PROGRAM PENUNJANG PD)	Nilai Sakip (Huruf/Predikat)	B	37,788,763,478	CC	5,114,812,968	C	6,288,024,300	0	2,722,489,710	0%	43%	0	2,722,489,710	#VALUE!	7.2%	Dinas KP dan Pertanian	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	37,788,763,478	90	5,114,812,968	90	6,288,024,300	50	2,722,489,710	56%	43%	50	2,722,489,710	55.6%	7.2%	Dinas KP dan Pertanian	
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	45,788,250	100	7,500,000	100	5,000,000	25	928,000	25%	19%	25	928,000	25.0%	2.0%	Dinas KP dan Pertanian	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	15,262,750	2	2,500,000	2	3,000,000	1	928,000	50%	31%	3	3,428,000	30.0%	22.5%	Dinas KP dan Pertanian	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	30,525,500	2	5,000,000	2	2,000,000	0	-	0%	0%	2	5,000,000	20.0%	16.4%	Dinas KP dan Pertanian	
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (Persen)	100	33,422,204,878	100	4,530,852,968	100	5,624,724,300	50	2,377,209,238	50%	42%	50	2,377,209,238	50.0%	7.1%	Dinas KP dan Pertanian	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	70	33,388,626,828	14	4,525,352,968	14	5,618,724,300	8	2,376,635,238	57%	42%	22	6,901,988,206	31.4%	20.7%	Dinas KP dan Pertanian	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	15,262,750	1	2,500,000	1	2,000,000	0	-	0%	0%	1	2,500,000	20.0%	16.4%	Dinas KP dan Pertanian	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	10	12,210,200	2	2,000,000	2	2,500,000	1	574,000	50%	23%	3	2,574,000	30.0%	21.1%	Dinas KP dan Pertanian	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	6,105,100	1	1,000,000	1	1,500,000	0	-	0%	0%	1	1,000,000	20.0%	16.4%	Dinas KP dan Pertanian	
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100	2,202,720,080	100	364,441,196	100	308,800,000	50	150,142,532	50%	49%	50	150,142,532	50.0%	6.8%	Dinas KP dan Pertanian	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	10,989,180	1	1,770,000	1	1,800,000	1	1,800,000	100%	100%	2	3,570,000	40.0%	32.5%	Dinas KP dan Pertanian	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	10	244,204,000	2	25,000,000	1	25,000,000	0	-	0%	0%	2	25,000,000	20.0%	10.2%	Dinas KP dan Pertanian	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	280,834,600	12	49,820,000	12	37,000,000	6	20,625,000	50%	56%	18	70,445,000	30.0%	25.1%	Dinas KP dan Pertanian	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	73,261,200	12	12,000,000	12	12,000,000	5	4,600,000	42%	38%	17	16,600,000	28.3%	22.7%	Dinas KP dan Pertanian	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	67,156,100	11	11,000,000	11	11,000,000	5	4,500,000	45%	41%	16	15,500,000	29.1%	23.1%	Dinas KP dan Pertanian	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di Luar Kantor	60	1,526,275,000	12	264,851,196	12	222,000,000	6	118,617,532	50%	53%	18	383,468,728	30.0%	25.1%	Dinas KP dan Pertanian	
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100	959,912,800	100	62,698,804	100	183,500,000	50	111,368,940	50%	61%	50	111,368,940	50.0%	11.6%	Dinas KP dan Pertanian	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	146,522,400	12	59,198,804	12	75,000,000	6	24,288,940	50%	32%	18	83,487,744	30.0%	57.0%	Dinas KP dan Pertanian	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan Kantor yang Disediakan Sewa Kantor, Rumah Dinas, Gudang Pertanian dan Kendaraan Operasional dinas	60	788,970,000	0	0	12	107,000,000	6	86,000,000	50%	80%	6	86,000,000	10.0%	10.9%	Dinas KP dan Pertanian	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	24,420,400	12	3,500,000	12	1,500,000	6	1,080,000	50%	72%	18	4,580,000	30.0%	18.8%	Dinas KP dan Pertanian	
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100	1,158,137,470	100	149,320,000	100	166,000,000	50	82,841,000	50%	50%	50	82,841,000	50.0%	7.2%	Dinas KP dan Pertanian	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	235,046,350	12	38,300,000	12	37,500,000	6	20,604,000	50%	55%	18	58,904,000	30.0%	25.1%	Dinas KP dan Pertanian	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	143	923,091,120	28	111,020,000	29	128,500,000	14	62,237,000	48%	48%	42	173,257,000	29.4%	18.8%	Dinas KP dan Pertanian	
		Bidang Pangan	Nilai Tukar Petani	102.3	5,332,934,899	106.7	725,898,000	97.25	493,436,000	105.08	190,253,504	108%	39%	105.1	190,253,504	102.7%	3.6%	Dinas KP dan	
		PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	28,000	4,202,340,624	28,000	634,545,900	28,000	268,346,000	15204	150,687,904	54%	56%	15204	150,687,904	54.3%	3.6%	Dinas KP dan Pertanian	
		Kegiatan : Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	85.4	296,496,624	84.85	48,074,400	84.98	31,250,000	0	16,389,000	0%	52%	0	16,389,000	0.0%	5.5%	Dinas KP dan Pertanian	
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Buku Neraca Bahan Makanan	5	296,496,624	1	48,074,400	1	31,250,000	0	16,389,000	0%	52%	1	64,463,400	20.0%	21.7%	Dinas KP dan Pertanian	
		Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	100	3,978,704,000	87.8	586,471,500	20	28,596,000	4	5,735,000	20%	20%	4	5,735,000	4.0%	0.1%	Dinas KP dan Pertanian	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Terpelihara Tersedianya Biaya Rekonsiliasi Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	53	72,860,000	0	-	34	28,596,000	7	5,735,000	21%	20%	7	5,735,000	13.2%	7.9%	Dinas KP dan Pertanian	
		Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	87.90	3,905,844,000	87.8	586,471,500	87.8	208,500,000	0	128,563,904	0%	62%	0	128,563,904	0.0%	3.3%	Dinas KP dan Pertanian	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	8	3,663,060,000	2	552,032,500	2	173,000,000	1	128,563,904	50%	74%	3	680,596,404	37.5%	18.6%	Dinas KP dan Pertanian	
		Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah laporan pemantauan konsumsi pangan	5	242,784,000	2	34,439,000	1	35,500,000	0	-	0%	0%	2	34,439,000	40.0%	14.2%	Dinas KP dan Pertanian	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	5	982,082,275	7	91352100	7	190,090,000	0	14,365,000	0%	8%	0	14,365,000	0.0%	1.5%	Dinas KP dan Pertanian	
		Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan Informasi Dearah Rawan Pangan	100	219,478,345	100	35244800	100	38,861,000	0	2,546,000	0%	7%	0	2,546,000	0.0%	1.2%	Dinas KP dan Pertanian	
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terupdatenya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	5	219,478,345	1	35,244,800	1	38,861,000	0	2,546,000	0%	7%	1	37,790,800	20.0%	17.2%	Dinas KP dan Pertanian	
		Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Daerah Rawan Pangan	4	762,603,930	0	56107300	1	151,229,000	0	11,819,000	0%	8%	0	11,819,000	0.0%	1.5%	Dinas KP dan Pertanian	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penanganan Kerawanan Pangan	15	762,603,930	2	56,107,300	2	151,229,000	0	11,819,000	0%	8%	2	67,926,300	13.3%	8.9%	Dinas KP dan Pertanian	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	60.00	148,512,000	60	0	60	35,000,000	50	25,200,600	83%	72%	50	25,200,600	83.3%	17.0%	Dinas KP dan Pertanian	
		Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100.00	148,512,000	100	0	100	35,000,000	50	25,200,600	50%	72%	50	25,200,600	50.0%	17.0%	Dinas KP dan Pertanian	
		Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	5	232,050,000	0	0	1	10,000,000	0	2,982,500	0%	30%	0	2,982,500	0.0%	1.3%	Dinas KP dan Pertanian	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	5	148,512,000	0	0	2	25,000,000	1	22,218,100	50%	89%	1	22,218,100	20.0%	15.0%	Dinas KP dan Pertanian	
		Bidang Pertanian	Nilai Tukar Petani	102.3	11,512,557,500	101.2	1,449,334,420.00	98.51	2,228,764,000	105.08	834,959,850	107%	37%	105	834,959,850	102.7%	7.3%	Dinas KP dan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani	102.3	5,799,845,000	101.2	714,475,000.00	98.51	1,310,180,000	105.8	422,264,000	107%	32%	106	422,264,000	103.4%	7.3%	Dinas KP dan Pertanian	
		Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	0.3	915,765,000	0.3	134,462,000	0.3	60,000,000	0.1	11,172,000	33%	19%	0	11,172,000	33.3%	1.2%	Dinas KP dan Pertanian	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Laporan KP3 dan Pendampingan Sarana Pendukung Pertanian	10.00	915,765,000	2	134,462,000	2	60,000,000	1	11,172,000	50%	19%	3	145,634,000	30.0%	15.9%	Dinas KP dan Pertanian	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian	0,5	4,884,080,000	0.5	580,013,000	0.5	845,020,000	0.25	409,704,500	50%	48%	0	409,704,500	#VALUE!	8.4%	Dinas KP dan Pertanian	
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit komoditi perkebunan	81,000	2,747,295,000	2000	198,332,500	21700	440,000,000	2000	28,622,000	9%	7%	4000	226,954,500	4.9%	8.3%	Dinas KP dan Pertanian	
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Hortikultura	Jumlah Luasan Pengembangan Hortikultura	450	2,136,785,000	30	381,680,500	53	405,020,000	50	381,082,500	94%	94%	80	762,763,000	17.8%	35.7%	Dinas KP dan Pertanian	
		Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan Populasi Ternak	3.00	2,339,938,000	0	-	3	405,160,000	0	1,387,500	0%	0%	0	1,387,500	0.0%	0.1%	Dinas KP dan Pertanian	
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Jumlah Bibit Ternak	5,250	1,851,530,000	0	-	1655	405,160,000	0	1,387,500	0%	0%	0	1,387,500	0.0%	0.1%	Dinas KP dan Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	151,322	150,000,000	145,418	-	146,872	314,779,000	75,000	146,077,250	51%	46%	75000	146,077,250	49.6%	97.4%	Dinas KP dan Pertanian	
		Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan data, informasi dan kajian lingkup pertanian	100	150,000,000	100	-	100	8,779,000	0	219,000	0%	2%	0	219,000	0.0%	0.1%	Dinas KP dan Pertanian	
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola	2	150,000,000	0	-	1	8,779,000	0	219,000	0%	2%	0	219,000	0.0%	0.1%	Dinas KP dan Pertanian	
		Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun dan berkondisi baik	85	13,718,500,000	n/a	-	82	306,000,000	50	145,858,250	61%	48%	50	145,858,250	58.8%	1.1%	Dinas KP dan Pertanian	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani y ang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	14	3,090,500,000	0	-	2	306,000,000	1	145,858,250	50%	48%	1	145,858,250	7.1%	4.7%	Dinas KP dan Pertanian	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	90	947,630,000	82	297,432,920	84	125,000,000	65	80,683,600	77%	65%	65	80,683,600	72.2%	8.5%	Dinas KP dan Pertanian	
		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terproteksinya ternak dan HPR dari penyakit hewan menular	90	755,900,000	82	253,978,020	84	85,789,500	65	55,725,000	77%	65%	65	55,725,000	72.2%	7.4%	Dinas KP dan Pertanian	
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Terproteksinya ternak dan HPR dari penyakit hewan menular	15,000	755,900,000	4000	253,978,020	3000	85,789,500	2000	55,725,000	67%	65%	6000	309,703,020	40.0%	41.0%	Dinas KP dan Pertanian	
		Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	100	191,730,000	100	43,454,900	100	39,210,500	64	24,958,600	64%	64%	64	24,958,600	64.0%	13.0%	Dinas KP dan Pertanian	
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Sampel daging dan Produk Hewan	1,500	191,730,000	260	43,454,900	450	39,210,500	290	24,958,600	64%	64%	550	68,413,500	36.7%	35.7%	Dinas KP dan Pertanian	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	90	1,409,905,000	82	70,166,000	84	25,000,000	66	12,637,000	79%	51%	66	12,637,000	73.3%	0.9%	Dinas KP dan Pertanian	
		Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penurunan persentase gangguan OPT/ Kegagalan panen pada komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	10	1,409,905,000	10	70,166,000	10	25,000,000	6	12,637,000	60%	51%	6	12,637,000	60.0%	0.9%	Dinas KP dan Pertanian	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Gerakan Pengendalian OPT komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	75	1,409,905,000	8	70,166,000	6	25,000,000	4	12,637,000	67%	51%	12	82,803,000	16.0%	5.9%	Dinas KP dan Pertanian	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	995	3,205,177,500	955	367,260,500	965	453,805,000	420	173,298,000	44%	38%	420	173,298,000	42.2%	5.4%	Dinas KP dan Pertanian	
		Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kualitas SDM Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian yang ditingkatkan	90	3,205,177,500	70	367,260,500	80	453,805,000	35	173,298,000	44%	38%	35	173,298,000	38.9%	5.4%	Dinas KP dan Pertanian	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan kualitas SDM	11	2,136,785,000	11	352,260,500	11	338,805,000	5	103,858,000	45%	31%	11	456,118,500	100.0%	21.3%	Dinas KP dan Pertanian	
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Petani dan Kelembagaan Petani yang ditingkatkan kualitas SDM	11	1,068,392,500	11	15,000,000	11	115,000,000	7	69,440,000	64%	60%	11	84,440,000	100.0%	7.9%	Dinas KP dan Pertanian	
		Bidang Lingkungan Hidup																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100	16,960,069,162	100	89%	100	100%	76%	77%	76%	77%	76%	77%	0.8%	8.0%	Dinas LH	
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	65,051,961	100	72%	100	67%	75%	77%	75%	77%	75%	77%	0.8%	14.6%	Dinas LH	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	10	11,339,530	10	23,681,120	2	2,163,000	2	2,163,000	100%	100%	2	2,163,000	20.0%	19.1%	Dinas LH	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja SKPD	10	26,236,766	10	27,667,900	2	5,000,000	1	2,656,000	50%	53%	1	2,656,000	10.0%	10.1%	Dinas LH	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	11,241,252,394	100	81%	100	50%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	0.5%	11.4%	Dinas LH	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	70	11,207,302,020	84	9,039,196,457	14	2,004,691,800	8	861,188,101	57%	43%	8	861,188,101	11.4%	7.7%	Dinas LH	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	5	13,118,383	5	12,805,500	1	2,500,000	0	-	0%	0%	0	-	0.0%	0.0%	Dinas LH	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran	90	10,494,706	10	10,330,000	18	3,000,000	9	1,965,000	50%	66%	9	1,965,000	10.0%	18.7%	Dinas LH	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	5	5,247,353	5	5,546,200	1	1,000,000	1	1,000,000	100%	100%	1	1,000,000	20.0%	19.1%	Dinas LH	
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan sarana dan prsarana pendukung kinerja	100	1,423,374,966	86	86%	100	46%	58%	67%	58%	67%	58%	67%	0.6%	12.1%	Dinas LH	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk pameran	6	113,183,828	3	89,978,500	1	25,000,000	1	25,000,000	100%	100%	1	25,000,000	16.7%	22.1%	Dinas LH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan dan penggandaan	60	141,358,445	59	293,111,170	12	52,187,400	6	23,476,600	50%	45%	6	23,476,600	10.0%	16.6%	Dinas LH	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya informasi media massa	50	62,968,237	60	69,600,000	10	12,000,000	6	6,000,000	60%	50%	6	6,000,000	12.0%	9.5%	Dinas LH	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	55	57,720,884	49	53,288,500	11	11,000,000	5	4,000,000	45%	36%	5	4,000,000	9.1%	6.9%	Dinas LH	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah	60	970,760,325	58	851,322,286	12	140,000,000	6	51,564,150	50%	37%	6	51,564,150	10.0%	5.3%	Dinas LH	
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan pendukung	100	696,370,984	95	92%	100	100%	62%	46%	62%	60%	50%	60%	0.5%	9.2%	Dinas LH	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	60	50,374,590	60	3,474,407,283	12	12,000,000	6	3,358,000	50%	28%	6	3,358,000	10.0%	6.7%	Dinas LH	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sewa gedung kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas	20	600,821,931	60	664,000,000	12	112,000,000	6	71,000,000	50%	63%	6	71,000,000	30.0%	11.8%	Dinas LH	
		Penyedia Jasa Pelayan Umum Kantor	Meningkatkan kebersihan kantor	60	45,174,463	60	52,674,463	12	7,500,000	6	4,201,000	50%	56%	6	4,201,000	10.0%	9.3%	Dinas LH	
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase barang miliki daerah yang dalam kondisi baik	100	2,947,648,136	100	100%	100	100%	51%	59%	51%	51%	51%	59%	0.5%	12.1%	Dinas LH	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	10	264,466,597	60	306,030,178	2	55,650,000	1	37,975,000	50%	68%	1	37,975,000	10.0%	14.4%	Dinas LH	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	65	1,970,800,881	60	2,530,104,042	13	424,610,000	7	202,793,000	54%	48%	7	202,793,000	10.8%	10.3%	Dinas LH	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya jasa pemeliharaan alat besar	5	598,219,244	60	589,097,600	12	90,200,000	6	64,250,000	50%	71%	6	64,250,000	120.0%	10.7%	Dinas LH	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	60	61,687,883	24	38,136,100	12	16,889,600	6	8,112,800	50%	50%	6	8,112,800	10.0%	13.2%	Dinas LH	
		Pemeliharaan/Rehabilitasu Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		60	52,473,531	24	67,473,531	12	15,000,000		0		0%		0	0.0%	0.0%	Dinas LH	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	3	2,482,702,500	1	250,000,000	100	325,000,000	100%	206,692,400	100%	100%	100%	206,692,400	33.3%	8.3%	Dinas LH	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.54	1,834,747,681	100	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.4%	10.0%	Dinas LH	
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	cakupan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	100	1,641,742,831	100	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.0%	10.0%	Dinas LH	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah dokumen Hasil Pengukuran IKA, IKD, dan IKTL	15	1,540,161,331		556,848,606	3	25,000,000	3	25,000,000	100%	100%	3	25,000,000	20.0%	1.6%	Dinas LH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PENGLOLAAN SAMPAH	Persentase jumlah sampah yang tertangani	22.98	10,782,132,298	100	114%	100	100%	46%	46%	46%	46%	50%	46%	2.2%	10.0%	Dinas LH	
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan sampah	60	7,721,499,000	60	8,768,364,093	12	1,862,300,000	6	775,615,000	50%	42%	6	775,615,000	10.0%	10.0%	Dinas LH	
		Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	15,813,919,039	200%	5,717,805,128	100%	2,651,403,400	50%	1,055,604,481	50.00%	50.00%	250%	6,773,409,609	250.0%	42.8%	Dinas Dukcapil	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	30	73,261,200	200%	32,193,050	100%	6,624,000	50%	4,624,000	50.00%	50.00%	250%	36,817,050	8.3%	50.3%	Dinas Dukcapil	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10	61,051,000	14	16,478,200	2	4,624,000	2	4,624,000	100.00%	100.00%	16	21,102,200	160.0%	34.6%	Dinas Dukcapil	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	12,210,200	16	15,714,850	2	2,000,000	0	-	0.00%	0.00%	16	15,714,850	80.0%	128.7%	Dinas Dukcapil	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	11,285,155,859	200%	3,112,224,746	100%	2,006,306,400	50%	864,876,337	25.00%	21.08%	250%	3,977,101,083	250.0%	35.2%	Dinas Dukcapil	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	60	11,251,577,809	24	3,090,374,446	12	2,000,806,400	6	864,053,337	50.00%	43.19%	30	3,954,427,783	50.0%	35.1%	Dinas Dukcapil	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	15,262,750	4	8,675,750	1	2,500,000	0	-	0.00%	0.00%	4	8,675,750	80.0%	56.8%	Dinas Dukcapil	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan, laporan triwulan dan laporan semester	20	12,210,200	12	8,175,000	4	2,000,000	2	823,000	50.00%	41.15%	14	8,998,000	70.0%	73.7%	Dinas Dukcapil	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	10	6,105,100	12	4,999,550	2	1,000,000	0	-	0.00%	0.00%	12	4,999,550	120.0%	81.9%	Dinas Dukcapil	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100%	1,929,211,600	200%	1,432,315,248	100%	199,903,000	50%	73,609,509	40.91%	30.31%	250%	1,505,924,757	250.0%	78.1%	Dinas Dukcapil	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60	48,840,800	26	16,231,800	12	3,745,000	6	1,221,000	50.00%	32.60%	32	17,452,800	53.3%	35.7%	Dinas Dukcapil	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	152,627,500	2	72,500,500	1	25,000,000	0	-	0.00%	0.00%	2	72,500,500	40.0%	47.5%	Dinas Dukcapil	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak, penggandaan dan kebutuhan ATK	60	366,306,000	26	135,783,800	12	33,158,000	6	10,850,000	50.00%	32.72%	32	146,633,800	53.3%	40.0%	Dinas Dukcapil	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan media cetak	60	73,261,200	48	151,110,000	12	12,000,000	6	4,100,000	50.00%	34.17%	54	155,210,000	90.0%	211.9%	Dinas Dukcapil	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	67,156,100	22	31,870,000	11	11,000,000	5	3,946,000	45.45%	35.87%	27	35,816,000	49.1%	53.3%	Dinas Dukcapil	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	1,221,020,000	48	1,024,819,148	12	115,000,000	6	53,492,509	50.00%	46.52%	54	1,078,311,657	90.0%	88.3%	Dinas Dukcapil	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung			-	0%	100%	85,000,000	0%	-	0.00%	0.00%	0%	-	#DIV/0!	0.0%	Dinas Dukcapil	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin			0	-	9	85,000,000	0	-	0.00%	0.00%	0	-	#DIV/0!	0.0%	Dinas Dukcapil	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100%	1,520,169,900	200%	503,100,884	100%	228,190,000	50%	86,417,635	50.00%	35.45%	250%	589,518,519	250.0%	38.8%	Dinas Dukcapil	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	378,516,200	48	159,330,464	12	94,966,200	6	20,952,635	50.00%	22.06%	54	180,283,099	90.0%	47.6%	Dinas Dukcapil	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan rumah dinas, gedung kantor dan kendaraan dinas	60	787,557,900	24	256,000,000	12	129,000,000	6	64,000,000	50.00%	49.61%	30	320,000,000	50.0%	40.6%	Dinas Dukcapil	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	354,095,800	24	87,770,420	12	4,223,800	6	1,465,000	50.00%	34.68%	30	89,235,420	50.0%	25.2%	Dinas Dukcapil	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100%	1,006,120,480	200%	249,284,290	100%	125,380,000	50%	26,077,000	50.00%	19.80%	250%	275,361,290	250.0%	27.4%	Dinas Dukcapil	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	60	340,664,580	24	112,755,490	12	55,800,000	6	13,000,000	50.00%	23.30%	30	125,755,490	50.0%	36.9%	Dinas Dukcapil	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	280,834,600	24	84,534,800	12	43,300,000	6	9,125,000	50.00%	21.07%	30	93,659,800	50.0%	33.4%	Dinas Dukcapil	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	60	384,621,300	24	51,994,000	12	26,280,000	6	3,952,000	50.00%	15.04%	30	55,946,000	50.0%	14.5%	Dinas Dukcapil	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan	100%	249,000,000	200%	584,575,448	100%	346,890,000	33%	42,210,800	33.33%	22.22%	233%	626,786,248	233.3%	251.7%	Dinas Dukcapil	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	249,000,000	200%	584,575,448	100%	59,800,000	50%	20,628,300	50.00%	34.50%	250%	605,203,748	250.0%	243.1%	Dinas Dukcapil	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	4	249,000,000	1	584,575,448	1	59,800,000	0.5	20,628,300	50.00%	34.50%	1.5	605,203,748	37.5%	243.1%	Dinas Dukcapil	
		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	0%	0%	0%	-	100%	219,990,000	0%	-	0.00%	0.00%	0%	-	#DIV/0!	0.0%	Dinas Dukcapil	
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk	0	-	0	-	1	219,990,000	0	-	0.00%	0.00%	0	-	#DIV/0!	0.0%	Dinas Dukcapil	
		Penyeleenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk	0%	-	0%	-	100%	67,100,000	50%	21,582,500	50.00%	32.16%	50%	21,582,500	#DIV/0!	0.0%	Dinas Dukcapil	
		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	0	-	0	-	50,000	67,100,000	25,000	21,582,500	50.00%	32.16%	25000	21,582,500	#DIV/0!	0.0%	Dinas Dukcapil	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	0%	-	0%	-	100%	85,267,000	50%	22,359,628	50.00%	26.29%	50%	22,359,628	#DIV/0!	0.0%	Dinas Dukcapil	
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	0%	-	0%	-	100%	40,170,000	50%	11,028,128	50.00%	27.45%	50%	11,028,128	#DIV/0!	0.0%	Dinas Dukcapil	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksanakannya Pelayanan Pencatatan Sipil	0	-	0	-	1	40,170,000	0.5	11,028,128	50.00%	27.45%	0.5	11,028,128	#DIV/0!	0.0%	Dinas Dukcapil	
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Pencatatan Sipil	0%	-	0%	-	100%	45,097,000	50%	11,331,500	50.00%	25.13%	50%	11,331,500	#DIV/0!	0.0%	Dinas Dukcapil	
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	0	-	0	-	1	45,097,000	0.5	11,331,500	50.00%	25.13%	0.5	11,331,500	#DIV/0!	0.0%	Dinas Dukcapil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	35,000,000	0%	-	100%	56,650,000	50%	9,130,000	50.00%	16.12%	50%	9,130,000	50.0%	26.1%	Dinas Dukcapil	
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	0%	-	0%	-	100%	56,650,000	50%	9,130,000	50.00%	16.12%	50%	9,130,000	#DIV/0!	0.0%	Dinas Dukcapil	
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	0	-	0	-	16	56,650,000	8	9,130,000	50.00%	16.12%	8	9,130,000	#DIV/0!	0.0%	Dinas Dukcapil	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Kependudukan Skala Kabupaten dalam 1 Tahun	0%	-	0%	-	100%	45,596,000	33%	25,846,155	33.33%	56.69%	33%	25,846,155	#DIV/0!	0.0%	Dinas Dukcapil	
		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	0%	-	0%	-	100%	45,596,000	33%	25,846,155	33.33%	56.69%	33%	25,846,155	#DIV/0!	0.0%	Dinas Dukcapil	
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Agregat dan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Pesisir Barat	0	-	0	-	75	45,596,000	25	25,846,155	33.33%	56.69%	25	25,846,155	#DIV/0!	0.0%	Dinas Dukcapil	
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	39,072,640	100	6,400,000	100	7,040,000	100	1,856,800	100.00	26.38	100	8,256,800	100.0%	21.1%	DPMP	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	5	8,547,140	1	1,400,000	1	1,540,000	0	584,800	0.00	37.97	2	1,984,800	40.0%	23.2%	DPMP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	5	30,525,500	1	5,000,000	1	5,500,000	0	1,272,000	0.00	23.13	2	6,272,000	40.0%	20.5%	DPMP	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	11,645,604,626	100	1,488,212,409	100	1,940,988,400	100.00	754,961,158	100.00	38.90	100	2,243,173,567	100.0%	19.3%	DPMP	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	11,612,026,576	14	1,482,712,409	14	1,934,938,400	8	754,961,158	57.14	39.02	28	2,237,673,567	40.0%	19.3%	DPMP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	15,262,750	1	2,500,000	1	2,750,000	0	-	0.00	-	2	2,500,000	40.0%	16.4%	DPMP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulan/Se mest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	10	12,210,200	2	2,000,000	2	2,200,000	0	-	0.00	-	4	2,000,000	40.0%	16.4%	DPMP	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	6,105,100	1	1,000,000	1	1,100,000	0	-	0.00	-	2	1,000,000	40.0%	16.4%	DPMP	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	1,589,141,661	100	231,586,560	100	247,211,400	100.00	100,798,137	100.00	40.77	100	332,384,697	100.0%	20.9%	DPMP	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	60	19,878,206	12	3,256,000	12	3,581,000	6	1,158,000	50.00	32.34	24	4,414,000	40.0%	22.2%	DPMP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	152,627,500	1	25,000,000	1	25,000,000	0	-	0.00	-	1	25,000,000	20.0%	16.4%	DPMP	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK dan barang cetakan	60	158,379,725	12	24,396,200	12	30,732,620	6	12,618,200	50.00	41.06	24	37,014,400	40.0%	23.4%	DPMP	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah SKHU	50	73,261,200	12	12,000,000	12	12,000,000	6	5,000,000	50.00	41.67	24	17,000,000	48.0%	23.2%	DPMP	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	67,156,100	11	11,000,000	11	11,000,000	5	4,000,000	45.45	36.36	45.45454545	15,000,000	82.6%	22.3%	DPMP	
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	1,117,838,930	12	155,934,360	12	164,897,780	6	78,021,937	50.00	47.32	50	233,956,297	83.3%	20.9%	DPMP	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Prasarana dan prasarana pendukung kinerja	100	304,500,000	100	33,700,000	100	91,500,000	100	-	100.00	-	100	33,700,000	100.0%	11.1%	DPMP	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	26	304,500,000	2	33,700,000	8	91,500,000	0	-	0.00	-	8	33,700,000	30.8%	11.1%	DPMP	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100	884,225,240	100	129,687,850	100	136,819,000	100	73,645,050	100.00	53.83	100	203,332,900	100.0%	23.0%	DPMP	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	197,805,240	12	18,751,850	12	32,400,000	6	3,607,050	50.00	11.13	24	22,358,900	40.0%	11.3%	DPMP	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	15	641,035,500	12	105,000,000	12	97,000,000	6	67,500,000	50.00	69.59	24	172,500,000	160.0%	26.9%	DPMP	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	45,384,500	12	5,936,000	12	7,419,000	6	2,538,000	50.00	34.21	24	8,474,000	40.0%	18.7%	DPMP	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100	450,861,635	100	68,712,975	100	81,235,000	100	22,285,000	100.00	27.43	100	90,997,975	100.0%	20.2%	DPMP	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	10	359,895,645	2	54,852,975	2	64,845,000	1	19,785,000	50.00	30.51	4	74,637,975	40.0%	20.7%	DPMP	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	60	90,965,990	12	13,860,000	12	16,390,000	6	2,500,000	50.00	15.25	24	16,360,000	40.0%	18.0%	DPMP	
		PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa Berkembang	100	6,240,000,000	79	1,199,772,300	60	400,000,000	69	-	115.00	-	115	1,199,772,300	115.0%	19.2%	DPMP	
		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Berkembang	100	6,240,000,000	100	1,199,772,300	100	400,000,000	0	-	0.00	-	0	1,199,772,300	0.0%	19.2%	DPMP	
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Pekon	5	6,240,000,000	1	1,199,772,300	1	400,000,000	0	-	0.00	-	2	1,199,772,300	40.0%	19.2%	DPMP	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pekon Tertib Administrasi	100	14,041,013,140	83.67	3,747,554,789	100	1,701,743,480	100	127,782,640	100.00	7.51	100	3,875,337,429	100.0%	27.6%	DPMP	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pekon Tertib Administrasi	100	14,041,013,140	83.67	3,747,554,789	100	1,701,743,480	100	127,782,640	100.00	7.51	100	3,875,337,429	100.0%	27.6%	DPMP	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi yang Diberikan	60	7,048,568,680	12	1,020,000,580	12	1,182,639,480	6	2,985,800	50.00	0.25	24	1,022,986,380	40.0%	14.5%	DPMP	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pekon	580	1,029,254,000	116	103,681,250	116	196,799,800	32	56,598,990	27.59	28.76	232	160,280,240	40.0%	15.6%	DPMP	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah pekon	580	696,150,000			116	110,000,000	32	33,929,000	27.59	30.84	116	33,929,000	20.0%	4.9%	DPMP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	jumlah BUMDES	137	1,392,300,000			2	111,000,400	0	30,841,500	0.00	27.79	2	30,841,500	1.5%	2.2%	DPMP	
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa	12	1,392,300,000			1	101,303,800	0	3,427,350	0.00	3.38	1	3,427,350	8.3%	0.2%	DPMP	
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	110	5,963,190,460	68	2,623,872,959												
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100	12,379,295,430	100	1,657,169,496	100	1,596,495,430	100	193,698,434	100.00	12.13	100	1,850,867,930	100.0%	1495.1%		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100	12,379,295,430	100	1,657,169,496	100	1,596,495,430	100	193,698,434	100.00	12.13	100	1,850,867,930	100.0%	1495.1%	DPMP	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader Posyandu yang dibina	4500	6,933,300,000	900	900,000,000	900	891,500,000	0	-	0.00	-	1800	900,000,000	40.0%	1298.1%	DPMP	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	60	5,445,995,430	12	757,169,496	12	704,995,430	6	193,698,434	50.00	27.48	24	950,867,930	40.0%	1746.0%	DPMP	
		Bidang Perhubungan		100	Rp 13,974,052,400	80	Rp 2,406,695,497	72	Rp 5,684,891,200	63	Rp 3,109,865,315	88	55	143	Rp 5,516,560,812	142.9%	3947.7%	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	Rp 9,459,501,000	90	Rp 1,433,297,003	90	Rp 2,608,051,200	56	Rp 803,074,211	62	31	146	Rp 2,236,371,214	145.5%	2364.2%	Dinas Perhubungan	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Rp 32,000,000	90	Rp 6,400,000	90	Rp 6,400,000	100	Rp 6,400,000	111	100	190	Rp 12,800,000	190.0%	4000.0%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen dan Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	10	Rp 7,000,000	2	Rp 1,400,000	3	Rp 1,400,000	3	Rp 1,400,000	100	100	5	Rp 2,800,000	50.0%	4000.0%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	Rp 25,000,000	2	Rp 5,000,000	3	Rp 5,000,000	3	Rp 5,000,000	100	100	5	Rp 10,000,000	50.0%	4000.0%	Dinas Perhubungan	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Rp 6,781,956,000	90	Rp 878,019,103	90	Rp 2,090,391,200	57	Rp 622,901,239	63	30	147	Rp 1,500,920,342	146.5%	2213.1%	Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	65	Rp 6,754,456,000	14	Rp 872,519,103	14	Rp 2,084,891,200	8	Rp 620,870,439	57	30	22	Rp 1,493,389,542	33.8%	2211.0%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Rp 12,500,000	1	Rp 2,500,000	3	Rp 2,500,000	0	Rp -	0	0	1	Rp 2,500,000	20.0%	2000.0%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran	10	Rp 10,000,000	18	Rp 2,000,000	3	Rp 2,000,000	2	Rp 1,030,800	67	52	20	Rp 3,030,800	200.0%	3030.8%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	5	Rp 5,000,000	1	Rp 1,000,000	3	Rp 1,000,000	3	Rp 1,000,000	100	100	4	Rp 2,000,000	80.0%	4000.0%	Dinas Perhubungan	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Rp 1,500,000,000	90	Rp 300,000,000	90	Rp 55,000,000	8	Rp 21,988,000	9	40	98	Rp 321,988,000	97.7%	2146.6%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai	66	Rp 1,500,000,000	6	Rp 300,000,000	13	Rp 55,000,000	1	Rp 21,988,000	8	40	7	Rp 321,988,000	10.6%	2146.6%	Dinas Perhubungan	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Rp 523,045,000	90	Rp 122,377,900	90	Rp 170,960,000	41	Rp 66,619,872	45	39	131	Rp 188,997,772	130.8%	3613.4%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	60	Rp 5,000,000	6	Rp 1,000,000	12	Rp 3,000,000	6	Rp 1,540,000	50	51	12	Rp 2,540,000	20.0%	5080.0%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya pameran	60	Rp 125,000,000	1	Rp 25,000,000	12	Rp 25,000,000	1	Rp 2,000,000	8	8	2	Rp 27,000,000	3.3%	2160.0%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor, penggandaan dan barang cetak	60	Rp 125,045,000	12	Rp 38,777,900	12	Rp 25,130,800	7	Rp 12,904,660	58	51	19	Rp 51,682,560	31.7%	4133.1%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	50	Rp 60,000,000	10	Rp 12,000,000	12	Rp 12,000,000	4	Rp 4,000,000	33	33	14	Rp 16,000,000	28.0%	2666.7%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman	55	Rp 55,000,000	11	Rp 11,000,000	11	Rp 11,000,000	5	Rp 5,000,000	45	45	16	Rp 16,000,000	29.1%	2909.1%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi	60	Rp 153,000,000	12	Rp 34,600,000	12	Rp 94,829,200	6	Rp 41,175,212	50	43	18	Rp 75,775,212	30.0%	4952.6%	Dinas Perhubungan	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Rp 400,000,000	90	Rp 80,000,000	90	Rp 117,300,000	52	Rp 56,565,100	58	48	142	Rp 136,565,100	141.9%	3414.1%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terpenuhinya pembiayaan listrik, telpon dan internet	60	Rp 90,000,000	100	Rp 18,000,000	12	Rp 19,800,000	6	Rp 7,812,100	50	39	106	Rp 25,812,100	176.7%	2868.0%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pembiayaan sewa kantor, sewa rumah dinas dan sewa kendaraan dinas	5	Rp 285,000,000	100	Rp 57,000,000	3	Rp 92,500,000	2	Rp 46,000,000	67	50	102	Rp 103,000,000	2040.0%	3614.0%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	60	Rp 25,000,000	4	Rp 5,000,000	12	Rp 5,000,000	6	Rp 2,753,000	50	55	10	Rp 7,753,000	16.7%	3101.2%	Dinas Perhubungan	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Rp 222,500,000	90	Rp 46,500,000	90	Rp 168,000,000	43	Rp 28,600,000	48	17	133	Rp 75,100,000	132.9%	3375.3%	Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pembiayaan pemeliharaan kendaraan dinas dan pembiayaan pajak kendaraan dinas	25	Rp 210,000,000	4	Rp 44,000,000	5	Rp 163,000,000	2	Rp 26,100,000	40	16	6	Rp 70,100,000	24.0%	3338.1%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pembiayaan Pemeliharaan Gedung Kantor	5	Rp 12,500,000	12	Rp 2,500,000	2	Rp 5,000,000	1	Rp 2,500,000	50	50	13	Rp 5,000,000	260.0%	4000.0%	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100	Rp 3,970,001,400	100	Rp 853,465,776	70	Rp 2,940,520,000	83.3	Rp 2,249,661,104	119	77	183	Rp 3,103,126,880	183.3%	7816.4%	Dinas Perhubungan	
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100	Rp 3,572,100,000	100	Rp 731,965,776	70	Rp 993,920,000	62.5	Rp 558,571,904	89	56	163	Rp 1,290,537,680	162.5%	3612.8%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Biaya Rehabilitasi dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100	Rp 3,572,100,000	10	Rp 731,965,776	32	Rp 993,920,000	20	Rp 558,571,904	63	56	30	Rp 1,290,537,680	30.0%	3612.8%	Dinas Perhubungan	
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	Rp 85,000,000	100	Rp 17,000,000	70	Rp 151,599,600	67	Rp 93,368,800	95	62	167	Rp 110,368,800	166.7%	12984.6%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya biaya pelaksanaan operasi ketupat, operasi tahun baru dan operasi lilin	15	Rp 85,000,000	3	Rp 17,000,000	3	Rp 151,599,600	2	Rp 93,368,800	67	62	5	Rp 110,368,800	33.3%	12984.6%	Dinas Perhubungan	
		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100	Rp 312,901,400	70	Rp 80,800,000	70	Rp 295,000,400	50	Rp 97,720,400	71	33	120	Rp 178,520,400	120.0%	5705.3%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Transportasi teknis milih dinas	35	Rp 312,901,400	10	Rp 80,800,000	2	Rp 295,000,400	1	Rp 97,720,400	50	33	11	Rp 178,520,400	31.4%	5705.3%	Dinas Perhubungan	
		Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	0	Rp -	-	Rp 23,700,000	100	Rp 1,500,000,000	3	Rp 1,500,000,000	100	100	100	Rp 1,523,700,000	#DIV/0!	-	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	0	Rp -	-	Rp 23,700,000	100	Rp 1,500,000,000	3	Rp 1,500,000,000	100	100	100	Rp 1,523,700,000	#DIV/0!	-	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pengelolaan Pelayaran	100	Rp 544,550,000	50	Rp 119,932,718	55	Rp 136,320,000	50	Rp 57,130,000	91	42	100	Rp 177,062,718	100.0%	3251.5%	Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penetapan Lintas Penyeberangan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	100	Rp 544,550,000	50	Rp 119,932,718	55	Rp 136,320,000	50	Rp 57,130,000	91	42	100	Rp 177,062,718	100.0%	3251.5%	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya biaya operasional dan pemeliharaan kapal teknis milik pemerintahan daerah kabupaten pesisir barat	25	Rp 544,550,000	5	Rp 119,932,718	2	Rp 136,320,000	1	Rp 57,130,000	50	42	6	Rp 177,062,718	24.0%	3251.5%	Dinas Perhubungan	
		Bidang Komunikasi dan Informatika			33,492,528,110		4,099,414,236		6,656,205,700		2,285,409,696	28.72%	34.34%		6,384,823,932	#DIV/0!	19.1%	Dinas Kominfotik	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	95.00%	20,075,529,617	95.00%	2,831,910,366	90.00%	4,542,041,300	27.61%	1,639,973,576	26.18%	36.11%	24.44%	4,471,883,942	25.7%	22.3%	Dinas Kominfotik	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	95.00%	34,233,341	100.00%	2,835,000	100.00%	6,400,000	0	-	0.00%	0.00%	20.00%	2,835,000	21.1%	8.3%	Dinas Kominfotik	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	10	7,488,543	2	960,000	2	1,400,000	0	-	0.00%	0.00%	2	960,000	20.0%	12.8%	Dinas Kominfotik	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laoran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	10	26,744,798	2	1,875,000	2	5,000,000	0	-	0.00%	0.00%	2	1,875,000	20.0%	7.0%	Dinas Kominfotik	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	95.00%	9,117,721,557	100.00%	1,139,232,085	100.00%	1,598,901,700	12.50%	606,788,791	12.50%	37.95%	22.50%	1,746,020,876	23.7%	19.1%	Dinas Kominfotik	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	70	9,088,302,279	14	1,136,035,685	14	1,595,705,300	7	606,788,791	50.00%	38.03%	21	1,742,824,476	30.0%	19.2%	Dinas Kominfotik	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Thun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	5	13,372,399	1	1,200,000	1	1,200,000	0	-	0.00%	0.00%	1	1,200,000	20.0%	9.0%	Dinas Kominfotik	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	10	10,697,919	2	1,350,000	2	1,350,000	0	-	0.00%	0.00%	2	1,350,000	20.0%	12.6%	Dinas Kominfotik	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (laporan)	5	5,348,960	1	646,400	1	646,400	0	-	0.00%	0.00%	1	646,400	20.0%	12.1%	Dinas Kominfotik	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	95%	10,000,879,186	100.00%	1,578,665,705	100.00%	1,995,183,600	42.21%	586,748,270	35.06%	29.41%	28.01%	2,165,413,975	29.5%	21.7%	Dinas Kominfotik	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik (buah)	300	29,954,174	51	2,978,000	-	-	0	-	0.00%	-	51	2,978,000	17.0%	9.9%	Dinas Kominfotik	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas (unit)	10	877,229,377	2	91,250,000	2	265,298,000	2	27,500,000	50.00%	10.37%	4	118,750,000	40.0%	13.5%	Dinas Kominfotik	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Pameran Pembangunan Pesisir Barat (kali)	5	133,723,990	1	25,000,000	1	25,000,000	0	-	0.00%	0.00%	1	25,000,000	20.0%	18.7%	Dinas Kominfotik	
		Peneyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak, Penggandaan dan Kebutuhan ATK (bulan)	60	1,617,133,844	12	254,836,600	12	259,348,600	6	59,776,200	50.00%	23.05%	18	314,612,800	30.0%	19.5%	Dinas Kominfotik	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (bulan)	60	6,588,634,495	12	906,160,000	12	1,212,960,000	6	379,970,000	50.00%	31.33%	18	1,286,130,000	30.0%	19.5%	Dinas Kominfotik	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (bulan)	55	58,838,556	11	21,000,000	11	33,000,000	5	12,000,000	45.45%	36.36%	16	33,000,000	29.1%	56.1%	Dinas Kominfotik	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Di Luar Kantor (bulan)	60	695,364,750	12	277,441,105	12	199,577,000	6	107,502,070	50.00%	53.86%	18	384,943,175	30.0%	55.4%	Dinas Kominfotik	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	95.00%	363,729,254	75.00%	34,415,826	90.00%	845,556,000	50.00%	422,200,000	50.00%	49.93%	25.00%	456,615,826	26.3%	125.5%	Dinas Kominfotik	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	60	336,984,456	9	30,541,826	12	840,000,000	6	419,700,000	50.00%	49.96%	15	450,241,826	25.0%	133.6%	Dinas Kominfotik	
		Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (bulan)	60	26,744,798	9	3,874,000	12	5,556,000	6	2,500,000	50.00%	45.00%	15	6,374,000	25.0%	23.8%	Dinas Kominfotik	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik	95.00%	558,966,279	100%	76,761,750	90.00%	96,000,000	33.33%	24,236,515	33.33%	25.25%	26.67%	100,998,265	28.1%	18.1%	Dinas Kominfotik	
		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (bulan)	60	290,181,059	12	43,297,500	12	52,500,000	6	17,075,000	50.00%	32.52%	18	60,372,500	30.0%	20.8%	Dinas Kominfotik	
		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (bulan)	60	177,852,907	12	17,156,250	12	37,500,000	6	7,161,515	50.00%	19.10%	18	24,317,765	30.0%	13.7%	Dinas Kominfotik	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (bulan)	Jumlah Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (bulan)	60	90,932,313	12	16,308,000	12	6,000,000	0	-	0.00%	0.00%	12	16,308,000	20.0%	17.9%	Dinas Kominfotik	
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik	85.00%	12,557,842,972	100%	1,138,441,770	80.00%	1,831,292,500	39.02%	503,646,386	26.52%	21.79%	60.01%	1,642,088,156	70.6%	13.1%	Dinas Kominfotik	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Menerima Informasi Publik dari Saluran Resmi Pemerintahan Daerah	85.00%	12,557,842,972	100%	1,138,441,770	80.00%	1,831,292,500	39.02%	503,646,386	26.52%	21.79%	60.01%	1,642,088,156	70.6%	13.1%	Dinas Kominfotik	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah yang didesiminasikan sesuai strategi komunikasi (persen)	100.00%	1,783,072,568	100.00%	242,050,400	100.00%	370,803,000	23.64%	87,659,705	23.64%	23.64%	61.82%	329,710,105	61.8%	18.5%	Dinas Kominfotik	
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh dins provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No. 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (persen)	100.00%	3,019,594,232	100.00%	67,713,870	100.00%	72,800,000	30.67%	22,327,681	30.67%	30.67%	65.34%	90,041,551	65.3%	3.0%	Dinas Kominfotik	
		Pelayanan Informasi Publik	Persentase Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Barat (persen)	100.00%	309,867,265	100%	13,477,500	100.00%	128,677,500	1.77%	2,278,000	1.77%	1.77%	50.89%	15,755,500	50.9%	5.1%	Dinas Kominfotik	
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Media yang Bekerjasama (media)	500	7,445,308,907	114	815,200,000	100	1,259,012,000	196	391,381,000	50.00%	31.09%	310	1,206,581,000	62.0%	16.2%	Dinas Kominfotik	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	85.00%	859,155,521	100%	129,062,100	80.00%	282,871,900	50.00%	141,789,734	33.45%	50.13%	16.67%	270,851,834	19.6%	31.5%	Dinas Kominfotik	
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pemerintah Secara Digital	80.00%	859,155,521	100%	129,062,100	80.00%	282,871,900	50.00%	141,789,734	33.45%	50.13%	16.67%	270,851,834	20.8%	31.5%	Dinas Kominfotik	
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Derah	Operasional Pengolahan Data (bulan)	60	109,135,521	12	129,062,100	12	174,867,900	6	109,652,734	50.00%	62.71%	18	238,714,834	30.0%	218.7%	Dinas Kominfotik	
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (unit)	25	395,000,000	0	-	5	79,000,000	5	27,929,000	35.35%	35.35%	5	27,929,000	20.0%	7.1%	Dinas Kominfotik	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Ekosistem SPBE (dokumen)	5	355,020,000	0	-	1	29,004,000	0	4,208,000	15.00%	14.51%	0	4,208,000	0.0%	1.2%	Dinas Kominfotik	
		Bidang Statistik			308,234,965		37,884,100		41,045,000		8,546,000		20.82%		46,430,100	#DIV/0!	15.1%	Dinas Kominfotik	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik (dokumen)	10	308,234,965	1	37,884,100	1	41,045,000	1	8,546,000	10.00%	20.82%	1	46,430,100	10.0%	15.1%	Dinas Kominfotik	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Data Statistik Sektoral (dokumen)	10	308,234,965	1	37,884,100	1	41,045,000	1	8,546,000	10.00%	20.82%	1	46,430,100	10.0%	15.1%	Dinas Kominfotik	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (dokumen)	5	308,234,965	1	37,884,100	1	41,045,000	0	8,546,000	10.00%	20.82%	1	46,430,100	20.0%	15.1%	Dinas Kominfotik	
		Bidang Persandian			743,418,036		71,520,161		182,300,000		48,271,000		26.48%		119,791,161	#DIV/0!	16.1%	Dinas Kominfotik	
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik (persen)	100.00%	743,418,036	100.00%	71,520,161	100.00%	182,300,000	45.51%	48,271,000	40.00%	26.48%	35.51%	119,791,161	35.5%	16.1%	Dinas Kominfotik	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Keamanan Informasi Daerah (persen)	100.00%	347,500,000	0.00%	-	100.00%	47,500,000	41.03%	14,589,000	30.00%	30.71%	41.03%	14,589,000	41.0%	4.2%	Dinas Kominfotik	
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (perangkat daerah)	39	347,500,000	0	-	39	47,500,000	16	14,589,000	30.00%	30.71%	16	14,589,000	41.0%	4.2%	Dinas Kominfotik	
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100.00%	395,918,036	100.00%	71,520,161	100.00%	134,800,000	50.00%	33,682,000	50.00%	24.99%	30.00%	105,202,161	30.0%	26.6%	Dinas Kominfotik	
		Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (bulan)	60	395,918,036	12	71,520,161	12	134,800,000	6	33,682,000	50.00%	24.99%	18	105,202,161	30.0%	26.6%	Dinas Kominfotik	
		Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	70	1,640,079,014	90	2,318,645,100	50	1,099,740,701	55.555556	47.43	50	2,739,819,715	52.6%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	70	6,999,800	90	10,162,000	50	7,662,000	55.555556	75.40	50	14,661,800	52.6%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	10	0	2	2,000,000	2	5,162,000	2	5,162,000	100	100	4	7,162,000	40.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	0	12	4,999,800	12	5,000,000	6	2,500,000	50	50	18	7,499,800	30.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	70	1,181,858,490	90	1,756,316,600.00	50	793,321,552.00	55.555556	45.17	50	1,975,180,042.00	52.6%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	0	12	1,176,358,490	12	1,749,316,600	6	792,071,802	50	45.28	18	1,968,430,292	30.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	60	0	12	2,500,000	12	2,500,000	6	-	50	0	18	2,500,000	30.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	0	24	2,000,000	12	2,500,000	6	1,249,750	50	49.99	30	3,249,750	50.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	60	0	12	1,000,000	12	2,000,000	6	-	50	0	18	1,000,000	30.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	70	9,990,000	90	10,000,000.00	50	9,262,000.00	55.555556	92.62	50	19,252,000.00	52.6%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	60	0	12	9,990,000	12	10,000,000	6	9,262,000	50	92.62	18	19,252,000	30.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	70	242,831,733	90	255,352,000.00	50	133,218,779.00	55.5555556	52.17	50	376,050,512.00	52.6%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	60	0	24	2,840,000	12	1,388,000	0	-	0	0	24	2,840,000	40.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Keikutsertaan pada Krui Fair	4	0	2	25,000,000	1	25,000,000	0	-	0	0	2	25,000,000	50.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Barang Cetak dan Penggandaan	60	0	24	33,535,540	12	35,964,000	6	14,836,500	50	41.25	30	48,372,040	50.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	0	24	10,600,000	12	12,000,000	6	6,000,000	50	50.00	30	16,600,000	50.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianyan Makan dan Minum Kantor	55	0	22	10,967,000	11	11,000,000	5	3,996,000	45.4545455	36.3272727	27	14,963,000	49.1%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi Ke Dalam dan Luar Daerah	60	0	24	159,889,193	12	170,000,000	6	108,386,279	50	63.76	30	268,275,472	50.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	95	0	70	-	90	1,410,000	0	-	0			0	0.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	0	0	-	1	1,410,000	0	-	0		0	0	0.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	70	108,401,386	90	98,854,500	50	56,524,500	55.5555556	57.18	50	164,925,886	52.6%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	60	0	24	18,506,386	12	24,600,000	6	7,250,000	50	29.47	30	25,756,386	50.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya biaya Sewa Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas	60	0	24	84,500,000	12	72,000,000	6	47,500,000	50	65.97	30	132,000,000	50.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Kebersihan Kantor	60	0	24	5,395,000	12	2,254,500	6	1,774,500	50	78.71	30	7,169,500	50.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	70	89,997,605	90	186,550,000.00	50	99,751,870.00	55.5555556	53.47	50	189,749,475.00	52.6%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	60	0	24	79,997,605	12	133,550,000	6	48,251,870	50	36.13	30	128,249,475	50.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	60	0	24	10,000,000	12	53,000,000	6	51,500,000	50	97.17	30	61,500,000	50.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	55	0	50	223,487,500	50	63,828,000	50	20,954,000	100	32.83	50	244,441,500	90.9%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi Aktif	55	0	50	223,487,500	50	63,828,000	50	20,954,000	100	32.83	50	244,441,500	90.9%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koperasi Aktif	55	0	22	223,487,500	11	63,828,000	11	20,954,000	100	32.83	33	244,441,500	60.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten	60	0	45	465,971,000	45	520,370,000	45	177,242,000	100	34.06	45	643,213,000	75.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten	60		45.45	465,971,000	45	520,370,000	45	177,242,000	100	34.06	45	643,213,000	75.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Tentang Perkoperasian dan UMKM	20	0	8	465,971,000	4	520,370,000	2	177,242,000	50	34.06	10	643,213,000	50.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	2.29	0	0.15	1,907,662,400	1.98	230,000,000	1.0	218,974,000	47.979798	95.21	1.0	2,107,662,400	41.5%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	2.29	0	0.15	1,907,662,400	1.98	230,000,000	1.0	218,974,000	47.979798	95.21	1.0	2,107,662,400	41.5%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersedianya Hibah dan Bantuan Sosial	5	0	2	1,907,662,400	1	200,000,000	1	200,000,000	100	100.00	3	2,107,662,400	60.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Penyelenggaraan Pekan Festival UMKM	25	0	5	-	5	30,000,000	2	18,974,000	40	63.25	7	18,974,000	28.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Bidang Perdagangan																	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	11.59	0	14.68	860,104,000	11.55	490,453,000.00	12.9	69,563,200.00	111.341991	14.18	12.9	929,667,200.00	111.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	11.59	0	14.68	860,104,000	11.55	490,453,000.00	12.9	69,563,200.00	111.341991	14.18	12.9	929,667,200.00	111.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Perdagangan	5	0	1	158,448,000	2	389,642,000.00	1	16,275,000	50	4.18	2	174,723,000	40.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pasar	60	0	24	701,656,000	12	100,811,000	12	53,288,200	100	52.86	36	754,944,200	60.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok	70	0	30	#REF!	40	446,390,000.00	30	195,389,742.00	75	43.77	30	860,791,242.00	42.9%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok	70	0	30	19,943,500	40	60,358,000.00	30	8,871,000.00	75	14.70	30	28,814,500.00	42.9%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksananya Monitoring dan Sosialisasi Distribusi BBM dan BGG	60	0	24	19,943,500	12	60,358,000	6	8,871,000	50	14.70	30	28,814,500	50.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok	70	0	30	645,458,000	40	35,032,000	30	11,146,200	75	31.82	30	656,604,200	42.9%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring Evaluasi	260	0	104	645,458,000	52	35,032,000	26	11,146,200	50	31.82	130	656,604,200	50.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Program Pengembangan Ekspor	Net Ekspor Barang dan Jasa Pokok	43,227	0	43,055	-	43,098	351,000,000	20,000	175,372,542	46.4058657	49.96	20,000	175,372,542	46.3%		Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Net Ekspor Barang dan Jasa Pokok	43,227	0	43,055	-	43,098	351,000,000	1	175,372,542	0.00232029	49.9636872	1	175,372,542	0.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pameran Dagang Nasional		5	0	0	-	2	351,000,000	1	175,372,542	50	49.96	1	175,372,542	20.0%	0.0%	Dinas Koperasi, UKM	
		Bidang Penanaman Modal																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Dokumen	100%	14,412,914,145	100.00%	97.50%	100.00%	100.00%	16.65%	11.84%	16.65%	11.84%	20.71%	21.66%	20.0%	21.7%		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan	100%	66,327,101	99.47%	99.47%	100.00%	100.00%	25.78%	25.78%	0.00%	25.78%	20.00%	16.87%	20.0%	16.9%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	10	39,582,302	2	2,664,000	2	5,400,000	0	1,326,200	0.00%	24.56%	2	3,990,200	20.0%	10.1%	Dinas PMPTSP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	26,744,799	2	4,977,000	2	5,000,000	0	1,350,000	0.00%	27.00%	2	6,327,000	20.0%	23.7%	Dinas PMPTSP	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketertiban admistrasi Keuangan	100%	10,068,414,084	100.00%	91.89%	100.00%	100.00%	28.57%	10.54%	28.57%	10.54%	25.71%	19.29%	100.0%	19.3%	Dinas PMPTSP	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	10,037,368,720	14	1,301,951,836	14	1,988,494,900	9	678,277,115	64.29%	34.11%	23	1,980,228,951	32.9%	19.7%	Dinas PMPTSP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	13,372,400	1	2,500,000	1	2,304,000	0	-	0.00%	0.00%	1	2,500,000	20.0%	18.7%	Dinas PMPTSP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	90	12,324,004	18	2,269,000	18	2,500,000	9	201,600	50.00%	8.06%	27	2,470,600	30.0%	20.0%	Dinas PMPTSP	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5,348,961	1	1,000,000	1	1,000,000	0	-	0.00%	0.00%	1	1,000,000	20.0%	18.7%	Dinas PMPTSP	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terciptanya peningkatan SDM yang Berdaya saing	100%	125,000,000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	8.00%	20.0%	8.0%	Dinas PMPTSP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	10	125,000,000	2	10,000,000	5	25,000,000	0	-	0.00%	0.00%	2	10,000,000	20.0%	8.0%	Dinas PMPTSP	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perangkat daerah	100%	3,008,490,247	100.00%	99.58%	100.00%	100.00%	25.45%	11.07%	25.45%	11.07%	25.45%	11.07%	25.5%	17.2%	Dinas PMPTSP	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	133,723,991	1	24,985,000	1	25,000,000	0	-	0.00%	0.00%	1	24,985,000	20.0%	18.7%	Dinas PMPTSP	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	344,708,354	12	63,294,000	12	66,726,000	6	3,500,000	50.00%	5.25%	18	66,794,000	30.0%	19.4%	Dinas PMPTSP	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	50	64,187,516	10	12,000,000	10	12,000,000	0	-	0.00%	0.00%	10	12,000,000	20.0%	18.7%	Dinas PMPTSP	
		fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	58,838,557	11	11,000,000	11	11,000,000	3	3,000,000	27.27%	27.27%	14	14,000,000	25.5%	23.8%	Dinas PMPTSP	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	2,407,031,828	12	460,278,171	12	355,000,000	6	81,030,581	50.00%	22.83%	18	541,308,752	30.0%	22.5%	Dinas PMPTSP	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	100%	53,489,597	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	56.09%	121.4%	56.1%	Dinas PMPTSP	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	5	53,489,597	1	30,000,000	1	84,750,000	0	-	0.00%	0.00%	1	30,000,000	20.0%	56.1%	Dinas PMPTSP	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	749,127,146	100.00%	95.55%	100.00%	100.00%	50.00%	28.84%	50.00%	28.84%	23.33%	21.25%	94.2%	21.2%	Dinas PMPTSP	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	160,468,789	12	26,041,166	0	-	0	-	0.00%	0.00%	12	26,041,166	20.0%	16.2%	Dinas PMPTSP	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	15	572,338,680	3	107,000,000	3	57,000,000	3	29,000,000	100.00%	50.88%	6	136,000,000	40.0%	23.8%	Dinas PMPTSP	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	16,319,677	12	3,046,000	12	2,331,000	6	831,000	50.00%	35.65%	18	3,877,000	30.0%	23.8%	Dinas PMPTSP	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah	100%	342,065,969	100.00%	95.99%	100.00%	100.00%	12.50%	6.67%	12.50%	6.67%	15.00%	12.95%	0.0%	12.9%	Dinas PMPTSP	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	20	330,833,153	4	61,080,000	4	73,100,000	1	9,750,000	25.00%	13.34%	5	70,830,000	25.0%	21.4%	Dinas PMPTSP	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah izin Kendaraan	20	11,232,816	4	1,957,870	4	2,600,000	0	-	0.00%	0.00%	4	1,957,870	20.0%	17.4%	Dinas PMPTSP	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah minat Investasi	100%	3,814,576,076	100.00%	99.15%	100.00%	100.00%	50.00%	32.48%	50.00%	32.48%	30.00%	54.64%	87.9%	54.6%	Dinas PMPTSP	
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah minat Investasi	100%	3,814,576,076	100.00%	99.15%	100.00%	100.00%	50.00%	32.48%	50.00%	32.48%	30.00%	54.64%	100.0%	54.6%	Dinas PMPTSP	
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	10	3,814,576,076	2	1,617,429,117	2	1,437,000,000	1	466,770,828	50.00%	32.48%	3	2,084,199,945	30.0%	54.6%	Dinas PMPTSP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	3,303,251,813	100.00%	97.36%	100.00%	100.00%	68.96%	9.01%	68.96%	9.01%	23.79%	15.91%	20.0%	15.9%	Dinas PMPTSP	
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	6,105	3,303,251,813	100.00%	97.36%	100.00%	100.00%	68.96%	9.01%	68.96%	9.01%	23.79%	15.91%	100.0%	15.9%	Dinas PMPTSP	
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang dikeluarkan	3000	655,240,457	600	148,250,800	600	856,742,500	1655	73,124,500	275.83%	8.54%	2255	221,375,300	75.2%	33.8%	Dinas PMPTSP	
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Rekomendasi	3000	695,963,870	600	54,470,000	0	-	0	-	0.00%	0.00%	600	54,470,000	20.0%	7.8%	Dinas PMPTSP	
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan yang Ditindak Lanjuti	50	390,294,053	10	47,456,000	10	47,216,500	0	12,995,000	0.00%	27.52%	10	60,451,000	20.0%	15.5%	Dinas PMPTSP	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Laporan	55	1,561,753,433	11	102,058,980	0	-	0	-	0.00%	0.00%	11	102,058,980	20.0%	6.5%	Dinas PMPTSP	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	100%	3,529,074,244	100.00%	77.74%	100.00%	100.00%	0.00%	8.07%	0.00%	8.07%	20.00%	11.27%	25.0%	11.3%	Dinas PMPTSP	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	15	3,529,074,244	100.00%	77.74%	100.00%	100.00%	0.00%	8.07%	0.00%	8.07%	20.00%	11.27%	10.0%	11.3%	Dinas PMPTSP	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	5	925,357,921	1	56,309,000	1	50,000,000	0	8,119,200	0.00%	16.24%	1	64,428,200	20.0%	7.0%	Dinas PMPTSP	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	5	1,637,560,006	1	206,641,000	1	349,190,000	0	-	0.00%	0.00%	1	206,641,000	20.0%	12.6%	Dinas PMPTSP	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	5	966,156,317	1	123,175,000	1	180,940,000	0	14,400,000	0.00%	7.96%	1	137,575,000	20.0%	14.2%	Dinas PMPTSP	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	100%	1,604,711,994	100.00%	98.52%	100.00%	100.00%	0.00%	21.44%	0.00%	21.44%	20.00%	9.24%	20.0%	9.2%	Dinas PMPTSP	
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	5	1,604,711,994	100.00%	98.52%	100.00%	100.00%	0.00%	21.44%	0.00%	21.44%	20.00%	9.24%	0.0%	9.2%	Dinas PMPTSP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen	5	1,604,711,994	1	125,557,000	1	106,000,000	0	22,725,000	0.00%	21.44%	1	148,282,000	20.0%	9.2%	Dinas PMPTSP	
		Bidang Pemuda dan Olahraga																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	21,414,233,270	100%	3,217,597,441	90%	7,060,331,320	48.08	3,217,597,441	5342%	46%	48.08	3,217,597,441	5061.1%	15.0%	Dinas Pora	
		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		95%	32,000,000	100%	6,400,000.00	100%	6,400,000.00							0.0%		Dinas Pora	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja	19	7,000,000	4	1,400,000.00	2	1,400,000	-	-	0%	0%			0.0%	0.0%	Dinas Pora	
		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA- SKPD	24	25,000,000	4	5,000,000.00	2	5,000,000	1	958,000.00	50%	19%	14.97	958,000.00	62.4%	3.8%	Dinas Pora	
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah		85%	9,168,301,000	100%	1,088,029,005.00	90%	1,833,460,200.00	15.6%	794,384,821.00	17%	43%		-	0.0%		Dinas Pora	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pns	65	9,082,580,000	8	1,071,396,805.00	14	1,816,516,000	8	789,127,621.00	57%	43%	10.18	789,127,621.00	15.7%	8.7%	Dinas Pora	
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	Jumlah alat tulis kantor	72	57,221,000	12	11,132,200.00	12	11,444,200	6	5,257,200.00	50%	46%	47.23	5,257,200.00	65.6%	9.2%	Dinas Pora	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan SKPD	5	12,500,000	1	2,500,000.00	1	2,500,000	-	-	0%	0%		-	0.0%	0.0%	Dinas Pora	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulnan/triwulan	12	10,000,000	2	2,000,000.00	2	2,000,000	-	-	0%	0%		-	0.0%	0.0%	Dinas Pora	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analis prognosis realisasi anggaran skpd	6	6,000,000	1	1,000,000.00	1	1,000,000	-	-	0%	0%		-	0.0%	0.0%	Dinas Pora	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	50,000,000	100%	13,500,000	100%	13,500,000	0%	-	0%	0%		-	0.0%		Dinas Pora	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Jumlah aparatur SDM yang mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus/Pelatihan	5	50,000,000	1	13,500,000.00	1	13,500,000	-	-	0%	0%		-	0.0%	0.0%	Dinas Pora	
		Administrasi umum Perangkat Daerah		90%	1,071,179,000	100%	30,004,000	80%	319,431,000		-	0%	0%		-	0.0%		Dinas Pora	
		Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik	6	25,020,000	1	5,004,000.00	2	5,004,000	1	1,626,240.00	50%	32%	32.50	1,626,240.00	541.7%	6.5%	Dinas Pora	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah aktifitas	10	75,000,000	1	25,000,000.00	1	25,000,000	-	-	0%	0%		-	0.0%	0.0%	Dinas Pora	
		Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK	72	72,255,000	12	14,451,000.00	12	14,451,000	6	7,362,580.00	50%	51%	50.95	7,362,580.00	70.8%	10.2%	Dinas Pora	
		Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah SKHU	60	60,000,000	12	12,000,000.00	12	12,000,000	-	-	0%	0%		-	0.0%	0.0%	Dinas Pora	
		Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah layanan jasa penyediaan makan dan minum	120	55,000,000	12	12,000,000.00	12	12,000,000	6	7,500,000.00	50%	63%	41.67	7,500,000.00	34.7%	13.6%	Dinas Pora	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi diluar kantor	72	783,904,000	12	250,383,920.00	12	250,976,000	6	94,161,700.00	50%	38%	46.92	94,161,700.00	65.2%	12.0%	Dinas Pora	
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	591,740,000	100%	113,467,844	90%	118,348,000	13.33%	61,966,000.00	15%	52%		-	0.0%		Dinas Pora	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran tagihan	72	78,000,000	12	10,719,844.00	12	15,600,000	-	-	0%	0%		-	0.0%	0.0%	Dinas Pora	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bangunan dan kendaraan dinas	72	485,000,000	12	97,000,000.00	12	97,000,000	6	59,500,000.00	50%	61%	61.34	59,500,000.00	85.2%	12.3%	Dinas Pora	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tagihan	72	28,740,000	12	5,748,000.00	12	5,748,000	6	2,466,000.00	50%	43%	42.90	2,466,000.00	59.6%	8.6%	Dinas Pora	
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		95%	432,610,000	100%	110,122,000	90%	110,122,000	26.7%	58,050,000.00	30%	53%		-	0.0%		Dinas Pora	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Jumlah kendaraan	72	273,500,000	12	66,872,000.00	12	66,872,000	6	37,250,000.00	50%	56%	53.20	37,250,000.00	73.9%	13.6%	Dinas Pora	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah pajak	72	10,750,000	12	4,650,000.00	2	4,650,000	-	-	0%	0%		-	0.0%	0.0%	Dinas Pora	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	72	93,360,000	12	27,600,000.00	12	27,600,000	6	14,800,000.00	50%	54%	5362	14,800,000.00	7447.2%	15.9%	Dinas Pora	
		Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	72	25,000,000	12	5,000,000.00	12	5,000,000	6	3,000,000.00	50%	60%	60.00	3,000,000.00	83.3%	12.0%	Dinas Pora	
		Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	72	30,000,000	12	6,000,000.00	12	6,000,000	6	3,000,000.00	50%	50%	50.00	3,000,000.00	69.4%	10.0%	Dinas Pora	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan (persen)	60%	4,224,500,000			50%	2,175,574,800									Dinas Pora	
		Penyadaraan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor terhadap pemuda pelopor		60%	4,224,500,000	100%	632,644,068	100%	932,874,800	11.00%	67,395,800.00	11%	7%			0.0%		Dinas Pora	
		Koordinasi,sikronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Jumlah pemuda pelopor	15	316,900,000	12	49,335,000.00	14	151,354,800	7	67,395,800.00	50%	45%	49.98	75,645,800.00	333.2%	23.9%	Dinas Pora	
		Koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	12	282,600,000	12	16,500,000.00	20	56,520,000	-	-	0%	0%			0.0%	0.0%	Dinas Pora	
		Peningkatan Kepemimpinan , kepoloporan dan kesukarelawan pemuda	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan,perdamaian,dan lingkungan hidup	28	3,625,000,000	8	566,809,068.00	16	725,000,000	4	122,518,200.00	25%	17%	1	122,518,200.00	2.7%	3.4%	Dinas Pora	
		Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kab / kota		60%	1,242,700,000	100%	855,000,000	100%	1,242,700,000			0%	0%					Dinas Pora	
		Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kab / kota	Persentase organisasi kepemudaan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan	30	1,242,700,000	12	855,000,000.00	16	1,242,700,000	5	425,000,000.00	31%	34%	55.23	425,000,000.00	184.1%	34.2%	Dinas Pora	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan (persen)	60%	4,601,203,270			45%	2,483,495,320			0%	0%			0.0%		Dinas Pora	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan		60%	745,000,000	100%	79,990,000	100%	149,000,000			0%	0%			0.0%		Dinas Pora	
		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	60	745,000,000	12	79,990,000.00	20	149,000,000	11	78,273,900.00	55%	53%	78.27	78,273,900.00	130.5%	10.5%	Dinas Pora	
		Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kab / kota		40%	822,856,900	100%	61,106,400	100%	164,571,380			0%	0%			0.0%		Dinas Pora	
		Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kab / kota	Persentase penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan olahraga skala kabupaten yang di fasilitasi pemerintah daerah	10	822,856,900	4	61,106,400.00	10	164,571,380	-	-	0%	0%			0.0%	0.0%	Dinas Pora	
		Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi		80%	776,429,770	100%	264,485,954	100%	265,000,000			0%	0%			0.0%		Dinas Pora	
		Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kab / kota	Persentase olahragawan andalan yang di bina	60	776,429,770	12	264,485,954.00	14	265,000,000	5	93,508,000.00	36%	35%	34.00	93,508,000.00	56.7%	12.0%	Dinas Pora	
		Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga		60%	1,805,000,000	100%	1,165,000,000	100%	1,805,000,000			0%	0%			0.0%		Dinas Pora	
		Pengembangan organisasi keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi keolahragaan	20	1,805,000,000	12	1,165,000,000.00	15	1,805,000,000	11	1,340,000,000.00	73%	74%	76.79	1,340,000,000.00	384.0%	74.2%	Dinas Pora	
		Pembinaan dan Pengembangan olahraga rekreasi		60%	451,916,600	100%	99,923,940	100%	99,923,940			0%	0%			0.0%		Dinas Pora	
		Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Jumlah perlombaan olahraga massal	6	451,916,600	12	99,923,940.00	12	99,923,940	6	56,642,200.00	50%	57%	56.64	56,642,200.00	944.0%	12.5%	Dinas Pora	
		Bidang Perikanan			Rp 5,402,275,550		Rp 2,502,461,461		Rp 4,780,498,500		Rp 2,108,082,454		44%	0	Rp 4,610,543,915	#DIV/0!	85.3%	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	Rp 3,714,017,850	59%	Rp 1,918,807,216	90%	Rp 2,661,983,460	31%	Rp 829,745,194	34%	31%	0.9	Rp 2,748,552,410	94.7%	74.0%	Dinas Perikanan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93%	Rp 7,475,225	100%	Rp 6,399,950	90%	Rp 6,464,000	100%	Rp 6,464,000	111%	100%	200%	Rp 12,863,950	215.1%	172.1%	Dinas Perikanan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja	2	Rp 1,727,878	2	Rp 1,400,000	2	Rp 1,414,000	2	Rp 1,414,000	100%	100%	4	Rp 2,814,000	200.0%	162.9%	Dinas Perikanan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya RKA SKPD	2	Rp 5,747,347	2	Rp 4,999,950	2	Rp 5,050,000	2	Rp 5,050,000	100%	100%	4	Rp 10,049,950	200.0%	174.9%	Dinas Perikanan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 2,524,381,337	100%	Rp 1,196,172,336	90%	Rp 1,999,871,500	100%	Rp 531,830,104	111%	27%	2	Rp 1,728,002,440	200.0%	68.5%	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	14	Rp 2,512,903,339	14	Rp 1,187,172,336	14	Rp 1,990,498,500	8	Rp 527,305,104	57%	26%	22	Rp 1,714,477,440	157.1%	68.2%	Dinas Perikanan	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	1	Rp 3,085,446	1	Rp 2,500,000	1	Rp 2,525,000	1	Rp 2,525,000	100%	100%	2	Rp 5,025,000	200.0%	162.9%	Dinas Perikanan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	Rp 4,072,856	2	Rp 3,000,000	2	Rp 3,333,000	0	Rp -	0%	0%	2	Rp 3,000,000	100.0%	73.7%	Dinas Perikanan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	Rp 2,468,398	2	Rp 2,000,000	2	Rp 2,000,000	2	Rp 2,000,000	100%	100%	4	Rp 4,000,000	200.0%	162.0%	Dinas Perikanan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2	Rp 1,851,298	2	Rp 1,500,000	2	Rp 1,515,000	0	Rp -	0%	0%	2	Rp 1,500,000	100.0%	81.0%	Dinas Perikanan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	2	Rp 64,587,081	100%	Rp 15,000,000	90%	Rp 15,000,000	0	Rp -	0%	0%	1	Rp 15,000,000	50.0%	23.2%	Dinas Perikanan	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SMD Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	2	Rp 64,587,081	3	Rp 15,000,000	3	Rp 15,000,000	0	Rp -	0%	0%	3	Rp 15,000,000	150.0%	23.2%	Dinas Perikanan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Kantor	95%	Rp 454,728,163	100%	Rp 321,468,300	90%	Rp 242,507,552	100%	Rp 127,140,800	111%	52%	2	Rp 448,609,100	210.5%	98.7%	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan	5	Rp 4,912,111	1	Rp 2,623,000	1	Rp 4,019,800	1	Rp 4,019,800	100%	100%	2	Rp 6,642,800	40.0%	135.2%	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Pembiayaan Advetorial dan Pameran	5	Rp 30,854,970	1	Rp 25,000,000	1	Rp 25,000,000	1	Rp 25,000,000	100%	100%	2	Rp 50,000,000	40.0%	162.0%	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Biaya Fotocopy	12	Rp 39,434,628	12	Rp 30,329,100	12	Rp 27,487,752	6	Rp 13,536,000	50%	49%	18	Rp 43,865,100	150.0%	111.2%	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Rp 13,597,280	12	Rp 12,000,000	12	Rp 12,000,000	6	Rp 6,000,000	50%	50%	18	Rp 18,000,000	150.0%	132.4%	Dinas Perikanan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Kunjungan Tamu	11	Rp 12,464,174	11	Rp 11,000,000	11	Rp 11,000,000	5	Rp 5,000,000	45%	45%	16	Rp 16,000,000	145.5%	128.4%	Dinas Perikanan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Pembiayaan Rapat dan Konsultasi Luar Daerah	12	Rp 353,465,000	12	Rp 240,516,200	12	Rp 163,000,000	6	Rp 73,585,000	50%	45%	18	Rp 314,101,200	150.0%	88.9%	Dinas Perikanan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pemenuhan Sarana dan Prasarana SDM	95%	Rp 115,551,472	100%	Rp 30,000,000	90%	Rp 45,410,000	100%	Rp 45,410,000	111%	100%	2	Rp 75,410,000	210.5%	65.3%	Dinas Perikanan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Perlengkapan Kantor	3	Rp 46,457,374	0	Rp -	3	Rp 5,410,000	3	Rp 5,410,000	100%	100%	3	Rp 5,410,000	100.0%	11.6%	Dinas Perikanan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Perlengkapan Kantor	3	Rp 69,094,098	3	Rp 30,000,000	3	Rp 40,000,000	3	Rp 40,000,000	100%	100%	6	Rp 70,000,000	200.0%	101.3%	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	Rp 80,731,894	100%	Rp 127,669,780	90%	Rp 76,450,000	100%	Rp 45,175,290	111%	59%	2	Rp 172,845,070	210.5%	214.1%	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran Rekening Listrik dan Telepon	12	Rp 16,996,600	12	Rp 19,169,780	12	Rp 14,400,000	6	Rp 7,187,290	50%	50%	18	Rp 26,357,070	150.0%	155.1%	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pembiayaan Sewa Rumah Dinas	12	Rp 57,564,300	12	Rp 53,500,000	12	Rp 57,000,000	6	Rp 36,000,000	50%	63%	18	Rp 89,500,000	150.0%	155.5%	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Pembiayaan Kebersihan Kantor	12	Rp 6,170,994	12	Rp 55,000,000	12	Rp 5,050,000	6	Rp 1,988,000	50%	39%	18	Rp 56,988,000	150.0%	923.5%	Dinas Perikanan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	Rp 466,562,678	100%	Rp 222,096,850	90%	Rp 276,280,408	100%	Rp 73,725,000	111%	27%	2	Rp 295,821,850	210.5%	63.4%	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Rp 23,795,240	12	Rp 35,698,000	12	Rp 21,000,000	6	Rp 12,000,000	50%	57%	18	Rp 47,698,000	150.0%	200.5%	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12	Rp 343,962,041	12	Rp 142,398,850	12	Rp 220,880,408	6	Rp 37,450,000	50%	17%	18	Rp 179,848,850	150.0%	52.3%	Dinas Perikanan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Rp 33,727,287	1	Rp 20,000,000	1	Rp 15,000,000	1	Rp 15,000,000	100%	100%	2	Rp 35,000,000	200.0%	103.8%	Dinas Perikanan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Kantor	12	Rp 65,078,110	12	Rp 24,000,000	12	Rp 19,400,000	6	Rp 9,275,000	50%	48%	18	Rp 33,275,000	150.0%	51.1%	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	15002	Rp 640,339,224	13559	Rp 184,640,000	14136	Rp 753,259,760	13559	Rp 528,612,160	96%	70%	27118	Rp 713,252,160	180.8%	111.4%	Dinas Perikanan	
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di Danau Sungai Waduk atau Genangan Air Lainnya (Ton)	15002	Rp 425,453,492	13559	Rp 149,640,000	14136	Rp 650,000,000	13559	Rp 449,067,400	96%	69%	27118	Rp 598,707,400	180.8%	140.7%	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Terpenuhinya Prasarana Usaha Penangkapan Ikan	10	Rp 209,757,947	10	Rp 50,000,000	51	Rp 454,000,000	25	Rp 253,487,400	49%	56%	35	Rp 303,487,400	350.0%	144.7%	Dinas Perikanan	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terpenuhinya Sarana Usaha Penangkapan Ikan	16	Rp 215,695,545	13	Rp 99,640,000	28	Rp 196,000,000	28	Rp 195,580,000	100%	100%	41	Rp 295,220,000	256.3%	136.9%	Dinas Perikanan	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	360	Rp 214,885,732	0.95	Rp 35,000,000	245	Rp 103,259,760	212	Rp 79,544,760	87%	77%	212.95	Rp 114,544,760	59.2%	53.3%	Dinas Perikanan	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok	360	Rp 214,885,732	1	Rp 35,000,000	245	Rp 103,259,760	212	Rp 79,544,760	87%	77%	213	Rp 114,544,760	59.2%	53.3%	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	228.059	Rp 659,317,768	0.32	Rp 250,414,000	215	Rp 672,125,280	214	Rp 347,096,200	100%	52%	214.32	Rp 597,510,200	94.0%	90.6%	Dinas Perikanan	
		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Meningkatnya Kemampuan Pembudidaya Ikan	70	Rp 186,461,944	0	Rp -	215	Rp 121,356,280	214	Rp 21,402,000	100%	18%	214	Rp 21,402,000	305.7%	11.5%	Dinas Perikanan	
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya Kemampuan Pembudidaya Ikan (Orang)	70	Rp 65,162,938	0	Rp -	55	Rp 72,708,000	20	Rp 13,583,000	36%	19%	20	Rp 13,583,000	28.6%	20.8%	Dinas Perikanan	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terfasilitasinya Kegiatan Pembentukan Kelompok Perikanan (Kelompok)	12	Rp 121,299,006	0	Rp -	6	Rp 48,648,280	2	Rp 7,819,000	33%	16%	2	Rp 7,819,000	16.7%	6.4%	Dinas Perikanan	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Perikanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Perikanan	100%	Rp 472,855,824	71%	Rp 250,414,000	50	Rp 550,769,000	26	Rp 325,694,200	52%	59%	26.71	Rp 576,108,200	2671.0%	121.8%	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan	14	Rp 472,855,824	10	Rp 250,414,000	50	Rp 550,769,000	26	Rp 325,694,200	52%	59%	36	Rp 576,108,200	257.1%	121.8%	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batas Biologis yang Aman (Angka)	0.033	Rp 89,449,577	0.032	Rp 78,800,000	0.032	Rp 44,528,000	0.032	Rp 44,528,000	100%	100%	0.064	Rp 123,328,000	193.9%	137.9%	Dinas Perikanan	
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya Sumberdaya Perikanan (Dokumen)	1	Rp 89,449,577	1	Rp 78,800,000	1	Rp 44,528,000	1	Rp 44,528,000	100%	100%	2	Rp 123,328,000	200.0%	137.9%	Dinas Perikanan	
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya Sumberdaya Perikanan (Dokumen)	1	Rp 89,449,577	1	Rp 78,800,000	1	Rp 44,528,000	1	Rp 44,528,000	100%	100%	2	Rp 123,328,000	200.0%	137.9%	Dinas Perikanan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	43.35	Rp 299,151,131	39.47	Rp 69,800,245	40.85	Rp 648,602,000	0	Rp 358,100,900	0%	55%	39.47	Rp 427,901,145	91.0%	143.0%	Dinas Perikanan	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Peningkatan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Unit Usaha)	100%	Rp 115,798,935	100%	Rp 69,800,245	100%	Rp 73,602,000	100%	Rp 34,877,500	100%	47%	2	Rp 104,677,745	200.0%	90.4%	Dinas Perikanan	
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terselenggaranya Kegiatan Gelar Produk dan Pemasaran Hasil Perikanan (Jenis)	1	Rp 115,798,935	1	Rp 69,800,245	3	Rp 73,602,000	2	Rp 34,877,500	67%	47%	3	Rp 104,677,745	300.0%	90.4%	Dinas Perikanan	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedia Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	43%	Rp 183,352,196	0	Rp -	40.85	Rp 575,000,000	0	Rp 323,223,400	0%	56%	0	Rp 323,223,400	0.0%	176.3%	Dinas Perikanan	
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan (AKI)	43.35	Rp 183,352,196	0	Rp -	40.85	Rp 575,000,000	0	Rp 323,223,400	0%	56%	0	Rp 323,223,400	0.0%	176.3%	Dinas Perikanan	
		Bidang Pariwisata																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95%	16,336,483,825.00	90	2,608,491,948.00	90	3,468,451,700.00	36.00	1,383,140,505.00	40	39.88	36.00	1,383,140,505.00	3789.5%	846.7%	Dinas Pariwisata	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	111,884,535.00	100	20,622,350.00	100	18,468,000.00	40.00	7,967,000.00	40	43.14	40.00	7,967,000.00	4000.0%	712.1%	Dinas Pariwisata	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	10	49,365,460.00	2	6,931,780.00	2	7,400,000.00	1	5,565,000.00	50.00	75.20	1.00	5,565,000.00	10.0%	1127.3%	Dinas Pariwisata	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah DokumenPerubahan DPA-SKPD	5	37,519,075.00	1	8,690,570.00	1	6,068,000.00	0	-	0.00	-	0.00	-	0.0%	0.0%	Dinas Pariwisata	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	25,000,000.00	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	1	2,402,000.00	50.00	48.04	1.00	2,402,000.00	10.0%	960.8%	Dinas Pariwisata	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PersentasePelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	9,592,366,510.00	100	1,181,595,762.00	90	1,908,887,100.00	63	859,889,657.00	69.57	45.05	62.61	859,889,657.00	6260.9%	896.4%	Dinas Pariwisata	
		Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	84	9,409,976,000.00	14	1,159,785,732.00	14	1,878,044,100.00	8	846,976,157.00	57.14	45.10	8.00	846,976,157.00	9.5%	900.1%	Dinas Pariwisata	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Administrasi Perkantoran UPTD	72	154,890,510.00	12	16,310,030.00	12	25,343,000.00	6	10,913,500.00	50.00	43.06	6.00	10,913,500.00	8.3%	704.6%	Dinas Pariwisata	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	12,500,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	0	-	0.00	-	0.00	-	0.0%	0.0%	Dinas Pariwisata	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	90	10,000,000.00	18	2,000,000.00	18	2,000,000.00	18	2,000,000.00	100.00	100.00	18.00	2,000,000.00	20.0%	2000.0%	Dinas Pariwisata	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	0	-	0.00	-	0.00	-	0.0%	0.0%	Dinas Pariwisata	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik		159,500,000.00	0	-	90	75,000,000.00	50	41,900,000.00	55.56	55.87	50.00	41,900,000.00	#DIV/0!	2627.0%	Dinas Pariwisata	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Menikuti Peningkatan Kapasitas		159,500,000.00	0	-	12	75,000,000.00	6	41,900,000.00	50.00	55.87	6.00	41,900,000.00	#DIV/0!	2627.0%	Dinas Pariwisata	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100%	2,198,206,045.00	100	640,934,335.00	90	424,643,600.00	44.0816327	170,891,621.00	48.98	40.24	44.08	170,891,621.00	4408.2%	777.4%	Dinas Pariwisata	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	14,577,000.00	1	1,557,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	100.00	100.00	1.00	2,500,000.00	20.0%	1715.0%	Dinas Pariwisata	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	8	323,850,000.00	1	24,931,000.00	1	25,000,000.00	0	-	0.00	0	0.00	-	0.0%	0.0%	Dinas Pariwisata	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK)	60	353,029,045.00	12	82,681,175.00	12	138,643,600.00	6	53,463,000.00	50.00	38.56	6.00	53,463,000.00	10.0%	1514.4%	Dinas Pariwisata	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	60	60,000,000.00	12	11,900,000.00	12	12,000,000.00	6	4,000,000.00	50.00	33.33	6.00	4,000,000.00	10.0%	666.7%	Dinas Pariwisata	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	101,750,000.00	11	16,500,000.00	11	16,500,000.00	5	6,000,000.00	45.45	36.36	5.00	6,000,000.00	9.1%	589.7%	Dinas Pariwisata	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di Luar Kantor	60	1,345,000,000.00	12	503,365,160.00	12	230,000,000.00	6	104,928,621.00	50.00	45.62	6.00	104,928,621.00	10.0%	780.1%	Dinas Pariwisata	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100	363,349,535.00	100	94,505,000.00	90	51,230,000.00	54.00	15,980,000.00	60.00	31.19	90.00	15,980,000.00	90.0%	439.8%	Dinas Pariwisata	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap	18	363,349,535.00	7	94,505,000.00	5	51,230,000.00	3	15,980,000.00	60.00	31.19	3.00	15,980,000.00	16.7%	439.8%	Dinas Pariwisata	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100	3,149,927,200.00	100	489,114,275.00	90	764,893,000.00	45	274,335,237.00	50.00	35.87	45.00	274,335,237.00	45.0%	870.9%	Dinas Pariwisata	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	751,800,000.00	12	97,701,875.00	12	111,000,000.00	6	35,050,237.00	50.00	31.58	6.00	35,050,237.00	10.0%	466.2%	Dinas Pariwisata	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan	60	475,000,000.00	12	67,000,000.00	12	67,000,000.00	6	42,500,000.00	50.00	63.43	6.00	42,500,000.00	10.0%	894.7%	Dinas Pariwisata	
		Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	1,923,127,200.00	12	324,412,400.00	12	586,893,000.00	6	196,785,000.00	50.00	33.53	6.00	196,785,000.00	10.0%	1023.3%	Dinas Pariwisata	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik	100%	920,750,000.00	100	181,720,226.00	90	225,330,000.00	47.65	54,076,990.00	52.94	24.00	47.65	54,076,990.00	4764.7%	587.3%	Dinas Pariwisata	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan	26	509,500,000.00	4	123,970,226.00	5	134,870,000.00	3	18,301,990.00	60.00	13.57	3.00	18,301,990.00	11.5%	359.2%	Dinas Pariwisata	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	411,250,000.00	12	57,750,000.00	12	90,460,000.00	6	35,775,000.00	50.00	39.55	6.00	35,775,000.00	10.0%	869.9%	Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA	PAD Sektor Wisata (Milyar)	100%	1,910,452,000.00	100	397,143,960.00	100	90,000,000.00	100	28,207,800.00	100.00	31.34	100.00	28,207,800.00	10000.0%	147.6%	Dinas Pariwisata	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		15	1,910,452,000.00	3	397,143,960.00	3	90,000,000.00	3	28,207,800.00	100	31.34	3.00	28,207,800.00	20.0%	147.6%	Dinas Pariwisata	
		Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Terbangun	60	1,910,452,000.00	12	397,143,960.00	12	90,000,000.00	6	28,207,800.00	50.00	31.34	6.00	28,207,800.00	10.0%	147.6%	Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan Wisata (Orang)	100000 Orang	31,900,000,000.00	394735	3,818,932,918.00	62500	5,452,400,000.00	62176	2,950,768,038.00	99.48	54.12	62176.00	2,950,768,038.00	#VALUE!	925.0%	Dinas Pariwisata	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan		31,900,000,000.00	100	3,818,932,918.00	100	5,452,400,000.00	50	2,950,768,038.00	50	54.12		2,950,768,038.00	#DIV/0!	925.0%	Dinas Pariwisata	
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersiarinya Publikasi Pariwisata Pesisir Barat	150	3,400,000,000.00	0	-	1	152,400,000.00	0	-	0.00	-	0.00	-	0.0%	0.0%	Dinas Pariwisata	
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Krui Pro 2023 dan Terpilihnya Duta Wisata Muli Mekhanai	11	28,500,000,000.00	2	3,818,932,918.00	2	5,300,000,000.00	2	2,950,768,038.00	100.00	55.67	2.00	2,950,768,038.00	18.2%	1035.4%	Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Fasilitasi Pengembangan SDM Pariwisata	50%	838,000,000.00	0	-	20	182,192,400.00	0	119,986,400.00	0.00	65.86	0.00	119,986,400.00	0.0%	1431.8%	Dinas Pariwisata	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Desa Wisata		838,000,000.00	0	-	100	182,192,400.00	100	119,986,400.00	100.00	65.86	0.00	119,986,400.00	#DIV/0!	1431.8%	Dinas Pariwisata	
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Tersediannya Pelatihan peningkatan Mutu Produk	4	838,000,000.00	0	-	1	182,192,400.00	1	119,986,400.00	100.00	65.86	1.00	119,986,400.00	25.0%	1431.8%	Dinas Pariwisata	
		Bidang Sekretariat Daerah																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100%	267,604,023,033	100%	41,914,855,208	100%	63,255,943,154	39%	22,828,792,175	39%	36%	139%	22,828,792,175	100.0%	35.0%	Setda	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	138,577,500	100%	25,000,000	100%	25,000,000	0%	2,619,400	0%	10%	0%	27,619,400	0.0%	19.9%	Setda	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perncaaan Perangkat Daerah	5	27,715,500	1 Dokumen	5,000,000	1.00	5,000,000.00	0 Dokumen	2,619,400.00	0%	52%	0 Dokumen	7,619,400	#VALUE!	27.5%	Setda	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	27,715,500	1 Dokumen	5,000,000	1.00	5,000,000.00	0 Dokumen	0.00	0%	0%	0 Dokumen	5,000,000	#VALUE!	18.0%	Setda	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	27,715,500	1 Dokumen	5,000,000	1.00	5,000,000.00	0 Dokumen	0.00	0%	0%	0 Dokumen	5,000,000	#VALUE!	18.0%	Setda	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5	27,715,500	1 Dokumen	5,000,000	1.00	5,000,000.00	0 Dokumen	0.00	0%	0%	0 Dokumen	5,000,000	#VALUE!	18.0%	Setda	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5	27,715,500	1 Dokumen	5,000,000	1.00	5,000,000.00	0 Dokumen	0.00	0%	0%	0 Dokumen	5,000,000	#VALUE!	18.0%	Setda	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan, Monev dan Pembuatan Laporan	100%	126,190,336,159	100%	17,269,593,516.00	100%	20,085,670,500	50%	9,842,304,604.00	50%	49%	100%	27,111,898,120	100.0%	21.5%	Setda	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	60	126,185,740,603	12.00	17,268,747,516.00	12.00	20,081,350,500.00	6.00	9,842,304,604.00	50%	49%	6.00	27,111,052,120	10.0%	21.5%	Setda	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60	1,531,852	12.00	282,000.00	12.00	1,440,000.00	6.00	0.00	50%	0%	6.00	282,000	10.0%	18.4%	Setda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	60	1,531,852	12.00	282,000.00	12.00	1,440,000.00	6.00	0.00	50%	0%	6.00	282,000	10.0%	18.4%	Setda	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	60	1,531,852	12.00	282,000.00	12.00	1,440,000.00	6.00	0.00	50%	0%	6.00	282,000	10.0%	18.4%	Setda	
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	3,014,815,500	100%	613,749,609	100%	521,936,400	50%	433,667,337.00	50%	83%	35%	1,047,416,946	20.0%	34.7%	Setda	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Belanja Premi Asuransi untuk Kendaraan Dinas	60	3,014,815,500	12.00	613,749,609	12.00	500,000,000.00	6.00	424,667,337.00	50%	85%	6.00	1,038,416,946	10.0%	10.0%	Setda	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	109,682,000	0.00	-	12.00	21,936,400.00	6.00	9,000,000.00	50%	41%	6.00	9,000,000	10.0%	10.0%	Setda	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100%	2,039,264,661	100%	408,712,000.00	100%	600,584,400	33%	216,204,250.00	33%	36%	30%	624,916,250	30.0%	30.0%	Setda	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	36	137,809,200	0%	0.00	12.00	45,936,400	6.00	18,000,000.00	50%	39%	6.00	18,000,000	16.7%	16.7%	Setda	
		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	1050	1,930,622,661	100 stel	338,712,000.00	210.00	374,648,000.00	0 stel	35,000,000.00	0%	9%	0 stel	373,712,000	#VALUE!	#VALUE!	Setda	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60	108,642,000	12.00	70,000,000.00	12.00	180,000,000.00	6.00	163,204,250.00	50%	91%	6.00	233,204,250	10.0%	10.0%	Setda	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	5,806,463,871	100%	1,863,814,962.00	100%	2,305,651,260	50%	1,400,166,902.00	50%	61%	7%	3,263,981,864	0.0%	66.1%	Setda	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	80,514,586	12.00	26,193,000.00	12.00	27,122,000.00	6.00	17,088,000.00	50%	63%	6.00	43,281,000	10.0%	53.8%	Setda	
		Penyediaan Bahan Logistik	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik	60	135,802,500	12.00	25,000,000.00	12.00	50,000,000.00	6.00	0.00	50%	0%	6.00	25,000,000	10.0%	18.4%	Setda	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	188,846,792	12.00	113,216,194.00	12.00	328,658,400.00	6.00	198,801,065.00	50%	60%	6.00	312,017,259	10.0%	165.2%	Setda	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	458,088,993	12.00	51,214,000.00	12.00	275,010,000.00	6.00	209,204,900.00	50%	76%	6.00	260,418,900	10.0%	56.8%	Setda	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu Pemda	60	2,770,371,000	12.00	1,133,136,150.00	12.00	1,050,000,000.00	6.00	716,694,550.00	50%	68%	6.00	1,849,830,700	10.0%	66.8%	Setda	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	2,172,840,000	12.00	515,055,618.00	12.00	574,860,860.00	6.00	258,378,387.00	50%	45%	6.00	773,434,005	10.0%	35.6%	Setda	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100	523,958,637	100%	158,016,000.00	100%	2,242,420,000	50%	125,719,900.00	50%	6%	25%	283,735,900	100.0%	54.2%	Setda	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas	36	5,582,940,000	-	0.00	12.00	1,860,980,000	6.00	0.00	50%	0%	6.00	0	16.7%	0.0%	Setda	
		Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	36	452,940,000	-	0.00	12.00	150,980,000	6.00	0.00	50%	0%	6.00	0	16.7%	0.0%	Setda	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	60	523,958,637	12.00	158,016,000.00	12.00	130,980,000	6.00	125,719,900.00	50%	96%	6.00	283,735,900	10.0%	54.2%	Setda	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	36	298,440,000	-	0.00	12.00	99,480,000	6.00	0.00	50%	0%	6.00	0	16.7%	0.0%	Setda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	95,137,756,105	12.00	16,463,664,073.00	12 Bulan	30,795,640,000	50%	8,111,991,748.00	50%	26%	12.00	24,575,655,821	20.0%	30.8%	Setda	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	3,618,821,725	12.00	475,414,073.00	12.00	1,332,400,000.00	6.00	808,663,554.00	50%	61%	6.00	1,284,077,627	10.0%	35.5%	Setda	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Volume Penyediaan Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas	60	3,324,445,200	12.00	355,000,000.00	12.00	910,000,000.00	6.00	698,350,000.00	50%	77%	6.00	1,053,350,000	10.0%	31.7%	Setda	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Administrasi Keuangan Terlaksana dengan Baik	60	88,194,489,180	12.00	15,633,250,000.00	12.00	28,553,240,000.00	6.00	6,604,978,194.00	50%	23%	6.00	22,238,228,194	10.0%	25.2%	Setda	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	11,161,335,870	100%	1,286,667,194.00	100%	2,390,000,000	50%	883,572,262.00	50%	37%	25%	2,170,239,456	20.0%	67.2%	Setda	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	60	6,094,816,200	12.00	610,026,227.00	12.00	876,800,000.00	6.00	318,324,403.00	50%	36%	6.00	928,350,630	10.0%	15.2%	Setda	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	4,182,173,790	12.00	548,142,467.00	12.00	1,071,200,000.00	6.00	393,584,859.00	50%	37%	6.00	941,727,326	10.0%	22.5%	Setda	
		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	60	851,753,280	12.00	113,170,000.00	12.00	337,000,000.00	6.00	120,583,000.00	50%	36%	6.00	233,753,000	10.0%	27.4%	Setda	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60	32,592,600	12.00	15,328,500.00	12.00	105,000,000.00	6.00	51,080,000.00	50%	49%	6.00	66,408,500	10.0%	203.8%	Setda	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	100%	3,132,808,473	100%	539,400,432.00	100%	588,789,500	50%	260,549,269.00	50%	44%	27%	799,949,701	100.0%	27.9%	Setda	
		Penyedian Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Penyedian Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	60	933,800,261	0.00	167,400,432.00	12.00	168,089,500.00	6.00	94,189,891.00	50%	56%	6.00	261,590,323	10.0%	28.0%	Setda	
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksannya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	36	152,627,500	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	6.00	16,359,378.00	50%	65%	6.00	16,359,378	16.7%	10.7%	Setda	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	140	416,750,712	28 stel	72,000,000.00	28.00	95,700,000.00	0 stel	0.00	50%	0%	0 stel	72,000,000	#VALUE!	17.3%	Setda	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	60	1,629,630,000	12.00	300,000,000.00	12.00	300,000,000.00	6.00	150,000,000.00	50%	50%	6.00	450,000,000	10.0%	27.6%	Setda	
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi dalam Proses Fasilitasi Kerumah Tangga Sekretariat Daerah	100	8,190,206,400	100%	1,332,582,000.00	100%	1,612,591,580	50%	770,279,680.00	50%	48%	20%	2,102,861,680	0.2%	26.4%	Setda	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	60	3,788,573,600	12.00	641,248,000.00	12.00	739,709,200.00	6.00	345,424,880.00	50%	47%	6.00	986,672,880	10.0%	26.0%	Setda	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga wakil Kepala Daerah	60	2,783,635,100	12.00	343,613,000.00	12.00	569,709,200.00	6.00	267,551,580.00	50%	47%	6.00	611,164,580	10.0%	22.0%	Setda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	60	1,617,997,700	12.00	347,721,000.00	12.00	303,173,180.00	6.00	157,303,220.00	50%	52%	6.00	505,024,220	10.0%	31.2%	Setda	
		Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	100%	3,462,708,437	100%	350,381,720.00	100%	392,233,000.00	33%	150,733,387.00	33%	38%	100%	501,115,107	100.0%	18.0%	Setda	
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	250	1,025,483,733	50 buku	120,927,040.00	50.00	101,775,000.00	20 buku	40,637,350.00	40%	40%	20 buku	161,564,390	#VALUE!	15.8%	Setda	
		Fasilitasi Pelayan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayan Publik dan Tata Laksana	250	1,720,717,570	50 buku	147,247,750.00	50.00	137,396,000.00	10 buku	32,653,200.00	20%	24%	10 buku	179,900,950	#VALUE!	10.5%	Setda	
		Peningakatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningakatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	275	303,449,164	50 buku	39,167,930.00	55.00	104,812,000.00	30 buku	69,442,837.00	55%	66%	30 buku	108,610,767	#VALUE!	35.8%	Setda	
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	304,415,970		31,872,000.00	1.00	40,250,000.00	0 buku	0.00	0%	0%	0 buku	31,872,000	#VALUE!	10.5%	Setda	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	60	108,642,000		11,167,000.00	12.00	8,000,000.00	6.00	8,000,000.00	50%	100%	6.00	19,167,000	10.0%	17.6%	Setda	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksanaan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	8,805,791,420	100%	1,603,273,702.00	100%	1,695,426,514	0%	630,983,436.00	0%	37%	100%	2,234,257,138	100.0%	22.9%	Setda	
		Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	5	3,928,276,348	1 kegiatan	870,324,343.00	1.00	813,738,514.00	0 kegiatan	311,633,660.00	0%	38%	0 kegiatan	1,181,958,003	#VALUE!	30.1%	Setda	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	5	3,074,057,872	1 kegiatan	579,994,609.00	1.00	652,688,000.00	0 kegiatan	284,634,776.00	0%	44%	0 kegiatan	864,629,385	#VALUE!	28.1%	Setda	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5	1,803,457,200	1 kegiatan	152,954,750.00	1.00	229,000,000.00	0 kegiatan	34,715,000.00	0%	15%	0 kegiatan	187,669,750	#VALUE!	10.4%	Setda	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persen)	100%	41,401,178,118	100%	5,704,039,115.00	100%	7,468,297,186	39%	2,881,693,265.00	39%	34%	100%	8,585,732,380	100.0%	26.0%	Setda	
		Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100%	4,361,017,533	100%	889,822,691.00	100%	1,286,483,840	38%	368,045,000.00	38%	29%	100%	1,257,867,691	100.0%	29.1%	Setda	
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	130	2,810,533,230	26 Kegiatan	539,492,150.00	26.00	843,398,000.00	10 Kegiatan	267,267,600.00	38%	32%	10 Kegiatan	806,759,750	#VALUE!	28.7%	Setda	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	20	711,876,705	4 Laporan	187,335,129.00	4.00	284,604,000.00	1 Laporan	33,211,000.00	25%	12%	1 Laporan	220,546,129	#VALUE!	31.0%	Setda	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	838,607,598	20 buku	162,995,412.00	20.00	158,481,840.00	10 buku	67,566,400.00	50%	43%	10 buku	230,561,812	#VALUE!	27.5%	Setda	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	32,600,730,547	100%	3,980,748,285.00	100%	4,890,234,204	27%	2,039,425,860.00	27%	42%	100%	6,020,174,145	100.0%	18.5%	Setda	
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	20	8,512,109,390	4 kegiatan	1,292,234,044.00	4.00	1,407,289,528.00	2 kegiatan	679,425,860.00	50%	48%	2 kegiatan	1,971,659,904	#VALUE!	23.2%	Setda	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	160	23,735,993,127	23 Kegiatan	2,663,147,560.00	32.00	3,411,537,516.00	10 Kegiatan	1,360,000,000.00	31%	40%	10 Kegiatan	4,023,147,560	#VALUE!	16.9%	Setda	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	5	352,628,030	1 kegiatan	25,366,681.00	1.00	71,407,160.00	0 kegiatan	0.00	0%	0%	0 kegiatan	25,366,681	#VALUE!	7.2%	Setda	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi hukum	100%	3,879,815,096	100%	736,925,484.00	100%	1,106,153,142	62%	420,840,405.00	62%	38%	100%	1,157,765,889	100.0%	29.8%	Setda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	15	2,470,828,165	3 laporan	446,069,988.00	3.00	560,857,200.00	2 laporan	266,290,818.00	67%	47%	2 laporan	712,360,806	#VALUE!	28.8%	Setda	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	750	949,194,433	150 peserta	207,590,505.00	150.00	486,034,342.00	30 peserta	99,953,687.00	20%	21%	30 peserta	307,544,192	#VALUE!	32.4%	Setda	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	10	459,792,498	2 dokumen	83,264,991.00	2.00	59,261,600.00	2 dokumen	54,595,900.00	100%	92%	2 dokumen	137,860,891	#VALUE!	30.0%	Setda	
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	559,614,942	100%	96,542,655.00	100%	185,426,000	0%	53,382,000.00	0%	29%	100%	149,924,655	100.0%	26.8%	Setda	
		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	5	559,614,942	1 kegiatan	96,542,655.00	1.00	185,426,000.00	0 kegiatan	53,382,000.00	0%	29%	0 kegiatan	149,924,655	#VALUE!	26.8%	Setda	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100%	20,079,693,791	100%	2,714,003,438.00	100%	3,580,994,266	16%	483,769,348.00	16%	14%	78%	3,197,772,786	78.1%	15.9%	Setda	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	100%	6,649,525,952	100%	686,783,084.00	100%	1,040,395,440	0%	105,671,640.00	0%	10%	100%	792,454,724	100.0%	11.9%	Setda	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5	578,913,019	1 kegiatan	22,618,878.00	1.00	105,169,360.00	0 kegiatan	15,371,100.00	0%	15%	0 kegiatan	37,989,978	#VALUE!	6.6%	Setda	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5	5,237,569,979	1 kegiatan	596,801,806.00	1.00	756,595,480.00	0 kegiatan	65,518,220.00	0%	9%	0 kegiatan	662,320,026	#VALUE!	12.6%	Setda	
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Operasional Tim Monitoring dan Evaluasi KUR	5	833,042,954	1 kegiatan	67,362,400.00	1.00	178,630,600.00	0 kegiatan	24,782,320.00	0%	14%	0 kegiatan	92,144,720	#VALUE!	11.1%	Setda	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	100%	8,211,236,235	100%	1,097,474,458.00	100%	1,888,827,855	0%	225,898,000.00	0%	12%	100%	1,323,372,458	100.0%	16.1%	Setda	
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	15	3,918,831,014	3 dokumen	576,668,628.00	3.00	619,957,832.00	0 dokumen	81,831,000.00	0%	13%	0 dokumen	658,499,628	#VALUE!	16.8%	Setda	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15	2,769,632,234	3 dokumen	141,721,500.00	3.00	821,712,000.00	0 dokumen	86,350,800.00	0%	11%	0 dokumen	228,072,300	#VALUE!	8.2%	Setda	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	20	1,522,772,987	4 Dokumen	379,084,330.00	4.00	447,158,023.00	0 dokumen	57,716,200.00	0%	13%	0 dokumen	436,800,530	#VALUE!	28.7%	Setda	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	4,190,624,569	100%	786,760,796.00	100%	514,319,000	13%	91,280,998.00	13%	18%	13%	878,041,794	12.5%	21.0%	Setda	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1300	960,029,762	300 Paket	202,559,317.00	200.00	121,837,000.00	50 Paket	31,454,698.00	25%	26%	50 Paket	234,014,015	#VALUE!	24.4%	Setda	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1300	2,344,597,569	300 Paket	424,311,985.00	200.00	355,408,000.00	25 Paket	59,826,300.00	13%	17%	25 Paket	484,138,285	#VALUE!	20.6%	Setda	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150	885,997,238	0.00	159,889,494.00	10.00	37,074,000.00	0 peserta	0.00	0%	0%	0 peserta	159,889,494	#VALUE!	18.0%	Setda	
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	1,028,307,035	100%	142,985,100.00	100%	137,451,971	50%	60,918,710.00	50%	44%	100%	203,903,810	100.0%	19.8%	Setda	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	60	590,055,560	12.00	82,721,290.00	12.00	71,523,811.00	6.00	30,408,920.00	50%	43%	6.00	113,130,210	10.0%	19.2%	Setda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,Kelauatan dan Perikanan	TerlaksananyaKoordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,Kelauatan dan Perikanan	60	226,676,180	12.00	39,993,980.00	12.00	34,479,080	6.00	10,239,960.00	50%	30%	6.00	50,233,940	10.0%	22.2%	Setda	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	60	211,575,295	12.00	20,269,830.00	12.00	31,449,080	6.00	20,269,830.00	50%	64%	6.00	40,539,660	10.0%	19.2%	Setda	
		Bidang Kearsipan																	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen)	100%	69,344,013	100%	8,510,400.00	100%	35,074,110	50%	7,566,520.00	50%	22%	50%	16,076,920	50.0%	23.2%	Setda	
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip	100%	46,229,342	100%	8,510,400.00	100%	35,074,110	50%	7,566,520.00	50%	22%	100%	16,076,920	100.0%	34.8%	Setda	
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	60	23,114,671	12.00	4,255,200.00	12.00	16,999,590	6.00	7,566,520.00	50%	45%	6.00	11,821,720	10.0%	51.1%	Setda	
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	60	23,114,671	12.00	4,255,200.00	12.00	18,074,520	6.00	0.00	50%	0%	6.00	4,255,200	10.0%	18.4%	Setda	
		Bidang Perpustakaan																	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola (Lokasi)	100%	340,152,661	100%	208,334,000.00	100%	145,112,916	25%	51,819,931.00	25%	37%	100%	260,153,931	100.0%	76.5%	Setda	
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota		100%	340,152,661	100%	130,143,800.00	100%	70,968,000	50%	51,819,931.00	50%	73%	100%	181,963,731	100.0%	53.5%	Setda	
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan	Terlaksannanya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan	5	81,090,380	00:00	93,984,450.00	1.00	48,443,000	1 kegiatan	39,155,931.00	100%	81%	1 kegiatan	133,140,381	#VALUE!	164.2%	Setda	
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	5	259,062,281	00:00	36,159,350.00	100%	22,525,000	0 kegiatan	12,664,000.00	0%	56%	0 kegiatan	48,823,350	#VALUE!	18.8%	Setda	
		Pembudayaan Gemar Membaca	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca	5		00:00	78,190,200.00	1.00	74,144,916	0%	0.00	0%	0%	100%	78,190,200	20.0%	100.0%	Setda	
		Pengembangan dan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	terlaksannanya Pengembangan dan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	5	87,732,700	00:00	78,190,200.00	1.00	74,144,916	0 kegiatan	0.00	0%	0%	0 kegiatan	78,190,200	#VALUE!	89.1%	Setda	
		Bidang Sekretariat DPRD		90	160,024,468,500	19	29,573,755,291		32,004,893,700	19	14,390,694,325		45%	19	14,390,694,325	21.1%	9.0%	Setwan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan penunjang kinerja perangkat daerah	90	102,963,942,250	100	19,033,338,405	100	20,592,788,450	100	8,955,526,313	100%	43%	100	8,955,526,313	111.1%	8.7%	Setwan	
		Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu.	100	32,000,000	100	6,350,000	100	6,400,000	100	3,869,200	100%	60%	100	3,869,200	100.0%	12.1%	Setwan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	7,000,000	2	1,400,000	2	1,400,000	2	1,400,000	100%	100%	2	1,400,000	20.0%	20.0%	Setwan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	10	25,000,000	2	4,950,000	2	5,000,000	1	2,469,200	50%	49%	1	2,469,200	10.0%	9.9%	Setwan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan tepat waktu	100	8,727,784,500	100	1,350,336,337	100	1,745,556,900	100	849,777,284	100%	49%	100	849,777,284	100.0%	9.7%	Setwan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan PNS	70	8,700,284,500	70	1,344,836,337	14	1,740,056,900	8	848,808,084	57%	49%	8	848,808,084	11.4%	9.8%	Setwan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	5	12,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	0	0	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Setwan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	10	10,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	1	969,200	50%	48%	1	969,200	10.0%	9.7%	Setwan	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	5	5,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	0	0	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Setwan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	100	4,000,000,000	100	653,050,000	100	800,000,000	100	99,000,000	100%	12%	100	99,000,000	100.0%	2.5%	Setwan	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakian dinas yang tersedia	625	1,500,000,000	125	298,550,000	125	300,000,000	0	0	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Setwan	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kemampuan/Skil Sumber daya Aparatur	30	2,500,000,000	6	354,500,000	6	500,000,000	1	99,000,000	17%	20%	1	99,000,000	3.3%	4.0%	Setwan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	8,273,033,315	100	1,485,073,000	100	1,654,606,663	100	941,391,380	100%	57%	100	941,391,380	100.0%	11.4%	Setwan	
		Penyediaan Komponen intalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor	Tercapainya Kondisi Listrik yang baik di Kantor	30	162,952,000	6	27,152,900	6	32,590,400	2	9,340,400	33%	29%	2	9,340,400	6.7%	5.7%	Setwan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	30	108,900,000	6	18,230,000	6	21,780,000	6	21,420,000	100%	98%	6	21,420,000	20.0%	19.7%	Setwan	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Aktivitas	30	228,400,000	6	45,680,000	6	45,680,000	1	3,060,000	17%	7%	1	3,060,000	3.3%	1.3%	Setwan	
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah ATK	60	1,157,486,315	6	229,274,700	6	231,497,263	4	85,545,180	67%	37%	4	85,545,180	6.7%	7.4%	Setwan	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan	Meningkatnya Informasi melalui bahan bacaan dan Perundang-undangan	30	3,500,000,000	6	499,700,000	6	700,000,000	5	546,300,000	83%	78%	5	546,300,000	16.7%	15.6%	Setwan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan jasa penyediaan makanan dan minuman	55	1,737,500,000	11	341,416,000	11	347,500,000	5	182,138,000	45%	52%	5	182,138,000	9.1%	10.5%	Setwan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi di luar kantor	30	1,377,795,000	6	323,619,400	6	275,559,000	2	93,587,800	33%	34%	2	93,587,800	6.7%	6.8%	Setwan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase pemenuhan prasarana dan prasarana pendukung kinerja	100	2,346,400,000	100	155,885,000	100	469,280,000	100	127,890,000	100%	27%	100	127,890,000	100.0%	5.5%	Setwan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	30	1,148,900,000	6	68,390,000	6	229,780,000	2	79,050,000	33%	34%	2	79,050,000	6.7%	6.9%	Setwan	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	30	1,197,500,000	6	87,495,000	6	239,500,000	2	48,840,000	33%	20%	2	48,840,000	6.7%	4.1%	Setwan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan pendukung	100	3,261,115,000	100	617,886,739	100	652,223,000	100	293,439,461	100%	45%	100	293,439,461	100.0%	9.0%	Setwan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan	30	1,440,000,000	12	254,332,989	6	288,000,000	6	108,226,461	100%	38%	6	108,226,461	20.0%	7.5%	Setwan	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	30	285,000,000	6	57,000,000	6	57,000,000	4	36,000,000	67%	63%	4	36,000,000	13.3%	12.6%	Setwan	
		Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	1,536,115,000	12	306,553,750	12	307,223,000	6	149,213,000	50%	49%	6	149,213,000	10.0%	9.7%	Setwan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dalam kondisi baik	100	5,652,466,235	100	1,065,980,766	100	1,130,493,247	100	213,205,000	100%	19%	100	213,205,000	100.0%	3.8%	Setwan	
		Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	35	1,078,500,000	7	208,800,000	7	215,700,000	4	118,750,000	57%	55%	4	118,750,000	11.4%	11.0%	Setwan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor	60	3,763,257,235	12	708,889,766	12	752,651,447	1	35,480,000	8%	5%	1	35,480,000	1.7%	0.9%	Setwan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	60	810,709,000	12	148,291,000	12	162,141,800	5	58,975,000	42%	36%	5	58,975,000	8.3%	7.3%	Setwan	
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100	69,176,684,000	100	12,828,158,623	100	13,835,336,800	100	6,343,746,668	100%	46%	100	6,343,746,668	100.0%	9.2%	Setwan	
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	70	67,824,184,000	14	12,564,228,186	14	13,564,836,800	8	6,343,746,668	57%	47%	8	6,343,746,668	11.4%	9.4%	Setwan	
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD	125	1,352,500,000	25	263,930,437	25	270,500,000	0	0	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Setwan	
		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	100	1,494,459,200	100	870,617,940	100	298,891,840	100	83,207,320	100%	28%	100	83,207,320	100.0%	5.6%	Setwan	
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/kab/kota	300	332,104,250	-	-	60	66,420,850	-	-	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Setwan	
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	300	1,162,354,950	60	870,617,940	60	232,470,990	22	83,207,320	37%	36%	22	83,207,320	7.3%	7.2%	Setwan	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk Melaksanakan fungsi Pengawasan, fungsi Pembentukan perda, dan Fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (Persen)	100	57,060,526,250	100	10,540,416,886	100	11,412,105,250	100	5,435,168,012	100%	48%	100	5,435,168,012	100.0%	9.5%	Setwan	
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan pembentukan perda dan peraturan DPRD yang sesuai regulasi	100	2,882,278,600	100	422,878,460	100	576,455,720	-	-	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Setwan	
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	5	81,778,600	-	-	1	16,355,720	-	-	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Setwan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembahasan Rancangan Perda	Tersusunnya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	20	2,800,500,000	4	422,878,460	4	560,100,000	0	0	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Setwan	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	100	2,026,750,000	-	-	100	405,350,000	100	40,406,000	100%	10%	100	40,406,000	100.0%	2.0%	Setwan	
		Pembahasan KUA dan PPAS	Tersusunnya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	30	314,490,000	-	-	6	62,898,000	0	0	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Setwan	
		Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Tersusunnya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	30	314,490,000	-	-	6	62,898,000	0	0	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Setwan	
		Pembahasan APBD	Tersusunnya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	30	456,430,000	-	-	6	91,286,000	0	0	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Setwan	
		Pembahasan APBD Perubahan	Tersusunnya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	30	456,430,000	-	-	6	91,286,000	0	0	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Setwan	
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tersusunnya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	45	484,910,000	-	-	9	96,982,000	4	40,406,000	44%	42%	4	40,406,000	8.9%	8.3%	Setwan	
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase layanan peningkatan kapasitas DPRD	100	13,048,048,500	100	2,267,402,200	100	2,609,609,700	100	1,016,258,600	100%	39%	100	1,016,258,600	100.0%	7.8%	Setwan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendalaman Tugas DPRD	Tersusnya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	25	10,336,696,000	6	1,920,233,700	5	2,067,339,200	2	905,125,200	40%	44%	2	905,125,200	8.0%	8.8%	Setwan	
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersusnya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	20	975,000,000	-	-	4	195,000,000	0	0	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Setwan	
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersusnya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	30	1,736,352,500	6	347,168,500	6	347,270,500	2	111,133,400	33%	32%	2	111,133,400	6.7%	6.4%	Setwan	
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan pokir yang terealisasi	100	5,504,376,750	100	1,020,314,140	100	1,100,875,350	100	387,291,400	100%	35%	100	387,291,400	100.0%	7.0%	Setwan	
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Tersusnya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	180	650,000,000	36	91,314,140	36	130,000,000	16	56,275,000	44%	43%	16	56,275,000	8.9%	8.7%	Setwan	
		Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Tersusnya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	5	135,763,750	-	-	1	27,152,750	0	0	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Setwan	
		Pelaksanaan Reses	Tersusnya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	15	4,718,613,000	3	929,000,000	3	943,722,600	1	331,016,400	33%	35%	1	331,016,400	6.7%	7.0%	Setwan	
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Peningkatan Kerja Sama Daerah	100	1,200,000,000	-	-	100	240,000,000		-	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Setwan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Tersusnya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	5	1,200,000,000	-	-	1	240,000,000	0	0	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Setwan	
		Fasilitasi Tugas DPRD	Terintergrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD.	100	32,399,072,400	100	6,829,822,086	100	6,479,814,480	100	3,991,212,012	100%	62%	100	3,991,212,012	100.0%	12.3%	Setwan	
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tersusnya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	140	32,250,000,000	28	6,829,822,086	28	6,450,000,000	17	3,977,132,892	61%	62%	17	3,977,132,892	12.1%	12.3%	Setwan	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Tersusnya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	60	149,072,400	-	-	12	29,814,480	6	14,079,120	50%	47%	6	14,079,120	10.0%	9.4%	Setwan	
		Bidang Perencanaan		100%	50,575,576,691				7,242,902,100		2,913,597,872					0.0%		Bappelitbangda	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	90%	18,959,936,687	90	3,859,826,020	90	3,966,256,100	39.86	1,874,355,172	44.29	47.26	39.86	1,874,355,172	4429.0%	988.6%	Bappelitbangda	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan penganggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	183,013,000	100	28,693,600	100	28,693,000	11.11	6,016,000	11.11	20.97	11.11	6,016,000	11.1%	328.7%	Bappelitbangda	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renja	10	31,310,000	2	4,025,600	2	4,025,000	0	1,054,000	0.00	26.19	0	1,054,000	0.0%	336.6%	Bappelitbangda	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD	5	19,156,000	1	4,106,000	1	4,106,000	1	4,106,000	100.00	100.00	1	4,106,000	20.0%	2143.5%	Bappelitbangda	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	5	18,524,000	1	4,106,000	1	4,106,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0%	0.0%	Bappelitbangda	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD	5	24,976,000	1	4,106,000	1	4,106,000	0	856,000	0.00	20.85	0	856,000	0.0%	342.7%	Bappelitbangda	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	5	24,800,000	1	4,106,000	1	4,106,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0%	0.0%	Bappelitbangda	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	40,122,000	2	4,152,000	2	4,152,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0%	0.0%	Bappelitbangda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan LAKIP SKPD	5	24,125,000	1	4,092,000	1	4,092,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0%	0.0%	Bappelitbangda	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	13,718,695,570		2,090,328,246	100	2,672,145,100	50.00	1,177,872,686	50.00	44.08	50	1,177,872,686	5000.0%	858.6%	Bappelitbangda	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	13,626,433,570	14	2,076,291,046	14	2,658,109,100	8	1,177,872,686	57.14	44.31	8	1,177,872,686	11.4%	864.4%	Bappelitbangda	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan SKPD	5	27,580,000	1	4,130,400	1	4,130,000	0	0.00	0.00	0.00	0	-	0.0%	0.0%	Bappelitbangda	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triuwan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keungan Bulanan /Triuwan /Semester SKPD	90	37,412,000	18	5,834,400	18	5,834,000	9	-	50.00	0.00	9	-	10.0%	0.0%	Bappelitbangda	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	5	27,270,000	1	4,072,400	1	4,072,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0%	0.0%	Bappelitbangda	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	100%	285,000,000		13,846,500	100	166,000,000	100	145,000,000	50.00	87.35	100	145,000,000	10000.0%	5087.7%	Bappelitbangda	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Seragam Olahraga	50	125,000,000	0	-	25	21,000,000	0	-	0.00	0.00	0		0.0%		Bappelitbangda	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	30	200,000,000	2	13,846,500	20	145,000,000	20	145,000,000	100.00	100.00	20	145,000,000	66.7%	7250.0%	Bappelitbangda	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100%	2,544,473,117	100	488,868,200	100	721,648,000	47.92	345,136,147	47.92	47.83	47.91666667	345,136,147	4791.7%	1356.4%	Bappelitbangda	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktfitas	5	159,661,457	1	24,982,000	1	25,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0%	0.0%	Bappelitbangda	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	752,490,057	12	134,764,000	12	114,648,000	6	61,994,000	50.00	54.07	6	61,994,000	10.0%	823.9%	Bappelitbangda	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	60	428,484,421	12	84,000,000	12	96,000,000	6	44,000,000	50.00	45.83	6	44,000,000	10.0%	1026.9%	Bappelitbangda	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makan dan Minum	55	56,111,055	11	11,000,000	11	11,000,000	5	4,000,000	45.45	36.36	5	4,000,000	9.1%	712.9%	Bappelitbangda	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Diluar Kantor	60	1,147,726,127	12	234,122,200	12	475,000,000	6	235,142,147	50.00	49.50	6	235,142,147	10.0%	2048.8%	Bappelitbangda	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Prasarana Pendukung kinerja Daerah	100%	34,000,000	100	812,518,000	100	18,000,000	1	18,000,000	1.00	100.00	1	18,000,000	100.0%	5294.1%	Bappelitbangda	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap	30	34,000,000	17	812,518,000	1	18,000,000	1	18,000,000	100.00	100.00	1	18,000,000	3.3%	5294.1%	Bappelitbangda	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100%	1,424,995,000	100	259,000,000	100	216,000,000	50	108,000,000	50.00	50.00	50	108,000,000	5000.0%	757.9%	Bappelitbangda	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan Dan Kendaraan Dinas	34	1,250,000,000	4	259,000,000	4	216,000,000	2	108,000,000	50.00	50.00	2	108,000,000	5.9%	864.0%	Bappelitbangda	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Barang Milik Daerah Yang Dalam Kondisi Baik	100%	769,760,000	100	166,571,474	100	143,770,000	50.00	74,330,339	50.00	51.70	50	74,330,339	5000.0%	965.6%	Bappelitbangda	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	25	709,110,000	5	158,051,474	5	135,250,000	3	73,080,339	60.00	54.03	3	73,080,339	12.0%	1030.6%	Bappelitbangda	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	20	60,650,000	3	8,520,000	3	8,520,000	1	1,250,000	33.33	14.67	1	1,250,000	5.0%	206.1%	Bappelitbangda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan terhadap Dokumen Penganggaran	100%	15,939,179,519	100	1,239,163,932	100	1,632,651,000	100	542,368,800	100.00	33.22	100	542,368,800	10000.0%	340.3%	Bappelitbangda	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	8,736,127,618	100	794,822,500	100	930,294,000	33.33	406,487,800	33.33	43.69	33.33333333	406,487,800	3333.3%	465.3%	Bappelitbangda	
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ Bupati Tahun	5	1,058,427,934	5	93,179,200	1	248,574,000	0	62,350,000	0.00	25.08	0	62,350,000	0.0%	589.1%	Bappelitbangda	
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah	5	1,481,760,339	5	102,869,600	1	100,808,000	0	16,514,000	0.00	16.38	0	16,514,000	0.0%	111.4%	Bappelitbangda	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang RKPD Yang Dilaksanakan	5	1,643,589,723	1	196,830,300	1	214,807,000	1	207,136,000	100.00	96.43	1	207,136,000	20.0%	1260.3%	Bappelitbangda	
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya LAKIP Kabupaten Tahun	5	1,022,312,818	5	103,224,400	1	84,263,000	0	60,998,000	0.00	72.39	0	60,998,000	0.0%	596.7%	Bappelitbangda	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedia nya Dokumen Perencanaan ; RKPD Yang Telah Ditetapan Oleh PerKada	10	2,082,250,649	10	298,719,000	2	281,842,000	1	59,489,800	50.00	21.11	1	59,489,800	10.0%	285.7%	Bappelitbangda	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah	100%	2,716,647,087	100	227,644,050	100	285,778,000	0	38,187,000	0.00	13.36	0	38,187,000	0.0%	140.6%	Bappelitbangda	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedia nya Sistem Data Dan Statistik Yang terintegrasi	5	1,101,851,769	5	145,445,800	1	163,042,000	0	16,665,000	0.00	10.22	0	16,665,000	0.0%	151.2%	Bappelitbangda	
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	5	785,820,840	5	82,198,250	1	122,736,000	0	21,522,000	0.00	17.54	0	21,522,000	0.0%	273.9%	Bappelitbangda	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100%	2,821,433,199	100	216,697,382	100	416,579,000	0	97,694,000	0.00	23.45	0	97,694,000	0.0%	346.3%	Bappelitbangda	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Usulan DAK	5	852,954,632	3	114,299,731	1	144,089,000	0	27,412,000	0.00	19.02	0	27,412,000	0.0%	321.4%	Bappelitbangda	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan DAK Fisik dan Evaluasi RKPD, Evaluasi RENSTRA, Evaluasi RPJMD	10	1,968,478,567	10	102,397,651	3	272,490,000	0	70,282,000	0.00	25.79	0	70,282,000	0.0%	357.0%	Bappelitbangda	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Keselarasan Program Prioritas Daerah Terhadap Program Prioritas Pusat	95%	15,676,460,485	95	1,422,718,376	95	1,643,995,000	95	496,873,900	100.00	30.22	95	496,873,900	10000.0%	317.0%	Bappelitbangda	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata Rata capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	70%	8862167840	70	757,785,476	70	833,995,000	30	298,406,100	42.86	35.78	30	298,406,100	4285.7%	336.7%	Bappelitbangda	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen RAD SDGS	5	858,792,804	4	136,988,100	1	146,656,000	0	39,968,600	0.00	27.25	0	39,968,600	0.0%	465.4%	Bappelitbangda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Koordinasi Lintas Sektoral PDT Dan Transmigrasi	60	856,065,700	60	119,580,404	12	131,139,000	6	60,705,000	50.00	46.29	6	60,705,000	10.0%	709.1%	Bappelitbangda	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan Daerah(LP2KD)	5	941,759,035	5	137,367,550	1	144,017,000	0	62,252,400	0.00	43.23	0	62,252,400	0.0%	661.0%	Bappelitbangda	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen RAN HAM	5	718894403	5	111,729,000	1	133,075,000	0	33,331,000	0.00	25.05	0	33,331,000	0.0%	463.6%	Bappelitbangda	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Pelaksana RAD-PG	5	731,610,046	5	130,552,000	1	139,335,000	0	50,381,800	0.00	36.16	0	50,381,800	0.0%	688.6%	Bappelitbangda	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Lintas Sektoral Pemerintahan dan Sosial Budaya	60	811,082,701	60	121,568,422	12	139,773,000	6	51,767,300	50.00	37.04	6	51,767,300	10.0%	638.2%	Bappelitbangda	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata Rata Capaian Kinerja Bidang Perekonomian SDA (Sumber daya Alam)	70%	1,438,901,548	70	256,943,800	70	260,794,000	32.31	93,581,200	46.15	35.88	32.30769231	93,581,200	4615.4%	650.4%	Bappelitbangda	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Updating Potensi Ekonomi Daerah	5	719,882,879	5	127,759,800	1	130,062,000	0	41,697,800	0.00	32.06	0	41,697,800	0.0%	579.2%	Bappelitbangda	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Keordinasi Lintas Sektoral Kerjasama Dunia Usaha dan Lembaga	60	719,018,669	60	129,184,000	12	130,732,000	6	51,883,400	50.00	39.69	6	51,883,400	10.0%	721.6%	Bappelitbangda	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata Rata Capaian Kinerja Bidang Insfatruktur Dan Kewilayahan	70%	5,375,391,097	70	407,989,100	70	549,206,000	34.0540541	104,886,600	48.65	19.10	34.05405405	104,886,600	4864.9%	195.1%	Bappelitbangda	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Lintas Sektoral Program air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	60	1,027,066,230	60	142,259,800	12	190,460,000	6	30,041,400	50.00	15.77	6	30,041,400	10.0%	292.5%	Bappelitbangda	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Bidang Pembangunan Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	60	877,630,047	60	134,329,500	12	131,218,000	6	42,816,800	50.00	32.63	6	42,816,800	10.0%	487.9%	Bappelitbangda	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	400,000,000	0	-	1	96,491,000	0	14,790,000	0.00	15.33	0	14,790,000	0.0%	369.8%	Bappelitbangda	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Keordinasi Bidang Kewilayahan	60	761,455,947	60	131,399,800	12	131,037,000	6	17,238,400	50.00	13.16	6	17,238,400	10.0%	226.4%	Bappelitbangda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Bidang Penelitian dan Pengembangan			9,619,513,713		145,834,634		3,752,617,500		324,911,565		8.66	0	324,911,565	#DIV/0!	337.8%	Bappelitbangda	
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan inovasi Yang Ditetapkan Di Daerah	90	9,619,513,713	90	145,834,634	90	3,752,617,500	20%	324,911,565	0.22	8.66	0.2	324,911,565	0.2%	337.8%	Bappelitbangda	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Peyelenggaraan Pemerintah Dan Pengkajian Peraturan	80	4,717,513,713	80	145,834,634	80	2,346,030,500	0	271,079,700	0.00	11.55	0	271,079,700	0.0%	574.6%	Bappelitbangda	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5	839,513,713	1	145,834,634	1	193,667,500	0	118,769,000	0.00	61.33	0	118,769,000	0.0%	1414.7%	Bappelitbangda	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	5	480,000,000	0	-	1	131,227,000	0	65,655,500	0.00	50.03	0	65,655,500	0.0%	1367.8%	Bappelitbangda	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	6	2,874,000,000	0	-	4	1,884,762,000	0	44,206,800	0.00	2.35	0	44,206,800	0.0%	153.8%	Bappelitbangda	
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	4	524,000,000	0	-	1	136,374,000	0	42,448,400	0.00	31.13	0	42,448,400	0.0%	810.1%	Bappelitbangda	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang di Fasilitasi Dalam Penerapan SIDA	100%	2,488,000,000	100	-	100	755,615,000	40%	41,747,865	0.40	5.53	0.4	41,747,865	40.0%	167.8%	Bappelitbangda	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	4	863,000,000	0	-	2	429,916,000	0	33,988,865	0.00	7.91	0	33,988,865	0.0%	393.8%	Bappelitbangda	
		Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	4	1,625,000,000	0	-	1	325,699,000	0	7,759,000	0.00	2.38	0	7,759,000	0.0%	47.7%	Bappelitbangda	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangun	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	2,414,000,000	0	-	100	650,972,000	20	12,084,000	20.00	1.86	20	12,084,000	2000.0%	50.1%	Bappelitbangda	
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Dokumen Hasil Persentase Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4	1,286,000,000	0	-	1	325,289,000	0	7,349,000	0.00	2.26	0	7,349,000	0.0%	57.1%	Bappelitbangda	
		Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	4	1,128,000,000	0	-	1	325,683,000	0	4,735,000	0.00	1.45	0	4,735,000	0.0%	42.0%	Bappelitbangda	
		Bidang Keuangan		100	150,222,514,422	900	147,195,757,463	100	175,399,413,289	38	67,041,864,069	38	38	938	214,237,621,532	938.2%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	90	60,229,718,932	628	10,794,290,470	440	18,251,444,569	71	4,235,104,597	16	23	699	15,029,395,067	776.7%	2495.3%	BPKAD	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	67,000,000	65	6,500,000	21	13,500,000	-	-	-	-	65	6,500,000	65.0%	970.1%	BPKAD	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	5	10,000,000	5	1,500,000	1	2,000,000	-	-	-	-	5	1,500,000	100.0%	1500.0%	BPKAD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	8	8,000,000	0	-	2	2,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%		BPKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	8,000,000	0	-	2	2,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%		BPKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	8	8,000,000	0	-	2	2,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%		BPKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8	8,000,000	0	-	2	2,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%		BPKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	60	25,000,000	60	5,000,000	12	3,500,000	-	-	-	-	60	5,000,000	100.0%	2000.0%	BPKAD	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	4	8,000,000	0	-	1	2,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%		BPKAD	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	49,675,425,794	80	8,888,675,852	100	16,220,584,569	8	3,642,923,984	8	22	88	12,531,599,836	88.0%	2522.7%	BPKAD	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji,Tunjangan PNS, Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dan Iuran Tapera ASN Kabupaten Pesisir Barat	70	49,637,925,794	60	8,883,111,652	14	16,215,584,569	8	3,642,923,984	57	22	68	12,526,035,636	97.1%	2523.5%	BPKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	12,500,000	5	2,564,200	1	2,000,000	-	-	-	-	5	2,564,200	100.0%	2051.4%	BPKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	10	12,500,000	10	2,000,000	2	2,000,000	-	-	-	-	10	2,000,000	100.0%	1600.0%	BPKAD	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	12,500,000	5	1,000,000	1	1,000,000	-	-	-	-	5	1,000,000	100.0%	800.0%	BPKAD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yg berkinerja baik	100	1,200,000,000	60	427,380,000	100	500,000,000	23	50,280,000	23	10	83	477,660,000	83.0%	3980.5%	BPKAD	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	126	1,200,000,000	60	427,380,000	23	500,000,000	23	407,100,000	100	81	83	834,480,000	65.9%	6954.0%	BPKAD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	6,138,000,000	238	855,779,782	100	1,087,000,000	18	357,145,384	18	33	256	1,212,925,166	256.0%	1976.1%	BPKAD	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	220,000,000	3	25,000,000	1	25,000,000	-	-	-	-	3	25,000,000	60.0%	1136.4%	BPKAD	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK, Barang Cetak dan Penggandaan	60	2,500,000,000	60	386,750,000	12	390,000,000	6	208,667,400	50	54	66	595,417,400	110.0%	2381.7%	BPKAD	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah SKHU	50	668,000,000	60	17,000,000	12	72,000,000	-	-	-	-	60	17,000,000	120.0%	254.5%	BPKAD	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	1,250,000,000	55	141,166,000	11	150,000,000	6	65,152,000	55	43	61	206,318,000	110.9%	1650.5%	BPKAD	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	1,500,000,000	60	285,863,782	12	450,000,000	6	83,325,984	50	19	66	369,189,766	110.0%	2461.3%	BPKAD	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan peralatan dan mesin	100	240,000,000	5	43,833,599	100	325,000,000	4	74,500,000	4	23	9	118,333,599	9.0%		BPKAD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	240,000,000	5	43,833,599	6	325,000,000	4	74,500,000	67	23	9	118,333,599	81.8%		BPKAD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100	2,074,380,000	90	442,148,728	100	229,160,000	11	133,555,000	11	58	101	575,703,728	101.0%	2775.3%	BPKAD	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	30	1,915,000,000	30	410,272,728	5	221,160,000	4	129,000,000	80	58	34	539,272,728	113.3%	2816.0%	BPKAD	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	159,380,000	60	31,876,000	12	8,000,000	7	4,555,000	58	57	67	36,431,000	111.7%	2285.8%	BPKAD	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100	1,074,913,138	95	173,806,108	19	201,200,000	11	51,200,229	58	25	106	225,006,337	106.0%	2093.3%	BPKAD	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	35	696,233,138	35	108,216,108	7	140,350,000	5	51,200,229	71	36	40	159,416,337	114.3%	2289.7%	BPKAD	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	378,680,000	60	65,590,000	12	60,850,000	6	-	50	-	66	65,590,000	110.0%	1732.1%	BPKAD	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan tata kelola keuangan daerah sesuai aturan (Persen)	100	78,802,371,490	252	132,357,174,543	100	154,594,715,120	32	44,097,064,474	32	29	284	176,454,239,017	284.1%	22392.0%	BPKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Dokumen penganggaran daerah tepat waktu	100	21,788,585,780	43	2,449,166,044	100	3,376,150,000	32	1,084,523,067	32	32	75	3,533,689,111	75.1%	1621.8%	BPKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	10	2,456,983,671	2	258,814,000	2	357,549,960	1	316,548,496	50	89	3	575,362,496	30.0%	2341.7%	BPKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	10	2,532,922,000	2	249,306,800	2	358,632,800	-	-	-	-	2	249,306,800	20.0%	984.3%	BPKAD	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	5	552,150,300	4	71,972,060	1	103,285,060	1	40,265,060	100	39	5	112,237,120	100.0%	2032.7%	BPKAD	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	5	552,150,300	1	68,411,060	1	101,785,060	1	75,443,060	100	74	2	143,854,120	40.0%	2605.3%	BPKAD	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	5	1,084,959,009	1	36,670,420	1	89,268,620	-	-	-	-	1	36,670,420	20.0%	338.0%	BPKAD	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	5	1,116,925,000	1	19,413,500	1	90,292,500	-	-	-	-	1	19,413,500	20.0%	173.8%	BPKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen APBD Kabupaten Pesisir Barat	10	5,250,090,000	10	805,610,900	2	896,990,000	1	94,720,000	50	11	11	900,330,900	110.0%	1714.9%	BPKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat	10	5,250,840,000	10	759,715,304	2	901,818,000	1	494,304,051	50	55	11	1,254,019,355	110.0%	2388.2%	BPKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Regulasi Bidang Anggaran	10	2,991,565,500	12	179,252,000	2	476,528,000	1	63,242,400	50	13	13	242,494,400	130.0%	810.6%	BPKAD	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan tata kelola keuangan daerah sesuai aturan (Persen)	100%	6,280,424,600	156	735,653,485	100	3,223,748,520	37	1,207,180,783	37	37	193	1,942,834,268	19344.6%	3093.5%	BPKAD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi Kasda, Rekap Dokumen SP2D dan Daftar Gaji Pemerintah Daerah	180	1,749,125,000	60	275,146,576	36	1,553,929,400	18	750,667,283	50	48	78	1,025,813,859	43.3%	5864.7%	BPKAD	
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	8	726,424,000	0	-	2	181,606,000	1	46,229,959	50	25	1	46,229,959	12.5%	636.4%	BPKAD	
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Laporan Sinkronisasi Pendapatan Daerah	60	1,829,545,600	60	370,032,209	12	424,909,120	7	141,806,141	58	33	67	511,838,350	111.7%	2797.6%	BPKAD	
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Laporan Konsinyering dan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	60	1,975,330,000	36	90,474,700	12	421,506,000	7	140,484,000	58	33	43	230,958,700	71.7%	1169.2%	BPKAD	
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	280	2,567,192,000	0	-	70	641,798,000	10	127,993,400	14	20	10	127,993,400	3.6%	498.6%	BPKAD	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan tata kelola keuangan daerah sesuai aturan (Persen)	100	5,644,908,000	29	913,042,362	100	1,009,860,400	32	321,419,045	32	32	61	1,234,461,407	60.8%	2186.9%	BPKAD	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi APBD Per Semester	10	362,455,000	10	60,606,600	2	40,991,000	1	34,070,600	50	83	11	94,677,200	110.0%	2612.1%	BPKAD	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5	2,990,422,000	5	557,795,879	1	541,334,400	-	287,348,445	-	53	5	845,144,324	100.0%	2826.2%	BPKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10	1,180,175,000	10	193,267,100	2	188,535,000	-	-	-	-	10	193,267,100	100.0%	1637.6%	BPKAD	
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar	4	151,185,600	2	46,191,000	2	49,941,000	-	-	-	-	2	46,191,000	50.0%	3055.3%	BPKAD	
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2	151,185,600	2	36,149,000	1	39,059,000	-	-	-	-	2	36,149,000	100.0%	2391.0%	BPKAD	
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	4	809,484,800	0	19,032,783	1	150,000,000	-	-	-	-	-	19,032,783	0.0%	235.1%	BPKAD	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pemenuhan penunjang pengelolaan keuangan daerah	100	45,088,453,110	24	128,259,312,652	100	146,984,956,200	28	41,483,941,579	28	28	52	169,743,254,231	52.2%	37646.7%	BPKAD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1	1,500,000,000	0	-	1	1,500,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	BPKAD	
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Belanja Tak Terduga	60	33,500,000,000	12	-	12	6,615,000,000	7	110,850,000	58	2	19	110,850,000	31.7%	33.1%	BPKAD	
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Pesisir Barat	5	11,588,453,110	12	128,259,312,652	12	140,369,956,200	7	41,373,091,579	58	29	19	169,632,404,231	380.0%	146380.5%	BPKAD	
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Cakupan penggunaan SIPD dalam keuangan daerah	100	1,986,424,000	0	-	100	496,606,000	30	222,012,604	30	45	30	222,012,604	30.0%	1117.6%	BPKAD	
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	280	1,986,424,000	0	-	78	496,606,000	30	222,012,604	38	45	30	222,012,604	10.7%	1117.6%	BPKAD	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan tata kelola barang milik daerah sesuai aturan (Persen)	100	11,190,424,000	20	4,044,292,450	100	2,553,253,600	-	607,553,645	-	24	20	4,651,846,095	20.0%	4157.0%	BPKAD	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pencatatan aset daerah	100	11,190,424,000	20	4,044,292,450	100	2,553,253,600	-	607,553,645	-	24	20	4,651,846,095	20.0%	4157.0%	BPKAD	
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021	5	3,171,618,800	5	423,830,895	1	417,205,600	-	17,828,280	-	4	5	441,659,175	100.0%	1392.5%	BPKAD	
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur BMD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat	5	320,087,200	5	681,584,120	1	628,324,000	-	248,032,966	-	-	5	929,617,086	100.0%	29042.6%	BPKAD	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen LBMD Pemerintah Daerah dan LBMD SKPD	10	4,068,690,000	10	2,772,049,435	2	641,924,000	-	76,665,600	-	12	10	2,848,715,035	100.0%	7001.6%	BPKAD	
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	2,006,028,000	5	166,828,000	1	459,800,000	-	159,256,000	-	35	5	326,084,000	100.0%	1625.5%	BPKAD	
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	1,624,000,000	0	0	1	406,000,000	-	105,770,799	-	26	-	105,770,799	0.0%	651.3%	BPKAD	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	19,956,686,371	88	4,515,394,841	90	3,137,871,320	45.43	1,816,698,719	50%	58%	45.43	1,816,698,719	5048.0%	9.1%	Bapenda	
		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	74,777,320	90	13,150,760	90	13,150,760	22.50	6,923,750	25%	53%	23	6,923,750	2500.0%	9.3%	Bapenda	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	10	38,516,600	2	7,703,320	2	7,703,320	1	3,902,750	50%	51%	1	3,902,750	10.0%	10.1%	Bapenda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	36,260,720	2	5,447,440	2	5,447,440	0	3,021,000	0%	55%	-	3,021,000	0.0%	8.3%	Bapenda	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	13,029,251,080	90	1,788,219,794	90	2,462,883,060	47.37	792,612,273	53%	32%	47.37	792,612,273	5263.2%	6.1%	Bapenda	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	60	12,947,010,280	14	1,781,771,634	14	2,456,434,900	8	789,735,823	57%	32%	8	789,735,823	13.3%	6.1%	Bapenda	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	13,141,000	1	2,628,200	2	2,628,200	0	0	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Bapenda	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	10	12,181,000	2	2,436,200	2	2,436,200	1	1,698,200	50%	70%	1	1,698,200	10.0%	13.9%	Bapenda	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	56,918,800	1	1,383,760	1	1,383,760	1	1,178,250	100%	85%	1	1,178,250	20.0%	2.1%	Bapenda	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	495,000,000	90	125,000,000	90	15,000,000	90.00	15,000,000	100%	100%	90.00	15,000,000	10000.0%	3.0%	Bapenda	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	60	495,000,000	10	125,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	100%	100%	12	15,000,000	20.0%	3.0%	Bapenda	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	2,104,918,200	90	497,731,105	90	320,827,500	34.47	106,312,746	38%	33%	34.47	106,312,746	3829.8%	5.1%	Bapenda	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	60	38,100,000	12	7,620,000	0	-	0	0	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Bapenda	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Propaganda/Pameran	5	181,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	0	0	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Bapenda	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	411,818,200	12	117,363,640	12	81,827,500	6	40,942,250	50%	50%	6	40,942,250	10.0%	9.9%	Bapenda	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	60	100,000,000	10	11,160,000	10	12,000,000	2	2,955,000	20%	25%	2	2,955,000	3.3%	3.0%	Bapenda	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	164,000,000	11	22,000,000	12	22,000,000	6	8,000,000	50%	36%	6	8,000,000	10.9%	4.9%	Bapenda	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	1,210,000,000	12	314,587,465	12	180,000,000	4	54,415,496	33%	30%	4	54,415,496	6.7%	4.5%	Bapenda	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	40	1,237,431,539	26	102,000,000	10	10,000,000	-	-	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Bapenda	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap	40	1,237,431,539	26	102,000,000	10	10,000,000	0	-	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Bapenda	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	1,611,420,000	84	293,360,682	90	185,760,000	67.50	107,681,000	75%	58%	67.50	107,681,000	7500.0%	6.7%	Bapenda	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	214,820,000	10	24,040,682	0	-	0	0	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Bapenda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	30	1,342,500,000	6	263,500,000	12	180,000,000	6	105,000,000	50%	58%	6	105,000,000	20.0%	7.8%	Bapenda	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	54,100,000	12	5,820,000	12	5,760,000	12	2,681,000	100%	47%	12	2,681,000	20.0%	5.0%	Bapenda	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	1,403,888,232	83	217,795,490	90	130,250,000	18.95	53,734,800	21%	41%	18.95	53,734,800	2105.3%	3.8%	Bapenda	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	15	854,660,782	3	98,650,000	8	112,750,000	3	49,359,800	38%	44%	3	49,359,800	20.0%	5.8%	Bapenda	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan Kantor	60	10,727,450	12	2,145,490	0	-	0	0	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Bapenda	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	60	351,000,000	10	8,000,000	1	10,000,000	0	2,500,000	0%	25%	-	2,500,000	0.0%	0.7%	Bapenda	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60	150,000,000	12	15,000,000	0	-	0	0	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Bapenda	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	37,500,000	12	94,000,000	10	7,500,000	1	1,875,000	10%	25%	1	1,875,000	1.7%	5.0%	Bapenda	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Persen)	90%	7,285,650,960	83	1,478,137,010	90	1,868,563,850	37.24	734,434,150	41%	39%	37.24	734,434,150	4137.9%	10.1%	Bapenda	
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Pendapatan TA selanjutnya, Terlaksananya Penyusunan Anggaran Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran Berjalan	90%	7,285,650,960	83	1,478,137,010	90	1,868,563,850	37.24	734,434,150	41%	39%	37.24	734,434,150	4137.9%	10.1%	Bapenda	
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan Asli Daerah	10	907,882,440	1	30,651,600	0	-	0.00	-	0%	0%	-	-	0.0%	0.0%	Bapenda	
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	0%	-	0	-	1	287,274,000	0.00	38,445,200	0%	13%	-	38,445,200	#DIV/0!	0.0%	Bapenda	
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0%	-	0	-	1	398,605,000	0	325,485,100	0%	82%	-	325,485,100	#DIV/0!	0.0%	Bapenda	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen	5	894,590,000	1	277,151,400	1	122,905,600	0	50,847,200	0%	41%	-	50,847,200	0.0%	5.7%	Bapenda	
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Cakupan Pengelolaan Pajak Daerah	55	4,443,108,000	9	732,352,000	12	476,974,000	6	93,746,500	50%	20%	6	93,746,500	10.9%	2.1%	Bapenda	
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Daerah	60	1,027,658,960	12	148,609,750	12	134,200,000	6	58,214,000	50%	43%	6	58,214,000	10.0%	5.7%	Bapenda	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan	1	140,090,000	1	133,994,260	1	241,000,450	0	130,712,450	0%	54%	-	130,712,450	0.0%	93.3%	Bapenda	
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	60	780,204,000	12	155,378,000	1	207,604,800	0	36,983,700	0%	18%	-	36,983,700	0.0%	4.7%	Bapenda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
		Bidang Kepegawaian		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah	95.00	13,339,424,497	90.00	12,951,762,771	90.00	2,554,991,200	41.67	880,757,524	41.67	34.47	41.67	880,757,524	43.9%	660.3%	BKPSDM	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.00	47,000,000	90.00	62,385,200	90.00	7,000,000	50.00	-	50.00	-	50.00	-	52.6%	0.0%	BKPSDM	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	22,000,000	36	27,480,600	4	2,000,000	2	-	50.00	-	2	-	20.0%	0.0%	BKPSDM	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	25,000,000	28	34,904,600	4	5,000,000	2	-	50.00	-	2	-	10.0%	0.0%	BKPSDM	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	95.00	9,176,561,900	90.00	9,113,203,661	90.00	1,968,868,200	52.94	742,074,257	52.94	37.69	52.94	742,074,257	55.7%	808.7%	BKPSDM	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	9,137,416,400	84	9,069,819,861	14	1,963,368,200	8	742,074,257	57.14	37.80	8	742,074,257	11.4%	812.1%	BKPSDM	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	16,423,000	7	17,447,000	1	2,500,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	BKPSDM	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	13,602,500	14	13,962,600	2	2,000,000	1	-	50.00	-	1	-	10.0%	0.0%	BKPSDM	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	9,120,000	8	11,974,200	2	1,000,000	1	-	50.00	-	1	11,974,200	10.0%	13129.6%	BKPSDM	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.00	370,000,000	90.00	88,866,882	90.00	10,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	BKPSDM	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41	370,000,000	15	88,866,882	1	10,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	BKPSDM	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.00	1,987,779,870	90.00	2,203,437,587	90.00	297,505,000	44.44	26,394,000	44.44	8.87	44.44	26,394,000	46.8%	132.8%	BKPSDM	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	12,802,500	84	15,558,000	1	1,224,000	-	732,000	-	59.80	-	732,000	0.0%	571.8%	BKPSDM	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	125,000,000	5	101,000,000	1	25,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	BKPSDM	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	293,560,070	84	315,151,100	1	49,880,400	-	20,662,000	-	41.42	-	20,662,000	0.0%	703.8%	BKPSDM	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	79,261,200	84	81,600,000	10	12,000,000	5	5,000,000	50.00	41.67	5	5,000,000	8.3%	630.8%	BKPSDM	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11= 10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	67,156,100	78	72,400,000	11	11,000,000	5	4,000,000	45.45	36.36	5	4,000,000	9.1%	595.6%	BKPSDM	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	1,410,000,000	84	1,617,728,487	12	198,400,600	6	49,456,820	50.00	24.93	6	49,456,820	10.0%	350.8%	BKPSDM	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa	95.00	1,294,232,359	90.00	1,147,274,602	90.00	195,168,000	42.86	96,245,577	42.86	49.31	42.86	96,245,577	45.1%	743.6%	BKPSDM	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	183,153,000	84	182,710,002	12	30,000,000	6	12,156,577	50.00	40.52	6	12,156,577	10.0%	663.7%	BKPSDM	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	1,080,602,700	84	932,000,000	1	157,000,000	-	82,500,000	-	52.55	-	82,500,000	0.0%	763.5%	BKPSDM	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	30,476,659	84	32,564,600	1	8,168,000	-	1,589,000	-	19.45	-	1,589,000	0.0%	521.4%	BKPSDM	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	95.00	463,850,368	90.00	336,594,839	90.00	76,450,000	27.78	16,043,690	27.78	20.99	27.78	16,043,690	29.2%	345.9%	BKPSDM	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	336,391,010	7	245,272,839	2	60,100,000	1	13,683,690	50.00	22.77	1	13,683,690	20.0%	406.8%	BKPSDM	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	114,629,358	1	15,898,000	13	14,520,000	3	2,060,000	23.08	14.19	3	2,060,000	60.0%	179.7%	BKPSDM	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	12,830,000	7	75,424,000	3	1,830,000	1	300,000	33.33	16.39	1	300,000	20.0%	233.8%	BKPSDM	
		Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Managemen Kepegawaian Daerah	13,390	16,175,706,700	17,815	7,351,586,842	1,015	1,687,033,000	998	361,151,995	98.33	21.41	998	361,151,995	7.5%	223.3%	BKPSDM	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tercapainya Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	7,511	7,957,872,600	9,314	2,915,812,702	5	697,481,800	-	55,760,480	-	7.99	-	55,760,480	0.0%	70.1%	BKPSDM	
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	6,681	6,176,707,800	8,033	2,033,362,381	1	516,040,800	-	33,644,080	-	6.52	-	33,644,080	0.0%	54.5%	BKPSDM	
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	260	296,986,000	411	286,415,224	1	33,889,000	-	4,556,000	-	13.44	-	4,556,000	0.0%	153.4%	BKPSDM	
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	60	363,392,000	48	135,853,031	1	46,344,000	-	3,520,000	-	7.60	-	3,520,000	0.0%	96.9%	BKPSDM	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	10	431,774,000	20	242,915,969	1	81,974,000	-	5,795,000	-	7.07	-	5,795,000	0.0%	134.2%	BKPSDM	
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	500	689,012,800	802	217,266,097	1	19,234,000	-	8,245,400	-	42.87	-	8,245,400	0.0%	119.7%	BKPSDM	
		Mutasi dan Promosi ASN	Tercapainya Mutasi dan Promosi ASN	44	5,846,740,000	35	2,353,871,172	4	735,921,400	1	256,361,015	25.00	34.84	1	256,361,015	2.3%	438.5%	BKPSDM	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	30	2,266,740,000	27	600,701,440	3	220,363,800	1	11,332,000	33.33	5.14	1	11,332,000	3.3%	50.0%	BKPSDM	
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	14	3,580,000,000	8	1,753,169,732	1	515,557,600	-	245,029,015	-	47.53	-	245,029,015	0.0%	684.4%	BKPSDM	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tercapainya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5,835	2,371,094,100	8,466	2,081,902,968	1,006	253,629,800	997	49,030,500	99.11	19.33	997	49,030,500	17.1%	206.8%	BKPSDM	
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60	499,393,000	54	496,770,098	1	79,677,000	-	2,089,000	-	2.62	-	2,089,000	0.0%	41.8%	BKPSDM	
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5,750	1,446,611,000	8,378	1,427,951,165	1000	116,483,000	995	43,917,500	99.50	37.70	995	43,917,500	17.3%	303.6%	BKPSDM	
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	25	425,090,100	34	157,181,705	5	57,469,800	2	3,024,000	40.00	5.26	2	3,024,000	8.0%	71.1%	BKPSDM	
		Bidang Pendidikan dan Pelatihan																	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia	797	10,005,573,686	54	326,953,862	3	687,944,000	-	531,260,000	-	77.22	-	531,260,000	0.0%	531.0%	BKPSDM	
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tercapainya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	797	10,005,573,686	54	326,953,862	3	687,944,000	-	531,260,000	-	77.22	-	531,260,000	0.0%	531.0%	BKPSDM	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	797	10,005,573,686	54	326,953,862	3	687,944,000	-	531,260,000	-	77.22	-	531,260,000	0.0%	531.0%	BKPSDM	
		Bidang Inspektorat		100	#REF!	100	5,004,648,292	100	#REF!	44%	#REF!	44%	41%	29%	#REF!	20.0%	18.0%	Inspektorat	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	31,369,633,625	100	3,349,453,149	100	4,666,550,400	35%	2,083,842,306	35%	45%	35%	5,433,295,455	64.1%	17.3%	Inspektorat	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen penyusunan perangkat daerah	100	37,510,956	100	6,342,000	100	6,716,000	0	2,233,000	0	33%	20%	8,575,000	106.9%	22.9%	Inspektorat	
		Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	5	9,305,956	1	1,342,000	1	1,716,000	0	826,000	0%	48%	1	2,168,000	20.0%	23.3%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya lap. Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	5	28,205,000	1	5,000,000	1	5,000,000	0	1,407,000	0%	28%	1	6,407,000	20.0%	22.7%	Inspektorat	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	23,724,213,549	100	2,373,864,303	100	3,252,804,900	27%	1,453,281,772	27%	45%	25%	3,827,146,075	100.0%	16.1%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70	23,693,560,355	14	2,368,430,303	14	3,247,370,900	8	1,451,857,522	57%	45%	22	3,820,287,825	31.4%	16.1%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	5	14,102,500	1	2,500,000	1	2,500,000	0	-	0%	0%	1	2,500,000	20.0%	17.7%	Inspektorat	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusun laporan keuangan bulan/triwulan/semesteran SKPD	10	10,909,694	2	1,934,000	2	1,934,000	1	986,750	50%	51%	3	2,920,750	30.0%	26.8%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan prognosis dan realisasi anggaran	5	5,641,000	1	1,000,000	1	1,000,000	0	437,500	0%	44%	1	1,437,500	20.0%	25.5%	Inspektorat	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	968,200,000	1	39,930,800	100	128,520,000	25%	57,457,738	25%	45%	15%	97,388,538	20.0%	10.1%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur Pengawas	60	968,200,000	12	39,930,800	12	100,000,000	6	51,116,000	50%	51%	18	91,046,800	30.0%	9.4%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4	148,512,000	0	-	1	28,520,000	0	6,341,738	0%	22%	-	6,341,738	0.0%	4.3%	Inspektorat	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	2,450,206,661	1	392,936,766	100	431,248,000	49%	212,732,146	49%	49%	30%	605,668,912	0.0%	24.7%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik	60	31,583,959	12	5,599,000	12	5,599,000	6	1,470,000	50%	26%	18	7,069,000	30.0%	22.4%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan Administrasi Perkantoran	60	618,218,009	12	118,619,000	12	116,649,000	6	64,655,500	50%	55%	18	183,274,500	30.0%	29.6%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Langganan 10 Buah Surat Kabar	60	67,692,000	12	12,000,000	12	12,000,000	6	5,000,000	50%	42%	18	17,000,000	30.0%	25.1%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum tamu	55	124,102,000	11	22,000,000	11	22,000,000	5	8,000,000	45%	36%	16	30,000,000	29.1%	24.2%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah	60	1,608,610,693	12	234,718,766	12	275,000,000	6	133,606,646	50%	49%	18	368,325,412	30.0%	22.9%	Inspektorat	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	741,450,167	100	113,650,000	100	193,721,500	63%	144,261,500	63%	74%	63%	257,911,500	20.0%	34.8%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya barang penunjang urusan perkantoran	18	147,600,000	5	23,300,000	1	1,500,000	1	1,500,000	100%	100%	6	24,800,000	33.3%	16.8%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana Komputer/laptop/notebook, printer dan proyektor	90	565,000,167	10	61,500,000	44	192,221,500	39	142,761,500	89%	74%	49	204,261,500	54.4%	36.2%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharannya Secara Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	12	28,850,000	12	28,850,000	0	-	0	-	0%	0%	12	28,850,000	100.0%	100.0%	Inspektorat	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	1,708,629,142	100	294,730,100	100	309,440,000	33%	169,159,000	33%	55%	48%	463,889,100	10.0%	27.1%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Jasa Telpn/internet, Sumber Daya Air dan Listrik	12	16,800,000	10	14,768,100	0	-	0	-	0%	0%	10	14,768,100	83.3%	87.9%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kantor/ Rumah Dinas dan Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional	60	1,644,095,000	12	271,500,000	12	280,000,000	6	157,500,000	50%	56%	18	429,000,000	30.0%	26.1%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	60	47,734,142	12	8,462,000	12	29,440,000	6	11,659,000	50%	40%	18	20,121,000	30.0%	42.2%	Inspektorat	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1,739,423,150	100	127,999,180	100	344,100,000	100	44,717,150	50%	13%	43%	172,716,330	100.0%	9.9%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpelihara Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan terbayarnya pajak kendaraan	60	224,511,800	12	39,800,000	12	39,800,000	6	10,212,000	50%	26%	18	50,012,000	30.0%	22.3%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan dan terbayarnya kendaraan dinas milik daerah di inspektorat	60	1,422,428,500	12	83,199,180	12	288,500,000	6	33,105,150	50%	11%	18	116,304,330	30.0%	8.2%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya secara rutin peralatan dan mesin	48	87,482,850	0	-	12	15,800,000	6	1,400,000	50%	9%	6	1,400,000	12.5%	1.6%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharannya Secara Rutin/ Berkala Gedung Kantor	12	5,000,000	12	5,000,000	0	-	0	-	0%	0%	12	5,000,000	100.0%	100.0%	Inspektorat	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan		100	8,720,033,728	100	1,073,538,743	100	1,552,317,500	45%	543,821,050	45%	35%	25%	1,617,359,793	20.0%	18.5%	Inspektorat	
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100	6,892,284,283	100	750,119,593	100	966,320,500	51%	457,597,600	51%	47%	26%	1,207,717,193	20.0%	17.5%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	tersusunnya laporan hasil pengawasan kinerja (internal berkala 70 LHP dan Evaluasi LPPD 1 Laporan hasil)	355	723,121,934	71	79,605,250	71	170,874,000	32	67,876,500	45%	40%	103	147,481,750	29.0%	20.4%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	tersusunnya laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Kas opname 60 LHP dan Movev dana BOS 30 LHP)	420	720,898,895	60	79,852,850	90	128,095,000	76	96,692,400	84%	75%	136	176,545,250	32.4%	24.5%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	tersusunnya laporan hasil reviu laporan kinerja	20	312,360,559	1	32,891,000	4	74,499,000	3	68,839,200	75%	92%	4	101,730,200	20.0%	32.6%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	tersusunnya laporan hasil reviu keuangan (Reviu LKPD 1 Laporan dan reviu penyerapan PBJ 4 laporan)	40	469,584,253	5	32,568,400	8	205,743,000	4	159,822,200	50%	78%	9	192,390,600	22.5%	41.0%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Pengawasan Desa	tersusunannya laporan hasil pengawasan dana desa/pekon	580	852,874,927	116	153,167,100	116	137,637,000	0	-	0%	0%	116	153,167,100	20.0%	18.0%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	terjalannya kerjasama pengawasan dengan pihak APH dalam rangka pencegahan dan pembrantasan praktik pungutan liar	60	2,337,785,011	12	148,865,250	12	77,501,000	6	20,066,400	50%	26%	18	168,931,650	30.0%	7.2%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut	60	1,475,658,704	12	223,169,743	12	171,971,500	6	44,300,900	50%	26%	18	267,470,643	30.0%	18.1%	Inspektorat	
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100	1,827,749,445	100	323,419,150	100	585,997,000	40%	86,223,450	40%	15%	23%	409,642,600	64.1%	22.4%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	terlaksananya penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	60	402,282,995	12	108,603,150	12	76,447,000	6	12,311,250	50%	16%	18	120,914,400	30.0%	30.1%	Inspektorat	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	tersusunnya laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (penanganan kasus pengaduan masyarakat)	135	1,425,466,450	15	214,816,000	20	509,550,000	6	73,912,200	30%	15%	21	288,728,200	15.6%	20.3%	Inspektorat	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		100	2,247,851,896	100	581,656,400	100	#REF!	50%	1,432,038,953	50%	#REF!	29%	2,013,695,353	0.0%	89.6%	Inspektorat	
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100	293,707,580	100	61,587,500	100	78,995,000	50%	39,028,900	50%	49%	34%	100,616,400	100.0%	34.3%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	60	293,707,580	12	61,587,500	12	48,995,000	6	26,906,500	50%	55%	18	88,494,000	30.0%	30.1%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	48	162,435,000	12	-	12	30,000,000	6	12,122,400	50%	40%	18	12,122,400	37.5%	7.5%	Inspektorat	
		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		100	1,954,144,316	100	520,068,900	100	#REF!	50%	1,393,010,053	50%	#REF!	24%	1,913,078,953	6.2%	97.9%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	60	1,643,972,516	12	394,858,500	12	291,214,000	6	73,905,600	50%	25%	18	468,764,100	30.0%	28.5%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	60	310,171,800	12	125,210,400	12	147,010,000	6	48,802,300	50%	33%	18	174,012,700	30.0%	56.1%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	terlaksananya Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	48	216,224,190	0	-	12	61,284,000	6	15,914,200	50%	26%	6	15,914,200	12.5%	7.4%	Inspektorat	
		Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik							10,277,879,630		1,254,387,953								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95%	14,023,279,669	90%	4,261,278,000	90%	2,077,456,500	90%	765,952,521	100%	37%	90%	765,952,521	94.7%	5.5%	Badan Kesbangpol	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	95%	23,936,042	90%	5,340,400	90%	3,482,500	90%	1,962,750	100%	56%	90%	1,962,750	94.7%	8.2%	Badan Kesbangpol	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10	12,274,042	4	2,787,200	2	1,962,750	2	1,962,750	100%	100%	2.00	1,962,750	20.0%	16.0%	Badan Kesbangpol	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	11,662,000	4	2,553,200	2	1,519,750	0	-	0%	0%	0.00	0	0.0%	0.0%	Badan Kesbangpol	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	95%	7,868,833,516	90%	2,325,745,002	90%	1,335,869,750	90%	441,843,726	100%	33%	90%	441,843,726	94.7%	5.6%	Badan Kesbangpol	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	7,839,733,516	28	2,318,893,602	12	1,332,209,500	6	441,577,726	50%	33%	6.00	441,577,726	8.6%	5.6%	Badan Kesbangpol	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	12,800,000	2	2,990,600	1	1,382,000	0	-	0%	0%	0.00	0	0.0%	0.0%	Badan Kesbangpol	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	10	10,300,000	4	2,488,200	2	1,377,250	0	-	0%	0%	0.00	0	0.0%	0.0%	Badan Kesbangpol	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	6,000,000	2	1,372,600	1	901,000	0	266,000	0%	30%	0.00	266,000	0.0%	4.4%	Badan Kesbangpol	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	95%	2,005,673,663	90%	544,564,825	90%	202,408,250	90%	100,976,834	100%	50%	90%	100,976,834	94.7%	5.0%	Badan Kesbangpol	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	60	58,792,000	24	12,578,400	12	1,888,000	12	1,888,000	100%	100%	12.00	1,888,000	20.0%	3.2%	Badan Kesbangpol	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	283,560,000	1	25,000,000	1	28,850,000	0	9,000,000	0%	31%	0.00	9,000,000	0.0%	3.2%	Badan Kesbangpol	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	436,297,100	24	117,037,978	12	25,670,250	6	15,421,000	50%	60%	6.00	15,421,000	10.0%	3.5%	Badan Kesbangpol	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	50	120,000,000	24	48,000,000	12	24,000,000	4	8,000,000	33%	33%	4.00	8,000,000	8.0%	6.7%	Badan Kesbangpol	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	275,000,000	22	77,000,000	11	22,000,000	4	8,000,000	36%	36%	4.00	8,000,000	7.3%	2.9%	Badan Kesbangpol	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	832,024,563	24	264,948,447	12	100,000,000	6	58,667,834	50%	59%	6.00	58,667,834	10.0%	7.1%	Badan Kesbangpol	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	95%	99,500,000	90%	0	90%	27,500,000	90%	0	100%	0%	90%	0	94.7%	0.0%	Badan Kesbangpol	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	18	99,500,000	0	0	5	27,500,000	0	-	0%	0%	0.00	0	0.0%	0.0%	Badan Kesbangpol	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	95%	3,106,413,543	90%	1,095,329,073	90%	392,196,000	90%	157,165,959	100%	40%	90%	157,165,959	94.7%	5.1%	Badan Kesbangpol	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	1,718,376,000	24	578,967,213	12	207,000,000	6	79,169,959	50%	38%	6.00	79,169,959	10.0%	4.6%	Badan Kesbangpol	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	30	1,310,540,000	12	498,000,000	6	182,000,000	3	76,000,000	50%	42%	3.00	76,000,000	10.0%	5.8%	Badan Kesbangpol	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	77,497,543	24	18,361,860	12	3,196,000	6	1,996,000	50%	62%	6.00	1,996,000	10.0%	2.6%	Badan Kesbangpol	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	95%	1,018,422,905	90%	290,298,700	90%	116,000,000	90%	64,003,252	100%	55%	90%	64,003,252	94.7%	6.3%	Badan Kesbangpol	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	15	498,459,750	6	163,742,700	3	94,000,000	1	47,003,252	33%	50%	1.00	47,003,252	6.7%	9.4%	Badan Kesbangpol	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	60	519,963,155	24	126,556,000	12	22,000,000	6	17,000,000	50%	77%	6.00	17,000,000	10.0%	3.3%	Badan Kesbangpol	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	53%	500,009,468	46%	134,759,106	46%	63,453,000	46%	2,740,000	100%	4%	46%	2,740,000	86.8%	0.5%	Badan Kesbangpol	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	53%	500,009,468	46%	134,759,106	46%	63,453,000	46%	2,740,000	100%	4%	46%	2,740,000	86.8%	0.5%	Badan Kesbangpol	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah rakor	12	500,009,468	2	134,759,106	2	63,453,000	0	2,740,000	0%	4%	0.00	2,740,000	0.0%	0.5%	Badan Kesbangpol	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Pesisir Barat	84.92%	34,700,771,342	84.08%	801,052,058	84.08%	533,333,130	84.08%	112,750,440	100%	21%	84.08%	112,750,440	99.0%	0.3%	Badan Kesbangpol	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	84.92%	34,700,771,342	84.08%	801,052,058	84.08%	533,333,130	84.08%	112,750,440	100%	21%	84.08%	112,750,440	99.0%	0.3%	Badan Kesbangpol	
		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	jumlah Partai politik yang mendapat kursi di pemilihan legislatif tahun 2019	45	33,534,227,768	18	667,274,260	9	333,637,130	1	92,707,940	11%	28%	1.00	92,707,940	2.2%	0.3%	Badan Kesbangpol	
		4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah fasilitasi kegiatan	7	442,404,549			1	106,356,000			0%	0%	0.00	0	0.0%	0.0%	Badan Kesbangpol	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	jumlah laporan	10	724,139,025	4	133,777,798	2	93,340,000	1	20,042,500	50%	21%	1.00	20,042,500	10.0%	2.8%	Badan Kesbangpol	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase organisasi masyarakat yang aktif di Kabupaten Pesisir Barat	77.5%	6,562,559,479	70%	1,766,044,310	70%	7,058,542,000	39.13%	263,680,692	56%	4%	39.13%	263,680,692	50.5%	4.0%	Badan Kesbangpol	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	77.5%	6,562,559,479	70%	1,766,044,310	70%	7,058,542,000	39.13%	263,680,692	56%	4%	39.13%	263,680,692	50.5%	4.0%	Badan Kesbangpol	
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah organisasi masyarakat yang mendapatkan hibah tahun 2022	105	6,165,970,743	28	1,660,000,000	17	6,962,033,000	3	250,000,000	18%	4%	3.00	250,000,000	2.9%	4.1%	Badan Kesbangpol	
		Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah rakor	10	396,588,736	4	106,044,310	2	96,509,000	1	13,680,692	50%	14%	1.00	13,680,692	10.0%	3.4%	Badan Kesbangpol	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	74.86%	365,066,280	73.87%	102,452,110	73.87%	182,822,000	73.87%	45,000,000	100%	25%	73.87%	45,000,000	98.7%	12.3%	Badan Kesbangpol	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	74.86%	365,066,280	73.87%	102,452,110	73.87%	182,822,000	73.87%	45,000,000	100%	25%	73.87%	45,000,000	98.7%	12.3%	Badan Kesbangpol	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah kegiatan	5	365,066,280	2	102,452,110	1	42,822,000	0	31,554,000	0%	74%	0.00	31,554,000	0.0%	8.6%	Badan Kesbangpol	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah rakor	10	365,066,280	0	0	2	140,000,000	0	13,446,000	0%	10%	0.00	13,446,000	0.0%	3.7%	Badan Kesbangpol	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Kabupaten Pesisir Barat	74.86%	946,432,754	73.87%	235,005,850	73.87%	362,273,000	73.87%	64,264,300	100%	18%	73.87%	64,264,300	98.7%	6.8%	Badan Kesbangpol	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	74.86%	946,432,754	73.87%	235,005,850	73.87%	362,273,000	73.87%	64,264,300	100%	18%	73.87%	64,264,300	98.7%	6.8%	Badan Kesbangpol	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah rakor	10	527,441,400	4	129,663,650	2	222,354,000	1	40,346,400	50%	18%	1.00	40,346,400	10.0%	7.6%	Badan Kesbangpol	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah laporan	10	418,991,354	4	105,342,200	2	139,919,000	1	23,917,900	50%	17%	1.00	23,917,900	10.0%	5.7%	Badan Kesbangpol	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												35.37	34.12						
Predikat Kinerja												SR	SR						

2.2 Permasalahan Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan pembangunan pada hampir seluruh aspek kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kewenangan daerah dengan target dan capaian yang secara umum mengarah kepada perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Walaupun secara umum Kabupaten Pesisir Barat masih perlu melakukan akselerasi perbaikan kinerja pada seluruh sektor pembangunan. Identifikasi berbagai permasalahan merupakan isu pokok permasalahan dan tantangan pembangunan daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas dalam rencana kerja pemerintah tahun 2023 dengan tetap mensinkronkan rencana pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional.

Secara umum isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2023 masih identik dengan RKPD Tahun 2023, yaitu masih berada pada sektor-sektor :

1. Perekonomian Masyarakat; bahwa PDRB Kabupaten Pesisir Barat bertumpu pada sektor pertanian, hal ini menunjukkan masih lemahnya pengembangan potensi-potensi unggulan daerah yang sangat diharapkan untuk tumbuh, seperti pariwisata. Berikutnya, nilai investasi yang ada di daerah belum mampu sepenuhnya menutupi kebutuhan pengembangan wilayah;
2. Sumber Daya Manusia; bahwa akses pendidikan dan kesehatan yang layak baik dari sisi sarana dan prasarana termasuk jumlah tenaga belum sepenuhnya merata dan dapat dengan mudah dinikmati oleh seluruh masyarakat. Daerah juga belum mampu memanfaatkan bonus demografi, sehingga jumlah angkatan kerja yang tersedia belum sepenuhnya terserap di dunia kerja. Efek akhirnya adalah jumlah penduduk miskin yang masih tinggi;
3. Sarana Dan Prasarana; ketersediaan infrastruktur daerah yang belum baik dan merata serta ketersediaan fasilitas umum yang layak masih menjadi permasalahan daerah. Jumlah jalan mantab yang tinggi serta besarnya kawasan kumuh di daerah merupakan tantangan pembangunan infrastruktur, selain daripada penyediaan pembangunan kantor pemerintahan daerah;
4. Kemampuan Keuangan Daerah; keterbatasan fiskal daerah yang sangat bergantung pada pendapatan transfer menunjukkan masih lemahnya pos pajak dan retribusi daerah sebagai penunjang PAD. Hal ini dapat dilihat dari salah satu alasan dilakukan perubahan RKPD Tahun 2023 untuk menyikapi

Peraturan Menteri Keuangan nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan (ii) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023

5. Aksesibilitas Wilayah; bahwa masih ada beberapa pekon yang sulit untuk diakses, baik dari sisi transportasi dan juga ketersediaan akomodasi. Khususnya pada
6. Karakteristik Daerah; Secara administrasi Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah yang strategis sebagai kabupaten terlur yang berbatasan dengan Kabupaten Kaur (Bengkulu) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan). Namun demikian, secara geografis, daerah yang terpit oleh Kawasan TNBBS serta Samudera Hindia menjadikannya sebagai daerah yang rawan bencana, potensi bencana yang mungkin terjadi seperti tanah longsor, gempa bumi, gelombang tinggi hingga tsunami.

2.2.1 Permasalahan Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 yang telah dipaparkan di atas serta penelaahan atas laporan evaluasi Renja oleh perangkat daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, menghasilkan beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Adanya ketidaksesuaian antara dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023 dengan dokumen APBD/DPA Perangkat Daerah TA 2023, ditemukan beberapa program yang telah direncanakan akan dilaksanakan di Tahun 2023, akan tetapi tidak dilaksanakan pada dokumen APBD/DPA Perangkat Daerah dikarenakan menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah atau penyesuaian prioritas perangkat daerah;
- b. Adanya keterlambatan dan/atau kesalahan pada proses penyampaian laporan pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 oleh beberapa perangkat daerah sehingga mempengaruhi

ketepatan waktu dalam penyampaian laporan evaluasi RKPD sampai dengan Triulan II Tahun 2023;

- c. Pada sebagian Perangkat Daerah sering terjadi penggantian aparatur yang mengerjakan laporan evaluasi dan monev Renja, sehingga mempengaruhi ketepatan, validitas data serta pemahaman terhadap proses bisnis penyusunan laporan;
- d. Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang pengelolaan perencanaan dan pengendalian serta penyusunan anggaran pada tataran daerah dan perangkat daerah;

2.2.2 Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat yang dihadapi daerah sampai dengan Triwulan II pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan	A B C D	Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan; Masih rendahnya kualitas tenaga pendidikan; Kondisi Sarana dan Prasarana yang belum optimal; Pencapaian SPM di bidang pendidikan belum optimal;
2	Kesehatan	A B C D E	Belum Optimalnya kualitas pelayanan kesehatan; Rasio tenaga Kesehatan per penduduk masih belum ideal; Belum Terpenuhinya 9 Jenis Profesi Tenaga Kesehatan; Belum meratanya distribusi tenaga Kesehatan; Pencapaian SPM di bidang kesehatan belum optimal;
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A B C D E	Jumlah jalan dalam kondisi baik yang belum memadai; Pembangunan jaringan jalan, jembatan dan drainase belum dilakukan secara integratif; Jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik yang belum memadai; Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang belum ideal dibandingkan dengan jumlah pegawai; Jumlah sarana dan prasarana fasilitas umum yang

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
		F	belum memadai; Belum optimalnya pengendalian penataan ruang daerah;
		G	Pencapaian SPM di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang belum optimal;
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	A	Masih rendahnya jumlah jaringan air minum dari sumber air ke rumah tangga dan hunian;
		B	Masih rendahnya jaringan limbah rumah tangga dan hunian;
		C	Masih rendahnya jaringan sanitasi rumah tangga dan hunian;
		D	Jumlah jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik yang belum memadai;
		E	Pencapaian SPM di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum optimal;
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	A	Masih rendahnya budaya dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan peraturan daerah;
		B	Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah yang rawan bencana: tsunami, gempa, banjir, angin kencang, tanah longsor;
		C	Masih minimnya sarana dan prasarana mitigasi dan pasca bencana;
6	Sosial	A	Angka kemiskinan daerah yang tinggi dibandingkan dengan Provinsi Lampung;
		B	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tinggi;
		C	Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat termajinalkan;
		D	Masih rendahnya fasilitas umum yang ramah untuk kaum difabel;
		E	Pencapaian SPM di bidang sosial belum optimal;
II	Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja	A	Kurangnya lapangan kerja yang ada di daerah disebabkan kurangnya kebijakan yang mendukung investasi;
		B	Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan skill khusus untuk menciptakan masyarakat wirausaha yang mandiri;
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A	Masih kurangnya pemberdayaan perempuan dalam keluarga hingga pembangunan;
		B	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat;
		C	Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dan masyarakat;
3	Pangan	A	Belum banyaknya diversifikasi produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat;
		B	Belum optimalnya ketersediaan pangan di lingkungan keluarga;
		C	Masih terjadi kenaikan harga bahan pokok pada hari-hari tertentu disebabkan oleh inflasi daerah
4	Pertanahan	A	Masih terjadi kasus-kasus konflik pertanahan atau sengketa kepemilikan lahan daerah dengan taman nasional hutan bukit barisan selatan;

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
		B	Masih rendahnya jumlah aset tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan.
5	Lingkungan Hidup	A	Belum optimalnya pengendalian/ pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan;
		B	Belum optimalnya penanganan sampah dan limbah masyarakat;
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	Belum optimalnya kualitas pelayanan pencatatan sipil;
		B	Belum optimalnya kuantitas pelayanan pencatatan sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A	Belum optimalnya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan desa dan daerah;
		B	Belum optimalnya kualitasnya aparatur pekon;
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A	Belum optimalnya persiapan daerah dalam menghadapi bonus demografi daerah;
		B	Belum optimalnya penyuluhan terkait Keluarga Berencana di masyarakat;
9	Perhubungan	A	Minimnya jumlah sarana dan prasarana perhubungan daerah;
		B	Belum tersusunnya moda transportasi di daerah dengan baik;
10	Komunikasi dan Informatika	A	Masih minimnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika daerah;
		B	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas manajemen informatika;
		C	Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan jumlah BTS;
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	A	Masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai penggerak ekonomi lokal;
		B	Belum optimalnya pembinaan terhadap koperasi, usaha kecil dan menengah;
		C	Masih sulitnya usaha kecil menengah dalam mengakses bantuan modal dari pihak perbankan;
		D	Masih relatif minimnya pengembangan dan pelatihan softskill dan hardskill pelaku koperasi, usaha kecil dan menengah;
12	Penanaman Modal	A	Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pesisir Barat;
		B	Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
13	Kepemudaan dan Olah Raga	A	Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;
		B	Belum optimalnya pembinaan terhadap atlet daerah;
		C	Keterbatasan jumlah sarana prasarana olahraga;
14	Statistik	A	Masih sulitnya melakukan penghitungan data statistik di daerah oleh Perangkat Daerah;
		B	Masih terbatasnya ketersediaan data sektoral
15	Persandian	A	Belum optimalnya kegiatan persandian daerah;
		B	Belum adanya sarana dan prasarana persandian;
		C	Belum adanya SDM yang menguasai;

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
16	Kebudayaan	A B	Masih belum ditetapkan cagar budaya daerah; Masih belum optimalnya pengembangan budaya daerah sebagai salah satu atraksi wisata daerah;
17	Perpustakaan	A B C D E	Masih belum adanya Perpustakaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat; Masih belum adanya manajemen pengembangan dan pengelolaan perpustakaan; Belum ada pustakawan daerah; Masih sedikitnya jumlah koleksi judul buku; Masih rendahnya minat baca masyarakat;
18	Kearsipan	A B C	Masih belum adanya Gedung Arsip Daerah Kabupaten Pesisir Barat; Masih belum adanya manajemen pengembangan dan pengelolaan kearsipan; Belum ada arsiparis daerah;
III	Urusan Pilihan		
1	Kelautan dan Perikanan	A B C D	Masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap; Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya; Jumlah sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya perikanan yang sedikit; Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi;
2	Pariwisata	A B C	Masih belum memadai sarana dan prasarana serta akomodasi di lokasi wisata; Masih terbatasnya lokasi tujuan wisata di daerah; Masih belum adanya industri pendukung pariwisata;
3	Pertanian	A B C D E	Masih rendahnya produktivitas pertanian; Masih rendahnya produktivitas perkebunan; Masih rendahnya produktivitas peternakan; Masih adanya alih fungsi lahan pertanian; Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi;
4	Perdagangan	A B	Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional; Masih belum optimalnya pengawasan pasar;
5	Perindustrian	A B C D	Masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan industri kecil dan menengah sebagai penggerak ekonomi lokal; Belum optimalnya pembinaan terhadap industri daerah Masih sulitnya industri kecil menengah dalam mengakses bantuan modal dari pihak perbankan; Masih relatif minimnya pengembangan dan pelatihan softskill dan hardskill pelaku industri kecil;
6	Transmigrasi	A B	Masih relatif belum berkembang secara signifikan kehidupan masyarakat transmigran; Masih belum optimalnya pembinaan masyarakat transmigran dalam pengembangan produk pertanian dan perkebunan dan peternakan;
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
1	Sekretariat Daerah	A	Belum Optimalnya proses pelayanan terhadap kepala daerah;

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
		B	Belum optimalnya proses pengkoordinasian antar perangkat daerah
2	Sekretariat DPRD	A	Belum optimalnya proses pelayanan kepada DPRD
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
1	Perencanaan	A	Masih belum optimalnya proses perencanaan daerah;
		B	Masih lemahnya pengendalian dan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
		C	Masih belum optimalnya sinergitas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pengendalian;
2	Keuangan	A	Masih belum optimalnya pembinaan dan pengendalian dalam proses penataan usaha keuangan daerah;
		B	Masih belum optimalnya pendataan aset daerah;
		C	Masih rendahnya nilai pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah;
		D	Masih rendahnya nilai retribusi daerah terhadap Pendapatan Daerah;
3	Kepegawaian	A	Belum optimalnya pembinaan dan pendataan pegawai;
		B	Belum optimalnya merit sistem dalam proses jenjang karir jabatan;
4	Pendidikan dan Pelatihan	A	Belum optimalnya sistem pendidikan dan pelatihan bagi PNS di daerah;
		B	Masih minimnya jumlah PNS yang mendapatkan kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
5	Penelitian dan Pengembangan	A	Masih minimnya jumlah kajian penelitian dan pengembangan daerah sebagai materi teknis perencanaan daerah;
		B	Belum optimalnya hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
VI	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		
1	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	A	Masih belum optimalnya proses pembinaan terhadap pegawai daerah;
		B	Masih belum optimalnya proses reviu dan pengendalian terhadap dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan;
		C	Masih belum optimalnya pelaksanaan manajemen pengawasan;
VII	Unsur Kewilayahan		
1	Kecamatan	A	Masih belum meratanya sarana dan prasana di tingkat kecamatan;
		B	Masih belum adanya sistem pelayanan bagi masyarakat yang terintegrasi
VIII	Unsur Pemerintahan Umum		
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	A	Masih belum optimalnya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat;
		B	Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum;

2.2.3 Rekomendasi

Sebagai langkah perbaikan kinerja pada periode mendatang, khususnya pada proses penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD dan/atau Renja Perangkat Daerah diperlukan rekomendasi perbaikan berdasarkan pada capaian kinerja serta permasalahan-permasalahan yang telah disajikan sebelumnya, antara lain:

- a. Perlunya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, hingga nantinya pada dokumen penganggaran daerah dan perangkat daerah terjalin sinergitas;
- b. Perlunya dilakukan perubahan target sasaran indikator makro daerah yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2023 untuk dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD Tahun 2023, hal ini berdasarkan pada realisasi capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 (dalam hal ini data yang tersedia sampai dengan tahun 2022 yang dinilai memberikan gambaran capaian hingga akhir tahun 2023) dengan tetap memperhatikan kondisi daerah;
- c. Dalam penetapan target kinerja yang akan dicapai pada setiap program, kegiatan, sub kegiatan pada Renja perangkat daerah agar memperhatikan satuan *output* pada dokumen perencanaan tahunan maupun lima tahunan dan juga Renja Perangkat Daerah maupun Renstra Perangkat Daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah berikut turunannya dan/atau pembaharuannya. Termasuk penentuan *output* yang terukur dan saling terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lainnya;
- d. Asumsi dan proyeksi pendapatan daerah baik berupa transfer pusat, pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan lainnya yang mempengaruhi perhitungan penerimaan daerah pada periode mendatang sebaiknya dapat diukur secermat mungkin dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dapat lebih akurat, efektif dan efisien;
- e. Penyusunan, penataan dan/atau penambahan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah untuk percepatan pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan;

- f. Sebagai salah satu bagian dalam siklus manajemen perencanaan dan penganggaran, tahap pengendalian evaluasi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan agar terwujud satu kesatuan manajemen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program-program pembangunan yang efektif dan efisien dengan tujuan akhir terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah Kabupaten Pesisir Barat dan kebijakan Keuangan Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Pesisir Barat serta pengaruh perekonomian regional (Provinsi Lampung) dan nasional. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikannya secara efektif dan efisien dengan pendekatan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang ingin dicapai oleh Kabupaten Pesisir Barat ini disusun dalam suatu kondisi perekonomian daerah yang masih berkembang sehingga perencanaan pembangunan yang terencana, tersusun dan akuntabel.

3.1 Kerangka Ekonomi Daerah

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di suatu daerah merupakan salah satu indikator dalam menilai pencapaian kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hal ini adalah sebagai fasilitator dan juga regulator dalam memberikan kemudahan dan kepastian bagi pelaku ekonomi untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonominya. Secara substansial pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya terencana dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kemampuan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya ekonomi secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan seluas-luasnya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah yang terencana diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel dalam rangka reformasi birokrasi.

3.1.1 Perkembangan Kinerja Ekonomi Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

3.1.1.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan alat kontrol dan evaluasi dalam penilaian hasil pembangunan yang pada akhirnya akan menentukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah tersebut. PDRB nominal (harga berlaku) dan PDRB riil (harga konstan), masing-masing mempunyai peran masing-masing. Seperti halnya dalam PDB (Produk Domestik Bruto), PDRB mempunyai tiga pendekatan dalam menghitungnya yaitu pendekatan produksi atau lebih dikenal dengan PDRB Sektoral atau PDRB menurut Lapangan Usaha, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Pada tahun 2020 sampai dengan 2021, sektor ekonomi terguncang dengan adanya Pandemi Covid-19. Dimana pada tahun 2022 daerah masih berada pada posisi untuk merestrukturisasi efek dari pandemi dimaksud, Hal ini tentunya sangat mempengaruhi Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). Pada tahun 2022, PDRB ADHB tercatat pada angka 5.349,44 (dalam miliar rupiah) atau naik sebesar 452,888 (dalam miliar rupiah). Tahun 2021, PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat berada pada angka 4.896,56 (dalam miliar rupiah) atau naik 219,02 (dalam miliar rupiah) dibandingkan pada data tahun 2020. Pada tahun 2020 PDRB ADHB berada pada angka 4.687,39 (dalam miliar rupiah), capaian ini meningkat dibandingkan dengan data pada tahun 2019 PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat berada pada angka 4.687,39 (dalam miliar rupiah) atau meningkat 405,01 (dalam miliar rupiah) dibandingkan data tahun 2018 yang berada pada angka 4.282,37 (dalam miliar rupiah).

Selanjutnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) pada tahun 2019 berada pada angka 3.106,10 (dalam miliar rupiah) atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,47% dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 4.944,88 (dalam miliar rupiah). Berikutnya pada tahun 2020 PDRB ADHK mengalami penurunan (1,18%) dengan capaian menjadi 3.069,60 (dalam miliar rupiah). Penurunan pada tahun 2020 dari tahun 2019 adalah sebesar 36,5 (dalam miliar rupiah). Berikutnya, pada tahun 2021 capaian PDRB ADHK sebesar 3.133,19 (dalam miliar rupiah) atau mengalami peningkatan

2,07% dibandingkan tahun 2020. Capaian pada tahun 2022 tercatat pada angka 3.223,12 (dalam miliar rupiah) atau naik 89.93 (dalam miliar rupiah).

Pada tahun 2023 ini PDRB ADHB diproyeksi dapat meningkat menjadi 5.531,32 (dalam miliar rupiah). Sementara itu untuk PDRB ADHK diproyeksikan pada tahun 2022 ini dapat tetap meningkat menjadi 3.332,70 (dalam miliar rupiah). Proyeksi ini berkaca dari perhitungan selama kurun waktu 2015-2019 dimana perkembangan PDRB ADHB dan ADHK yang masih mampu berkembang 4,0-5,0% pertahunnya, namun terjadi perubahan perkembangan nilai mulai tahun 2020-2021 berkembang pada kisaran (-1,0) - 2,0% pertahunnya.

Optimisme pertumbuhan diharapkan dari perbaikan ekonomi global, nasional dan regional yang dibarengi dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan perubahan pola hidup masyarakat daerah secara umum akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan perilaku masyarakat yang mulai teratur serta beraktivitas dengan lebih efektif dan efisien.

Tabel 3.1 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)

PDRB Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
ADHB	4.282,38	4.687,39	4.677,54	4.896,56	5.439,44
ADHK	2.944,88	3.106,11	3.069,60	3.133,19	3.223,12

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Data untuk PDRB ADHB untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tidak tersedia, sehingga perkembangan daerah menggunakan data dari Pemerintah Provinsi Lampung, yang mana Ekonomi Provinsi Lampung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp105.586,12 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp63.859,98 miliar.

3.1.1.2 Struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha

PDRB harga berlaku suatu daerah digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah daerah tersebut. Dalam konteks PDRB yang sangat familiar (menurut lapangan usaha), sumber-sumber ekonomi/sektor-sektor/lapangan usaha tersebut terdiri dari 17 (tujuh belas) kategori. Besar kecilnya PDRB dalam 17 (tujuh belas) kategori tersebut di atas sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi geografis, ketersediaan SDA, Infrastruktur, SDM yang memadai dan lain sebagainya. 17 kategori tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa Lainnya.

Walaupun kondisi laju pertumbuhan berfluktuasi, namun dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tidak ada kecenderungan pergeseran peran masing-masing sector sebagai penyumbang pertumbuhan PDRB. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar PDRB, dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tetap menjadi primadona sebagai penyumbang PDRB. Persentase kontribusi sektor-sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 selama 5 (lima) tahun terakhir cukup seimbang artinya dari nilai kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB.

Dari 9 (sembilan) sektor yang ada dalam komponen perhitungan PDRB, sektor Primer, kelompok Sektor Sekunder dan kelompok Sektor Tersier. Kelompok Sektor Primer terdiri dari 3 (tiga) sektor yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan (3) Konstruksi; kelompok sektor sekunder terdiri dari 5 (lima) sektor, yaitu: (1) Pertambangan dan Penggalian, (2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (3) Industri Pengolahan, (4) Jasa Pendidikan dan (5) Real Estate. Sementara untuk sektor tersier terdiri dari 9 (sembilan) kelompok,

yaitu: (1) Informasi dan Komunikasi, (2) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (4) Jasa Keuangan dan Asuransi, (5) Transportasi dan Pergudangan, (6) Jasa lainnya, (7) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (8) Pengadaan Listrik dan Gas dan (9) Jasa Perusahaan.

Pada tahun 2018 sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB ADHB adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan persentase 51,00% disusul dengan Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Reparasi Motor dengan persentase 11,30%. Berikutnya pada tahun 2019 sektro yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB ADHB kembali sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 48,47% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,96%. Pada tahun 2020 sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB ADHB tetap pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 49,29% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,54%. Kembali pada tahun 2021 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 48,86% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,86%. Tahun 2022, PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat disumbang sebesar 46,41% dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 14,68%.

Penurunan kontribusi dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dipengaruhi oleh mulai meningkatnya perkembangan sektor-sektor lainnya, khususnya sektor Konstruksi dan pertambangan. Peningkatan kontribusi dari beberapa sektor lainnya. Sektor utama yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah sektor Konstruksi yang pada tahun 2018 kembali naik menjadi 5,80% pada tahun 2019 berada pada angka 7,01% dan dan pada tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 6,83% dan 7.53% pada tahun 2021. Tahun 2022, sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 8,04%. Pesatnya perkembangan sektor konstruksi disebabkan pembangunan daerah yang membutuhkan banyak bangunan baru, baik dari sisi pemerintah dan/atau swasta.

Sementara itu untuk sektor pertambangan dan penggalian juga terus memberikan kontribusi signifikan pada distribusi PDRB ADHB. Di mulai pada tahun 2018 berada pada angka 5,80%. Pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan menjadi 5,64% dan data pada tahun 2020 menjadi 5,74% serta pada tahun 2021 berada pada angka 5,21% dan 5,22% pada tahun 2022. Perkembangan sektor konstruksi dan pertambangan dan penggalian ini dipengaruhi oleh pembangunan fisik di segala bidang yang terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Sedangkan sektor lain yang kontribusinya terhadap PDRB ADHB dinilai masih relatif kecil akan terus ditingkatkan karena pada dasarnya semua sektor penunjang PDRB Kabupaten Pesisir Barat merupakan potensi yang layak dikembangkan dan menjadi penunjang perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat. Sektor terkecil adalah sektor pengadaan listik dan gas yang pada tahun 2018 sebesar 0,01% dan pada tahun 2019-2022 tercatat dengan nilai 0,02. Berikutnya sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang dengan nilai kontribusi tetap pada angka 0,05% (tahun 2018-2022) serta sektor jasa Perusahaan yang dari tahun 2018-2022 masih berada pada angka 0,15% dari keseluruhan PDRB ADHB serta sektor.

Keseluruhan gambaran distribusi PDRB ADHB ini menunjukkan bahwa sebagai daerah pemekaran baru Kabupaten Pesisir Barat masyarakatnya masih berorientasi pada agraris, sektor-sektor industri dan jasa belum sepenuhnya berkembang dan perlu dukungan investasi dan intervensi kebijakan dari pemerintah daerah.

Tabel 3.2 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (dalam %)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	51,00	48,47	49,29	48,86	46,41
2	Pertambangan dan Penggalian	5,80	5,64	5,74	5,21	5,22
3	Industri Pengolahan	4,88	4,49	3,98	4,11	3,76
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	5,90	7,01	6,83	7,53	8,04
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,30	12,96	12,54	12,86	14,68
8	Transportasi dan Pergudangan	1,01	1,00	0,97	0,96	1,25
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,73	2,03	1,95	1,81	1,98
10	Informasi dan Komunikasi	2,24	2,24	2,29	2,38	2,27

11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,45	1,39	1,38	1,43	1,38
12	Real Estate	3,74	3,69	3,61	3,58	3,62
13	Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,12	5,11	5,23	5,12	5,17
15	Jasa Pendidikan	3,52	3,62	3,79	3,78	3,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,07	1,18	1,19	1,15
17	Jasa lainnya	1,04	1,06	1,00	0,95	1,13
	PDRB ADHB	100.00	100.00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Data untuk PDRB berdasarkan lapangan usaha untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tidak tersedia, sehingga perkembangan daerah menggunakan data dari Pemerintah Provinsi Lampung, dimana Provinsi Lampung pertumbuhan positif dicapai hampir seluruh lapangan usaha, terutama lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 25,80 persen. Selanjutnya lapangan usaha Jasa Lainnya, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar- Eceran dan Reparasi Kendaraan Mobil-Sepeda Motor juga tumbuh signifikan masing-masing mencapai 22,16 persen, 14,37persen dan 14,29 persen.

3.1.1.3 Struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Pengeluaran

PDRB menurut Pengeluaran digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi ekonomi suatu daerah melihat dari sisi pengeluaran dan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor perekonomian suatu daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) komponen, sebagai berikut: (1) Konsumsi Rumah Tangga; (2) Konsumsi LNPR; (3) Konsumsi Pemerintah; (4) PMTB; (5) Perubahan Inventori; (6) Ekspor; (7) Impor.

Berdasarkan pada data PDRB ADHB menurut Pengeluaran yang berfungsi untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan baik antar wilayah dan luar negeri. Data pada tahun 2019 sebesar 4.687,39 (dalam miliar rupiah) dari sebelumnya diangka 4.282,38 (dalam miliar rupiah) pada tahun 2018 atau naik 336,79 (dalam miliar rupiah). Pada tahun 2020 PDRB ADHB menurut pengeluaran tercatat sebesar 4.692,20 (dalam miliar rupiah) dan kembali

naik menjadi 4.919,53 (dalam miliar rupiah) pada tahun 2021. Pada tahun 2022, PDRB ADHB menurut jenis pengeluaran naik sebesar 429,91 (dalam miliar rupiah) menjadi sebesar 5.449,44 (dalam miliar rupiah).

Sementara itu untuk data PDRB ADHK menurut Pengeluaran pada tahun 2019 adalah sebesar 3.106,11 (dalam miliar rupiah) dari sebelumnya pada tahun 2018 adalah 2.944,88 (dalam miliar rupiah) atau meningkat sebesar 161,23 (dalam miliar rupiah). PDRB ADHK menurut Pengeluaran pada tahun 2020 adalah sebesar 3.069,60 (dalam miliar rupiah) atau mengalami penurunan sebesar (36,51 dalam miliar rupiah). Berikutnya ada peningkatan menjadi 3.133,19 (dalam miliar rupiah) pada tahun 2021 atau naik 63,59 (dalam miliar rupiah). Data PDRB ADHK menurut Jenis Pengeluaran berada pada angka 3.223,12 (dalam miliar rupiah) atau berhasil naik sebanyak 89,93 (dalam miliar rupiah).

Pada tahun 2023, PDRB ADHB menurut pengeluaran diproyeksikan akan berada pada angka 5.531,32 (dalam miliar rupiah) dan pada tahun 2024 diproyeksikan akan meningkat menjadi sebesar 5.730,44 (dalam miliar rupiah). Selanjutnya untuk PDRB ADHK menurut pengeluaran pada tahun 2023 diproyeksikan akan berada pada angka 3.332,70 (dalam miliar rupiah) dan diproyeksikan meningkat menjadi 3.452.67 (dalam miliar rupiah) pada tahun 2024 mendatang.

Baik pada nilai PDRB ADHB maupun PDRB ADHK menurut pengeluaran, sektor terbesar tetap ada pada: (1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga; (2) Pembentukan Modal Tetap Bruto; (3) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah; (4) Pengeluaran Konsumsi LNPRT; (5) Net Ekspor Barang dan Jasa; (6) Perubahan Inventori.

Berikutnya disampaikan PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 3.3 PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam Miliar rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.009,36	3.285,05	3.283,83	3.373,76	3.717,25
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	75,19	84,65	87,02	90,20	96,19

3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan	142,73	147,14	146,50	149,45	147,23
4	PMTB	933,61	1.068,19	1.017,88	1.110,62	1.205,95
5	Perubahan Inventori	63,79	18,96	11,08	7,17	7,46
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	57,70	83,40	145,88	188,33	175,36
	Total PDRB	4.282,38	4.687,39	4.692,20	4.919,53	5.349,44

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

**angka sementara*

***angka sangat sementara*

Lebih lanjut, disajikan PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 3.4 PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.112,13	2.237,12	2.195,72	2.206,58	2.310,06
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	46,45	51,49	51,90	52,63	53,55
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	96,50	98,57	96,10	96,69	93,89
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	652,79	727,03	670,11	702,02	732,58
5	Perubahan Inventori	37,13	8,29	14,61	4,29	4,40
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(0,11)	(16,40)	41,17	70,98	28,64
	PDRB	2.944,88	3.106,11	3.069,60	3.133,19	3.223,12

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

**angka sementara*

***angka sangat sementara*

Data untuk PDRB berdasarkan pengeluaran untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tidak tersedia, sehingga perkembangan daerah menggunakan data dari Pemerintah Provinsi Lampung, yang mana untuk Provinsi Lampung terjadi pertumbuhan positif terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 10,12 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,90 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,88 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,01 persen; dan Komponen

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,83 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 8,08 persen.

3.1.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023 diperkirakan berada pada kisaran 3,4-3,9% atau menyesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Lampung dan perekonomian daerah. Angka ini dinilai cukup realistis dan moderat bila melihat pada tantangan dan juga proyeksi pembangunan ekonomi pada tahun 2023 dan 2024 mendatang. Target pada tahun 2023 sebesar 3,4-3,9% juga melihat dari capaian pada tahun 2022 yang berada pada angka pertumbuhan 2,88%. Angka ini berdasarkan pada data series tahun 2015-2019 yang berada pada kisaran 4,9-5,3% sebelum menjadi minus pada tahun 2020 diangka -1,18%. Perbaikan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2021 yang berada pada angka 2.07%.

Diproyeksikan sumbangan terbesar perekonomian daerah masih berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor konstruksi dengan sumbangan $\pm 48-50\%$ dari total PDRB Kabupaten Pesisir Barat. Pada tahun 2023 ini diproyeksikan bahwa pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat masih ada pada sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan konsumsi masyarakat dan juga konsumsi Pemerintah Daerah. Proyeksi tersebut merupakan suatu hal yang wajar mengingat kondisi perekonomian Kabupaten Pesisir Barat selama tahun 2022 dan semester I Tahun 2023 telah kembali ke arah pertumbuhan meningkat yang stabil dengan catatan signifikannya peningkatan belanja modal pemerintah daerah dalam infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.

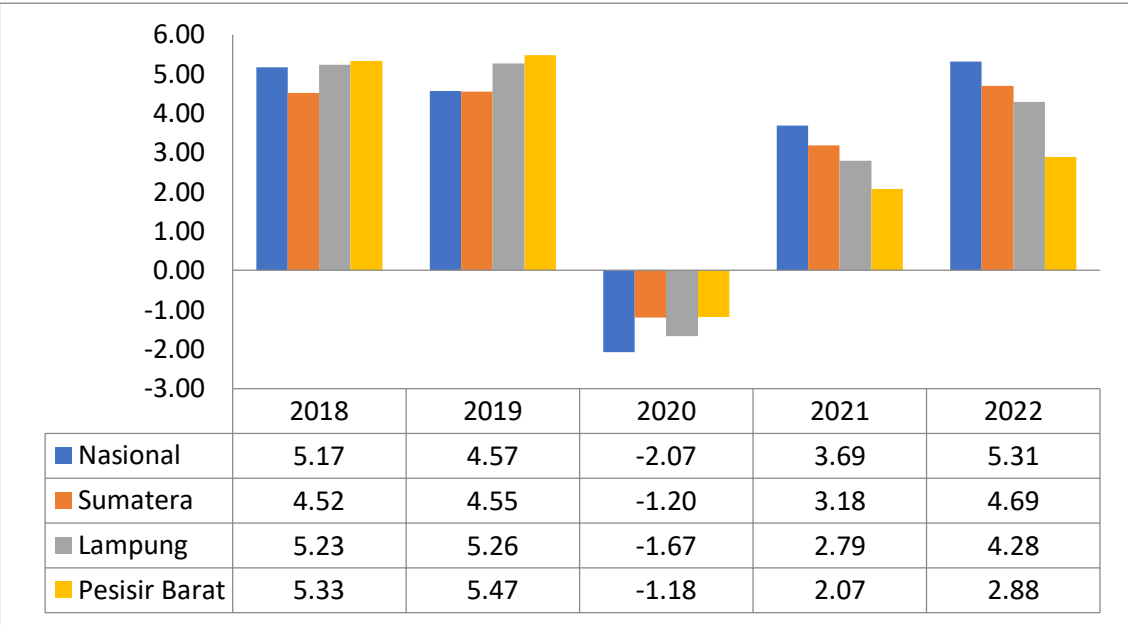
Target pertumbuhan ekonomi ini juga sejalan dengan kondisi ekonomi nasional dan Provinsi Lampung, Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,96 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,80 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,12 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 0,79 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 8,13 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 0,72 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat dalam 5 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut: Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2018 berada pada angka 5,33% atau stagnan dari tahun 2017. Data pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi berada pada 5.47% atau naik 0,14. Pada tahun 2020 mengalami penurunan secara signifikan dan terkoreksi minus sebanyak (1.18). Perbaikan mulai terjadi pada tahun 2021 yang menempatkan perekonomian Pesisir Barat pada angka 2.07%. Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi daerah berhasil naik menjadi sebesar 2,88%.

Capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 2.88% tersebut masih berada di bawah Provinsi Lampung yang mencatatkan nilai 4.28% serta regional Sumatera dengan capaian pertumbuhan 4.69%. Selanjutnya bila dilihat dari sisi nasional, maka capaian Pesisir Barat memiliki selisih 2.43% dari nasional yang tercatat sebesar 5.31%.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Data untuk pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tidak tersedia, sehingga perkembangan daerah menggunakan data dari Pemerintah Provinsi Lampung, Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2023 dibanding triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 0,79 persen (q-to-q), menguat dibanding capaian triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 5,34 persen. Pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh kenaikan produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan sektor dominan penopang perekonomian Provinsi Lampung. Tercatat pertumbuhannya sebesar 8,13 persen. Selanjutnya, lapangan usaha yang juga mengalami pertumbuhan cukup pesat adalah Jasa Keuangan yang tumbuh sebesar 6,09 persen.

Sementara itu beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 12,54 persen, serta lapangan usaha Real Estate mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 9,15 persen.

3.1.1.5 Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha

Secara konstan selama kurun waktu tahun (2018-2022) PDRB tumbuh antara 0,20 hingga 0,30%. Kuatnya (i) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, (ii) sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, (iii) sektor konstruksi, sektor pertambangan dan penggalian serta (iv) sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib dalam struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Barat merupakan indikasi bahwa sektor ini merupakan sektor yang sangat layak dikembangkan menjadi strategi pembangunan Kabupaten Pesisir Barat. Sementara itu sektor jasa pendidikan dan sektor real estate perlahan namun pasti diprediksi akan semakin menguat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat.

Ada tiga kelompok sektor dalam PDRB menurut lapangan usaha, yaitu kelompok sektor Primer, kelompok Sektor Sekunder dan kelompok Sektor Tersier. Kelompok Sektor Primer terdiri dari 2 (dua) sektor, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor Pertambangan, Kelompok sektor Sekunder terdiri dari 3 (tiga) sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor konstruksi, sedangkan kelompok sektor tersier terdiri dari 4 (empat)

sektor lainnya yaitu sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa lainnya.

Ketimpangan dalam perkembangan sektor primer dengan sektor sekunder dan tersier pada dasarnya mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang riil di Kabupaten Pesisir Barat. Secara umum dapat dikatakan bahwa efisiensi dan produktivitas lebih dominan terjadi pada sektor primer dan sekunder. Kelompok sektor Primer memegang dominasi paling kuat dalam struktur ekonomi Kabupaten Pesisir Barat atau dapat dikatakan struktur ekonomi daerah adalah struktur ekonomi yang masih pada sektor tradisional, pada urutan kedua penyumbang terbesar ada pada sektor Tersier dan menunjukkan angka yang stabil. Ini merupakan potensi bagi daerah untuk meningkatkan perekonomian di sektor Tersier dan mulai mengembangkan potensi ekonomi modern yang tidak lagi berbasis atau mengandalkan sektor Primer atau Tradisional.

Tabel 3.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK) Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020*	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,99	0,71	0,02	-0,03	-0,03
2	Pertambangan dan Penggalian	7,66	6,37	0,00	-5,76	-5,76
3	Industri Pengolahan	1,54	-0,10	-12,49	2,32	2,32
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,60	26,56	5,08	7,99	7,99
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,59	1,71	5,02	5,94	5,94
6	Konstruksi	13,85	28,50	-2,03	9,63	9,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,86	9,11	-4,01	6,97	6,97
8	Transportasi dan Pergudangan	6,45	7,50	-4,73	2,56	2,56
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,81	26,89	-4,54	-3,32	-3,32
10	Informasi dan Komunikasi	8,64	9,09	2,99	10,78	10,78
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,24	2,98	0,29	3,69	3,69
12	Real Estate	6,15	6,25	-3,80	3,44	3,44
13	Jasa Perusahaan	3,87	8,47	-1,81	1,30	1,30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,83	8,90	1,34	3,22	3,22
15	Jasa Pendidikan	8,94	9,48	4,09	3,42	3,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,20	8,60	9,53	3,89	3,89
17	Jasa lainnya	9,96	8,20	-4,49	-1,09	-1,09
	PDRB ADHK	5,33	5,47	-1,18	2,07	2,88

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

3.1.1.6 Pendapatan Per Kapita

Dilihat dari jumlah PDRB Per Kapita Kabupaten Pesisir Barat mengalami pertumbuhan yang cukup baik, pada tahun 2018 tercatat sebesar 27.85 (dalam juta rupiah). Pada tahun 2019 PDRB Perkapita berada pada angka 30,25 (dalam juta rupiah). Pada tahun 2020, PDRB Perkapita turun mengikuti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat yang berada pada minus 1,18% dengan nilai 28.89 (dalam juta rupiah). Tahun 2021, seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi daerah, PDRB perkapita berhasil naik 1,30% sehingga menjadi sebesar 30.06 (dalam juta rupiah). Pada tahun 2022, PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat tercatat pada angka 32,64 (dalam juta rupiah).

Tabel 3.6 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Tahun	PDRB ADHB	Jumlah Penduduk (berdasarkan BPS)	PDRB Perkapita (PPK)
2018	4,282.37	153,743	27.85
2019	4,687.38	154,973	30.25
2020	4,692.20	162,419	28.89
2021*	4,919.52	163,641	30.06
2022**	5,349.44	164,810	32,64

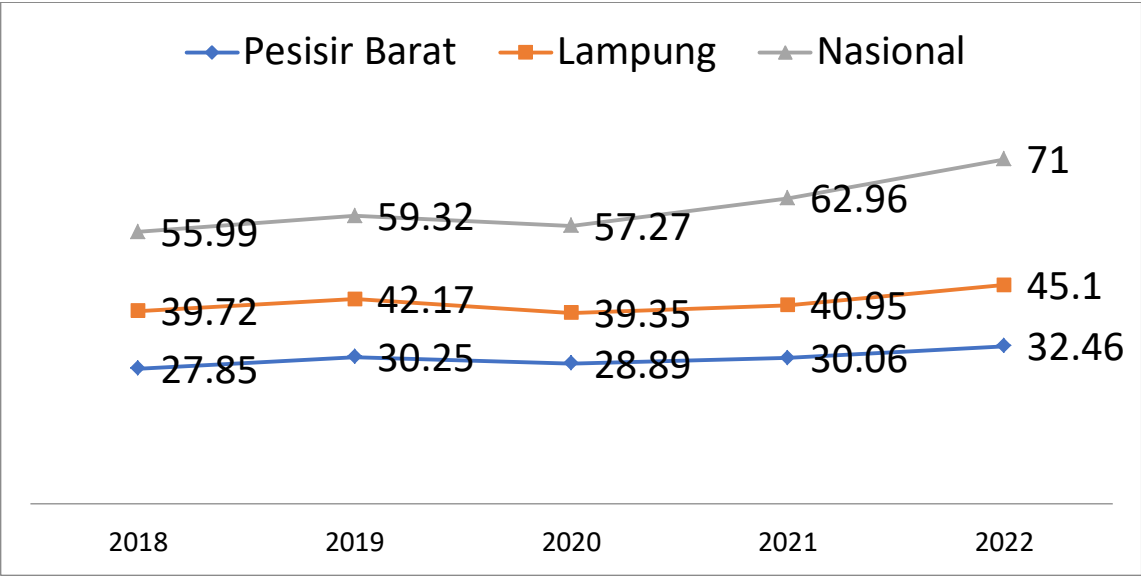
Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

*angka sementara

*angka sangat sementara

Pada tahun 2023 PDRB Perkapita diproyeksikan akan mengalami kenaikan dan berada pada angka 31.60-32.60 (dalam juta rupiah). sementara untuk target pada tahun 2024 mendatang diproyeksikan sebesar 33.60-34.10 (dalam juta rupiah). Walaupun melihat tantangan perekonomian nasional dan provinsi yang semakin berat, optimisme akan terjadinya pertumbuhan ekonomi juga masih diharapkan.

Gambar 3.2 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022
(dalam juta rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

3.1.1.7 Inflasi Daerah

Perubahan harga barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dalam sebuah perekonomian. Perubahan harga tersebut dapat berupa kenaikan dan juga penurunan. Rata-rata tertimbang perubahan harga tersebut pada kurun waktu tertentu dalam suatu wilayah itulah yang kita kenal dengan inflasi. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan inflasi regional, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga.

Pada April 2023, terjadi inflasi years on years (yoy) gabungan dua kota di Lampung sebesar 5,00 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,19. Inflasi yoy Kota Bandar Lampung sebesar 5,15 persen, dengan IHK sebesar 116,19 dan inflasi yoy Kota Metro sebesar 3,89 persen dengan IHK sebesar 116,25.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau 5,18 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 4,70 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga 1,57 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 3,14 persen; kelompok kesehatan 3,77 persen; kelompok transportasi 11,93 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 4,03 persen; kelompok pendidikan 9,23 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,94 persen; dan

kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 5,34 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks (deflasi) yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,19 persen.

Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada April 2023, antara lain bensin, rokok kretek filter, beras, sekolah menengah atas, angkutan udara, angkutan dalam kota dan telur ayam ras. Perkembangan harga berbagai komoditas pada April 2023 di dua kota IHK Lampung secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS, pada April 2023 terjadi inflasi yoy sebesar 5,00 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 110,65 pada April 2022 menjadi 116,19 pada April 2023. Tingkat inflasi mtm tercatat inflasi sebesar 0,30 persen dan tingkat inflasi ytd sebesar 1,32 persen.

Inflasi years on years (yoy) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi memberikan andil sebesar 1,59 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil sebesar 1,57 persen; kelompok pendidikan memberikan andil sebesar 0,46 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil sebesar 0,29 persen; kelompok pakaian dan alas kaki memberikan andil sebesar 0,28 persen; kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga memberikan andil sebesar 0,27 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran memberikan andil sebesar 0,25 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberikan andil sebesar 0,17 persen; kelompok kesehatan memberikan andil sebesar 0,09 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya memberikan andil sebesar 0,08 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan yang memberikan andil deflasi sebesar 0,05 persen.

3.1.2. Perkembangan Kinerja Sosial Ekonomi Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

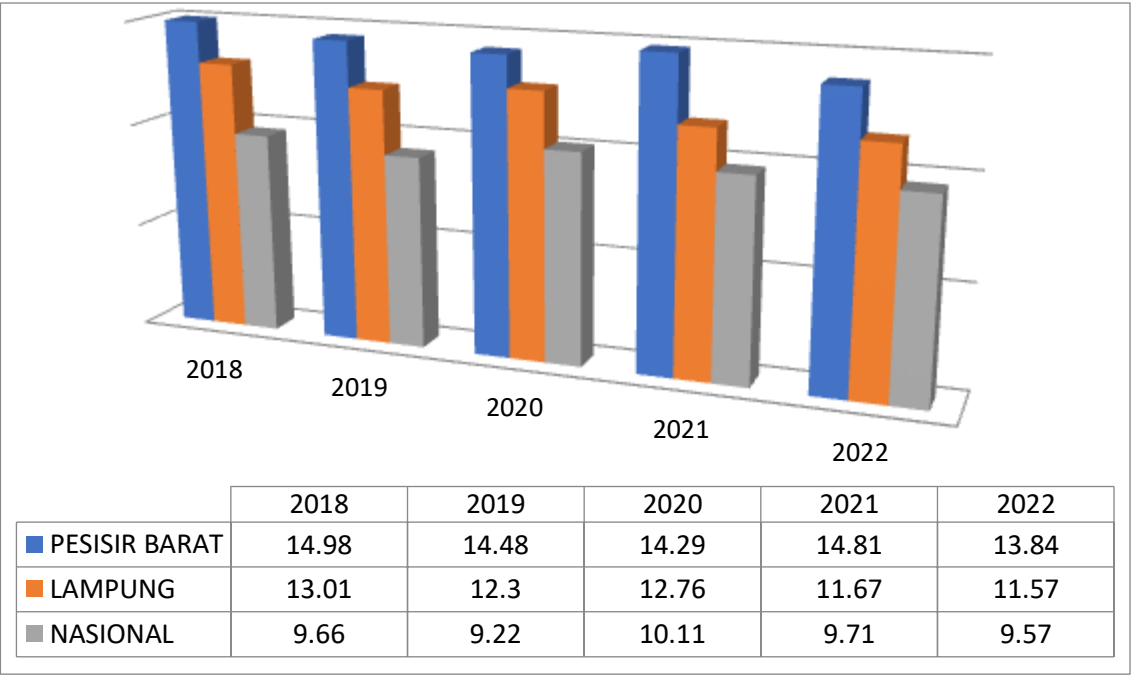
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan diimbangi dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik antar penduduk dan antar wilayah. Beberapa indikator dalam peningkatan kinerja sosial ekonomi daerah Kabupaten Pesisir Barat antara lain adalah Persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.1.2.1 Tingkat Kemiskinan

Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan terus menurun, hal ini sejalan dengan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan pada data tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2018 tingkat kemiskinan sebesar 14,98% atau sebanyak 22.980 penduduk miskin. Berikutnya berdasarkan pada data tahun 2019 terdapat 22.380 jiwa penduduk miskin dengan angka persentase sebesar 14,48%. Data pada tahun 2020, tingkat kemiskinan berada pada angka 14,29% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 22.241 jiwa. Pada tahun 2021, angka kemiskinan daerah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 14.81% atau sebanyak 23.230 jiwa penduduk miskin daerah. Kenaikan sebanyak 0.52% dipengaruhi dari efek pandemi Covid-19 yang menyebabkan penduduk marginal kesulitan dalam berusaha. Capaian pada tahun 2022 sebesar 13,84% penduduk miskin di daerah atau sebanyak 21.500 orang. Data keparahan kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2018-2022 berada pada indeks 0,40-0,50%.

Untuk tahun 2023 diproyeksi tingkat kemiskinan mampu turun menjadi 13,65% atau sebanyak 22.300 jiwa penduduk miskin. Proyeksi jumlah penduduk miskin yang naik dari sisi jumlah dilakukan dengan tetap memperhatikan kenaikan jumlah penduduk. Angka proyeksi ini diambil dari perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat selama 5 (lima) tahun dari 2018-2022 yang secara rata-rata turun sebanyak 0,30-0,50% pertahunnya walaupun terkoreksi pada tahun 2021.

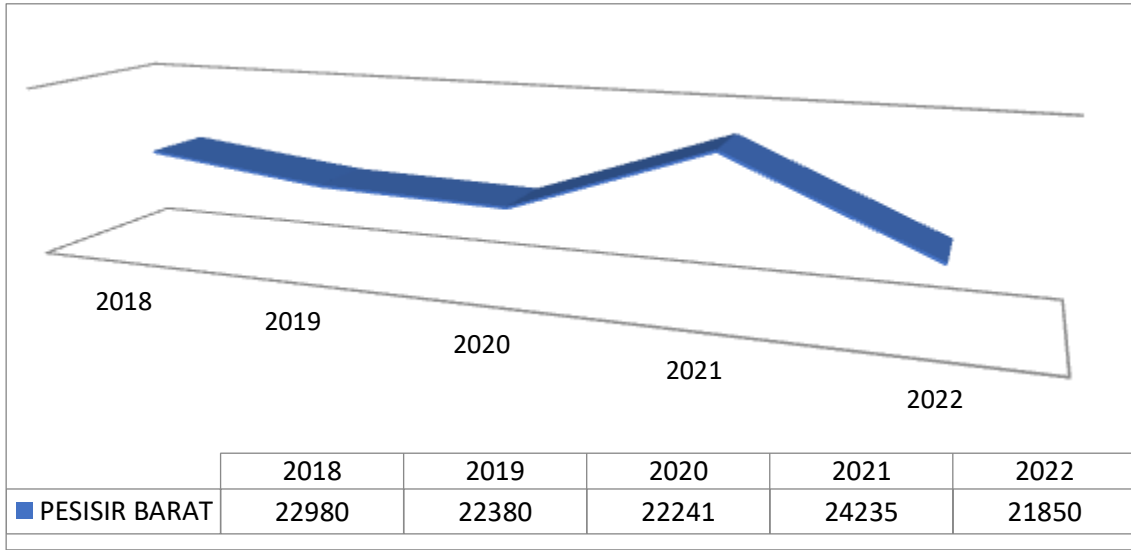
Gambar 3.3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Untuk tahun 2022, tingkat kemiskinan daerah Kabupaten Pesisir Barat tercatat sebesar 13.84%, jauh melebihi data Provinsi Lampung pada angka 11,57%. Angka capaian Kabupaten Pesisir Barat dan Provinsi Lampung ini masih diatas dari Nasional yang mencatat sebanyak 9,54% jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Gambar 3.4 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Data untuk Tingkat Kemiskinan dan jumlah penduduk miskin untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tidak tersedia, sehingga perkembangan daerah menggunakan data dari Pemerintah Provinsi Lampung. Bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 11,11 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah Garis Kemiskinan) pada Maret 2023 sebesar 970,67 ribu orang, kondisi ini lebih baik dibandingkan kondisi pada Bulan September 2022 yang mencapai 995,59 ribu, turun 24,92 ribu orang. Jumlah penduduk miskin turun 31,74 ribu orang terhadap Maret 2022 sebesar 1002,41 ribu orang.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 8,34 persen, turun menjadi 8,02 persen pada Maret 2023 atau sebesar 0,32 poin. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 12,96 persen, turun menjadi 12,65 persen pada Maret 2023 atau sebesar 0,31 poin. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan turun sebanyak 6,2 ribu orang (dari 239,11 ribu orang pada September 2022 menjadi 232,96 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 18,8 ribu orang (dari 756,48 ribu orang pada September 2022 menjadi 737,71 ribu orang pada Maret 2023).

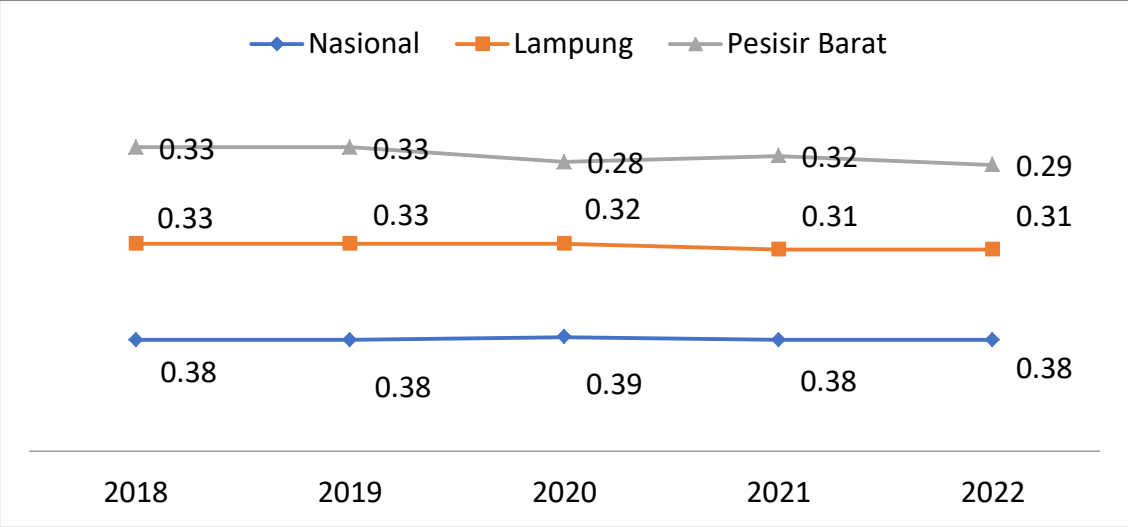
3.1.2.2 Indeks Gini

Rasio Gini adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Perkembangan indeks gini (gini ratio) di Kabupaten Pesisir Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini terus mengalami perbaikan. Hal ini erat kaitannya dengan perkembangan PDRB Perkapita penduduk dan juga persebaran jumlah tenaga kerja. Kabupaten Pesisir Barat yang juga terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Ketimpangan pendapatan di antara penduduk Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2018 sebesar 0,33 poin dan tetap pada angka 0,33 pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 capaian mengalami perbaikan kinerja dan berada pada angka 0,28. Pada

tahun 2021 yang lalu, angka ini kembali mengalami koreksi dan berada pada angka 0,32. Tahun 2022 ada perbaikan kinerja daerah, sehingga indeks gini turun menjadi 0,29 atau menurun 0,03.

Berikutnya proyeksi pada tahun 2023 ini diharapkan akan berada pada angka 0,29-0,32 poin. Angka proyeksi ini didapatkan dari perhitungan rata-rata dari penurunan gini ratio daerah yang cenderung turun stagnan dikisaran angka (0,00-0,20) poin pertahunnya. Gini rasio Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 tercatat sebesar 0.29. Nilai tersebut masih lebih baik bila dibandingkan dengan capaian kinerja provinsi dan nasional dengan nilai Provinsi Lampung dengan nilai capaian 0.31 dan nasional yang berada pada angka 0.38.

Gambar 3.5 Indeks Gini Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Data untuk Rasio Gini untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tidak tersedia, sehingga perkembangan daerah menggunakan data dari Pemerintah Provinsi Lampung. Pada Maret 2023, tingkat ketim- pangan pengeluaran penduduk Lampung yang diukur menggunakan Rasio Gini adalah sebesar 0,324. Angka ini meningkat 0,011 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2022 yang sebesar 0,313.

Rasio Gini di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,359; naik dibanding Rasio Gini September 2022 yang sebesar 0,352. Rasio Gini di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,287; naik dibanding Rasio Gini September 2022 sebesar 0,275. Hal ini sejalan dengan Indeks Theil yang mengalami peningkatan 0,018 persen poin pada periode September 2022 ke Maret

2023 yang mengindikasikan terjadinya kenaikan ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Lampung.

3.1.2.3 Distribusi dan Ketimpangan Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat selain dapat dilihat dari nilai pertumbuhan ekonomi, nilai PDRB dan PDRB Perkapita juga perlu dilihat dari sisi sumbangan kontribusi PDRB daerah terhadap pembentukan total PDRB Provinsi Lampung. Pada tahun 2021, secara struktur PDRB Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dengan kontributor terendah di Provinsi Lampung atau berada pada urutan 15. Kontribusi daerah walaupun stagnan pada tahun 2018-2022 dengan nilai 1,28-1,30% dan masih terus terendah. Hal ini sejalan dengan capaian dari Kabupaten Lampung Barat yang berada pada urutan ke-13, bahwa Kabupaten Lampung Barat merupakan kabupaten induk. Sementara Kabupaten Lampung tengah adalah kontributor tertinggi dari tahun 2018-2022.

Berikut adalah data kontribusi PDRB ADHB 15 Kabupaten/Kota terhadap total PDRB Provinsi Lampung:

Tabel 3.7 Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung terhadap Total PDRB Tahun 2018-2022 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lampung Barat	1,96	1,97	1,99	1,99	1,99
2	Tanggamus	4,33	4,33	4,31	4,34	4,35
3	Lampung Selatan	12,40	12,40	12,36	12,33	12,41
4	Lampung Timur	11,73	11,55	11,35	11,65	11,95
5	Lampung Tengah	19,70	19,71	19,82	19,74	19,78
6	Lampung Utara	6,60	6,60	6,63	6,60	6,48
7	Way Kanan	3,89	3,88	3,90	3,89	3,88
8	Tulang Bawang	6,40	6,40	6,44	6,42	6,24
9	Pesawaran	4,50	4,50	4,52	4,47	4,48
10	Pringsewu	3,10	3,10	3,11	3,10	3,08
11	Mesuji	2,89	2,89	2,90	2,89	2,87
12	Tulang Bawang Barat	3,18	3,18	3,19	3,18	3,17
13	Pesisir Barat	1,28	1,30	1,30	1,30	1,28
14	Bandar Lampung	16,28	16,43	16,42	16,34	16,30
15	Metro	1,76	1,75	1,75	1,75	1,73
	Jumlah	100	100	100	100	100

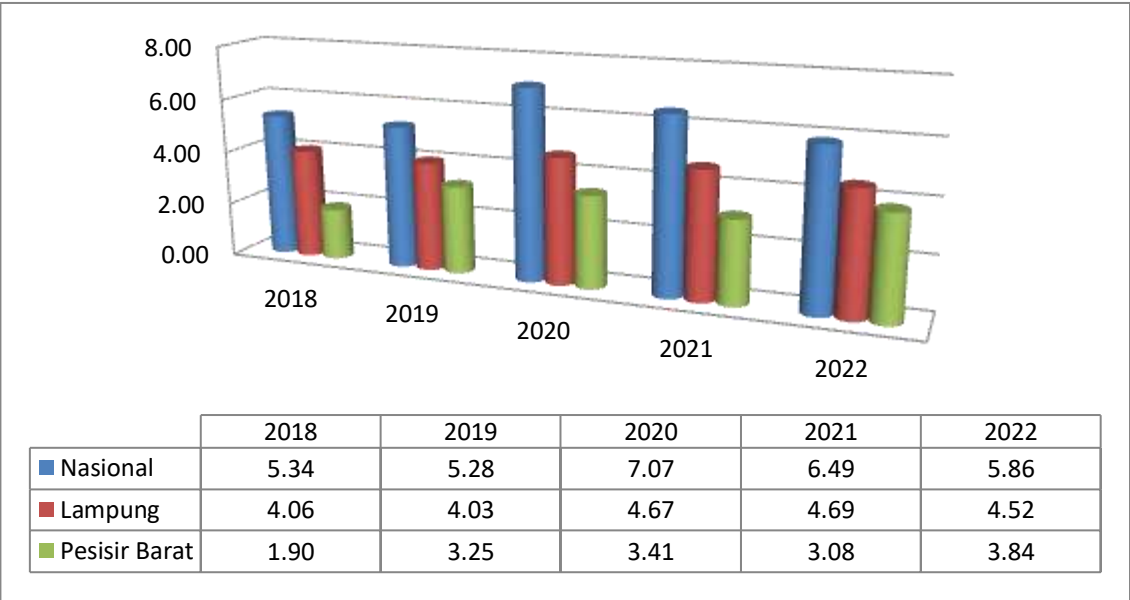
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

3.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pesisir Barat mengalami kinerja perbaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini berkaca dari persentase pada tahun 2018 dengan nilai 1.90%. Namun demikian, pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2019 TPT Kabupaten Pesisir Barat berada pada 3,25% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 3.41%. Capaian kinerja indikator TPT pada tahun 2021, kembali mengalami perbaikan menjadi 3,08%. Senada dengan terkoreksinya angka kemiskinan daerah. faktor utama efek domino dari Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi roda perekonomian daerah khususnya akibat pembatasan orang dan barang dan jasa yang beredar membuat beberapa jenis pekerjaan/usaha mengalami kemunduran yang berakibat pengurangan jumlah tenaga kerja. Capaian pada tahun 2022 adalah sebesar 3.73% atau mengalami kenaikan 0,65%.

Selanjutnya untuk proyeksi pada tahun 2023 nilai TPT akan berada pada angka 2,80-3,00%. Proyeksi ini melihat pada kondisi dalam 5 (lima) tahun perkembangan penurunan TPT yang berada pada kisaran 0,10-0,30%. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang Kabupaten Pesisir Barat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan banyak lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakatnya sehingga jumlah pengangguran terbuka dapat terus ditekan dan diminimalisir.

Gambar 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Data untuk TPT untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tidak tersedia, sehingga perkembangan daerah menggunakan data dari Pemerintah Provinsi Lampung, dimana penduduk usia kerja pada Februari 2023 sebanyak 6.942,0 ribu orang, naik sebanyak 86,4 ribu orang jika dibanding Februari 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 72,07 persen (5.003,1 ribu orang), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 1.938,8 ribu orang.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2023 terdiri atas 4.794,0 ribu orang penduduk yang bekerja dan 209,1 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan kondisi Februari 2022 jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 32,1 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 37,2 ribu orang dan pengangguran turun sebanyak 5,2 ribu orang. TPAK mengalami penurunan dibanding Februari 2022. TPAK pada Februari 2023 sebesar 72,07 persen, turun 0,44 persen poin dibanding Februari 2022.

Pada Februari 2023, TPT perkotaan sebesar 5,74 persen lebih tinggi dari TPT di perdesaan (3,45 persen). Dibandingkan Februari 2022, TPT perkotaan turun sebesar 2,31 persen poin sedangkan perdesaan naik sebesar 0,48 persen poin. Jika dibandingkan Februari 2022, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,83 persen poin sedangkan TPT perdesaan naik sebesar 0,17 persen poin.

3.1.3 Kerangka Ekonomi Daerah sampai dengan akhir Tahun 2023

a. Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal II-2021 mengalami peningkatan dengan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54% (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar

3,99% (yoy) terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi nonbangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih terbatas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan I 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian. LU Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan internasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2023 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Kalimantan, diikuti Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra).

Pada Juni 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 3,52 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,00. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Ambon sebesar 6,10 persen dengan IHK sebesar 118,67 dan terendah terjadi di Gunungsitoli sebesar 1,01 persen dengan IHK sebesar 114,79. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,85 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,47 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,49 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,57 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,58 persen; kelompok transportasi sebesar 10,18 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,75 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,27 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,27 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,23 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Juni 2023 sebesar 0,14 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Juni 2023 sebesar 1,24 persen. Sedangkan tingkat inflasi y-on-y komponen inti Juni 2023 sebesar 2,58 persen, inflasi m-to-m sebesar 0,12 persen, dan inflasi y-to-d sebesar 1,06 persen.

b. Tantangan dan Prospek Perekonomian Regional

Pada tahun 2023, pemulihan ekonomi Provinsi Lampung diperkirakan terus berlanjut, yakni pada kisaran 4,5%–5,0%. Kinerja perekonomian ke depan akan didorong oleh daya beli masyarakat yang terus mengalami perbaikan dan mendorong peningkatan komponen permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,96 persen pada triwulan I-2023 ini menempatkan Lampung pada posisi keempat pertumbuhan tertinggi di Sumatera. Adapun pertumbuhan tertinggi diraih Kepulauan Riau sebesar 6,51 persen. Lalu, disusul Sumatera Selatan sebesar 5,11 persen serta Jambi sebesar 5 persen.

Prospek semakin kuatnya permintaan domestik diperkirakan menjadi pendorong utama kinerja perekonomian Lampung pada tahun 2023 untuk tumbuh pada kisaran 4,7% - 5,2%, di tengah risiko global downturn. Kinerja konsumsi RT pada tahun 2023 diperkirakan meningkat, didorong oleh prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat yang didukung oleh pencabutan PPKM, kenaikan UMP Lampung tahun 2023 sebesar 7,90% (yoy), serta ekspektasi kenaikan penjualan, tingkat upah, dan serapan tenaga kerja pihak swasta. Kinerja investasi diperkirakan meningkat didorong oleh ekspektasi meningkatnya investasi swasta. Terkait dengan PSN, aktivitas pembangunan Bakauheni Harbour City diperkirakan meningkat pada semester I 2023 dalam rangka mencapai target soft opening Krakatau Park.

Inflasi gabungan kota di Provinsi Lampung pada tahun 2023 diperkirakan kembali ke sasaran inflasi $3\pm 1\%$ pada semester II 2023. Laju inflasi gabungan kota di Provinsi Lampung pada tahun 2023 diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, didukung oleh harga bahan pangan yang lebih terkendali seiring dengan sinergi Pusat dan Daerah melalui TPIP – TPID yang semakin intensif. Selain itu, imported inflation untuk harga komoditas pangan dan energi diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan melambatnya permintaan global dan berlanjutnya pemulihan produksi pangan di sisi hulu negara sentra. Adapun beberapa hal yang berisiko menjadi faktor pendorong

tekanan inflasi di tahun 2023 di antaranya bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau khususnya pada periode tanam komoditas hortikultura, libur hari besar dan kegamaan nasional, serta menjelang akhir tahun. Terkait dengan kelompok tembakau, inflasi aneka rokok pada tahun 2023 didorong oleh tarif cukai rokok pada tahun 2023 secara rerata mengalami peningkatan 11%. Adapun kenaikan pendapatan dan prospek meningkatnya aktivitas konsumsi pada tahun 2023 berisiko mendorong realisasi kenaikan harga barang dan jasa secara umum oleh pelaku usaha.

Pembangunan ekonomi yang direalisasikan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan mengakibatkan perekonomian masyarakat berkembang. Perekonomian yang berkembang, secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sampai dengan akhir tahun 2023, antara lain:

- a. Mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah dengan mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan ekspor produk unggulan daerah, melakukan pendampingan terhadap UMKM termasuk dalam usaha memperluas pasar. Berikutnya, peningkatan nilai ekspor perlu didukung dengan tetap meningkatkan intensitas promosi produk unggulan dan menggunakan saluran promosi digital marketing;
- b. Pengembalian momentum pertumbuhan investasi daerah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan iklim kemudahan dalam investasi melalui (i) penyempurnaan sistem OSS; (ii) penyempurnaan aspek informasi (transparansi, kemudahan akses, kelengkapan, kekinian dan akurasi); (iii) penyempurnaan aspek regulasi (kepastian, kejelasan, keselarasan, sederhana dan insentif investasi); (iv) penyempurnaan aspek komunikasi dan program; (v) penyempurnaan infrastruktur, termasuk listrik, air dan konektivitas; (vi) peningkatan sinergitas antar pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan;
- c. Meningkatkan kualitas dan kesiapan SDM melalui (i) penyiapan pendidikan vokasi dan pengembangan *factory teaching* untuk industri *medium to high* atau industri 4.0; (ii) meningkatkan literasi digital dan pengembangan

vokasi skill set profesi pada era teknologi digital; (iii) penyediaan dan perluasan akses sekolah lapangan pertanian yang lebih efisien;

- d. Untuk mengatasi peningkatan inflasi, TPID bersama Satgas Pangan akan terus melakukan koordinasi pengendalian inflasi dengan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, Komunikasi efektif). Memperkuat cadangan pangan di sentra produksi sebagai antisipasi gangguan cuaca dan distribusi, memperkuat ketersediaan database surplus deficit pangan masing-masing kabupaten/kota guna memastikan ketersediaan pasokan dan mengoptimalkan pemanfaatan informasi harga komoditas pangan yang ada di PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis).

c. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian nasional dan regional Lampung, diestimasikan perekonomian daerah Pesisir Barat masih mampu berkembang dan bertumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun mungkin akan melambat dibandingkan tahun sebelumnya akibat lesunya pertumbuhan ekonomi secara global yang berimbas pada berbagai negara belahan dunia termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif utamanya dalam mengatasi eksisnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal). Sejalan dengan kecenderungan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan sebagai peranan dari sektor tersier seperti sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sektor jasa-jasa, serta sektor pertanian berpengaruh signifikan dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Barat.

Disatu sisi, perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Sementara itu di sisi lain terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter fiskal maupun sektor riil. Selain itu, perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia yang

berpengaruh pada naiknya harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Kenaikan harga-harga kebutuhan bahan pokok yang menyebabkan naiknya inflasi di daerah.

Inflasi daerah perlu terus dijaga untuk tetap berada pada kisaran moderat. Kenaikan inflasi akan menyebabkan konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

Beberapa tantangan perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat, diantaranya mengenai pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, optimalisasi anggaran, dan program pemerintah dan kemandirian pemerintah. Ketiga hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi, dijelaskan sebagai berikut:

- i. Pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di mana masih terdapat daerah yang belum mendapatkan akses akomodasi transportasi yang mudah dan murah, khususnya pada 4 Pekon, yaitu Way Haru, Siring Gading, Way Tias dan Bandar Dalam. Minimnya anggaran daerah masih menjadi ganjalan bagi pemerataan pembangunan dalam melengkapi sarana dan prasarana pelayanan publik penunjang ekonomi. Kemiskinan daerah masih tinggi, dimana industri belum dapat berkembang dengan optimal, beberapa hal penyebab lambatnya perkembangan industri daerah adalah: (i) kapasitas SDM; (ii) keterbatasan permodalan; (iii) rendahnya kemampuan dalam membuka celah pasar; (iv) minimnya investasi;
- ii. Optimalisasi anggaran dan program pemerintah di mana APBD sebagian besar masih digunakan untuk kegiatan yang tidak mendorong aktivitas ekonomi produksi sehingga belum berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Pesisir Barat yang masih di atas rata-rata nasional dan Provinsi Lampung. Masih belum mampunya mengelola prioritas pembangunan daerah dalam upaya memaksimalkan anggaran yang dimiliki. Rendahnya nilai PAD dari pajak dan retribusi daerah semakin membebani pembangunan.

- iii. Kemandirian ekonomi, di mana keterbatasan industri dan minimnya lapangan pekerjaan menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sulit mewujudkan kemandirian daerah, pasokan barang jadi bergantung pada daerah lain. Belum adanya sektor unggulan yang benar-benar mampu menjadi penopang ekonomi daerah.

Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi daerah, antara lain:

- a. Meningkatkan *“value for money”* APBD dengan mendorong efisiensi belanja non prioritas untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih produktif dengan mengedepankan prinsip akuntabel, efektif dan efisien;
- b. Menyusun prioritas pembangunan daerah secara cermat dan berkesinambungan dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan masyarakat.
- c. Mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan memaksimalkan percepatan pemanfaatan dana desa, realisasi bantuan sosial/subsidi dan program perbaikan kesejahteraan terutama yang menyasar pada UMKM dan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), termasuk mendorong penyaluran KUR serta eksekusi program wakaf produktif dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan melibatkan pihak swasta;
- d. Pada tahun 2023 ini, tantangan perekonomian daerah tentunya adalah bagaimana daerah mampu membangun perekonomian dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi dan sosial. Bagaimana pemerintah daerah mampu memberikan stimulan bagi masyarakat, baik dari sisi bantuan uang, sembako, dan atau modal usaha UMKM. Penciptaan lapangan pekerjaan di sektor riil (baik untuk pekerjaan penggunaan dana desa) juga diharapkan mampu menjadi solusi bagi usaha mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial;

- e. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan tanpa melupakan dukungan dari sektor-sektor lainnya, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan menyikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi untuk proses investasi dan perizinannya melalui reformasi regulasi;
- g. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi;
- h. Meningkatkan partisipasi swasta dan seluruh stakeholder melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas;
- i. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL (pedagang kaki lima) secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Pesisir Barat, disamping menciptakan lapangan kerja;

- j. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (*seed capital*) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (*a group lending approach*) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kabupaten Pesisir Barat;
- k. Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat;
- l. Untuk mengatasi peningkatan inflasi daerah, TPID akan terus melakukan koordinasi pengendalian inflasi. Memperkuat cadangan pangan di masyarakat guna memastikan ketersediaan pasokan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan dengan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif);

3.1.4 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2023

Berdasarkan pada perkembangan ekonomi daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, serta dengan melihat pada tantangan dan prospek perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan akhir tahun 2023 serta dengan memperhatikan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menetapkan ulang target-target sasaran makro pembangunan daerah untuk Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.8 Sasaran Makro Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Sasaran RKPD 2023	capaian sampai dengan Triwulan II	Sasaran Perubahan RKPD 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.4- 3.9 %	2,88 % *	3,4 – 3,9 %
2	Tingkat Kemiskinan Daerah	Persen	13,65 %	13,84 % *	13,65 %
3	TPT	Persen	2.80-3,00 %	2,80 % *	2,80 – 3.00 %
4	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rupiah	28,60 – 29,04 Juta	32,46 Juta*	30,28 0 32,60 Juta
5	IPM	Poin	64,31	65,14 *	65,20
6	Rasio Gini	Poin	0,32	0,29 *	0,30 – 0,29
7	NTP	Poin	100,51	104.33	104,51

8	Penurunan Gas Rumah Kaca	Persen	10,50 %	-	10,50 %

3.2 Kerangka Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dari daerah yaitu (i) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (ii) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (iii) Urusan Pilihan; (iv) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (v) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (vi) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan; (vii) Unsur Kewilayahan; dan (viii) Unsur Pemerintahan Umum, kebijakan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan daerah sebagai instrumen penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah bersanding dengan perencanaan, penatausahaan serta pengendaliannya.

Guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran keuangan untuk sisa pelaksanaan tahun 2023 di Kabupaten Pesisir barat diarahkan untuk:

1. Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*), dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
2. Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
3. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara antara lain: (a) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit anggaran yang terkendali dari aspek pembiayaan

daerah; dan (b) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien serta akuntabel;

4. Memenuhi ketentuan *mandatory spending* sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
5. Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2023;

Selanjutnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Permenadagri No. 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dapat dilaksanakan dengan kondisi seperti hal-hal di bawah ini:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran (SilPA) sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perkembangan kondisi fiskal daerah yang tidak sesuai dari rencana awal pada tahun 2022 untuk penyusunan RKPD Tahun 2023 serta dinamika pembangunan yang menyebabkan terjadi perubahan terhadap kerangka keuangan daerah, termasuk penggunaan dana SilPA Tahun Anggaran 2022 (dalam hal ini terdapat defisit SilPA antara target yang ditetapkan pada APBD TA 2023 dengan data realisasi audit BPK RI terhadap APBD TA 2022). Perubahan kerangka keuangan daerah menyebabkan terjadi perubahan program, kegiatan, sub kegiatan pada tahun 2023 ini. Berdasarkan pada kondisi tersebut, kebijakan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri dari kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2023

Memperhatikan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan/Dana Transfer), serta pendapatan lain-lain. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tetap memperhatikan kemampuan masyarakat secara umum, sekaligus menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki, antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi (i) Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana dan pemeliharaan rutin bagi peningkatan pelayanan; (ii) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah, baik melalui sosialisasi serta iklan layanan menggunakan media komunikasi publik dan media sosial; (iii) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; (iv) Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah; (v) Meningkatkan sinergitas antar instansi yang berwenang dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah; (vi) Melakukan perbaharuan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (vii) Peningkatan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan PAD;
2. Pendapatan Transfer yang meliputi (i) Memperbaharui berbagai variabel serta kebutuhan penghitungan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat; (ii) Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah; (iii) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka persiapan usulan DAK; (iv) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Lampung

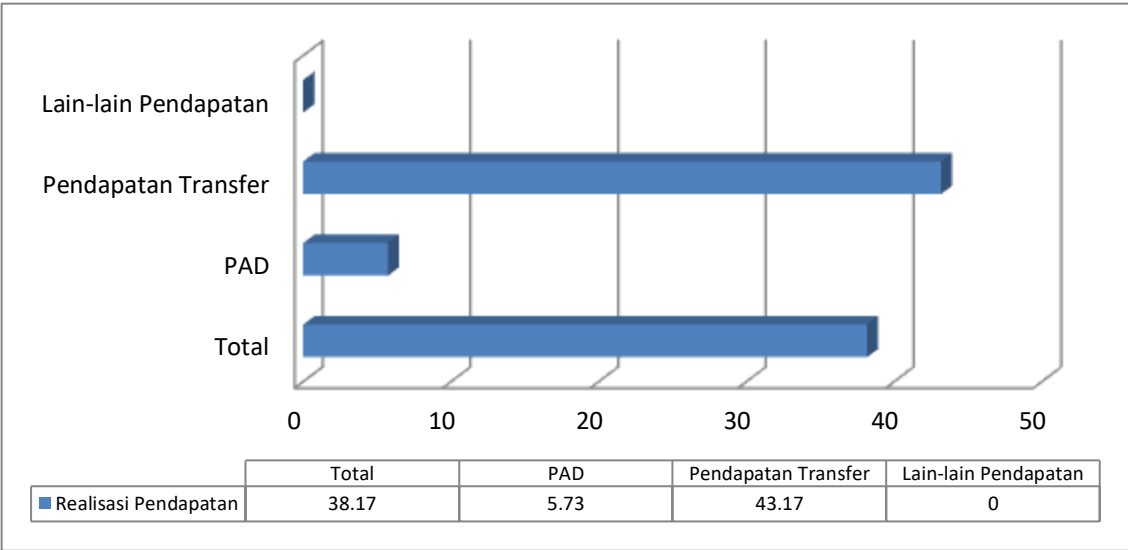
untuk dana bagi hasil dari pemerintah provinsi; (v) Peningkatan tata kelola keuangan daerah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan keuangan daerah;

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan, dikoordinasikan oleh daerah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Adapun beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan proyeksi kemampuan keuangan Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah mengalami penurunan pada Perubahan RKPD Tahun 2023, yaitu pada penurunan target lain-lain PAD yang sah.
- b. Penurunan pada pos PAD dari sumber Lain-lain PAD yang Sah, hal ini diasumsikan berdasarkan pada perhitungan capaian realisasi APBD TA 2022.
- c. Sementara untuk pos pendapatan daerah lainnya diasumsikan tetap.
- d. Hasil realisasi capaian Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II TA 2023 yaitu Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada periode semester I Tahun 2023 belum mampu terealisasi secara maksimal namun dalam toleransi kewajaran atau mendekati 50%. Hal ini dapat dilihat dari Total Pendapatan yang baru mampu teralisasi 38,17%. Angka 38,17% ini didapatkan dari perhitungan Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi pada angka 5,73%, Pendapatan Transfer pada angka 43,17%. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah pada angka 0,00% (tidak ada target). Namun demikian, optimisme untuk pencapaian target-target pendapatan pada Triwulan III dan IV Tahun 2023 diharapkan akan dapat terwujud dengan beberapa catatan perbaikan kinerja.

Gambar 3.7 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan II Tahun 2023



Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Hingga triwulan II TA 2023 ini, Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.839.107.656.766,00 baru terealisasi Rp.320.292.918.863,70. Beberapa Pos Pendapatan Daerah yang pencapaiannya masih sangat minim dan perlu dilakukan monitoring adalah Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar 2,28% dengan capaian Rp.2.157.276.648,39 dari target Rp.94.405.035.387,00 dan Pajak Daerah dengan capaian 9,18% dari target Rp.13.041.500.000,00 atau mencapai Rp.1.197.667.114,63.

Sementara itu, capaian kinerja yang telah melampaui 50% adalah pada pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan capaian sebesar 85,82% dari target Rp.2.929.479.534,00 dan angka realisasi sebesar Rp.2.514.171.916,67 serta Dana Insentif Daerah yang ditargetkan pada angka Rp.21.751.813.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.10.875.906.500,00 atau mencapai 50,00%.

Berikut adalah uraian singkat realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023:

Tabel 3.9 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan II
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran TA 2023 (Rp.)	Realisasi Triwulan II TA 2023 (Rp.)	(%)
4.	PENDAPATAN DAERAH	839.107.656.766,00	320.292.918.863,70	38,17
4.1	Pendapatan Asli Daerah	112.093.444.521,00	6.432.437.066,71	5,73
4.1.1	Pajak daerah	13.041.500.000,00	1.197.667.114,63	9,18
4.1.2	Retribusi Daerah	1.717.429.680,00	563.321.387,00	32,80
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	2.929.479.534,00	2.514.171.916,67	85,82
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	94.405.035.307,00	2.157.276.648,39	2,28
4.2	Pendapatan Transfer	727.014.212.245,00	313.860.481.797,00	43,17
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	668.193.875.000,00	286.705.853.864,00	42,90
4.2.1.1	Dana Perimbangan	555.307.183.000,00	275.829.947.564,00	49,67
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	21.751.813.000,00	10.875.906.500,00	50,00
4.2.1.3	Dana Desa	91.134.879.000,00	0,00	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.820.337.245,00	27.154.627.933,00	46,16
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	58.820.337.245,00	27.154.627.933,00	46,16
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00

Sumber : Bapenda - BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Lebih lanjut, disajikan capaian realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai pada APBD TA 2022 sebagai pembanding, sebagai berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat APBD TA 2022

No	Uraian	APBD TA 2022 (Rp.)	Realisasi TA 2022 (Rp.)	(%)
4.	PENDAPATAN DAERAH	911.701.792.560,34	769.761.549.332,99	84,43
4.1	Pendapatan Asli Daerah	75.036.341.821,34	29.045.920.662,99	38,71
4.1.1	Pajak daerah	12.251.400.830,00	9.977.052.361,00	81,44
4.1.2	Retribusi Daerah	1.525.335.898,00	1.328.688.256,00	87,11
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	2.406.970.133,00	2.406.970.133,00	100
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	58.852.634.960,34	15.333.209.912,99	26,05

4.2	Pendapatan Transfer	836.665.450.739,00	740.715.628.670,00	88,53
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	681.111.686.000,00	677.460.797.296,00	99,46
4.2.1.1	Dana Perimbangan	557.057.403.000,00	553.406.514.296,00	99,34
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	27.002.655.000,00	27.002.655.000,00	100
4.2.1.3	Dana Desa	97.051.628.000,00	97.051.628.000,00	100
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	155.553.764.739,00	63.254.831.374,00	40,66
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	155.553.764.739,00	63.254.831.374,00	40,66
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00

Sumber : Bapenda - BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Dari berbagai pertimbangan serta melihat gambaran atas realisasi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah seperti yang telah diuraikan diatas serta analisis dan perkiraan dari sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan arah kebijakan keuangan daerah, maka proyeksi Pendapatan Daerah di Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)			
		RKPD 2023	APBD TA 2023	P RKPD 2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)
4.	PENDAPATAN DAERAH	864.275.293.067	839.107.656.766	806.571.416.043	32.536.240.722,44
4.1	Pendapatan Asli Daerah	53.142.198.886	112.093.444.521	112.093.444.521	32.536.240.722,44
4.1.1	Pajak daerah	11,882,490,847	13.041.500.000	13.041.500.000	0,00
4.1.2	Retribusi Daerah	2,116,319,700	1.717.429.680	1.717.429.680	0,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	1,931,409,014	2.929.479.534	2.929.479.534	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	37,211,979,326	94.405.035.307	61.686.794.584,56	32.536.240.722,44

4.2	Pendapatan Transfer	811,133,094,181	727.014.212.245	727.014.212.245	0,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	745,814,083,119	668.193.875.000	668.193.875.000	0,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	613,726,147,845	555.307.183.000	555.307.183.000	0,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	12,093,328,080	21.751.813.000	21.751.813.000	0,00
4.2.1.3	Dana Desa	119,994,607,194	91.134.879.000	91.134.879.000	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	68,891,992,307	58.820.337.245	58.820.337.245	0,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	68.891,992,307	58.820.337.245	58.820.337.245	0,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Bappelitbangda, Bapenda, BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Penurunan pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 diasumsikan ada pada pos Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah dari rekening Pendapatan dari Pengembalian. Kenaikan ini secara proyeksi dimungkinkan melihat dari potensi jumlah pengembalian yang mungkin dapat diterima oleh daerah.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2023

Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah pada hakekatnya diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, pelayanan terhadap pembangunan infrastruktur, pelayanan terhadap ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta perlindungan sosial.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait operasional perkantoran pada tahun yang bersangkutan. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah melalui belanja barang dan jasa dalam kaitanya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, belanja modal, dan belanja transfer kepada pemerintah desa.

Arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Barat selama kurun waktu RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 akan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. *Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.* Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. *Prioritas*. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur, energi dan pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih;
3. *Tolok Ukur dan Target Kinerja*. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah;
4. *Optimalisasi Belanja Daerah*, Belanja Daerah khususnya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja operasi dan belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta; dan
5. *Transparan dan Akuntabel*. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Berikutnya, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah kebijakan Belanja Daerah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat:

- a. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD sampai dengan triwulan II yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;

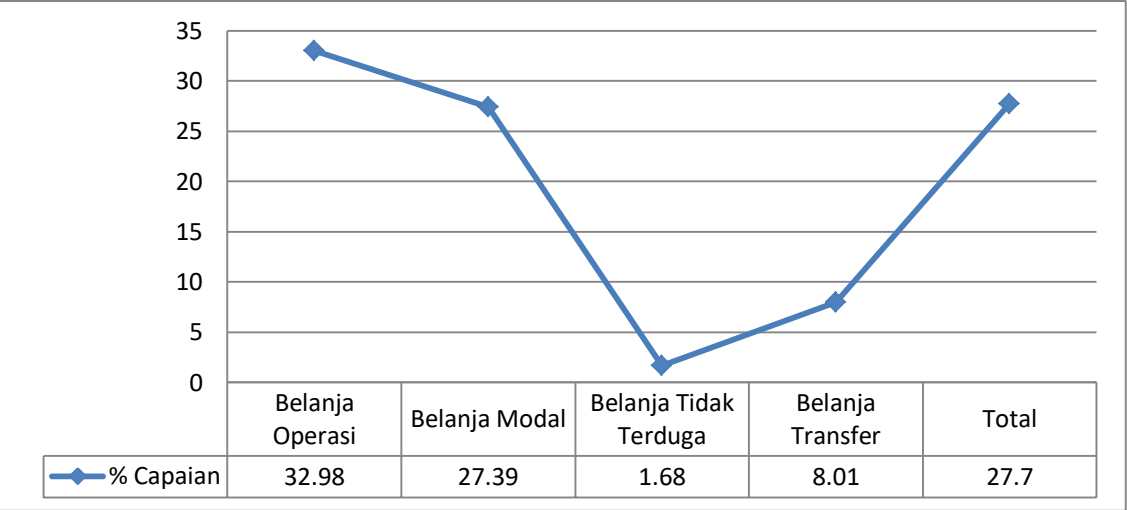
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta pelaksanaan ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Belanja dalam rangka pemenuhan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan untuk kecamatan dan unsur pemerintahan umum;
- c. Belanja daerah diarahkan untuk pencapaian Visi, Misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan capaian kinerja dan kerangka pendanaan serta dalam upaya mendukung pelaksanaan prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Barat diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (*input*) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. Belanja pegawai digunakan untuk gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dianggarkan naik dengan asumsi penyesuaian pada perhitungan ulang hingga Semester I;

- f. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran atau pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing perangkat daerah, pada Perubahan RKPD Tahun 2023 diproyeksikan turun dalam upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah;
- g. Belanja bantuan sosial digunakan untuk dalam rangka meningkatkan stimulus kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat marjinal dan diberikan melalui pendataan yang terukur, selektif tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi, pada perubahan RKPD Tahun 2023 dianggarkan tetap
- h. Belanja hibah dilakukan secara selektif, sesuai kebutuhan, pemenuhan peraturan perundang-undangan, memenuhi unsur urgensi serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, pada perubahan RKPD Tahun 2023 dianggarkan tetap;
- i. Belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur daerah untuk penunjang ekonomi masyarakat dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, pada perubahan RKPD Tahun 2023 mengalami penurunan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran daerah;
- j. Belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan kegiatan kerja yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh dari Pemerintah Daerah serta sifatnya tidak biasa dan/atau tanggap darurat, pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dianggarkan tetap;
- k. Belanja Transfer merupakan bantuan keuangan dan bagi hasil kepada pemerintahan desa yang bersifat umum. Belanja transfer dianggarkan sesuai dengan perhitungan dari peraturan perundang-undangan dan diarahkan pada pencapaian prioritas daerah di desa, pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dianggarkan tetap dalam upaya pemenuhan terhadap kewajiban daerah terhadap pemerintahan desa;

1. Hasil realisasi capaian Belanja Daerah sampai dengan Triwulan II TA 2023 belum mampu terealisasi secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari Total Belanja Daerah yang baru mampu teralisasi 27,70%. Angka capaian sebesar 27,29% ini didapatkan dari perhitungan Belanja Operasi yang terealisasi pada angka 32,98%, Belanja Modal sebesar 27,39%, Belanja Tidak Terduga masih pada 1,68% dan Belanja Transfer mencapai 8,01%. Namun demikian, optimisme untuk pencapaian target-target Belanja pada Semester II Tahun 2023 akan dapat terwujud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas belanja yang terukur;

Gambar 3.8 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan II Tahun 2023



Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Total Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.890,793,928,766.00,00 dan baru terserap sebesar Rp.186.980.020.942,00 atau 27,70%. Secara umum realisasi belanja daerah masih sangat minim. Sebagaimana belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.160.000.000,00 belum terealisasi atau sebesar 0,00%; belanja modal aset lainnya sebesar Rp.78.030.000,00 belum terealisasi atau 0,00%; belanja tidak terduga sebesar 1,68% atau Rp.110.850.000,00 dari target Rp.6.615.000.000,00; belanja bagi hasil kepada pemerintah pekon dengan target Rp.3.492.249.000,00 dengan realisasi 0%.

Capaian pada rekening belanja tertinggi pada belanja bantuan sosial dengan target Rp.7.249.200.000,00 telah mencapai 68,89% atau Rp.4.994.200.000,00; belanja pegawai mencapai angka Rp.108.852.120.404,00 atau 35,33% dari target

Rp.308,103,452,752.00; belanja modal gedung dan bangunan yang mencapai 38,99% atau sebesar Rp.32.619.343.847,00 dari target Rp.83,652,181,099.00.

Adapun gambaran singkat realisasi Belanja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan II Tahun 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran TA 2023 (Rp.)	Realisasi Triwulan II TA 2023 (Rp.)	(%)
5	BELANJA DAERAH	890.793.928.766,00	246.790.892.476,00	27,70
5.1	Belanja Operasi	566.928.827.379,00	186.980.020.942,00	32.98
5.1.1	Belanja Pegawai	308.103.452.752,00	108.852.120.404,00	35.33
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	235.722.504.497,00	68.785.063.408,00	29.18
5.1.3	Belanja Bunga	1.000.000.000,00	0,00	0.00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0.00
5.1.5	Belanja Hibah	14.853.670.130,00	4.348.637.130,00	29.28
5.1.6	Belanja Bansos	7.249.200.000,00	4.994.200.000,00	68.89
5.2	Belanja Modal	176.880.145.187,00	48.450.464.655,00	27.39
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.786.391.000,00	241.015.750,00	6.37
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.153.075.904,00	1.135.373.794,00	10.18
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.652.181.099,00	32.619.343.847,00	38.99
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.050.467.184,00	14.454.631.264,00	18.52
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	160.000.000,00	0,00	0.00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	78.030.000,00	0,00	0.00
5.3	Belanja Tidak Terduga	6.615.000.000,00	110.850.000,00	1.68
5.3.5	Belanja Tidak Terduga	6.615.000.000,00	110.850.000,00	1.68
5.4	Belanja Transfer	140.369.956.200,00	11.249.656.879,00	8.01
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.492.249.000,00	0,00	0.00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	136.877.707.200,00	11.249.656.879,00	8.22

Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Capaian belanja daerah pada Triwulan II TA 2023 yang cenderung kecil diasumsikan akan naik pada akhir tahun anggaran. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi Belanja Daerah pada APBD TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.13 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat APBD TA 2022

No	Uraian	APBD TA 2022 (Rp.)	Realisasi TA 2022 (Rp.)	(%)
5	BELANJA DAERAH	915.569.972.945,00	767.630.116.995,29	83,95
5.1	Belanja Operasi	507.305.721.665,00	421.755.335.654,00	83,14
5.1.1	Belanja Pegawai	216.611.709.915,00	218.850.761.941,00	87,85
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	235.722.504.497,00	190.302.016.983,00	29,18

5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	12.557.637.130,00	8.538.637.130,00	68,00
5.1.6	Belanja Bansos	9.566.700.000,00	4.063.919.600,00	42,48
5.2	Belanja Modal	260.952.616.360,00	217.250.297.659,00	83,25
5.2.1	Belanja Modal Tanah	13.091.369.000,00	9.651.896.350,00	73,73
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.251.919.965,00	8.770.687.238,00	77,95
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.367.232.664,00	97.613.890.520,00	90,92
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	125.013.925.644,00	97.251.294.210,00	77,79
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.228.169.087.000,00	3.962.529.341,00	93,72
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	4.068.676.487,00	3.804.529.341,00	93,51
5.3	Belanja Tidak Terduga	4.042.537.820,00	8.171.030,94	0,20
5.3.5	Belanja Tidak Terduga	4.042.537.820,00	8.171.030,94	0,20
5.4	Belanja Transfer	143.269.097.100,00	129.616.312.652,00	90,47
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.331.425.000,00	0,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	140.937.672.100,00	129.616.312.652,00	91,97

Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Selanjutnya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yaitu (i) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (ii) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (iii) Urusan Pilihan; (iv) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (v) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (vi) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (vii) Unsur Kewilayahan (viii) Unsur Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan daerah (yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya) dijabarkan dalam bentuk Program dan Indikasi Kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama kurun waktu sisa tahun 2023. Gambaran Proyeksi Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Barat untuk Perubahan RKPD Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Target Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)			
		RKPD 2023	APBD TA 2023	P RKPD 2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)
5	BELANJA DAERAH	881.775.293.067	890.793.928.766	855.071.028.766	(35.722.900.000)
5.1	Belanja Operasi	521.784.402.096	566.928.827.379	559.451.597.621	(7.477.229.758)
5.1.1	Belanja Pegawai	251.577.370.685	308.103.452.752	308.215.152.752	111.700.000

5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	254.181.517.439	235.722.504.497	228.133.574.739	(7.588.929.758)
5.1.3	Belanja Bunga	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0
5.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0
5.1.5	Belanja Hibah	11.767.081.972	14.853.670.130	14,853,670,130	0
5.1.6	Belanja Bansos	4.258.432.000	7.249.200.000	7,249,200,000	0
5.2	Belanja Modal	189.714.432.813	176.880.145.187	148.634.474.945	(28.245.670.242)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5,500,000,000	3,786,391,000	1,386,391,000	(2.400.000.000)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,854,432,813	11,153,075,904	11,228,075,904	75.000.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75,350,000,000	83,652,181,099	81,944,942,777	(1.707.238.322)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan Irigasi	83,500,000,000	78,050,467,184	53,837,035,264	(24.213.431.920)
5.2.5	Aset Tetap Lainnya	11,375,000,000	160,000,000	160,000,000	0
5.2.6	Aset Lainnya	135,000,000	78,030,000	78,030,000	0
5.3	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	6.615.000.000	6,615,000,000	0
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	6.615.000.000	6,615,000,000	0
5.4	Belanja Transfer	166.276.458.158	140.369.956.200	140,369,956,200	0
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.138.867.528	3.492.249.000	3,492,249,000	0
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	164.137.590.630	136.877.707.200	136,877,707,200	0

Sumber: Bappelitbangda, BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2023

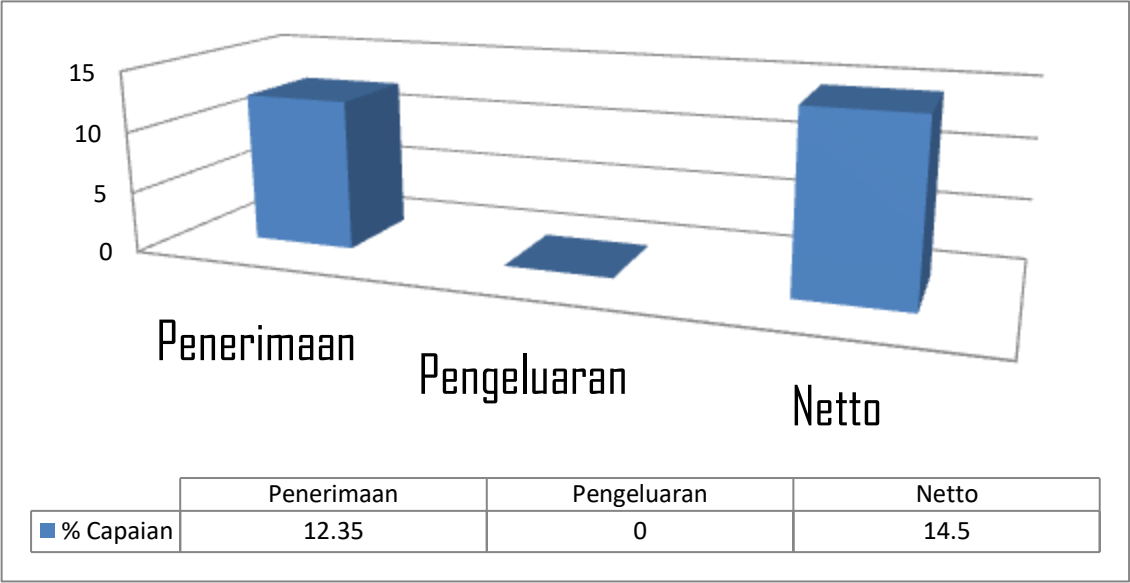
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara APBD. Pembiayaan disediakan untuk

menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 ini pada dasarnya bersifat pasif, dalam artian kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didapatkan dari perhitungan SilPA hasil dari audit riil BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung berdasarkan pada LKPD APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022, yaitu:

- a. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2023 diarahkan untuk menyeimbangkan antara kemampuan pendapatan daerah dengan belanja daerah;
- b. SiLPA APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat minus bila membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada APBD TA 2023 dengan capaian realisasi. Dimana dianggarkan sebesar Rp.10.686.272.000,- namun hanya mampu tercapai sebesar Rp.8.868.180.385,74. Sehingga terjadi kekurangan perhitungan sebesar Rp.1,818,091,614.26 atau target SiLPA hanya mampu mencapai 82,99%.
- c. Rencana pinjaman daerah Rp.50.000.000.000,00 belum terealisasi, dan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 ini diproyeksikan tetap;
- d. Perhitungan pengeluaran pembiayaan yang merupakan rangkaian dari rencana penerimaan dari pinjaman daerah juga belum terealisasi sebesar Rp.6.500.000.000,00, yaitu pada pos pengeluaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
- e. Penyertaan modal sebesar Rp.2.500.000.000,00 belum terealisasi, namun tetap dianggarkan serupa pada Perubahan RKPD;
- f. Hasil realisasi capaian Pembiayaan Daerah sampai dengan Triwulan II TA 2023 yaitu 17,16% dengan perhitungan Penerimaan Pembiayaan tercapai 14,61% serta pengeluaran pembiayaan masih pada capaian 0,00%.

Gambar 3.9 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan II Tahun 2023



Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Total pembiayaan daerah telah tercapai 17,16%. Angka ini didapatkan dari perhitungan target yang ditetapkan pada angka Rp.51.686.272.000,00 dan telah terkoreksi berdasarkan pada hasil audit riil keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung menjadi Rp.7.499.612.722,74. Untuk penerimaan pembiyaan didapatkan angka capaian 14,50% yaitu target sebesar Rp.60,686,272,000.00 dan hanya tercapai Rp.7.499.612.722,74 dari pos SiLPA, sementara pada pos pinjaman daerah belum terealisasikan. Sementara itu untuk pengeluaran pembiayaan daerah berada pada posisi 0,00%, yaitu target pembayaran cicilan utang sebesar Rp.6.500.000.000,00 belum direalisasikan berikut juga dengan penyertaan modal Rp.2.500.000.000,00 yang juga belum direalisasikan.

Tabel 3.15 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan II Tahun 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran TA 2023 (Rp.)	Realisasi Triwulan II TA 2023 (Rp.)	(%)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	51.686.272.000,00	7.499.612.722,74	14,50
6.1	Penerimaan Pembiayaan	60.686.000.000,00	7.499.612.722,44	12,35
6.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	10.686.272.000,00	7.499.612.722,74	82,99
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00

6.1.3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	50.000.000.000,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	9.000,000,000,00	0,00	0,00
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.500.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Sebagai pembanding capaian kinerja, disajikan capaian realisasi pembiayaan daerah pada TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.16 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
APBD TA 2022

No	Uraian	APBD TA 2022 (Rp.)	Realisasi TA 2022 (Rp.)	(%)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	3.868.180.384,74	6.368.180.384,74	164,63
6.1	Penerimaan Pembiayaan	8.868.180.384,74	8.868.180.384,74	100
6.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	8.868.180.385,74	8.868.180.385,74	100
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00

6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	50,00
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	50,00
6.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Gambaran Proyeksi Pembiayaan Daerah di Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)			
		RKPD 2023	APBD TA 2023	P RKPD 2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	17.500.000.000	51.686.272.000	48.499.612.722,44	(3,186,659,277.56)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	23.500.000.000	60.686,000,000	57.499.612.722,44	(3,186,659,277.56)
6.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	23.500.000.000	10.686.272.000	7.499.612.722,44	(3,186.659.277,56)
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
6.1.3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	50.000.000.000	50.000.000.000	0

6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000	9.000,000,000	9.000,000,000	0
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	6.500.000.000	6.500.000.000	0
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	0
6.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0
6.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
6.2.4	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0

Sumber: Bappelitbangda, BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atau target atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas dan/atau gabungan beberapa program prioritas. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah dan hasil perumusan teknokratis terkait/naskah akademik. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah serta perubahan-perubahan kondisi di lapangan pada saat tahun berjalan. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 merupakan penjabaran dari pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tahun kedua RPJMD, tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan pada pencapaian kinerja, antara lain: (i) pencapaian kinerja urusan pemerintahan daerah sampai dengan twiluan II tahun 2023, (ii) telaah tujuan dan tahapan dari RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025, (iii) telaah tujuan dan tahapan dari RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026, (iv) telaah prioritas RPJMN Tahun 2020-2024 dan isu-isu kebijakan nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi demi percepatan target dan sasaran pembangunan daerah, provinsi dan nasional tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat harus dapat mendukung target-target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat. Namun demikian, penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tetap harus berpedoman pada kewenangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan PP 72 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga dalam menyusun Program, Kegiatan Sub Kegiatan Perangkat daerah harus berdasarkan pada pembagian urusan pemerintahan daerah.

Visi dari pembangunan Kabupaten Pesisir Barat yang terangkum dalam Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Pesisir Barat yang Amanah, Maju dan Sejahtera”**. Penjelasan secara umum dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pesisir Barat yang Amanah

Pesisir Barat yang Amanah mengandung makna setiap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah akan selalu dilandasi dan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan yang amanah adalah pemerintahan yang senantiasa mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam usaha-usaha untuk menyejahterakan masyarakat.

b. Pesisir Barat Maju

Pesisir Barat yang maju mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Dalam artian sumber daya manusia yang kompetitif, terampil dan menguasai teknologi informasi. Sumber daya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif. Sumber daya manusia yang sejahtera, jujur, beretika dan mempunyai integritas. Dengan demikian, maka akan dapat memenangkan persaingan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah (value added) dan rantai nilai (value chain) dari produk daerah dan sumber daya alam.

c. Pesisir Barat Sejahtera

Setelah Pesisir Barat mampu menjalankan pemerintahan yang amanah dan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta daya saing daerah, maka diharapkan secara bertahap Pesisir Barat akan sejahtera. Secara ekonomi, sejahtera adalah kondisi terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup masyarakat. Dalam konteks sosial, kesejahteraan menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejahtera adalah suatu kondisi yang bersifat multidimensi yang mencakup terpenuhinya kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan), tersedianya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, ketersediaan jaminan masa depan, tingginya kualitas sumber daya manusia serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan bermasyarakat.

Visi tersebut diarahkan pencapaiannya dengan misi-misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju Dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: (1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan; (4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan dasar berkualitas; (5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; (6) Pengentasan kemiskinan; dan (7) Peningkatan produktivitas dan daya saing dari angkatan kerja.

2. Misi 2: Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dengan Konsep Pembangunan Inklusif Untuk Konektivitas Antar Wilayah Dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana Dan Berwawasan Lingkungan

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan melalui: (1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar secara bertahap dan merata, khususnya gedung pelayanan pemerintahan daerah; (2) Pembangunan infrastruktur perkotaan; (3) Pembangunan konektivitas multimoda transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; (4) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur Teknologi informasi untuk transformasi digital; (5) Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup dan daya dukung lingkungan; (6) Peningkatan Ketahanan Bencana daerah dan Perubahan Iklim.

3. **Misi 3: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Dan Perikanan**

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: (1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan perikanan dan peternakan (2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital; (3) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; (4) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; (5) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah.

4. **Misi 4: Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Yang Berpijak Pada Kearifan Lokal**

Pariwisata daerah diharapkan menjadi lokomotif peningkatan ekonomi daerah, yaitu dengan konsep pembangunan inklusif seluruh sektor yang akan mendukung pariwisata daerah, melalui (1) Pembangunan destinasi pariwisata daerah; (2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; (3) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. **Misi 5: Menyelenggarakan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga**

Pelayanan publik yang dekat, murah dan mudah bagi masyarakat merupakan indikator keberhasilan pengelolaan pemerintahan daerah usaha menuju kearah ini dicapai melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Penataan regulasi dan tata kelola proses perizinan dan investasi daerah; (3) Peningkatan rasa aman, ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

Visi dan Misi, tujuan serta Sasaran Pembangunan merupakan rangkaian upaya dalam merealisasikan Visi dan Misi menjadi program dan kegiatan yang dapat direalisasikan. Dengan kata lain, merealisasikan suatu hal yang abstrak menjadi riil dan konkret. Visi dan Misi dimaksudkan untuk memberikan gambaran besar mengenai keadaan yang ingin diwujudkan dari/melalui pembangunan daerah. Gambaran besar ini harus diperjelas dalam penetapan tujuan. Tujuan dimaksudkan untuk memberi uraian tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dan harus dilakukan tersebut haruslah mengarah secara jelas terhadap sasaran yang hendak dicapai. Penetapan sasaran dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pencapaian target dan hasil yang ingin dicapai.

Sebagai kesinambungan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, maka memasuki periode tahun kedua untuk RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dan periode Kedua RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025, perencanaan yang harus dilalui pada tahap ini adalah tahapan perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan capaian-capaian dari kinerja yang telah dicapai pada periode RPJMD Tahun 2016-2021 dengan mensinergikan pencapaian target dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pada tahapan ini pembangunan difokuskan untuk kemajuan dan kesejahteraan semua aspek, utamanya dengan peningkatan capaian dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar atau pelaksanaan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu dengan peningkatan pelayanan publik pada akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, trantibum dan linmas, sosial. Lebih lanjut pembangunan juga diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan, infrastruktur dan fasilitas umum penunjang di seluruh sektor, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik aparatur maupun SDM masyarakat, pemerataan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat secara aktif secara integratif dengan mengembangkan potensi lokal daerah sebagai penggerak roda perekonomian. Pemanfaatan teknologi untuk membangun perekonomian daerah melalui sumber daya manusia yang berkarakter mandiri serta berdaya saing. Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip *sustainable development* untuk kualitas kehidupan daerah yang lebih baik.

Selanjutnya, di bawah ini adalah penjabaran dan uraian dari Misi dan Tujuan, Sasaran pembangunan daerah yang diambil dari RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana diuraikan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Visi: Terwujudnya Pesisir Barat yang Amanah, Maju dan Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi I: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing			
1 Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	1 Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terjangkau dan Bermutu bagi Penduduk
			2 Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Fasilitas Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas
			3 Peningkatan Pembinaan dan Layanan Keluarga Berencana
2 Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	1 Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	1 Pemberdayaan dan Pengembangan Kompetensi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan
			2 Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan Kerja, serta Pelayanan Penempatan Kerja bagi Penduduk Usia Kerja
3 Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	1 Terwujudnya Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	1 Pengarusutamaan Gender, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan serta Pemenuhan dan Perlindungan Anak	1 Penurunan Diskriminasi dan Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga

Misi II: Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan			
1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	1 Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah	1 Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Jaringan Jalan dan Sarana Perhubungan Daerah	1 Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Jalan
			2 Mengembangkan Moda Transportasi yang Aman, Murah, Terjangkau dan Berkualitas
	2 Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	1 Peningkatan Ketersediaan, Kualitas, dan Kapasitas Prasarana dan Sarana Jaringan Air Minum, Air Limbah, Sanitasi, Persampahan serta Pengelolaan Bangunan dan Lingkungannya	1 Pembangunan Fasilitas Layanan Permukiman dan Perumahan yang Layak dan Berkualitas dengan Memperhatikan Penataan Ruang
	3 Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	1 Peningkatan Ketersediaan, Kualitas, dan Kapasitas Prasarana dan Sarana pada Sistem Jaringan Irigasi Daerah	1 Pengembangan Jaringan Irigasi Daerah dari Hulu hingga Hilir
	4 Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	1 Pengendalian Lingkungan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Udara, Air, Lahan	1 Perencanaan, Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Kualitas Udara, Air dan Lahan
	5 Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	1 Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah termasuk Pemadam Kebakaran	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penyelamatan Bencana yang Efektif, Efisien dan Tepat Guna termasuk Pemadam Kebakaran

Misi III: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan			
1 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	1 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1 Pengembangan Sektor-sektor Ekonomi Cepat Tumbuh	1 Peningkatan Produktivitas Industri Cepat Tumbuh
			2 Peningkatan Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pendukung Perdagangan Barang dan Jasa
			3 Peningkatan dan Pengembangan Iklim investasi yang Kondusif, Stabil, dan Berdaya Saing
	2 Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	1 Peningkatan Produktifitas Ekonomi Masyarakat	1 Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat yang Terintegrasi dengan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
	3 Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	1 Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu, dan Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perikanan	1 Optimalisasi Pengelolaan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
			2 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh dan Petani
			3 Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya
			4 Optimalisasi Penyediaan, Penyaluran, dan Pengendalian Pangan di Masyarakat sesuai dengan Kebutuhan Daerah

	4	Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	1	Penguatan Peran Koperasi dan UMKM sebagai Pengungkit Pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1	Peningkatan Kapasitas, Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMKM	
	5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	1	Mengurangi Beban Pengeluaran Penduduk Miskin dan Mempermudah Akses Mendapatkan Pelayanan	1	Penguatan dan Perluasan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penanggulangan Kemiskinan	
Misi IV: Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal							
1	Meningkatkan Pariwisata Daerah yang Berdaya Saing	1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	1	Pengembangan Destinasi Wisata, Aksesibilitas serta Atraksi dan Amenitas Pariwisata Daerah dengan Peningkatan Promosi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata	1	Peningkatan Pengelolaan Pariwisata yang Terintegrasi dengan Pengelolaan Kebudayaan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat
Misi V: Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga							
1	Meningkatkan Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Responsif, Murah, Mudah dan Cepat serta Berdaya Saing sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik serta Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

	2	Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	1	Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Pemerintahan Daerah	1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah dengan berpedoman pada Penggunaan Data dan Teknologi Informasi
					2	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Profesional dan Proposional
					3	Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah serta Peningkatan Layanan kepada Kepala Daerah dan Anggota DPRD
					4	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum
					5	Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik
					6	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pimpinan dan Pemerintah Daerah
	3	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	1	Membangun Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan

	4	Meningkatnya Pembangunan di Desa/Pekon	1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1	Peningkatan Pembangunan Desa dan Masyarakatnya termasuk pada Kawasan Transmigrasi

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Tema pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2023 masih terfokus pada upaya pemulihan ekonomi dan pembangunan sumber daya masyarakat serta peningkatan infrastruktur daerah. Prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pangan (pertanian dan perikanan), infrastruktur, pariwisata, dan UMKM. Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 adalah **“Melanjutkan Pemulihan Ekonomi Dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Memantapkan Infrastruktur Daerah”** ditetapkan untuk mewujudkan percepatan pencapaian Visi Kabupaten Pesisir Barat “Terwujudnya Pesisir Barat yang Amanah, Maju dan Sejahtera”. Berikutnya diperlukan penegasan terhadap upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan serta akan mendasari gerak langkah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat selama sisa pelaksanaan pembangunan untuk satu tahun kedepan yaitu pada tahun 2023.

Untuk menunjang pelaksanaan Tema Pembangunan tersebut, ditetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat untuk tahun 2023 dalam pelaksanaan roda pemerintahan daerah dan perencanaan pembangunan untuk peningkatan penjaminan terlaksananya pelayanan pembangunan, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari sisi kualitas dan kuantitas dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar dan Kesehatan terhadap Masyarakat;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat, termasuk keluarga, perempuan dan anak;
 - c. Peningkatan kapasitas pemuda;

2. Pembangunan Ekonomi Daerah dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan akses dan kapasitas pencari kerja;
 - b. Penyediaan lapangan pekerjaan;
 - c. Peningkatan investasi di daerah;
 - d. Pengembangan pertanian, perikanan dan perkebunan;
 - e. Pemulihan sektor pariwisata;
 - f. Pengendalian inflasi dan harga sembako;
 - g. Fasilitasi pengembangan koperasi dan UKM;
 - h. Pengembangan pasar dengan meningkatkan industri kecil dan kreatif;
 - i. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
3. Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas daerah dengan arah kebijakan:
 - a. Penyelesaian Pembangunan Perkantoran Pemda;
 - b. Pembangunan jaringan jalan dan jembatan dan kelengkapannya;
 - c. Pembangunan jaringan irigasi;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana pada perumahan dan permukiman masyarakat;
 - e. Pengendalian banjir pada daerah sungai dan pantai;
4. Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat dengan arah kebijakan:
 - a. Perluasan bantuan sosial kepada masyarakat;
 - b. Pengembangan nilai-nilai luhur budaya masyarakat dan daerah dalam kehidupan;
 - c. Meningkatkan nilai-nilai wawasan kebangsaan serta partisipasi masyarakat dalam pemilu;
 - d. Menjaga stabilitas pemerintahan dan masyarakat;
 - e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;
 - f. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan termasuk pemadam kebakaran;

5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan arah kebijakan:
- a. Peningkatan pelayanan publik dan masyarakat yang mudah dan murah;
 - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur;
 - c. Penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis SPBE;
 - d. Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta pengawasan Pembangunan;
 - e. Pengembangan Inovasi dalam Pembangunan;

Berikut persandingan antara tema, prioritas, arah kebijakan antara Perubahan RKPD Tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Matrik Sandingan Antara Tema dan Prioritas Pembangunan Perubahan Tahun 2023 dengan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Tema Perubahan RKPD 2023	Prioritas Perubahan RKPD 2023	Arah Kebijakan Perubahan RKPD 2023	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
Melanjutkan Pemulihan Ekonomi Dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Memantapkan Infrastruktur Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari sisi kualitas dan kuantitas	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan terhadap Masyarakat	Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terjangkau dan Bermutu bagi Penduduk
			Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Fasilitas Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas Peningkatan Pembinaan dan Akses Layanan Keluarga Berencana
		Pemberdayaan Masyarakat, termasuk keluarga, perempuan dan anak	Peningkatanan Pembangunan Desa dan Masyarakatnya termasuk pada Kawasan Transmigrasi

			Penurunan Diskriminasi dan Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga
		Peningkatan kapasitas pemuda	Pemberdayaan dan Pengembangan Kompetensi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan
	Pembangunan Ekonomi Daerah	Peningkatan akses dan kapasitas pencari kerja	Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan Kerja, serta Pelayanan Penempatan Kerja bagi Penduduk Usia Kerja
		Penyediaan lapangan pekerjaan	
		Peningkatan invensi di daerah	Peningkatan Produktivitas Industri Cepat Tumbuh
			Peningkatan dan Pengembangan Iklim Investasi yang Kondusif, Stabil, dan Berdaya Saing
		Pengembangan pertanian, perikanan dan perkebunan serta peternakan	Optimalisasi Pengelolaan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
			Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh dan Petani
			Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya
			Optimalisasi Penyediaan, Penyaluran, dan Pengendalian Pangan di Masyarakat sesuai dengan Kebutuhan Daerah

		Pemulihan sektor pariwisata	Peningkatan Pengelolaan Pariwisata yang Terintegrasi dengan Pengelolaan Kebudayaan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat
		Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM	Peningkatan Kapasitas, Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMKM
		Pengendalian inflasi dan harga sembako	Peningkatan Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pendukung Perdagangan Barang dan Jasa
		Pengembangan pasar dengan meningkatkan industri kecil dan kreatif	Peningkatan Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pendukung Perdagangan Barang dan Jasa
			Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat yang Terintegrasi dengan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
		Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Perencanaan, Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Kualitas Udara, Air dan Lahan
	Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas daerah	Penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah	Pembangunan Fasilitas Layanan Permukiman dan Perumahan yang Layak dan Berkualitas dengan Memperhatikan Penataan Ruang
		Penyediaan sarana dan prasarana pada perumahan dan permukiman masyarakat	
		Pembangunan jaringan jalan dan jembatan	Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Jalan
		Pengembangan jaringan transportasi	Mengembangkan Moda Transportasi yang Aman, Murah, Terjangkau dan Berkualitas

		Pembangunan jaringan irigasi	Pengembangan Jaringan Irigasi Daerah dari Hulu hingga Hilir
		Pengendalian banjir pada daerah sungai dan pantai	
	Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Perluasan bantuan sosial kepada masyarakat	Penguatan dan Perluasan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penanggulangan Kemiskinan
		Pengembangan nilai-nilai luhur budaya masyarakat dan daerah dalam kehidupan	Peningkatan Pengelolaan Pariwisata yang Terintegrasi dengan Pengelolaan Kebudayaan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat
		Meningkatkan nilai-nilai wawasan kebangsaan serta partisipasi masyarakat dalam pemilu	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum
		Menjaga stabilitas pemerintahan dan masyarakat	
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan termasuk pemadam kebakaran	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penyelematan Bencana yang Efektif, Efisien dan Tepat Guna termasuk Pemadam Kebakaran
	Pelaksanaan Asas-asas Pemerintahan yang Baik	Peningkatan pelayanan publik dan masyarakat yang mudah dan murah	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
		Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Profesional dan Proposional

		Penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis SPBE	Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik
		Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta pengawasan Pembangunan termasuk pengembangan Inovasi dalam Pembangunan	Membangun Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan
			Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah serta Peningkatan Layanan kepada Kepala Daerah dan Anggota DPRD
		Peningkatan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Anggota DPRD	Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah serta Peningkatan Layanan kepada Kepala Daerah dan Anggota DPRD
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pimpinan dan Pemerintah Daerah

Sumber: RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 dalam RKPD yang telah ditetapkan di atas disusun sebagai kesinambungan pembangunan daerah dan pusat baik melalui sistem *bottom up* maupun *top down planning* dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan pada tingkat Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat Tahun 2023, sehingga pelaksanaan pembangunan ke depan dapat selaras dan berkesinambungan baik pada tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat sesuai dengan Visi dan Misi pembangunan yang ditetapkan.

Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2023 yaitu “MELANJUTKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA MEMANTAPKAN INFRASTRUKTUR DAERAH”. Sedangkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah “PENGUATAN

EKONOMI YANG INKLUSIF UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH” dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah “PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”. Berdasarkan pada masing-masing rumusan Tema Pembangunan pada Tahun 2023 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa rumusan Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat tersebut telah sejalan dengan RPJMN Tahun 2005-2025, RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan titik berat pembangunan ada pada Pembangunan Ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Tema yang ditetapkan juga telah disusun dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur daerah dan pelayanan publik masyarakat.

Sejalan dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional yang pada utamanya adalah untuk meningkatkan pembangunan segala bidang, khususnya pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, sehingga dengan demikian telah dapat diterangkan bahwa rumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat telah selaras dengan target dan sasaran dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat. Keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Perubahan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat

Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan					
Kabupaten Pesisir Barat		Provinsi Lampung		Nasional	
I	Tema	I	Tema	I	Tema
	Melanjutkan Pemulihan Ekonomi Dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Memantapkan Infrastruktur Daerah		Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah		Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
II	Prioritas	II	Prioritas	II	Prioritas
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari sisi kualitas dan kuantitas	1	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2	Pembangunan Ekonomi Daerah	2	Meningkatkan Kualitas SDM	2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

3	Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah	3	Pembangunan Infrastruktur	3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	4	Reformasi Birokrasi	4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5	Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	5	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		6	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
				7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Bila dilakukan sinkronisasi tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023, maka akan diperoleh padanan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sinkronisasi Tema dan Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat

Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan					
Kabupaten Pesisir Barat		Provinsi Lampung		Nasional	
I	Tema	I	Tema	I	Tema
	Melanjutkan Pemulihan Ekonomi Dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Memantapkan Infrastruktur Daerah		Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah		Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
II	Prioritas	II	Prioritas	II	Prioritas
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia , baik dari sisi kualitas dan kuantitas	2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2	Pembangunan Ekonomi Daerah	1	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

3	Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah	3	Pembangunan Infrastruktur	2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
		6	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
				6	Membangun Lingkungan Hidup , Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
4	Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	5	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5	Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	4	Reformasi Birokrasi	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Tema dan prioritas pembangunan tahun 2023 tersebut juga menetapkan target sasaran makro pembangunan. Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berusaha untuk bersinergi dalam mencapai target kinerja dimaksud dalam upaya pelaksanaan sistem pembangunan nasional yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. Target kinerja ini dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4.5 Keselarasan Target Sasaran Makro Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2023

No	Indikator	Pemerintah Pusat	Provinsi Lampung	Kabupaten Pesisir Barat
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,9	3,5 - 4,5	3,4 - 3,9
2	PDRB Perkapita (juta rupiah)	-	43 - 44	30,28- 32.60
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 - 6,0	4,0 - 4,3	2,80 - 3,20
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 - 8,5	11,4 - 11,9	13,65
5	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,31 - 73,49	70,3 - 70,6	65,20
6	Indeks Gini (Nilai)	0,375 - 0,378	0,302 - 0,319	0,30-0,29
7	Nilai Tukar Petani (Nilai)	103 - 105	-	100,51
8	Nilai Tukar Nelayan (Nilai)	106 - 107	-	103
9	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02	0,7066	10,50

Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah diharapkan mampu bersinergi dengan perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan pusat. Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang menjelaskan bahwa Proyek Strategis Nasional dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan skala prioritas yang mempertimbangkan kebutuhan, kemanfaatan, dan daya dukung atas kelancaran Proyek Strategis Nasional, serta konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi, sehingga pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menjadi tepat sasaran dalam mewujudkan tercapainya pertumbuhan perekonomian nasional yang meningkat dan stabil, serta terealisasinya secara konkret pemerataan hasil pembangunan nasional ke seluruh lapisan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Berikut Daftar Proyek Strategis Nasional yang berada di Provinsi Lampung, sebagai berikut:

Tabel 4.6 Daftar Proyek Strategis Nasional di Provinsi Lampung

No	Daftar Proyek Startegis Nasional	Lokasi
I	Sektor Kereta	
A	Kereta Api Logistik Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Tarahan – Lampung dan Prabumulih – Kertapati/Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung
II	Sektor Kawasan	
A	Kawasan Industri Tanggamus	Provinsi Lampung
B	Kawasan Terintegrasi Bakauheni	Provinsi Lampung
III	Sektor Bendungan dan Irigasi	
A	Bendungan Way Sekampung	Provinsi Lampung
B	Bendungan Marga Tiga	Provinsi Lampung
IV	Sektor Air Bersih dan Sanitasi	
A	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung

Berdasarkan pada data di atas, Kabupaten Pesisir Barat memiliki kesempatan untuk mengembangkan wilayah dengan memanfaatkan pada potensi pengembangan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Tanggamus. Direnanakan Kawasan Industri ini akan dibangun diatas milik PT. Pertamina seluas 802 hektar, dengan infrastruktur penunjang diantaranya Dermaga/Pelabuhan milik Kementerian Perhubungan, Industri Air Baku melalui PDAM Way Agung Tanggamus, akses jalan Provinsi Lampung dan jaringan listrik PT. perusahaan Listrik Negara (PLN).

Beberapa hal yang dapat dilakukan dan juga didapatkan manfaatnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagai kabupaten tetangga dalam peluang pengembangan wilayah, antara lain:

- a. Pengembangan KI Tanggamus akan semakin mengembangkan wilayah Kabupaten Tanggamus dan harapannya juga kepada Kabupaten Pesisir Barat (sebagai daerah yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan) bila melihat pada pengembangan jalan nasional;
- b. Pemanfaatan pengembangan jaringan listik PLN untuk daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanggamus;
- c. Mempermudah akses terhadap Distribusi Logistik sumatera bagian Barat termasuk Pesisir Barat;
- d. Memberikan peluang daerah untuk membangun industri-industri penunjang yang dibutuhkan dalam proses pembangunan hingga berjalannya KI Tanggamus;
- e. Membuka lapangan pekerjaan, bagaimana Kabupaten Pesisir Barat mampu menyediakan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan dalam proses pembangunan kawasan industri hingga nantinya kawasan tersebut selesai pembangunannya;

Prioritas-prioritas serta metode pendekatan diatas diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*. Masih berkaitan dengan prioritas tersebut di atas, pada Kabupaten Pesisir Barat prioritas-prioritas pembangunan untuk tahun 2023 tersebut dibebankan kepada Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat dengan langkah-langkah kebijakan disusun dalam urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia, Baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas**, diprioritaskan pada pelaksanaan Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Pemuda dan Olahraga, Urusan Perpustakaan, Urusan Kearsipan, Urusan Transmigrasi

- 2. **Pembangunan Ekonomi Daerah**, difokuskan pada pelaksanaan Urusan Pangan, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Penanaman Modal, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian
- 3. **Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah**, difokuskan pada pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Pertanahan, Urusan Perhubungan
- 4. **Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat**, difokuskan pada pelaksanaan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Sosial, Urusan Kebudayaan, Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik
- 5. **Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik**, difokuskan pada pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, Urusan Persandian, Unsur Sekretariat Daerah, Unsur Sekretariat DPRD, Unsur Perencanaan, Unsur Keuangan, Unsur Kepegawaian, Unsur Pendidikan dan Pelatihan, Unsur Penelitian dan Pengembangan, Unsur Inspektorat Daerah, Unsur Kecamatan

Berikutnya dibawah ini adalah hubungan antara Misi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan Prioritas dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hubungan antara Misi dan Arah Kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dengan Prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023

No	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Prioritas RKPD
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terjangkau dan Bermutu bagi Penduduk	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Baik Dari Sisi Kualitas dan Kuantitas
		Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Fasilitas Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas	

		Peningkatan Pembinaan dan Layanan Keluarga Berencana Pemberdayaan dan Pengembangan Kompetensi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Kerja, serta Pelayanan Penempatan Kerja bagi Penduduk Usia Kerja Penurunan Diskriminasi dan Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga	
2	Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dengan Konsep Pembangunan Inklusif Untuk Konektivitas Antar Wilayah Dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana Dan Berwawasan Lingkungan	Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Jalan Mengembangkan Moda Transportasi yang Aman, Murah, Terjangkau dan Berkualitas Pembangunan Fasilitas Layanan Pemukiman dan Perumahan yang Layak dan Berkualitas dengan Memperhatikan Penataan Ruang Pengembangan Jaringan Irigasi Daerah dari Hulu hingga Hilir Perencanaan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Kualitas Udara, Air dan Lahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penyelematan Bencana yang Efektif, Efisien dan Tepat Guna termasuk Pemadam Kebakaran	1. Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah
3	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Dan Perikanan	Peningkatan Produktivitas Industri Cepat Tumbuh Peningkatan Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pendukung Perdagangan Barang dan Jasa Peningkatan dan Pengembangan Iklim Investasi yang Kondusif, Stabil dan Berdaya Saing Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat yang Terintegrasi dengan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Optimalisasi Pengelolaan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh dan Petani Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya	1. Pembangunan Ekonomi Daerah

		Optimalisasi Penyediaan, Penyaluran dan Pengendalian Pangan di Masyarakat sesuai dengan Kebutuhan Daerah	
		Peningkatan Kapasitas, Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		Penguatan dan Perluasan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penanggulangan Kemiskinan	
4	Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Yang Berpijak Pada Kearifan Lokal	Peningkatan Pengelolaan Pariwisata yang Terintegrasi dengan Pengelolaan Kebudayaan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat	1. Pembangunan Ekonomi Daerah
5	Menyelenggarakan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1. Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat
		Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Berpedoman pada Penggunaan Data dan Teknologi Informasi	2. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
		Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Profesional dan Proposional	
		Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah serta Peningkatan Layanan kepada Kepala Daerah dan Anggota DPRD	
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum	
		Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pimpinan dan Pemerintah Daerah	
		Membangun Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	
		Peningkatan Pembangunan Desa dan Masyarakatnya termasuk pada Kawasan Transmigrasi	

Selain berpedomanan pada Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 yang merupakan tema pentahapan pencapaian Visi dan Misi Bupati Pesisir Barat, Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi/pengendalian dan reuiu yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan dalam Bab II dokumen ini serta memperhatikan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026. Selain itu,

penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional serta global.

Rencana Arah kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023 ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan arah kebijakan yang diambil pada tahun-tahun sebelumnya, atau masih dalam arah kebijakan yang sebagaimana diarahkan pada RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2026 dan RPJMD Tahun 2021-2026. Hal utama yang mendasarinya adalah Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah termuda di Provinsi Lampung baru berdiri pada tahun 2013 yang lalu dan sebagai daerah yang tergolong minim dalam ketersediaan sarana dan parasarana serta pusat pelayanan publik.

Kabupaten Pesisir Barat juga masih tergolong daerah tertinggal berdasarkan pada Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 bersama-sama dengan 62 daerah lainnya di Indonesia dan satu-satunya daerah di Provinsi Lampung (untuk perencanaan tahun 2023 hal ini dinilai masih relevan). Arah kebijakan diambil berdasarkan pada isu strategis daerah Kabupaten Pesisir Barat, sebagai berikut:

Tabel 4.8 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	
1	Penguatan Reformasi Birokrasi Aparatur Dan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	A	Optimalisasi Pelaksanaan <i>Good Government</i> Dan <i>Clean Governance</i>
		B	Perlunya Sinkronisasi Impelementasi Peraturan Antara Tingkat Pusat Dan Daerah
		C	Peningkatan kualitas SDM Aparatur Baik Secara Kuantitas Dan Kualitas
		D	Penyusunan Peraturan Daerah Dan/Atau Peraturan Kepala Daerah Yang Berkualitas Dan Bersinggungan Langsung Dengan Kebutuhan Masyarakat
		E	Peningkatan Pelayanan Publik yang sesuai Harapan Masyarakat
		F	Peningkatan Inovasi Daerah
2	Pembangunan Infrastruktur Dan Penguatan Konektivitas Wilayah Terpencil Dan Tertinggal	A	Pembangunan Perkantoran Pemerintah Daerah Dan Pembangunan Fasilitas Umum
		B	Pembangunan Jalan – Jalan Kabupaten Dan/Atau Jalan Yang Menghubungkan Antar Pekon
		C	Pembangunan Irigasi Pertanian Dan Jaringannya
		D	Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Darat, Laut Dan Udara
		E	Pembangunan Infrastruktur Listrik Dan Energi Terbarukan

3	Pengembangan Pariwisata, Iklim Investasi, Koperasi dan UMK dan Menengah Sebagai Penggerak Perekonomian Masyarakat dalam upaya Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	A	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata
		B	Meningkatkan Pengelolaan Kepariwisataaan Dengan Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pariwisata
		C	Memfasilitasi Pemasaran Produk UMKM
		D	Peningkatan Produksi Padi Dengan Perluasan Lahan Sawah (Cetak Sawah)
		E	Pengembangan Pertanian Dengan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Penyediaan Alat Pertanian Dan Bibit Unggul
		F	Pengembangan Peternakan Dengan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Penyediaan Bibit Unggul Ternak
		G	Penguatan Dan Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap Dan Perikanan Budidaya
		H	Diversifikasi Produk Pertanian, Peternakan Dan Perikanan
4	Rendahnya SDM Masyarakat, Derajat Kesehatan Rendah Dan Tingginya Tingkat Kemiskinan	A	Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun Dengan Melanjutkan Upaya Untuk Memenuhi Hak Seluruh Penduduk Mendapatkan Layanan Pendidikan Dasar, Dan Memperluas Dan Meningkatkan Pemerataan Pendidikan Menengah Berkualitas
		B	Meningkatkan Kualitas Pembelajaran, Melalui Penguatan Jaminan Kualitas (<i>Quality Assurance</i>) Pelayanan Pendidikan Dasar
		C	Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat
		D	Pemerataan Tenaga Medis/Kesehatan Di Kabupaten Pesisir Barat
		E	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Pedesaan
		F	Optimalisasi Kelembagaan Dan Kualitas Aparatur Desa
		G	Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat Yang Masih Kurang Optimal
5	Pembangunan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang harmonis	A	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam PelestarianBudaya Lokal
		B	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat yang humanis
		C	Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan

UU Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah, sesuai dengan kewenangannya; dimana SPPN bertujuan untuk: (i) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (iii)

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berikutnya berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan pula bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Wujud dari seluruh rangkaian proses-tahapan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing hirarki penyelenggara negara menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden, dan dilaksanakan secara tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Demikian pula halnya ditingkat pemerintah daerah, menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, dan dilaksanakan secara tahunan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan memperhatikan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, pokok-pokok kebijakan pembangunan kabupaten/kota diarahkan pada:

1. Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, substansi dokumen Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten/kota diminta untuk mengintegrasikan program/kegiatan pendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018 serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan mendukung kebijakan pembangunan global yang terkait dengan *Sustainable Development Goals* (SDG's) sesuai dengan PP Nomor 59 Tahun 2017.
2. Penyusunan rencana program/kegiatan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten/Kota perlu memperhatikan konsistensi dan keselarasan dengan RPJMD Kabupaten/Kota, prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi Lampung, dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP yang disesuaikan dengan lingkup kewenangan masing-masing pemerintah daerah.

3. Perubahan RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:
- a. Secara substansial, memuat perubahan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam sisa waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun;
 - b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUPA dan PPPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Perubahan RAPBD;
 - c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - d. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
4. Prioritas & Sasaran Pembangunan Nasional Berdasarkan Pemutakhiran RKP Tahun 2023:

No	Prioritas	Sasaran Makro
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,9 % 2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0 % 3. Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,378 4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,31 – 73,49 5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02 % 6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103 – 105 7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 106 – 107 8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5 – 8,5 %
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	

7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	

5. Prioritas & Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023:

No	Prioritas	Sasaran Makro
1	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,5 – 4,5 %
2	Meningkatkan Kualitas SDM	2. Tingkat Kemiskinan sebesar 11,67 %
3	Pembangunan Infrastruktur	3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,0 – 4,3 %
4	Reformasi Birokrasi	4. Pendapatan Perkapita sebesar Rp.43 - 44 juta
5	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	5. Indek Pembangunan Manusia sebesar 70,3 – 70,6
6	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	6. Rasio Gini sebesar 0,302 - 0,319
		7. Emisi Gas Rumah Kaca 7,066%;

6. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan (RKPD dan RPJMD) serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan; Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan, yakni reviu atas dokumen RKPD/Perubahan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah/Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelaslah bahwa dalam kerangka mewujudkan tujuan bernegara, pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam dokumen perencanaan perlu dijabarkan oleh seluruh tingkatan pemerintahan daerah, sebaliknya dapat pula dinyatakan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional akan tercapai apabila terdapat kontribusi dari daerah; yang dimulai dari adanya keselarasan antardokumen perencanaan pusat dan daerah.

Terkait dengan sasaran dan target makro pembangunan nasional dan Provinsi Lampung pada tahun 2023 yang terangkum dalam dokumen perencanaan Pemutakhiran RKP Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana disebutkan diatas, maka dalam rangka pencapaiannya terdapat pula target dan

sasaran makro pembangunan pada lingkup pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023, yaitu:

No	Sasaran Makro	RKPD 2023	Capaian Target s.d. TW II 2023 (data tersedia 2022)	Perubahan RKPD 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3.4- 3.9 %	2,88 % *	3,4 – 3,9 %
2	Tingkat Kemiskinan Daerah	13,65 %	13,84 % *	13,65 %
3	TPT	2.80-3,00 %	2,80 % *	2,80 – 3.00 %
4	PDRB Perkapita ADHB	28,60 – 29,04 Juta Rupiah	32,46 *	30,28 - 32,60 Juta Rupiah
5	IPM	64,31	65,14 *	65,20
6	Rasio Gini	0,32	0,29 *	0,30 – 0,29
7	NTP	100,51	104.33	104,51
8	Penurunan Gas Rumah Kaca	10,50 %	-	10,50 %

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023
*data tahun 2022

4.2.1 Program Prioritas Daerah

Pelaksanaan program prioritas daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diarahkan untuk melaksanakan pencapaian dari misi, tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 untuk tahun perencanaan 2023. selanjutnya akan dijelaskan gambaran prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 disandingkan dengan program dari perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan pada pembagian pelaksanaan Urusan Wajib (Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar), Urusan Pilihan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan, serta Unsur Pemerintahan Umum berdasarkan pada Visi, Misi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9 Program Prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Perubahan RKPD Tahun 2023

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas RPJMD	Indikator	Target	Perangkat Daerah Pelaksana	Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2023
Misi I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju Dan Berdaya Saing				
Tuj 1	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	65.20		Pembangunan SDM, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas
Sas 1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	65.20		Pembangunan SDM, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas
	Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan (Persen)	100	Dinas P dan K	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola (Lokasi)	1	Sekretariat Daerah	
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen)	25	Sekretariat Daerah	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Tingkat Pengawasan dan Tindak Lanjut terhadap Perizinan Usaha (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0.98	Dinas PP PA dan KB	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Total Fertility Rate (Angka)	2.19	Dinas PP PA dan KB	

	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Angka)	58.00	Dinas PP PA dan KB	
Tuj 2	Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Pemuda Dan Penduduk Usia Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2.80 – 3,00		Pembangunan SDM, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas
Sas 2	Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2.80 – 3,00		Pembangunan SDM, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Persen)	55.00	Dinas Pora	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pemenuhan Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan (Persen)	45.00	Dinas Pora	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2.80 – 3.20	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	73.04	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
	Program Hubungan Industrial	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Persen)	65.00	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
Tuj 3	Meningkatkan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (Angka)	94.29		Pembangunan SDM, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas
Sas 3	Terwujudnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (Angka)	94.29		Pembangunan SDM, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (Persen)	100	Dinas PP PA dan KB	
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan (Persen)	100	Dinas PP PA dan KB	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	30.00	Dinas PP PA dan KB	

	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Terhadap Anak (Persen)	33.33	Dinas PP PA dan KB	
	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Pendampingan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Persen)	100	Dinas PP PA dan KB	
Misi II	Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dengan Konsep Pembangunan Inklusif Untuk Konektivitas Antar Wilayah Dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana Dan Berwawasan Lingkungan				
Tuj 1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Dan Kewilayahan	Indeks Kualitas Infrastruktur (Angka)	55.00		Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah
Sas 1	Tersedianya Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Transportasi Daerah	Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)	41.50		Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah
	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)	41.50	Dinas Pu dan PR	
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Jalan Desa Strategis dengan kondisi baik (Persen)	25.00	Dinas PU dan PR	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat (Persen)	70.00	Dinas Perhubungan	
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Cakupan Wilayah yang terlayani Angkutan Laut (Persen)	55.00	Dinas Perhubungan	
Sas 2	Tersedianya Pemukiman Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen)	40.00		Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen)	40.00	Dinas PU dan PR	

	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen)	69.87	Dinas PU dan PR	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan (Persen)	30.00	Dinas PU dan PR	
	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni (Persen)	87.00	Dinas PR dan KP	
	Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni (Persen)	38.75	Dinas PR dan KP	
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Permukiman yang Tertata (Persen)	40.00	Dinas PR dan KP	
Sas 3	Tersedianya Sumber Daya Air Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Rasio Jaringan Irigasi (Persen)	53.00		Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah (Persen)	35.00	Dinas PU dan PR	
Sas 4	Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	73.87		Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana Sarana Umum (Persen)	40.00	Dinas PR dan KP	
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap (Persen)	60.00	Dinas PU dan PR	
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Persen)	5.00	Dinas PU dan PR	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan (Persen)	27.50	Dinas PU dan PR	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog (Persen)	20.00	Dinas PU dan PR	

	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan Dokumen Perencanaan Lingkungan hidup (Persen)	100	Dinas LH	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	73.87	Dinas LH	
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan (Persen)	52.09	Dinas LH	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah (Persen)	5.00	Dinas LH	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan Pengendalian terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Izin Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berbasis Lingkungan Hidup (PUU LH) (Persen)	100	Dinas LH	
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase Penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat (Persen)	30.00	Dinas LH	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reformasi Agraria (Kepala Keluarga)	5.000	Dinas PR dan KP	
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rasio Luas Tanah yang Disediakan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Ha)	10.50	Dinas PR dan KP	
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Cakupan Pemanfaatan Tanah Kosong (Persen)	1.85	Dinas PR dan KP	
Sas 5	Tersedianya Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (Angka)	180.71		Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat

	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen)	100	Satpol PP dan Damkar	
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen)	100	Satpol PP dan Damkar	
	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah (Persen)	100	BPBD	
Misi III	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Dan Perikanan				
Tuj 1	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Dengan Fokus Pada Potensi Lokal	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	3,40 s/d 3,90		Pembangunan Ekonomi Daerah
Sas 1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	3,40 s/d 3,90		Pembangunan Ekonomi Daerah
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Persen)	37.00	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (Persen)	11.55	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok (Persen)	40.00%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	Program Pengembangan Ekspor	Net Ekspor Barang dan Jasa	43.098	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) (Perusahaan/ Perorangan)	730	Dinas PM dan PTSP	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Perizinan (Persen)	80.00	Dinas PM dan PTSP	
	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA (Persen)	5.55	Dinas PM dan PTSP	

	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN (Persen)	16.49	Dinas PM dan PTSP	
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data Laporan Perizinan dan Non Perizinan (Laporan)	5	Dinas PM dan PTSP	
Sas 2	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	PDRB Perkapita (juta)	2,80-32,60		Pembangunan Ekonomi Daerah
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Persen)	3.99	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
Sas 3	Meningkatnya Kontribusi Pertanian Terhadap Perekonomian Masyarakat	Nilai Tukar Petani (Angka)	104.51		Pembangunan Ekonomi Daerah
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai Tukar Petani (Angka)	104,51	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi Sektor Pertanian (Ton)	146.872	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (Poktan)	965	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Persen)	84.00	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (Persen)	84.00	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	28,000	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Peresentase Daerah Rentan Rawan Pangan (Persen)	7.00	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan (Persen)	60.00	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	14.136	Dinas Perikanan	

	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	18.925	Dinas Perikanan	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batas Biologis yang Aman (Angka)	0.032	Dinas Perikanan	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (Angka)	103	Dinas Perikanan	
Sas 4	Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini (Angka)	0.30-0.29		Pembangunan Ekonomi Daerah
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persen)	50.00	Dinas Koperindag	
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten (Persen)	45.00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persen)	1.98	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
Sas 5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Tingkat Kemiskinan Daerah (Persen)	13.65		Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat
	Program Pemberdayaan Sosial	Terdatanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Persen)	100	Dinas Sosial	
	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Sosial (Persen)	100	Dinas Sosial	
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Perlindungan Sosial Daerah (Persen)	100	Dinas Sosial	
	Program Penanganan Bencana	Cakupan Pemenuhan pasca Bencana (Persen)	100	Dinas Sosial	
Misi IV	Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Yang Berpijak Pada Kearifan Lokal				
Tuj 1	Meningkatkan Pariwisata Daerah Yang Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (Persen)	1.74		Pembangunan Ekonomi Daerah; Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat

Sas 1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara (persen)	21.00		Pembangunan Ekonomi Daerah; Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen)	2.78	Dinas Pariwisata	
	Program Pemasaran Pariwisata	Kunjungan Wisatawan (Orang)	394.735	Dinas Pariwisata	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata (Persen)	20.00	Dinas Pariwisata	
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi (Persen)	25.00	Dinas P dan K	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Penduduk Usia 10 tahun keatas yang Terlibat Pertunjukan Seni (Persen)	20.00	Dinas P dan K	
Misi V	Menyelenggarakan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga				
Tuj 1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)	C		Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
Sas 1	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (Angka)	77.00		Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas (Persen)	100	Dinas Capil	
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Persen)	100	Dinas Capil	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Persen)	100	Dinas Capil	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Data Kependudukan Skala Kabupaten dalam 1 Tahun (Persen)	100	Dinas Capil	

	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik (Persen)	80.00	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
	Program Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) (Persen)	80.00	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persen)	100	Kecamatan Bangkunt; Krui Selatan; Lemong; Ngambur; Ngaras; Pulau Pisang; Pesisir Selatan; Pesisir Utara	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Persen)	100	Kecamatan Pesisir Tengah	
Sas 2	Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Yang Berkualitas	Nilai SAKIP (Huruf/Predikat)	CC		Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat; Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	90.00	Seluruh Perangkat Daerah	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik (Dokumen)	2	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara baik (Persen)	100	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan terhadap Dokumen Penganggaran (Persen)	100	Bappeda	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Keselarasan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Pusat (Persen)	85.00	Bappeda	

	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi daerah (Angka)	Sangat Inovatif	Bappeda	
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Persen)	71.75	BKPSDM	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat ASN telah yang mengikuti pelatihan kepemimpinan (Persen)	22.20	BKPSDM	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan (Persen)	100	Inspektorat	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Cakupan Konsistensi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terhadap Kepatuhan Peraturan perundang-undangan (Persen)	100	Inspektorat	
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persen)	80.00	Sekretariat Daerah	
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Cakupan penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan (Persen)	80.00	Sekretariat Daerah	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk Melaksanakan fungsi Pengawasan, fungsi Pembentukan perda, dan Fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (Persen)	100	Sekretariat DPRD	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Persen)	48.00`	Badan Kesbangpol	

	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (Persen)	84.08	Badan Kesbangpol	
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif (Persen)	73.00	Badan Kesbangpol	
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Persen)	65.00	Badan Kesbangpol	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi dan Peran Lembaga dan Elemen Masyarakat dalam Pencegahan terjadinya Konflik Sosial (Persen)	70.00	Badan Kesbangpol	
Sas 3	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah Yang Berkualitas	Opini BPK (Huruf/Predikat)	WTP		Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Tata Kelola Keuangan Daerah sesuai Aturan (Persen)	100	BPKAD	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Tata Kelola Barang Milik Daerah sesuai Aturan (Persen)	100	BPKAD	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Persen)	3.50	Bapenda	
Sas 4	Meningkatnya Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun (Angka)	0.6700		Pembangunan SDM, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas
	Program Penataan Desa	Jumlah Desa Berkembang (Pekon)	60	Dinas PMP	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pekon Tertib Administrasi (Pekon)	95	Dinas PMP	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (Pekon)	95	Dinas PMP	

	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi (Angka)	42.03	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibina (Lokasi)	1	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	

4.2.2 Dukungan terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), menggantikan program sebelumnya *Millennium Development Goals* (MDGs) yang selesai pada akhir tahun 2015. SDGs tersebut akan otomatis berlaku bagi negara-negara maju dan berkembang untuk 15 tahun ke depan di mulai pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2030. Pembangunan Berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Adapun elemen dari pembangunan berkelanjutan yaitu bidang sosial ekonomi dan lingkungan hidup. Agenda SDGs disusun berdasarkan capaian MDGs, dengan target dan sasaran yang diperluas. SDGs jauh lebih komprehensif dan transformatif dibandingkan dengan MDGs. Komprehensif karena melibatkan negara maju dan berkembang dengan tujuan yang lebih luas, mencakup tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menetapkan mekanisme untuk mengimplementasikan 17 tujuannya tersebut, yaitu melalui perangkat implementasi (*means of implementations*). Kemudian, transformatif karena tidak meninggalkan siapapun di belakang. Mereka yang miskin, rentan, ataupun difabel didorong untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan, dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari SDGs. Indonesia siap dan berkomitmen penuh untuk melaksanakan SDGs karena sejalan dengan visi pembangunan Indonesia dan sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia memiliki 119 target yang sesuai dengan 169 target SDGs.

Kabupaten Pesisir Barat juga berkomitmen untuk mewujudkan pelaksanaan seluruh sektor 17 Tujuan TPB, yaitu: (1) Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan; (2) Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, Serta

Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan; (3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia; (4) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua; (5) Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan; (6) Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih Serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua; (7) Energi bersih dan terjangkau untuk semua; (8) Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan , Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh Serta Pekerjaan Yang Layak; (9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi; (10) Mengurangi Kesenjangan dalam Negara dan Antar Negara; (11) Membangunan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan; (12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; (13) Penanganan Perubahan Iklim dan Dampaknya; (14) Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim; (15) Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat; (16) Perdamaian, Kelembagaan dan Keadilan yang Kokoh; (17) Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan serta memastikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Berikutnya, dalam upaya pencapaian TPB/SDGs Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada kewenangan daerah disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.10 Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 terhadap Pencapaian Tujuan SDGs Kabupaten Pesisir Barat

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD		TPB/SDGs
Misi I Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan bagi Semua Penduduk dalam segala Usia Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar sepanjang Hayat bagi Semua

	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	2	Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	Tujuan 8 Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan EKonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak
	Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	3	Terwujudnya Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan
Misi II Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	1	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah	Tujuan 9 Mempromosikan Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi
		2	Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	Tujuan 11 Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
		3	Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua
		4	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau untuk Semua Tujuan 14 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat
		5	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim dan Dampaknya Tujuan 14 Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim

Misi III Mengembangk an Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Tujuan 8 Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan EKonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak Tujuan 9 Mempromosikan Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi
		2	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
		3	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	Tujuan 2 Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan
		4	Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan dalam Negara dan Antar Negara
		5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Tujuan 1 Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan
Misi IV Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal	Meningkatkan Pariwisata Daerah yang Berdaya Saing	1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Tujuan 8 Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan EKonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak
Misi V Menyelenggarak an Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Tujuan 17 Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan

		2	Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Tujuan 17 Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan
		3	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	Tujuan 17 Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan
		4	Meningkatnya Pembangunan di Desa/ Pekon	Tujuan 16 Perdamaian, Kelembagaan dan Keadilan yang Kokoh

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 (diolah)

Upaya untuk pencapaian SDGs di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung dan juga Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung termasuk Kabupaten Pesisir Barat hendaknya dimulai dari area-area prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Bahwa aspek pendidikan dan kesehatan, terutama pendidikan usia dini, menengah dan tinggi merupakan hal yang harus diprioritaskan dalam pencapaian target SDGs. Oleh karena itu, agenda pembangunan sebaiknya difokuskan pada penyediaan layanan pendidikan minimal di tingkat menengah dan penguasaan IPTEK. Sementara itu, target utama pembangunan SDM dibidang kesehatan adalah tersedianya akses universal terhadap jaminan kesehatan, terutama bagi kalangan perempuan dan anak-anak. Aspek pencegahan dan hidup sehat menjadi lebih utama dibandingkan dengan aspek kuratif. Penting untuk segera mewujudkan akses universal jaminan kesehatan yang berkelanjutan, termasuk dari sisi kualitas pelayanan dan pembiayaannya.
2. Tersedianya infrastruktur dasar secara penuh, terutama air bersih dan sanitasi yang baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Pemerintah daerah dituntut agar dapat berinovasi dalam penyediaan infrastruktur dasar tersebut mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia.
3. Penguatan konektivitas antar wilayah melalui tersedianya infrastruktur-infrastruktur yang dapat memperkuat konektivitas antar wilayah termasuk ke dalam prioritas pembangunan. Kehadiran infrastruktur multi-moda yang

menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, seperti jalan darat, kereta api, pesawat terbang dan kapal laut merupakan salah satu komponen penting untuk peningkatan PDRB di masing-masing daerah. Sekaligus hal ini dapat menjadi jalan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

4. Penghidupan yang layak melalui ketersediaan lapangan kerja yang layak. Penciptaan lapangan kerja yang layak dapat didorong dengan menggali potensi-potensi ekonomi yang baru dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
5. Penggunaan institusi dan tata kelola (*good governance*) yang baik akan menjamin tercapainya berbagai target dalam SDGs dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan, kehadiran peran pemerintah dibutuhkan di seluruh pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik secara tidak langsung juga akan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat pada pemerintah dan akhirnya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Adapun karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik dan perlu mendapatkan jaminan untuk dilaksanakan oleh instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Kerangka hukum yang adil dan merata;
- c. Pelayanan public yang responsif;
- d. Menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan semua program dan kegiatan pelayanan publik.
- e. Berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
- f. Kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan;
- g. Sumber Daya Publik dikelola secara efektif dan efisien.

4.2.3 Dukungan terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah hak seluruh individu. Pemerintah wajib menjamin pemenuhannya. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan hal tersebut, bahkan menjadikan SPM sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas anggaran daerah. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian. Peraturan kementerian teknis SPM di atas menjadi rujukan pemerintah daerah dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan pelaksanaan SPM di daerahnya masing-masing. maka pemerintah daerah melalui prangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif dan efisien.

Penerapan SPM sendiri merupakan pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Dalam konteks pelaksanaan tahap penerapan SPM ini, pemerintah daerah harus memastikan akses pelayanan dasar bagi seluruh warga negara, di samping juga harus memperhatikan penyediaan jenis dan mutu pelayanan dasar secara minimal agar warga negaranya dapat hidup secara layak.

Dalam konteks penerapan SPM, pemerintah daerah sebagai pelaksana pemenuhan SPM harus melakukan serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Integrasi

pelayanan dasar dalam dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi bagian integral dari pelaksanaan tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. SPM menjadi dasar dari pelaksanaan dan pencapaian target pemenuhan layanan dasar di daerah.

Saat ini SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Serta Sosial dengan berbagai indikatornya. Untuk itu, dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib pemerintahan daerah, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM, khususnya pada perangkat daerah terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional.

Mengingat SPM sudah diterapkan secara efektif mulai pada tahun 2019 maka perangkat daerah wajib:

1. Melakukan pengintegrasian SPM kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam dokumen RKPD dan Renja, sebagai acuan dalam penyusunan RKA untuk penyusunan RAPBD;
2. Menyampaikan pelaporan capaian SPM setiap akhir tahun anggaran yang bersinergi dengan materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
3. Diharapkan kedepannya SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.
4. Untuk itu diharapkan seluruh perangkat daerah untuk bersama sama melakukan satu kesatuan gerak langkah untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah untuk peningkatan kinerja organisasi dan melaksanakan tugas pokok serta fungsi sebagaimana telah diamanahkan kepada masing-masing perangkat daerah.

Berikutnya, dalam upaya pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada kewenangan daerah disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.11 Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 terhadap Pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Barat

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD		Indikator SPM
Misi I Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	1. Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar 2. Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa Berdasarkan hasil Asesmen Nasional 3. Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan 4. Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa Berdasarkan hasil Asesmen Nasional 5. Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD 1. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan 2. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan 3. Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan 4. Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan 5. Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan 6. Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan 7. Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan

				8. Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 9. Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 10. Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan 11. Jumlah warga negara terduga tuberculosi yang mendapatkan pelayanan kesehatan 12. Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
Misi II Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	2	Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	13. Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 14. Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
		3	Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	1. Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic
		5	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/kota 2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

				3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Misi III Mengembangk an Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	6. Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 7. Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 8. Jumlah warga negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 9. Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti 10. Jumlah warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 (diolah)

4.3 Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat

Selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan daerah pada tahun 2021 ini juga menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

Dalam Penataan Ruang dikenal kawasan strategis, yaitu suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan, teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung tahun 2021, selain mengacu pada RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005–2025, juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037.

Kawasan strategis nasional dan provinsi yang berada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam RTRW meliputi:

- a. kawasan strategis nasional ditinjau dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, Kawasan perbatasan negara ini terdapat di Pulau Batu Kecil, atau dalam bahasa lokal disebut sebagai Pulau Betuah, berada di Kecamatan Bangkunt yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Pulau Betuah ini merupakan salah satu pulau terluar di Wilayah Barat Indonesia.
- b. kawasan strategis provinsi, meliputi
 - 1) Kawasan Agro Minapolitan, lokasi agrominapolitan yang dimaksud berada di Kecamatan Ngambur, Ngaras dan Bangkunt.
 - 2) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan/TNBBS. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional (Kawasan Lindung Nasional) yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Sebagian besar sungai-sungai yang mengalir di Provinsi Lampung berhulu di TNBBS

dan hutan yang masih termasuk kategori primer juga hanya terdapat di TNBBS.

c. Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:

- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi :
 - a. Kawasan Ekowisata Pulau Pisang di Kecamatan Pulau Pisang;
 - b. Kawasan Labuhan Jukung di Kecamatan Pesisir Tengah;
 - c. Kawasan Tanjung Setia di Kecamatan Pesisir Selatan; dan
 - d. Kawasan perkotaan krui di Kecamatan Pesisir Tengah.
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan adalah Kawasan Hutan Tanam Rakyat (HTR) tersebar di wilayah kabupaten.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kewilayahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, menempuh kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Pesisir Barat, terdiri atas:
 - a. pengembangan pariwisata berbasis wisata alam dan budaya dengan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.
 - 1) meningkatkan sinergitas pariwisata dengan sektor potensial dengan konsep agrowisata, minawisata dan ekowisata;
 - 2) mengembangkan daya tarik wisata potensial dengan meningkatkan aspek pemasaran pariwisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara;
 - 3) mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan pariwisata yang bertumpu pada pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat; dan
 - 4) membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung bagi kawasan wisata potensial.

- b. pengembangan sistem permukiman yang berhirarki dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan dan pengembangan sistem prasarana wilayah.
 - 1) mengembangkan pusat pelayanan yang seimbang dan berjenjang antar wilayah dengan mengutamakan pada kawasan prioritas sesuai dengan potensi wilayah;
 - 2) membangun dan meningkatkan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan wilayah; dan
 - 3) Meningkatkan instrumen tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung wilayah.
- c. pengembangan kawasan minapolitan dengan pengelolaan sumber daya lokal berbasis pengelolaan komoditas unggulan melalui proses industrialisasi modern yang ramah lingkungan.
 - 1) mengembangkan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
 - 2) memanfaatkan potensi lahan non produktif secara lebih bijaksana bagi industri perikanan dan kelautan;
 - 3) mengembangkan dan memanfaatkan teknologi modern dalam pengelolaan industri perikanan dan kelautan dalam rangka peningkatan produktivitas dan memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - 4) menguatkan pemasaran hasil perikanan dan kelautan melalui peningkatan sumber daya; dan
 - 5) meningkatkan instrumen ruang untuk pengendalian lingkungan bagi industri perikanan dan kelautan.
- d. pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan agroindustri yang kompetitif dan terintegrasi antar sektor.
 - 1) mengoptimalkan kapasitas produksi sektor pertanian melalui peningkatan komoditas unggulan; dan

- 2) mengembangkan infrastruktur pertanian dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan.
- e. perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing dengan memperhatikan kearifan lokal.
- 1) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;
 - 2) meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan dengan penerapan teknologi modern;
 - 3) mengoptimalkan kearifan lokal daerah dalam upaya untuk pelestarian lingkungan;
 - 4) melakukan pencegahan penurunan kualitas lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup melalui pengembangan instrumen perizinan, insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - 5) mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi konservasi kawasan.
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan negara.
- 1) mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - 2) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - 3) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan.

Sementara itu, berdasarkan pada Perda No 8 Tahun 2017, arahan pemanfaatan ruang untuk perencanaan Tahun 2023 diarahkan untuk pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.12 Arah Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pembangunan RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
A	Pengembangan Struktur Ruang							
A1	Pemantapan Rencana Pusat-Pusat Pelayanan							
A1.1	Peningkatan fungsi PKL Krui	Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kantor Pemerintah Kabupaten	Pesisir Tengah				Penataan Bangunan Gedung	Dinas PU dan PR
		Pembangunan dan Peningkatan Pusat Perdagangan Barang dan Jasa	Pesisir Tengah				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag
		Pengembangan Kawasan pariwisata	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah	Pesisir Tengah				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pesisir Tengah				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan SPAM Perpipaan dan Berbasis Masyarakat	Pesisir Tengah				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Kawasan Permukiman	Pesisir Tengah				Pengembangan Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
A1.2	Peningkatan Fungsi PKLp Kota Jawa	Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa	Bangkunat				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag
		Pengembangan Kawasan Pariwisata	Bangkunat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Bangkunat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas Pertanian	Bangkunat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Kawasan Industri	Bangkunat				Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag
A1.3	Peningkatan Fungsi PKLp Biha	Penyusunan Rencana Detail/Rinci Kawasan Perkotaan Biha	Pesisir Selatan				Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa	Pesisir Selatan				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag
		Pengembangan kawasan pariwisata	Pesisir Selatan				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pesisir Selatan				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pesisir Selatan				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Kawasan Industri	Pesisir Selatan				Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag
		Pengembangan Jaringan Irigasi Teknis	Pesisir Selatan				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
A1.4	Peningkatan Fungsi PKLp Lemong	Penyusunan Rencana Detail/Rinci Kawasan Perkotaan Lemong	Lemong				Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa	Lemong				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengembangan kawasan pariwisata	Lemong				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Lemong				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Lemong				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.5	Peningkatan Fungsi PPK Negeri Ratu Ngambur	Pengembangan kawasan pariwisata	Ngambur				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Ngambur				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.6	Peningkatan Fungsi PPK Way Napal	Pengembangan kawasan pariwisata	Krui Selatan				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Krui Selatan				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Pusat Pelayanan Kesehatan	Krui Selatan				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
A1.7	Peningkatan Fungsi PPK Gunung Kemala	Pengembangan kawasan pariwisata	Way Krui				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Way Krui				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.8	Peningkatan Fungsi PPK Kebuayan	Pengembangan kawasan pariwisata	Karya Penggawa				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Karya Penggawa				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.9	Peningkatan Fungsi PPL Parda Suka	Pengembangan kawasan Pariwisata	Ngaras				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Ngaras				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Ngaras				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.10	Peningkatan Fungsi PPL Kuripan	Pengembangan kawasan pariwisata	Pesisir Utara				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pesisir Utara				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.11	Peningkatan Fungsi PPL Pasar Pulau Pisang	Pengembangan Kawasan Pariwisata	Pulau Pisang				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pulau Pisang				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pulau Pisang				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Kawasan Industri Kecil	Pulau Pisang				Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag
A2	Sistem Prasarana Utama							
A2.1	Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Darat	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer	Pesisir Barat				Penyelenggara an Jalan	Dinas PU dan PR
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten	Pesisir Barat				Penyelenggara an Jalan	Dinas PU dan PR
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	Pesisir Barat				Penyelenggara an Jalan	Dinas PU dan PR
		Rehabilitasi Jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan	Pesisir Barat				Penyelenggara an Jalan	Dinas PU dan PR
		Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Terminal Tipe C	Bangkunat, Lemong				Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Pesisir Barat				Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Pengembangan Jaringan Pelayanan Lalu Lintas	Pesisir Barat				Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
A2.2	Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Laut	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal	Pesisir Barat				Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Khusus Perikanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan	Pesisir Barat				Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
A3	Sistem Prasarana lainnya							
A3.1	Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi	Pembangunan Sistem Jaringan Telekomunikasi (Komunikasi, Data dan Informasi)	Pesisir Barat				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
		Pembangunan jaringan Hotspot di Kawasan Wisata	Pesisir Barat				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Kegiatan Pemerintahan dan Dunia Usaha	Pesisir Barat				Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo
A3.2	Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air	Peningkatan dan Pemeliharaan Sumberdaya Air Berskala Regional Guna Menjaga Kelestarian Lingkungan Dilakukan pada Seluruh Sungai yang Berhulu di TNBBS	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
		Pembangunan dan Peningkatan Daerah Irigasi	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas PU dan PR; Dinas Pertanian
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang Tersebar di Seluruh Kecamatan di Pesisir Barat	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas PU dan PR; Dinas Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir di Seluruh Wilayah	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pembangunan dan Rehabilitasi System Drainase Primer, Sekunder dan Tersier	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
		Pengamanan Abrasi Pantai	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
A3.3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan							
A3.3.1	Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Berbasis Masyarakat	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
		Pembangunan dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Minum	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
A3.3.2	Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan	Pembangunan Dan Peningkatan TPA	Ngaras, Krui Selatan dan Pesisir Utara				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
		Pembangunan TPST	Pesisir Barat				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
		Pembanguunan TPS	Pesisir Barat				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pesisir Tengah				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
A3.3.3	Pengembangan Sistem Jaringan Air Limbah	Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Limbah di Pusat Pelayanan Kesehatan	Pesisir Barat				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pembangunan IPLT	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PU dan PR
		Pembangunan sarana dan prasarana air limbah di pedesaan	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Sarana dan Prasarana pengelolaan Air Limbah	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PU dan PR
B	Pengembangan Pola Ruang							
B1	Pengembangan Kawasan Budidaya							
B1.1	Pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertanian	Pengembangan Lahan Padi Sawah Beririgasi Teknis pada Areal-areal Potensial	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Peningkatan Produktivitas Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Budidaya Perkebunan	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Budidaya Peternakan	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Peningkatan Produktivitas Produksi Perkebunan melalui Intensifikasi Lahan dan Peningkatan Keterampilan Petani Kebun	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Kawasan Pertanian melalui Pendekatan Agropolitan pada Kawasan-kawasan Potensial	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
B1.2	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan	Pengembangan Perikanan Tangkap	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan Sarana dan Prasaranan Perikanan Nelayan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Optimalisasi TPI	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan Sentra Budidaya Perikanan Laut (udang, kerapu, dan rumput laut)	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Sentra Budidaya Perikanan Air Tawar	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Kegiatan Minapolitan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
B1.3	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Pembangunan Kawasan Industri	Pesisir Selatan, Bangkunat				Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengendalian Lingkungan pada Kawasan Industri	Pesisir Barat				Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
		Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Industri	Pesisir Selatan, Bangkunt				Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag
		Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pesisir Barat				Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag
B1. 4	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata	Pengembangan Kawasan Pariwisata Berkelanjutan	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Pariwisata	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Promosi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Pesisir Barat				Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
B1. 5	Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Pesisir Barat				Pengembangan Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
		Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan	Pesisir Barat				Kawasan Permukiman	Dinas PR dan KP
		Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasaran Permukiman	Pesisir Barat				Pengembangan Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
		Pengembangan Perumahan Rakyat	Pesisir Barat				Pengembangan Perumahan	Dinas PR dan KP
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Permukiman	Pesisir Barat				Pengembangan Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
		Pembangunan dan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pesisir Barat				Pengembangan Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Cepat Tumbuh Perkotaan	Pesisir Barat				Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas PU dan PR
C	Pengembangan Kawasan Strategis							
C1	Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi	Pengembangan Kawasan Pulau Pisang	Pulau Pisang				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Kawasan Tanjung Setia	Pesisir Selatan				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Kawasan Perkotaan	Pesisir Tengah				Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas PU dan PR

Sumber : RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

BAB V

RENCANA KERJA

DAN PENDANAAN DAERAH

Dengan mengusung tema pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 **“Melanjutkan Pemulihan Ekonomi Dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Memantapkan Infrastruktur Daerah”** tema tersebut ditetapkan untuk mewujudkan percepatan pencapaian Visi Kabupaten Pesisir Barat “Terwujudnya Pesisir Barat yang Amanah, Maju dan Sejahtera”. Berikutnya diperlukan penegasan terhadap upaya-upaya umum dari pemerintah daerah yang akan dilaksanakan serta akan mendasari gerak langkah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat selama sisa pelaksanaan tahun 2023.

Untuk menunjang pelaksanaan Tema Pembangunan tersebut, ditetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023 dalam pelaksanaan roda pemerintahan daerah dan perencanaan pembangunan untuk peningkatan penjaminan terlaksananya pelayanan pembangunan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan;
3. Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat;
4. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas;
5. Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat;

Berdasarkan pada 5 (lima) prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Barat tersebut di atas, penganggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 ini pada dasarnya merupakan program prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya Visi, Misi, RPJMD Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan konsistensi dan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Elemen-elemen utama Program Prioritas memuat Kegiatan yang akan dilaksanakan, yang memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan, dimana kegiatan juga merupakan akumulasi dari pencapaian dari masing-masing sub kegiatan. Disatu sisi, bahwa proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 mencakup pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*) dan atas bawah (*top-down*); serta tetap memperhatikan pendekatan tematik- holistik, integratif, dan spasial, dimana:

1. Tematik-holistik yaitu pendekatan pembangunan yang memandang pentingnya mempertimbangkan sumber daya pembangunan sebagai satu kesatuan faktor (hulu – hilir) yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Integratif yaitu pendekatan pembangunan yang menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
3. Spasial yaitu pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan dimensi pemanfaatan ruang dan indikasi lokasi sesuai dengan kewenangan masing-masing hirarki pemerintahan, dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Uraian pokok pada bab ini terdiri dari (1) Program Prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah wajib berdasarkan Urusan Pemerintahan sesuai dengan kewenangan sebagaimana yang diatur pada UU No. 23 Tahun 2014; (2) Sinkronisasi Program Prioritas Kabupaten Pesisir Barat dengan Prioritas Pembangunan Nasional; (3) Sinkronisasi Program Prioritas Kabupaten Pesisir Barat dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan (4) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Tabel 5.1 Pagu Indikatif Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2023

No	Urusan	Program	Pagu Indikatif Anggaran (Rp)			Perangkat Daerah
			RKPD 2023	APBD 2023	P RKPD 2023	
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		482,939,454,173	473,403,994,605	454,842,694,605	
1	Pendidikan		184,402,994,727	196,895,852,665	223,034,741,049	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	140,777,077,500	157,112,519,665	153,289,619,665	Dinas P dan K
		Program Pengelolaan Pendidikan	43,625,917,227	39,783,333,000	69,745,121,384	Dinas P dan K
2	Kesehatan		97,613,462,717	90,902,184,735	102,296,742,557	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	33,248,522,660	34,361,458,360	34,361,458,360	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	63,045,409,457	54,702,350,435	61,863,008,257	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	175,622,400	1,712,281,200	5,946,181,200	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	125,231,000	14,930,940	14,930,940	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,018,677,200	111,163,800	111,163,800	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		177,482,352,222	167,145,533,500	111,050,787,294	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	5,342,895,805	4,958,800,300	4,920,960,300	Dinas PU dan PR
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6,842,177,518	9,525,190,936	2,542,487,606	Dinas PU dan PR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,274,128,691	1,300,000,000	600,000,000	Dinas PU dan PR

		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1,074,128,691	686,096,700	386,096,700	Dinas PU dan PR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2,142,677,375	1,570,144,700	421,848,030	Dinas PU dan PR
		Program Pengembangan Permukiman	1,491,949,905	0	0	Dinas PU dan PR
		Program Penataan Bangunan Gedung	146,671,401,896	73,498,523,387	43,085,205,681	Dinas PU dan PR
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	3,675,156,555	0	805,559,000	Dinas PU dan PR
		Program Penyelenggaraan Jalan	8,179,940,306	73,264,950,677	55,908,200,677	Dinas PU dan PR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	473,407,540	469,877,000	508,479,500	Dinas PU dan PR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	314,487,940	1,871,949,800	1,871,949,800	Dinas PU dan PR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		8,459,930,875	3,793,727,305	3,793,727,305	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,388,393,748	2,298,109,000	2,298,109,000	Dinas PR dan KP
		Program Pengembangan Perumahan	327,281,364	189,850,000	189,850,000	Dinas PR dan KP
		Program Kawasan Permukiman	561,818,800	307,173,400	307,173,400	Dinas PR dan KP
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	4,509,076,963	211,132,000	211,132,000	Dinas PR dan KP
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	673,360,000	787,462,905	787,462,905	Dinas PR dan KP
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		8,309,599,532	7,736,926,300	7,736,926,300	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,847,939,169	2,549,120,300	2,569,120,300	Satpol-PP dan Damkar

		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2,017,209,100	1,404,259,100	1,320,529,100	Satpol-PP dan Damkar
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	522,060,000	510,060,000	573,790,000	Satpol-PP dan Damkar
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	1,755,446,458	2,595,986,900	2,595,986,900	BPBD
		Program Penanggulangan Bencana	1,166,944,805	677,500,000	677,500,000	BPBD
6	Sosial		6,671,114,100	6,929,770,100	6,929,770,100	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,215,242,000	2,507,458,100	2,507,458,100	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	312,536,400	205,177,000	205,177,000	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	3,398,065,200	3,952,109,000	3,952,109,000	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	454,190,900	213,339,000	213,339,000	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	291,079,600	51,687,000	51,687,000	Dinas Sosial
II	Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar		78,173,847,086	67,393,631,236	64,993,631,236	
1	Tenaga Kerja		2,700,130,537	2,748,903,300	2,748,903,300	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,143,130,537	2,085,903,300	2,085,903,300	Dinas Trans Naker dan Perindustrian
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	250,000,000	545,000,000	545,000,000	Dinas Trans Naker dan Perindustrian
		Program Penempatan Tenaga Kerja	180,000,000	73,000,000	73,000,000	Dinas Trans Naker dan Perindustrian
		Program Hubungan Industrial	127,000,000	45,000,000	45,000,000	Dinas Trans Naker dan Perindustrian

2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		5,686,372,900	2,288,800,000	2,288,800,000	
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	150,000,000	770,645,000	770,645,000	Dinas PPPA dan KB
		Program Perlindungan Perempuan	215,965,000	101,947,000	101,947,000	Dinas PPPA dan KB
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	76,500,000	750,000,000	750,000,000	Dinas PPPA dan KB
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	386,938,600	329,355,000	329,355,000	Dinas PPPA dan KB
		Program Perlindungan Khusus Anak	901,800,000	336,853,000	336,853,000	Dinas PPPA dan KB
3	Pangan		8,741,812,754	6,781,460,300	6,781,460,300	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	7,448,695,154	6,288,024,300	6,288,024,300	Dinas KP dan Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	919,937,500	268,346,000	268,346,000	Dinas KP dan Pertanian
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	267,365,750	190,090,000	190,090,000	Dinas KP dan Pertanian
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	105,814,350	35,000,000	35,000,000	Dinas KP dan Pertanian
4	Pertanahan		8,423,774,568	3,940,171,000	1,540,171,000	
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	28,123,200	0	0	Dinas PR dan KP
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	7,882,219,768	3,786,391,000	1,386,391,000	Dinas PR dan KP
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	513,431,600	153,780,000	153,780,000	Dinas PR dan KP
5	Lingkungan Hidup		6,576,629,549	5,204,691,800	5,204,691,800	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	3,235,351,019	2,992,391,800	2,992,391,800	Dinas LH
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	493,245,405	325,000,000	325,000,000	Dinas LH

		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	311,403,805	25,000,000	25,000,000	Dinas LH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	202,274,405	0	0	Dinas LH
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	125,014,405	0	0	Dinas LH
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	106,710,105	0	0	Dinas LH
		Program Pengelolaan Persampahan	2,102,630,405	1,862,300,000	1,862,300,000	Dinas LH
6	Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5,338,636,901	3,185,806,400	3,185,806,400	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	4,579,397,401	2,651,403,400	2,651,403,400	Dinas Duk Capil
		Program Pendaftaran Penduduk	459,613,000	346,890,000	346,890,000	Dinas Duk Capil
		Program Pencatatan Sipil	108,399,000	85,267,000	85,267,000	Dinas Duk Capil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	92,803,500	56,650,000	56,650,000	Dinas Duk Capil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	98,424,000	45,596,000	45,596,000	Dinas Duk Capil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		9,639,362,400	6,203,032,710	6,203,032,710	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,859,362,400	2,504,793,800	2,516,893,800	Dinas PMP
		Program Penataan Desa	900,000,000	400,000,000	400,000,000	Dinas PMP
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	2,580,000,000	1,701,743,480	1,689,643,480	Dinas PMP

		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3,300,000,000	1,596,495,430	1,596,495,430	Dinas PMP
8	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana		4,313,627,100	8,374,391,400	8,374,391,400	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	3,955,169,300	4,247,324,400	4,247,324,400	Dinas PPPA dan KB
		Program Pengendalian Penduduk	431,550,900	208,200,000	208,200,000	Dinas PPPA dan KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2,636,978,300	2,643,395,000	2,643,395,000	Dinas PPPA dan KB
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1,245,097,900	1,275,472,000	1,275,472,000	Dinas PPPA dan KB
9	Perhubungan		3,125,170,480	5,684,891,200	5,684,891,200	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	1,979,900,200	2,608,051,200	2,608,051,200	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1,036,360,280	2,940,520,000	2,940,520,000	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	108,910,000	136,320,000	136,320,000	Dinas Perhubungan
10	Komunikasi dan Informatika		7,049,022,864	6,656,205,700	6,656,205,700	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	3,979,998,364	4,542,041,300	4,542,041,300	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1,877,630,500	1,831,292,500	1,831,292,500	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,191,394,000	282,871,900	282,871,900	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian

11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		3,690,486,400	3,132,843,600	3,132,843,600	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,768,909,000	2,318,645,600	2,318,645,600	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	42,186,400	63,828,000	63,828,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	479,391,000	520,370,000	520,370,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	400,000,000	230,000,000	230,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
12	Penanaman Modal		5,473,010,397	5,746,294,900	5,746,294,900	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,775,719,547	2,719,205,900	2,719,205,900	Dinas PM dan PTSP
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	340,999,405	0	0	Dinas PM dan PTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	735,331,205	1,437,000,000	1,437,000,000	Dinas PM dan PTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	628,960,230	903,959,000	903,959,000	Dinas PM dan PTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	671,204,605	580,130,000	580,130,000	Dinas PM dan PTSP
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	320,795,405	106,000,000	106,000,000	Dinas PM dan PTSP
13	Kepemudaan dan Olahraga		6,476,365,725	6,692,047,900	6,692,047,900	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,336,565,900	2,385,693,100	2,385,693,100	Dinas Pora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,675,000,000	1,936,354,800	1,936,354,800	Dinas Pora

		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2,464,799,825	2,370,000,000	2,370,000,000	Dinas Pora
14	Statistik		131,545,000	41,045,000	41,045,000	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	131,545,000	41,045,000	41,045,000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
15	Persandian		156,800,000	182,300,000	182,300,000	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	156,800,000	182,300,000	182,300,000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
16	Kebudayaan		350,559,405	350,559,000	350,559,000	
		Program Pengembangan Kebudayaan	267,000,000	267,000,000	267,000,000	Dinas P dan K
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	83,559,405	83,559,000	83,559,000	Dinas P dan K
17	Perpustakaan		173,948,001	145,112,916	145,112,916	
		Program Pembinaan Perpustakaan	173,948,001	145,112,916	145,112,916	Setda
18	Kearsipan		126,592,105	35,074,110	35,074,110	
		Program Pengelolaan Arsip	126,592,105	35,074,110	35,074,110	Setda
III	Urusan Pilihan		18,404,817,481	18,564,346,100	18,564,346,100	
1	Perikanan		5,008,837,421	4,780,498,500	4,780,498,500	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	3,173,671,640	2,661,983,460	2,640,983,460	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	612,264,065	753,259,760	753,259,760	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	592,099,655	672,125,280	693,125,280	Dinas Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	160,660,206	44,528,000	44,528,000	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	470,141,855	648,602,000	648,602,000	Dinas Perikanan

2	Pariwisata		5,557,874,702	9,193,044,100	9,193,044,100	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	3,708,476,242	3,468,451,700	3,468,451,700	Dinas Pariwisata
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	730,465,640	90,000,000	90,000,000	Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	613,932,820	5,452,400,000	5,452,400,000	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	505,000,000	182,192,400	182,192,400	Dinas Pariwisata
3	Pertanian		6,186,111,300	2,228,764,000	2,228,764,000	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,334,568,700	1,310,180,000	1,310,180,000	Dinas KP dan Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2,345,352,000	314,779,000	314,779,000	Dinas KP dan Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	237,243,600	125,000,000	125,000,000	Dinas KP dan Pertanian
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	396,310,800	25,000,000	25,000,000	Dinas KP dan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	872,636,200	453,805,000	453,805,000	Dinas KP dan Pertanian
4	Perdagangan		693,994,058	936,843,000	936,843,000	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	113,811,058	490,453,000	490,453,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	319,183,000	95,390,000	95,390,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	261,000,000	351,000,000	351,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
5	Perindustrian		554,000,000	984,744,500	984,744,500	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	479,000,000	984,744,500	984,744,500	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian

		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	75,000,000	0	0	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
6	Transmigrasi		404,000,000	440,452,000	440,452,000	
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	255,000,000	440,452,000	440,452,000	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	149,000,000	0	0	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
IV	Unsur Pendukung		91,489,570,982	106,310,128,306	93,048,528,306	
1	Sekretariat Daerah		59,659,383,532	74,305,234,606	61,043,634,606	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	51,441,306,791	63,255,943,154	49,994,343,154	Setda
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	4,844,396,741	7,468,297,186	7,468,297,186	Setda
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	3,373,680,000	3,580,994,266	3,580,994,266	Setda
2	Sekretariat DPRD		31,830,187,450	32,004,893,700	32,004,893,700	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	20,218,082,200	20,592,788,450	20,591,367,600	Setwan
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	11,612,105,250	11,412,105,250	11,413,526,100	Setwan
V	Unsur Penunjang		189,889,214,902	198,211,177,989	196,711,177,989	
1	Perencanaan		9,265,893,080	7,242,902,100	7,242,902,100	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	3,676,948,000	3,966,256,100	3,966,256,100	Bappelitbangda
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2,868,331,600	1,632,651,000	1,632,651,000	Bappelitbangda
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2,720,613,480	1,643,995,000	1,643,995,000	Bappelitbangda

2	Keuangan		171,938,097,581	182,285,690,189	180,785,690,189	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	11,326,783,700	18,615,944,569	18,615,944,569	BPKAD
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	152,196,357,500	156,418,921,120	154,851,421,120	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,427,739,600	2,244,389,600	2,311,889,600	BPKAD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	3,917,599,150	3,137,871,050	3,137,871,050	Bapenda
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,069,617,631	1,868,563,850	1,868,563,850	Bapenda
3	Kepegawaian		4,332,338,953	4,242,024,200	4,242,024,200	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,599,735,981	2,554,991,200	2,554,991,200	BKPSDM
		Program Kepegawaian Daerah	1,732,602,972	1,687,033,000	1,687,033,000	BKPSDM
4	Pendidikan dan Pelatihan		2,603,531,288	687,944,000	687,944,000	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,603,531,288	687,944,000	687,944,000	BKPSDM
5	Penelitian dan Pengembangan		1,749,354,000	3,752,617,500	3,752,617,500	
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1,749,354,000	3,752,617,500	3,752,617,500	Bappelitbangda
VI	Unsur Pengawasan		7,431,880,000	6,797,370,900	6,797,370,900	
1	Inspektorat		7,431,880,000	6,797,370,900	6,797,370,900	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	4,574,128,900	4,666,550,400	4,516,550,400	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,916,181,100	1,552,317,500	1,702,317,500	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	941,570,000	578,503,000	578,503,000	Inspektorat

VII	Unsur Kewilayahan		8,386,200,000	9,835,400,000	9,835,400,000	
1	Kecamatan		8,386,200,000	9,835,400,000	9,835,400,000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	7,829,340,740	8,868,359,440	8,868,359,440	Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Selatan, Pesisir Utara, Bangkunt, Ngaras Ngambur, Lemong, Way Krui, Krui Selatan, Karya Penggawa, Pulau Pisang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	356,859,260	330,240,560	330,240,560	Kecamatan Bangkunt, Krui Selatan, Lemong, Ngambur, Ngaras, Pulau Pisang, Pesisir Selatan, Pesisir Utara
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,000,000	636,800,000	636,800,000	Kecamatan Pesisir Tengah
VIII	Unsur Pemerintahan Umum		5,060,308,443	10,277,879,630	10,277,879,630	
1	Kesatuan bangsa dan politik		5,060,308,443	10,277,879,630	10,277,879,630	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,746,182,581	2,077,456,500	2,077,456,500	Badan Kesbangpol
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	131,853,952	63,453,000	63,453,000	Badan Kesbangpol

		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	562,234,801	533,333,130	533,333,130	Badan Kesbangpol
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,273,133,001	7,058,542,000	7,058,542,000	Badan Kesbangpol
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	142,144,803	182,822,000	182,822,000	Badan Kesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	204,759,305	362,273,000	362,273,000	Badan Kesbangpol
		Total Belanja	881,775,293,067	890,793,928,766	855,071,028,766	
I	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		482,939,454,173	473,403,994,605	454,842,694,605	53.19
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		78,173,847,086	67,393,631,236	64,993,631,236	7.60
III	Urusan Pilihan		18,404,817,481	18,564,346,100	18,564,346,100	2.17
IV	Unsur Pendukung		91,489,570,982	106,310,128,306	93,048,528,306	10.88
V	Unsur Penunjang		189,889,214,902	198,211,177,989	196,711,177,989	23.01
VI	Unsur Pengawasan		7,431,880,000	6,797,370,900	6,797,370,900	0.79
VII	Unsur Kewilayahan		8,386,200,000	9,835,400,000	9,835,400,000	1.15
VIII	Unsur Pemerintahan Umum		5,060,308,443	10,277,879,630	10,277,879,630	1.20
		Jumlah	881,775,293,067	890,793,928,766	855,071,028,766	100.00

Pada kolom data Pagu Anggaran Program APBD TA 2023, terdapat beberapa program yang sebelumnya telah terangkum dan tercatat dalam RKPD Tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026 yang tidak dianggarkan pada APBD TA 2023. Program dimaksud tidak dapat dianggarkan dikarenakan keterbatasan fiskal daerah pada saat proses penyusunan dokumen anggaran daerah. Namun demikian, pada Perubahan RKPD Tahun 2023, ada program yang sebelumnya tidak dianggarkan pada APBD TA 2023 namun kembali dianggarkan. Hal ini tentunya menjadi perhatian dan koreksi bagi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran berikutnya dalam upaya menjaga harmonisasi penyusunan.

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023, penganggaran untuk Belanja per Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan pada urutan persentase terbesar adalah sebagai berikut: (1) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar memiliki porsi terbesar dengan persentase 53,19%, (2) Pelaksanaan Unsur Penunjang dengan persentase 23,01%, (3) Pelaksanaan Unsur Pendukung dengan persentase 11,93%, (4) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan persentase 7,60%, (5) Urusan Pilihan dengan persentase 2,08%. (6) Pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum dengan persentase 1,20%, (7) Pelaksanaan Unsur Kewilayahan dengan persentase 1,15%, (8) Pelaksanaan Unsur Pengawasan dengan persentase 0,76%.

Berikutnya disajikan Sinkronisasi Program Prioritas Kabupaten Pesisir Barat dengan Prioritas Pembangunan Nasional pada Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2 Sinkronisasi Program Kabupaten Pesisir Barat dengan Program Prioritas Nasional Perubahan Tahun 2023

Prioritas Nasional		Urusan Pemerintahan Daerah		Pagu Indikatif Anggaran (Rp.)		
				RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3,690,486,400	3,132,843,600	3,132,843,600
		2	Penanaman Modal	5,473,010,397	5,746,294,900	5,746,294,900
		3	Perikanan	5,008,837,421	4,780,498,500	4,780,498,500
		4	Pariwisata	5,557,874,702	9,193,044,100	9,193,044,100
		5	Pertanian	6,186,111,300	2,228,764,000	2228764000
		6	Perdagangan	693,994,058	936,843,000	936,843,000
		7	Perindustrian	554,000,000	984,744,500	984,744,500

2	Mengembangk an Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	Pemberdaya an Masyarakat dan Desa	9,639,362,400	6,203,032,710	6,203,032,710
		2	Perhubungan	3,125,170,480	5,684,891,200	5,684,891,200
		3	Transmigrasi	404,000,000	440,452,000	440,452,000
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Pendidikan	184,402,994,727	196,895,852,665	223,034,741,049
		2	Kesehatan	97,613,462,717	90,902,184,735	102,296,742,557
		3	Tenaga Kerja	2,700,130,537	2,748,903,300	2,748,903,300
		4	Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak	5,686,372,900	2,288,800,000	2,288,800,000
		5	Pangan	8,741,812,754	6,781,460,300	6,781,460,300
		6	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	4,313,627,100	8,374,391,400	8,374,391,400
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	Sosial	6,671,114,100	6,929,770,100	6,929,770,100
		2	Kepemudaan dan Olahraga	6,476,365,725	6,692,047,900	6,692,047,900
		3	Kebudayaan	350,559,405	350,559,000	350,559,000
		4	Kesatuan Bangsa dan Politik	5,060,308,443	10,277,879,630	10,277,879,630
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	177,482,352,222	167,145,533,500	111,050,787,294
		2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8,459,930,875	3,793,727,305	3,793,727,305
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1	Lingkungan Hidup	6,576,629,549	5,204,691,800	5,204,691,800
		2	Pertanahan	8,423,774,568	3,940,171,000	1,540,171,000
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	8,309,599,532	7,736,926,300	7,736,926,300

	2	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,338,636,901	3,185,806,400	3,185,806,400
	3	Komunikasi dan Informatika	7,049,022,864	6,656,205,700	6,656,205,700
	4	Statistik	131,545,000	41,045,000	41,045,000
	5	Persandian	156,800,000	182,300,000	182,300,000
	6	Perpustakaan	173,948,001	145,112,916	145,112,916
	7	Kearsipan	126,592,105	35,074,110	35,074,110
	8	Sekretariat Daerah	59,659,383,532	74,305,234,606	61,043,634,606
	9	Sekretariat DPRD	31,830,187,450	32,004,893,700	32,004,893,700
	10	Perencanaan	9,265,893,080	7,242,902,100	7,242,902,100
	11	Keuangan	171,938,097,581	182,285,690,189	180,785,690,189
	12	Kepegawaian	4,332,338,953	4,242,024,200	4,242,024,200
	13	Pendidikan dan Pelatihan	2,603,531,288	687,944,000	687,944,000
	14	Penelitian dan Pengembangan	1,749,354,000	3,752,617,500	3,752,617,500
	15	Inspektorat	7,431,880,000	6,797,370,900	6,797,370,900
	16	Kecamatan	8,386,200,000	9,835,400,000	9,835,400,000
Total			881,775,293,067	890,793,928,766	855,071,028,766

Lebih lanjut disajikan Sinkronisasi Program Prioritas Kabupaten Pesisir Barat dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung pada Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.3 Sinkronisasi Program Kabupaten Pesisir Barat dengan Program Prioritas Provinsi Lampung Perubahan Tahun 2023

Prioritas Provinsi		Urusan Pemerintahan Daerah		Pagu Indikatif Anggaran (Rp.)		
				RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023
1	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3,690,486,400	3,132,843,600	3,132,843,600
		2	Penanaman Modal	5,473,010,397	5,746,294,900	5,746,294,900
		3	Perikanan	5,008,837,421	4,780,498,500	4,780,498,500
		4	Pariwisata	5,557,874,702	9,193,044,100	9,193,044,100
		5	Pertanian	6,186,111,300	2,228,764,000	2,228,764,000
		6	Perdagangan	693,994,058	936,843,000	936,843,000
		7	Perindustrian	554,000,000	984,744,500	984,744,500
2	Meningkatkan Kualitas SDM	1	Pendidikan	184,402,994,727	196,895,852,665	223,034,741,049
		2	Kesehatan	97,613,462,717	90,902,184,735	102,296,742,557
		3	Tenaga Kerja	2,700,130,537	2,748,903,300	2,748,903,300

		4	Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak	5,686,372,900	2,288,800,000	2,288,800,000
		5	Pangan	8,741,812,754	6,781,460,300	6,781,460,300
		6	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	4,313,627,100	8,374,391,400	8,374,391,400
3	Pembangunan Infrastruktur	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	177,482,352,222	167,145,533,500	111,050,787,294
		2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8,459,930,875	3,793,727,305	3,793,727,305
		3	Pemberdaya an Masyarakat dan Desa	9,639,362,400	6,203,032,710	6,203,032,710
		4	Perhubungan	3,125,170,480	5,684,891,200	5,684,891,200
		5	Transmigrasi	404,000,000	440,452,000	440,452,000
4	Reformasi Birokrasi	1	Kependuduk an dan Pencatatan Sipil	5,338,636,901	3,185,806,400	3,185,806,400
		2	Komunikasi dan Informatika	7,049,022,864	6,656,205,700	6,656,205,700
		3	Statistik	131,545,000	41,045,000	41,045,000
		4	Persandian	156,800,000	182,300,000	182,300,000
		5	Perpustakaan	173,948,001	145,112,916	145,112,916
		6	Kearsipan	126,592,105	35,074,110	35,074,110
		7	Sekretariat Daerah	59,659,383,532	74,305,234,606	61,043,634,606
		8	Sekretariat DPRD	31,830,187,450	32,004,893,700	32,004,893,700
		9	Perencanaan	9,265,893,080	7,242,902,100	7,242,902,100
		10	Keuangan	171,938,097,581	182,285,690,189	180,785,690,189
		11	Kepegawaian	4,332,338,953	4,242,024,200	4,242,024,200
		12	Pendidikan dan Pelatihan	2,603,531,288	687,944,000	687,944,000
		13	Penelitian dan Pengembang an	1,749,354,000	3,752,617,500	3,752,617,500
		14	Inspektorat	7,431,880,000	6,797,370,900	6,797,370,900
		15	Kecamatan	8,386,200,000	9,835,400,000	9,835,400,000
5	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	1	Sosial	6,671,114,100	6,929,770,100	6,929,770,100
		2	Kepemudaan dan Olahraga	6,476,365,725	6,692,047,900	6,692,047,900
		3	Kebudayaan	350,559,405	350,559,000	350,559,000
		4	Kesatuan bangsa dan politik	5,060,308,443	10,277,879,630	10,277,879,630

6	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	1	Lingkungan Hidup	6,576,629,549	5,204,691,800	5,204,691,800
		2	Pertanahan	8,423,774,568	3,940,171,000	1,540,171,000
		3	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	8,309,599,532	7,736,926,300	7,736,926,300
			Total	881,775,293,067	890,793,928,766	855,071,028,766

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026, dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2023 untuk mendukung Prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.4 Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2023

No	Prioritas RKPD Tahun 2023	Sasaran RPJMD	Program	Indikator Program (Target)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Target)	Perangkat Daerah
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Terwujudnya SDM Daerah yang berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan (100 Persen)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD (70.00 Persen)	Dinas P dan K
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP (70.00 Persen)	Dinas P dan K
			Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola (1 Lokasi)	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan (150 Orang)	Sekretariat Daerah
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (20.00 Persen)	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Dinamis sebagai Warisan Budaya yang Preservasi (21.000 Arsip)	Sekretariat Daerah
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (100 Persen)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Sarana dan Prasarana Kondisi Baik (100 Persen)	Dinas Kesehatan

			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Puskesmas/ Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (100 Persen)	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang Mengetahui PHBS (100 Persen)	Dinas Kesehatan
		Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (50.00 Persen)	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Wirausaha Muda (1.10 Persen)	Dinas Pora
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pemenuhan Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan (45.00 Persen)	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lomba Kejuaraan Olahraga yang Dilaksanakan (100 Persen)	Dinas Pora
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (72.71 Persen)	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemerataan Tenaga Kerja (30.00 Persen)	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian

		Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (100 Persen)	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peserta yang Menerima Pembinaan P3KSS dan GSI (100 Persen)	Dinas PP PA dan KB
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Terhadap Anak (16.67 Persen)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengetahuan tentang Pemenuhan Hak-hak Anak Menuju Kabupaten Layak Anak (100 Persen)	Dinas PP PA dan KB
			Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (1.01 Persen)	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan Koordinasi Integrasi Program Bangga Kencana dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (11 Kecamatan)	Dinas PP PA dan KB
		Meningkatnya Pembangunan di Desa/Pekon	Program Penataan Desa	Jumlah Desa Berkembang (69 Pekon)	Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa (65.00 Persen)	Dinas PMP
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibina (1 Lokasi)	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Cakupan Pengembangan Daerah Transmigran (80.00 Persen)	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian

2	Pembangunan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN (15.99 Persen)	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Izin yang Diterbitkan (80.00 Persen)	Dinas PM dan PTSP
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (13.859 Ton)	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Area Penangkapan Ikan (80.00 Persen)	Dinas Perikanan
		Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (1.89 Persen)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Mendapatkan Kemitraan, Kemudahan dan Penguatan Kelembagaan serta Terdata di Database (60.00 Persen)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (11.54 Persen)	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terfasilitasi (60.00 Persen)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

		Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai Tukar Petani (100.51 Angka)	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian (0.30 Persen)	Dinas KP dan Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama (28.000 Ton)	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (84.95 Angka)	Dinas KP dan Pertanian
		Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (35.00 Persen)	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Terealisasinya Rencana Pembangunan Industri (100 Persen)	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (2.58 Persen)	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lamanya Kunjungan Wisatawan (8 Hari)	Dinas Pariwisata
3	Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Transportasi Daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (41.00 Persen)	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten/Kota (41.00 Persen)	Dinas PU dan PR

			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat (70.00 Persen)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Perlengkapan Jalan (10.00 Persen)	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayanan	Persentase Cakupan Wilayah yang terlayani Angkutan Laut (50.00 Persen)	Penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Transportasi Laut yang Layak (70.00 Persen)	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (37.50 Persen)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan (37.50 Persen)	Dinas PU dan PR
			Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni (86.00 Persen)	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Cakupan Pengelolaan Rumah Susun (86.00 Persen)	Dinas PR dan KP
		Tersedianya SDA untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah (30.00 Persen)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (30.00 Persen)	Dinas PU dan PR

		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog (20.00 Persen)	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR (100 Persen)	Dinas PU dan PR
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana Sarana Umum (35.00 Persen)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (20.00 Persen)	Dinas PR dan KP
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rasio Luas Tanah yang Disediakan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (10.00 Ha)	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Kerugian (10 Lokasi)	Dinas PR dan KP

			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (73.54 Angka)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup (100 Persen)	Dinas LH
4	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Sosial (100 Persen)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan (100 Persen)	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Perlindungan Sosial Daerah (100 Persen)	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daerah yang Aktif Melakukan Pemutakhiran dan Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (100 Persen)	Dinas Sosial
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Penduduk Usia 10 tahun keatas yang Terlibat Pertunjukan Seni (20.00 Persen)	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Menonton secara Langsung Pertunjukan Seni (60 Orang)	Dinas P dan K

		Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (100 Persen)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (15 Menit)	Satpol PP dan Damkar
			Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah (100 Persen)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah (100 Persen)	BPBD
		Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi dan Peran Lembaga dan Elemen Masyarakat dalam Pencegahan terjadinya Konflik Sosial (70.00 Persen)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (100 Persen)	Badan Kesbangpol
5	Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas (100 Persen)	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk (100 Persen)	Dinas Duk dan Capil

			Program Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) (80.00 Persen)	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Informasi Digital di Lingkup Pemerintah Daerah (100 Persen)	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (100 Persen)	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pengembangan Pemuda (100 Persen)	11 Kecamatan
		Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik (2 Dokumen)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Data Statistik Sektoral (100 Persen)	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik (100 Persen)	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase Layanan Keamanan Informasi Daerah (100 Persen)	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian

			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan (100 Persen)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penjabaran konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan anggaran terhadap kepatuhan Peraturan peundang-undangan (100 Persen)	Inspektorat
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan terhadap Dokumen Penganggaran (100 Persen)	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (100 Persen)	Bappelitbangda
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Sangat Inovatif Predikat)	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan SIDA (100 Persen)	Bappelitbangda
			Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (70.00 Persen)	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan Pemenuhan ASN (50.00 Persen)	BKPSDM

			Program Pengembangan Pengawasan	Cakupan Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan (100 Persen)	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (20 Jam Pelajaran)	BKPSDM
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (80.00 Persen)	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaporan administrasi tata pemerintahan Tepat Waktu (100 Persen)	Sekretariat Daerah

			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk Melaksanakan fungsi Pengawasan, fungsi Pembentukan perda, dan Fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (100 Persen)	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Yang sesuai regulasi (100 Persen)	Sekretariat DPRD
		Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Tata Kelola Keuangan Daerah sesuai Aturan (100 Persen)	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Dokumen penganggaran daerah tepat waktu (100 Persen)	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Tata Kelola Barang Milik Daerah sesuai Aturan (100 Persen)	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pencatatan Aset Daerah (100 Persen)	BPKAD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah (3.18 Persen)	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Peningkatan PAD (2.50 Persen)	Bapenda

5.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan Tahun 2023 dapat dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan daerah untuk mencapai prioritas dan sasaran daerah tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.5 Prioritas Daerah, Sasaran Daerah dan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2023

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas (P1)	1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas (S1) 2. Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah (S2) 3. Terwujudnya Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas (S3) 4. Meningkatnya Pembangunan di Desa/Pekon (S18)	a. Pendidikan b. Kesehatan c. Tenaga Kerja d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa g. Pemuda dan Olahraga h. Perpustakaan i. Kearsipan j. Transmigrasi
2	Pembangunan Ekonomi Daerah (P2)	1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah (S9) 2. Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat (S10) 3. Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat (S11) 4. Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat (S12) 5. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (S14)	a. Pangan b. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah c. Penanaman Modal d. Kelautan dan Perikanan e. Pariwisata f. Pertanian g. Perdagangan h. Perindustrian
3	Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah (P3)	1. Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah (S4) 2. Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas (S5) 3. Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan (S6)	a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman c. Pertanahan d. Lingkungan Hidup e. Perhubungan

		4. Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan (S7)	
4	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat (P4)	1. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah (S13) 2. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (S14) 3. Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah (S8) 4. Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas (S16)	a. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat b. Sosial c. Kebudayaan d. Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik serta pembangunan Kebudayaan (P5)	1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas (S15) 2. Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas (S16) 3. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (S17)	a. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Komunikasi dan Informatika c. Statistik d. Persandian e. Sekretariat Daerah f. Sekretariat DPRD g. Perencanaan h. Keuangan i. Kepegawaian j. Pendidikan dan Pelatihan k. Penelitian dan Pengembangan l. Inspektorat Daerah m. Kecamatan

Selanjutnya, berdasarkan pada rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing Urusan Pemerintahan Daerah untuk menunjang pelaksanaan Prioritas Pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat serta Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							184,402,994,727	196,895,852,665	223,034,741,049					206,706,549,136			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	140,777,077,500	157,112,519,665	153,289,619,665					90,00 Persen	154,854,785,250		
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	6,400,000	29,200,000	29,200,000					100 %	7,040,000		
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1,400,000	24,200,000	24,200,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	ASN	2 Dokumen	1,540,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	ASN	2 Laporan	5,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	135,275,899,500	149,433,908,665	149,433,908,665					100 %	148,803,489,450		
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Yang Terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan 0 Orang/bulan	14 Bulan 0 Orang/bulan	135,270,399,500	149,428,408,665	149,428,408,665	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	ASN	14 Bulan 0 Orang/bulan	148,797,439,450	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Kerja Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	ASN	1 Laporan	2,750,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	ASN	2 Laporan	2,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	ASN	1 Dokumen	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	2 Urusan		2 Urusan	2 Urusan	2 Urusan	4,800,000,000	6,560,733,000	2,737,833,000					2 Urusan	5,280,000,000		
1 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terselenggaranya Pembinaan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2 Kali	0 Orang 2 Kali	4,800,000,000	6,560,733,000	2,737,833,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Masyarakat	0 Orang 2 Kali	5,280,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100 %		100 %	100 %	100 %	524,556,000	483,656,000	483,656,000					100 %	577,011,600		
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya intalasi penerangan kantor				12 Bulan	12 Bulan	1,640,000	1,640,000	1,640,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	ASN	12 Bulan	1,804,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85,000,000	85,000,000	85,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	ASN	1 Paket	93,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berdaya Saing	dan Kuantitas				
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	94,916,000	96,016,000	96,016,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	ASN	12 Bulan	104,407,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	12,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	ASN	12 Bulan	13,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu				0 Laporan 11 Bulan	0 Laporan 11 Bulan	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	ASN	0 Laporan 11 Bulan	12,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya rapat/kunjungan /koordinasi /pertemuan urusan kedinasan				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	320,000,000	260,000,000	260,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	ASN	0 Laporan 12 Bulan	352,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100 %		100 %	100 %	100 %	84,142,000	204,542,000	204,542,000					100 %	92,556,200		
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	21,600,000	42,000,000	42,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	ASN	0 Laporan 12 bulan	23,760,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	57,000,000	157,000,000	157,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	ASN	0 Laporan 12 Bulan	62,700,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	5,542,000	5,542,000	5,542,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	ASN	0 Laporan 12 Bulan	6,096,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Terfasilitasinya kebersihan kantor									Kelurahan	Umum						
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100 %		100 %	100 %	100 %	86,080,000	400,480,000	400,480,000					100 %	94,688,000		
1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Bulan	12 Bulan	85,000,000	123,500,000	123,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	ASN	12 Bulan	93,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket	1 Paket	1,080,000	276,980,000	276,980,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	ASN	1 Paket	1,188,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	100 Persen		54,92 Persen	100 Persen	100 Persen	43,625,917,227	39,783,333,000	69,745,121,384					100 Persen	51,851,763,886		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	%		%	92.07 %	92.07 %	26,623,132,227	23,919,287,000	44,751,987,000					92.07 %	30,374,898,386		
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				6 Sekolah	36 Sekolah	7,623,160,227	5,568,979,000	17,373,979,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Sekolah Dasar	36 Sekolah	8,516,694,186	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				35800 Unit	35800 Unit	895,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Sekolah Dasar	35800 Unit	1,965,260,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapat fasilitasi pengembangan karir Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				60 Orang 0 Orang	60 Orang 0 Orang	225,250,000	244,155,000	9,271,855,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Sekolah Dasar	60 Orang 0 Orang	225,250,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				127 Satuan Pendidikan	127 Satuan Pendidikan	17,499,504,000	17,986,980,000	17,986,980,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Sekolah Dasar	127 Satuan Pendidikan	19,249,454,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Terselenggaranya Supervisi dan Evaluasi Layanan Pendidikan Tingkat SD				0 Dokumen 4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen	147,000,000	119,173,000	119,173,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Sekolah Dasar	0 Dokumen 4 Dokumen	161,700,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Sekolah Dasar	2 Dokumen	110,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				4 Kali 472 Orang	4 Kali 472 Orang	133,218,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Sekolah Dasar	4 Kali 472 Orang	146,539,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka partisipasi kasar SMP	92.16 %		92.08 %	92.1 %	92.1 %	12,008,846,000	12,419,373,000	21,448,461,384						92.1 %	13,730,952,600	
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Sekolah	10 Sekolah	2,320,320,000	4,359,110,000	13,388,198,384	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Sekolah Menengah Pertama	10 Sekolah	2,758,602,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Alokasi Khusus Fisik						
1 01 02 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	325,000,000	43,100,000	43,100,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Sekolah Menengah Pertama	1 Paket	711,370,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Karir Pertama				30 Orang	30 Orang	91,980,000	106,125,000	106,125,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Sekolah Menengah Pertama	30 Orang	91,980,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				36 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	8,927,706,000	7,817,150,000	7,817,150,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Sekolah Menengah Pertama	36 Satuan Pendidikan	9,820,476,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Terselenggaranya Supervisi dan Evaluasi Layanan Pendidikan Tingkat SMP				0 Dokumen 4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen	147,000,000	93,888,000	93,888,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Sekolah Menengah Pertama	0 Dokumen 4 Dokumen	132,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Sekolah Menengah Pertama	2 Dokumen	110,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				4 Kali 385 Orang	4 Kali 385 Orang	96,840,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Sekolah Menengah Pertama	4 Kali 385 Orang	106,524,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka partisipasi kasar PAUD	75 %		70 %	72 %	72 %	4,784,899,000	3,032,353,000	3,132,353,000						72 %	7,515,968,900	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Sekolah	2 Sekolah	283,839,000	602,459,000	702,459,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	PAUD	2 Sekolah	312,222,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				6600 Paket	6600 Paket	165,000,000	161,568,000	161,568,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	PAUD	6600 Paket	357,060,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				3300 Peserta Didik	3300 Peserta Didik	1,980,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	PAUD	3300 Peserta Didik	4,284,720,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				118 Satuan Pendidikan	118 Satuan Pendidikan	2,159,060,000	2,192,510,000	2,192,510,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	PAUD	118 Satuan Pendidikan	2,374,966,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12 Dokumen	12 Dokumen	147,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	PAUD	12 Dokumen	132,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	75,816,000	75,816,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	PAUD	2 Dokumen	55,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keset araan	Jumlah Warga negara dalam pendidikan kesetaraan	325 Orang		325 Orang	325 Orang	325 Orang	209,040,000	412,320,000	412,320,000						325 Orang	229,944,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	209,040,000	412,320,000	412,320,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	PKBM	4 Satuan Pendidikan	229,944,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							350,559,405	350,559,000	350,559,000					366,915,345			
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penduduk usia 10 Tahun keatas yang Terlibat Pertunjukan Seni	30,00 Persen		n/a Persen	20,00 Persen	20,00 Persen	267,000,000	267,000,000	267,000,000					20,00 Persen	275,000,000		
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	70 %		50 %	55 %	55 %	267,000,000	267,000,000	267,000,000					55 %	275,000,000		
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	267,000,000	267,000,000	267,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat	2 Objek	275,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	40,00 Persen		n/a Persen	25,00 Persen	25,00 Persen	83,559,405	83,559,000	83,559,000					25,00 Persen	91,915,345		
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Terdaftar	10 Objek		2 Objek	2 Objek	2 Objek	83,559,405	83,559,000	83,559,000					2 Objek	91,915,345		
2 22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				2 Objek	2 Objek	83,559,405	83,559,000	83,559,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat	2 Objek	91,915,345	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							74,975,819,717	67,614,765,735	79,009,323,557					82,427,293,422			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	33,248,522,660	34,361,458,360	34,361,458,360					90,00 Persen	37,797,604,196		
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 %		90 %	90 %	90 %	30,516,800	42,229,600	42,229,600					90 %	46,452,560		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	12,005,600	19,220,000	19,220,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	2 Dokumen	21,142,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,500,000	6,752,000	6,752,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	1 Laporan	7,427,200	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	13,011,200	16,257,600	16,257,600	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	4 Laporan	17,883,360	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 %		90 %	90 %	90 %	31,634,575,800	32,839,360,900	32,839,360,900					90 %	36,123,296,990		
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	31,628,525,800	32,827,310,900	32,827,310,900	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	14 bulan	36,110,041,990	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,750,000	4,750,000	4,750,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	1 Laporan	5,225,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,200,000	4,200,000	4,200,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	2 Laporan	4,620,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Laporan	1 Laporan	1,100,000	3,100,000	3,100,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	1 Laporan	3,410,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 %		90 %	90 %	90 %	785,443,860	775,657,860	775,657,860					90 %	853,223,646		
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	6,122,600	6,122,600	6,122,600	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	12 Bulan	6,734,860	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	120,000,000	120,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	1 Paket	132,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	120,435,260	120,435,260	120,435,260	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	12 bulan	132,478,786	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	324,786,000	197,000,000	197,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	2 Dokumen	216,700,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	12,100,000	12,100,000	12,100,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	11 Laporan	13,310,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	12 bulan	297,000,000	320,000,000	320,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	12 bulan	352,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %		90 %	90 %	90 %	99,950,000	155,950,000	155,950,000					90 %	171,545,000		
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				75 Unit	75 Unit	99,950,000	155,950,000	155,950,000	Kab. Pesisir Barat, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas	Aparatur	75 Unit	171,545,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Berdaya Saing	dan Kuantitas				
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %		90 %	90 %	90 %	352,378,200	202,631,000	202,631,000					90 %	222,894,100		
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	135,740,000	96,000,000	96,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	12 Laporan	105,600,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	207,000,000	97,000,000	97,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	2 Laporan	106,700,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	9,638,200	9,631,000	9,631,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	12 Bulan	10,594,100	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %		90 %	90 %	90 %	345,658,000	345,629,000	345,629,000					90 %	380,191,900		
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	309,058,000	309,029,000	309,029,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	15 Unit	339,931,900	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan	12 Bulan	36,600,000	36,600,000	36,600,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	12 Bulan	40,260,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	100 Persen		51,50 Persen	100 Persen	100 Persen	40,407,766,457	31,647,450,435	38,808,108,257					100 Persen	42,741,931,592		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	100 %	24,023,869,957	11,199,250,400	18,359,908,222					100 %	20,195,899,044		
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Laporan	1 Laporan	15,186,899,810	1,083,500,747	8,244,158,569	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	9,068,574,426	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2,857,540,000	1,336,623,000	1,336,623,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	1,470,285,300	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	482,831,000	3,275,020,394	3,275,020,394	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	3,602,522,433	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	3,367,683,989	3,976,658,259	3,976,658,259	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	4 Dokumen	4,374,324,085	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,128,915,158	1,527,448,000	1,527,448,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Paket	1,680,192,800	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	100 %	15,996,261,600	20,029,598,112	20,029,598,112					100 %	22,085,570,433		
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3 Laporan	3 Laporan	490,110,000	429,570,400	429,570,400	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	472,527,440	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Laporan	1 Laporan	161,804,600	64,091,400	64,091,400	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	70,500,540	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	29,679,000	38,560,500	38,560,500	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	38,560,500	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	864,844,100	304,739,800	304,739,800	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	335,213,780	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	194,355,500	193,365,700	193,365,700	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	212,702,270	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Laporan	3 Laporan	92,217,200	353,486,400	353,486,400	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	445,703,600	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Laporan	2 Laporan	172,236,400	70,857,946	70,857,946	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	77,943,741	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				3 Laporan	3 Laporan	94,749,000	164,402,350	164,402,350	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	180,842,585	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Laporan	8 Laporan	519,038,800	1,461,267,541	1,461,267,541	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	8 Laporan	1,607,394,295	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	8,564,204,000	12,439,695,075	12,439,695,075	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	13,683,664,582	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Laporan	1 Laporan	3,900,000,000	4,100,000,000	4,100,000,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	4,510,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	267,896,000	77,940,000	77,940,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	85,734,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten				0 Unit 1 Laporan	0 Unit 1 Laporan	606,067,000	292,561,000	292,561,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	0 Unit 1 Laporan	321,817,100	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Laporan	1 Laporan	39,060,000	39,060,000	39,060,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	42,966,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100 %		100 %	100 %	100 %	387,634,900	418,601,923	418,601,923					100 %	460,462,115		
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	173,408,000	178,408,000	178,408,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	3 Dokumen	196,248,800	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	214,226,900	240,193,923	240,193,923	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	1 Dokumen	264,213,315	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Kesehatan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	100 Persen	175,622,400	1,479,762,200	5,713,662,200					100 Persen	1,627,723,420		
1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	100 %	29,308,000	29,308,000	29,308,000					100 %	32,223,800		
1 02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				95 Dokumen	95 Dokumen	29,308,000	29,308,000	29,308,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	95 Dokumen	32,223,800	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	100 %	46,294,600	46,294,600	46,294,600					100 %	50,924,060		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Laporan	1 Laporan	46,294,600	46,294,600	46,294,600	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	1 Laporan	50,924,060	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	100 %	100,019,800	1,404,159,600	5,638,059,600						100 %	1,544,575,560	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				4 Laporan	4 Laporan	100,019,800	1,404,159,600	5,638,059,600	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	1,544,575,560	Dinas Kesehatan
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tingkat pengawasan dan tindak lanjut terhadap perizinan usaha	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	100 Persen	125,231,000	14,930,940	14,930,940						100 Persen	132,254,034	
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 %		100 %	100 %	100 %	19,931,000	14,930,940	14,930,940						100 %	16,424,034	
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Laporan	1 Laporan	19,931,000	14,930,940	14,930,940	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	16,424,034	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	TerlaksananyaPenerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100 %		100 %	100 %	100 %	105,300,000	0	0						100 %	115,830,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	105,300,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	115,830,000	Dinas Kesehatan
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase puskesmas/fasilitas kesehatan yang melaksanakan kegiatan promotif dan preventif	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	100 Persen	1,018,677,200	111,163,800	111,163,800					100 Persen	127,780,180		
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	100 %	1,018,677,200	111,163,800	111,163,800					100 %	127,780,180		
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Laporan	1 Laporan	1,018,677,200	111,163,800	111,163,800	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur, dan Masyarakat	1 Laporan	127,780,180	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,496,548,000	2,509,304,250	2,509,304,250						2,760,234,675		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							2,496,548,000	2,464,104,250	2,464,104,250						2,710,514,675		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	18,112,000	18,112,000						19,923,200		
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0	18,112,000	18,112,000	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	19,923,200	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	100 %	2,496,548,000	2,445,992,250	2,445,992,250					100 %	2,690,591,475		
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Laporan	1 Laporan	0	95,110,000	95,110,000	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	104,621,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	10,290,000	10,290,000	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	11,319,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	4,860,000	4,860,000	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	5,346,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Laporan	1 Laporan	0	233,827,000	233,827,000	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	257,209,700	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Laporan	1 Laporan	0	38,300,000	38,300,000	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	42,130,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	33,680,000	33,680,000	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	37,048,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	11,720,000	11,720,000	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	12,892,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				4 Laporan	4 Laporan	0	50,227,500	50,227,500	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	55,250,250	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Laporan	5 Laporan	0	198,210,000	198,210,000	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	5 Laporan	218,031,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	1,555,030,000	1,555,030,000	1,555,030,000	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	1,710,533,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Laporan	1 Laporan	941,518,000	213,624,000	213,624,000	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	234,986,400	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Laporan	1 Laporan	0	1,113,750	1,113,750	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	1,225,125	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							0	45,200,000	45,200,000							49,720,000	
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	45,200,000	45,200,000							49,720,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Laporan	1 Laporan	0	45,200,000	45,200,000	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	49,720,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,331,326,000	1,422,512,000	1,422,512,000						1,564,763,200		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,331,326,000	1,411,562,000	1,411,562,000							1,552,718,200	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	15,085,500	15,085,500							16,594,050	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0	15,085,500	15,085,500	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	16,594,050	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	100 %	1,331,326,000	1,396,476,500	1,396,476,500						100 %	1,536,124,150	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Laporan	1 Laporan	0	69,515,000	69,515,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	76,466,500	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	5,840,000	5,840,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	6,424,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	7,080,000	7,080,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	7,788,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0	216,981,500	216,981,500	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	238,679,650	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Laporan	1 Laporan	0	10,060,000	10,060,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	11,066,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	30,355,000	30,355,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	33,390,500	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	6,360,000	6,360,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	6,996,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				4 Laporan	4 Laporan	0	64,040,000	64,040,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	70,444,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Laporan	5 Laporan	0	176,940,000	176,940,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	5 Laporan	194,634,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	631,970,000	631,970,000	631,970,000	Kab. Pesisir Barat,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	695,167,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil	Berkualitas Dan Berdaya Saing	dari Sisi Kualitas dan Kuantitas				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Laporan	1 Laporan	699,356,000	177,335,000	177,335,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	195,068,500	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							0	10,950,000	10,950,000						12,045,000		
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	10,950,000	10,950,000						12,045,000		
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Laporan	1 Laporan	0	10,950,000	10,950,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	12,045,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							703,684,000	766,986,500	766,986,500					843,685,150			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							703,684,000	743,946,500	743,946,500						818,341,150		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	9,634,000	9,634,000						10,597,400		
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang				1 Laporan	1 Laporan	0	9,634,000	9,634,000	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	10,597,400	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Disediakan										Khusus Non Fisik						
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	100 %	703,684,000	734,312,500	734,312,500						100 %	807,743,750	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Laporan	1 Laporan	0	28,710,000	28,710,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	31,581,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	17,370,000	17,370,000	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	19,107,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	7,640,000	7,640,000	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	8,404,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0	106,473,500	106,473,500	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	117,120,850	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Laporan	1 Laporan	0	6,420,000	6,420,000	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	7,062,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	39,015,000	39,015,000	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	42,916,500	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	3,840,000	3,840,000	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	4,224,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Khusus Non Fisik						
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				4 Laporan	4 Laporan	0	57,600,000	57,600,000	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	63,360,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Laporan	5 Laporan	0	93,610,000	93,610,000	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	5 Laporan	102,971,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	260,000,000	260,000,000	260,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	286,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Laporan	1 Laporan	443,684,000	113,634,000	113,634,000	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	124,997,400	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							0	23,040,000	23,040,000						25,344,000		
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	23,040,000	23,040,000						25,344,000		
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Laporan	1 Laporan	0	23,040,000	23,040,000	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	25,344,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,588,576,000	1,683,972,500	1,683,972,500						1,852,369,750		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,588,576,000	1,633,332,500	1,633,332,500							1,796,665,750	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	14,973,500	14,973,500							16,470,850	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0	14,973,500	14,973,500	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	16,470,850	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	100 %	1,588,576,000	1,618,359,000	1,618,359,000						100 %	1,780,194,900	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Laporan	1 Laporan	0	59,440,000	59,440,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	65,384,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	62,640,000	62,640,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	68,904,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	19,960,000	19,960,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	21,956,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0	171,724,000	171,724,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	188,896,400	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Laporan	1 Laporan	0	36,590,000	36,590,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	40,249,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	28,140,000	28,140,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	30,954,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	4,400,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				4 Dokumen	4 Dokumen	0	65,030,000	65,030,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	4 Dokumen	71,533,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Laporan	5 Laporan	0	97,670,000	97,670,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	5 Laporan	107,437,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	896,470,000	896,470,000	896,470,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	986,117,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Laporan	1 Laporan	692,106,000	176,495,000	176,495,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	194,144,500	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Laporan	1 Laporan	0	200,000	200,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	220,000	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							0	50,640,000	50,640,000						55,704,000		
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	50,640,000	50,640,000						55,704,000		
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Laporan	1 Laporan	0	50,640,000	50,640,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	55,704,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,745,344,000	2,780,720,000	2,780,720,000					3,058,792,000			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							2,745,344,000	2,769,840,000	2,769,840,000						3,046,824,000		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	18,195,500	18,195,500						20,015,050		
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0	18,195,500	18,195,500	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	20,015,050	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	100 %	2,745,344,000	2,751,644,500	2,751,644,500					100 %	3,026,808,950		
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Laporan	1 Laporan	0	71,680,000	71,680,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	78,848,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	47,400,000	47,400,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	52,140,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	27,480,000	27,480,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	30,228,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0	223,622,000	223,622,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	245,984,200	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Laporan	1 Laporan	0	31,440,000	31,440,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	34,584,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	32,510,000	32,510,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	35,761,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	36,480,000	36,480,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	40,128,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				4 Laporan	4 Laporan	0	98,880,000	98,880,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	108,768,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Laporan	3 Laporan	0	123,866,000	123,866,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	136,252,600	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	1,828,340,000	1,828,340,000	1,828,340,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	2,011,174,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Laporan	1 Laporan	917,004,000	224,946,500	224,946,500	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	247,441,150	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							0	10,880,000	10,880,000						11,968,000		
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	10,880,000	10,880,000						11,968,000		
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Laporan	1 Laporan	0	10,880,000	10,880,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	11,968,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Kabupaten/Kota																	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,503,998,000	2,530,680,500	2,530,680,500						2,783,748,550		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							2,503,998,000	2,509,080,500	2,509,080,500						2,759,988,550		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	17,919,500	17,919,500						19,711,450		
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0	17,919,500	17,919,500	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	19,711,450	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	100 %	2,503,998,000	2,491,161,000	2,491,161,000						100 %	2,740,277,100	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Laporan	1 Laporan	0	54,130,000	54,130,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	59,543,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	5,490,000	5,490,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	6,039,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	20,360,000	20,360,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	22,396,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0	205,657,500	205,657,500	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	226,223,250	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Laporan	1 Laporan	0	36,170,000	36,170,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	39,787,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	33,480,500	33,480,500	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	36,828,550	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	19,350,000	19,350,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	21,285,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				3 Laporan	3 Laporan	0	91,840,000	91,840,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	101,024,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Laporan	5 Laporan	0	225,130,000	225,130,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	5 Laporan	247,643,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	1,587,744,000	1,587,744,000	1,587,744,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	1,746,518,400	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Laporan	1 Laporan	916,254,000	211,259,000	211,259,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	232,384,900	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Laporan	1 Laporan	0	550,000	550,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	605,000	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							0	21,600,000	21,600,000							23,760,000	
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	21,600,000	21,600,000							23,760,000	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Laporan	1 Laporan	0	21,600,000	21,600,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	23,760,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,322,210,000	2,355,145,750	2,355,145,750						2,590,660,325		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							2,322,210,000	2,332,665,750	2,332,665,750							2,565,932,325	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	17,155,500	17,155,500							18,871,050	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0	17,155,500	17,155,500	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	18,871,050	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	100 %	2,322,210,000	2,315,510,250	2,315,510,250					100 %	2,547,061,275		
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Laporan	1 Laporan	0	130,950,000	130,950,000	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	144,045,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	78,930,000	78,930,000	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	86,823,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	6,160,000	6,160,000	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	6,776,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0	204,793,250	204,793,250	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	225,272,575	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Laporan	1 Laporan	0	8,500,000	8,500,000	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	9,350,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	30,870,000	30,870,000	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	33,957,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	11,880,000	11,880,000	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	13,068,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				5 Laporan	5 Laporan	0	110,680,000	110,680,000	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	5 Laporan	121,748,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Laporan	5 Laporan	0	73,180,000	73,180,000	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	5 Laporan	80,498,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	1,458,400,000	1,458,400,000	1,458,400,000	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	1,604,240,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Laporan	1 Laporan	863,810,000	201,167,000	201,167,000	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	221,283,700	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							0	22,480,000	22,480,000							24,728,000	
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	22,480,000	22,480,000							24,728,000	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Laporan	1 Laporan	0	22,480,000	22,480,000	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	24,728,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,661,512,000	1,689,120,500	1,689,120,500						1,849,687,050		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN							1,661,512,000	1,681,200,500	1,681,200,500							1,840,975,050	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	16,313,000	16,313,000							17,944,300	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0	16,313,000	16,313,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	17,944,300	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	100 %	1,661,512,000	1,664,887,500	1,664,887,500						100 %	1,823,030,750	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Laporan	1 Laporan	0	83,465,000	83,465,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	83,465,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	8,880,000	8,880,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	9,768,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	7,480,000	7,480,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	8,228,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0	237,532,000	237,532,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	261,286,200	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Laporan	1 Laporan	0	17,730,000	17,730,000	Kab. Pesisir Barat,	Dana Transfer Khusus-			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	19,503,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Lingkungan										Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	32,350,000	32,350,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	35,585,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	6,480,000	6,480,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	7,128,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				5 Laporan	5 Laporan	0	73,142,500	73,142,500	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	5 Laporan	80,456,750	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Laporan	5 Laporan	0	167,290,000	167,290,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	5 Laporan	184,019,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	830,762,000	830,762,000	830,762,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	913,838,200	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Laporan	1 Laporan	830,750,000	192,276,000	192,276,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	211,503,600	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Laporan	1 Laporan	0	7,500,000	7,500,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	8,250,000	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA							0	7,920,000	7,920,000						8,712,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	MANUSIA KESEHATAN																	
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	7,920,000	7,920,000							8,712,000	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Laporan	1 Laporan	0	7,920,000	7,920,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	8,712,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							4,687,055,000	4,699,128,500	4,699,128,500							5,169,041,350	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							4,687,055,000	4,690,488,500	4,690,488,500							5,159,537,350	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	18,181,000	18,181,000							19,999,100	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0	18,181,000	18,181,000	Kab. Pesisir Barat, Bangkunan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	19,999,100	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	100 %	4,687,055,000	4,672,307,500	4,672,307,500						100 %	5,139,538,250	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Laporan	1 Laporan	0	101,530,000	101,530,000	Kab. Pesisir Barat, Bangkunan, Semua Kelurahan				Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	111,683,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	174,855,000	174,855,000	Kab. Pesisir Barat, Bangkunan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	192,340,500	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	14,240,000	14,240,000	Kab. Pesisir Barat, Bangkunan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	15,664,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0	206,773,000	206,773,000	Kab. Pesisir Barat, Bangkunan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	227,450,300	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Laporan	1 Laporan	0	37,660,000	37,660,000	Kab. Pesisir Barat, Bangkunan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	41,426,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	29,580,000	29,580,000	Kab. Pesisir Barat, Bangkunan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	32,538,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	8,428,500	8,428,500	Kab. Pesisir Barat, Bangkunan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	9,271,350	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				4 Laporan	4 Laporan	0	63,325,000	63,325,000	Kab. Pesisir Barat, Bangkunan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	69,657,500	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Laporan	4 Laporan	0	78,035,000	78,035,000	Kab. Pesisir Barat, Bangkunan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	85,838,500	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	3,743,600,000	3,743,600,000	3,743,600,000	Kab. Pesisir Barat, Bangkunan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	4,117,960,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Laporan	1 Laporan	943,455,000	214,281,000	214,281,000	Kab. Pesisir Barat, Bangkunan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	235,709,100	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							0	8,640,000	8,640,000							9,504,000	
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	8,640,000	8,640,000							9,504,000	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Laporan	1 Laporan	0	8,640,000	8,640,000	Kab. Pesisir Barat, Bangkunan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	9,504,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,441,959,000	1,571,199,500	1,571,199,500						1,770,061,150		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,441,959,000	1,559,710,500	1,559,710,500							1,757,423,250	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP							0	14,963,000	14,963,000							58,201,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0	14,963,000	14,963,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	58,201,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	100 %	1,441,959,000	1,544,747,500	1,544,747,500						100 %	1,699,222,250	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Laporan	1 Laporan	0	52,910,000	52,910,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	58,201,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Laporan	1 Laporan	0	20,900,000	20,900,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	22,990,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	5,760,000	5,760,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	6,336,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0	170,307,000	170,307,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	187,337,700	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Laporan	1 Laporan	0	9,540,000	9,540,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	10,494,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	124,880,000	124,880,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	137,368,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Khusus Non Fisik						
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	20,259,000	20,259,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	22,284,900	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				4 Laporan	4 Laporan	0	48,760,000	48,760,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	53,636,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Laporan	5 Laporan	0	131,000,000	131,000,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	5 Laporan	144,100,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	784,200,000	784,200,000	784,200,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	862,620,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Laporan	1 Laporan	657,759,000	176,231,500	176,231,500	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	193,854,650	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							0	11,489,000	11,489,000							12,637,900	
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	11,489,000	11,489,000							12,637,900	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Laporan	1 Laporan	0	11,489,000	11,489,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	12,637,900	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											Non Fisik						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,155,431,000	1,278,649,000	1,278,649,000					1,406,513,900			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,155,431,000	1,258,969,000	1,258,969,000					1,384,865,900			
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	14,467,500	14,467,500					15,914,250			
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0	14,467,500	14,467,500	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	15,914,250 Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	100 %	1,155,431,000	1,244,501,500	1,244,501,500					100 %	1,368,951,650		
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Laporan	1 Laporan	0	40,846,000	40,846,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	44,930,600 Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	43,035,000	43,035,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	47,338,500 Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Laporan	2 Laporan	0	5,840,000	5,840,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	6,424,000 Dinas Kesehatan	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0	195,947,500	195,947,500	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	215,542,250	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Laporan	1 Laporan	0	18,300,000	18,300,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	20,130,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	26,000,000	26,000,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	28,600,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Laporan	1 Laporan	0	14,300,000	14,300,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	15,730,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				5 Laporan	5 Laporan	0	78,590,000	78,590,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	5 Laporan	86,449,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Laporan	5 Laporan	0	127,955,000	127,955,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	5 Laporan	140,750,500	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	522,637,000	522,637,000	522,637,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	574,900,700	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Laporan	1 Laporan	632,794,000	169,451,000	169,451,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	186,396,100	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Laporan	1 Laporan	0	1,600,000	1,600,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	1,760,000	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							0	19,680,000	19,680,000						21,648,000		
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	19,680,000	19,680,000						21,648,000		
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Laporan	1 Laporan	0	19,680,000	19,680,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		1 Laporan	21,648,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							177,482,352,222	167,145,533,500	111,050,787,294					148,196,698,189			
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	5,342,895,805	4,958,800,300	4,920,960,300					90,00 Persen	5,678,190,920		
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	21,019,900	24,480,000	24,480,000					100 %	28,021,890		
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	17,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil				1 Laporan	1 Laporan	10,019,900	9,480,000	9,480,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat	1 Laporan	11,021,890	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Kelurahan		Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Daerah			
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	3,188,581,110	2,621,810,500	2,621,810,500					100 %	2,883,991,550		
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				448 Orang/bulan	448 Orang/bulan	3,176,481,110	2,609,710,500	2,609,710,500	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	448 Orang/bulan	2,870,681,550	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,500,000	5,500,000	5,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6,050,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4,400,000	4,400,000	4,400,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4,840,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	2,200,000	2,200,000	2,200,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2,420,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %		100 %	100 %	100 %	149,382,200	204,000,000	204,000,000					100 %	224,400,000		
1 03 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	149,382,200	204,000,000	204,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	224,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kepegawaian dan sumber daya manusia	100 %		100 %	100 %	100 %	216,592,870	83,000,000	83,000,000					100 %	91,300,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				93 Paket	93 Paket	116,592,870	33,000,000	33,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	93 Paket	36,300,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	20 Orang	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100 %		100 %	100 %	100 %	452,335,625	748,409,800	889,341,800						100 %	868,567,480	
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	8,943,000	3,270,000	0	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	11 Paket	3,597,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				41 Paket	41 Paket	88,078,625	104,564,800	145,761,800	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	41 Paket	160,337,980	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	110,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket	27,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	105,314,000	82,575,000	143,580,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	8 Paket	90,832,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	318,000,000	360,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	349,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	110,000,000	215,000,000	215,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	236,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100 %		100 %	100 %	100 %	225,500,000	410,000,000	285,000,000					100 %	616,000,000		
1 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	150,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	50 Unit	165,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	75,500,000	410,000,000	285,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	1 Unit	451,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung kantor	100 %		100 %	100 %	100 %	431,784,100	374,400,000	318,468,000					100 %	411,840,000		
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	77,000,000	76,000,000	43,018,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	83,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	288,200,000	223,200,000	143,200,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	245,520,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	66,584,100	75,200,000	132,250,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	82,720,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100 %		100 %	100 %	100 %	657,700,000	492,700,000	494,860,000					100 %	554,070,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Urusan Pemerintahan Daerah																	
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	326,700,000	357,700,000	359,860,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	9 Unit	393,470,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	320,000,000	135,000,000	135,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	5 Unit	148,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan	12 Bulan	11,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12,100,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah	50,00 Persen		27,00 Persen	35,00 Persen	35,00 Persen	6,842,177,518	9,525,190,936	2,542,487,606						35,00 Persen	12,897,710,030	
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai	50 %		27 %	35 %	35 %	3,421,088,759	7,915,190,936	2,287,952,306						35 %	11,126,710,030	
1 03 02 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1 KM	1 KM	1,221,088,759	7,915,190,936	2,287,952,306	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Sarana dan prasarana SDA Daerah	1 KM	8,706,710,030	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.01 18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0.15 KM	0.15 KM	1,100,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Sarana dan prasarana SDA Daerah	0.15 KM	1,210,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				100 %	100 %	1,100,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Sarana dan prasarana SDA Daerah	100 %	1,210,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional				Daerah	
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	50 %		27 %	35 %	35 %	3,421,088,759	1,610,000,000	254,535,300						35 %	1,771,000,000	
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				3.6 KM	3.6 KM	1,771,088,759	1,410,000,000	254,535,300	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Sarana dan prasarana SDA Daerah	3.6 KM	1,551,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara Tersedianya Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Irigasi				0 KM 100 %	0 KM 100 %	1,650,000,000	200,000,000	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan Sarana dan prasarana SDA Daerah	0 KM 100 %	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap sumber daya air yang sehat dan aman	45,00 Persen		33,00 Persen	40,00 Persen	40,00 Persen	1,274,128,691	1,300,000,000	600,000,000						40,00 Persen	1,731,541,560	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	45 %		33 %	40 %	40 %	1,274,128,691	1,300,000,000	600,000,000						40 %	1,731,541,560	
1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	274,128,691	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sumber daya air yang sehat dan aman (SPAM)	1 Dokumen	301,541,560	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				600 SR	600 SR	1,000,000,000	1,300,000,000	600,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sumber daya air yang sehat	600 SR	1,430,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														dan aman (SPAM)				
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	cakupan pelayanan sanitasi sub sektor air limbah domestik	%		%	30 %	30 %	1,074,128,691	686,096,700	386,096,700					30 %	1,221,247,930		
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air Limbah Domestik) Layak dan aman	%		%	69 %	69 %	1,074,128,691	686,096,700	386,096,700					69 %	1,221,247,930		
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	424,128,691	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi Layak dan aman	1 Dokumen	466,541,560	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 05 2.01 03	Pembangunan/Pen yediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				250 Rumah Tangga	250 Rumah Tangga	650,000,000	686,096,700	386,096,700	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi Layak dan aman	250 Rumah Tangga	754,706,370	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pelayanan sanitasi sub sektor drainase lingkungan	%		%	30 %	30 %	2,142,677,375	1,570,144,700	421,848,030					30 %	1,727,159,170		
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	45 %		n/a %	30 %	30 %	2,142,677,375	1,570,144,700	421,848,030					30 %	1,727,159,170		
1 03 06 2.01 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				500 M	500 M	2,142,677,375	1,570,144,700	421,848,030	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Persentase drainase dalam kondisi baik/pemb uangan aliran air tidak tersumbat	500 M	1,727,159,170	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Cakupan infrastruktur di kawasan pemukiman	%		%	25 %	25 %	1,491,949,905	0	0						25 %	1,641,144,895	
1 03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan pemukiman yang dapat dilalui kendaraan roda 4(empat)	40 %		22 %	25 %	25 %	1,491,949,905	0	0						25 %	1,641,144,895	
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Sistem Jaringan	4 Sistem Jaringan	1,491,949,905	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan infrastrukturu di kawasan pemukiman	4 Sistem Jaringan	1,641,144,895	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	tersedianya prasaran, sarana dan utilitas dasar (PSU) perkantoran pemerintah daerah kabupaten dalam skala mantap	%		%	60 %	60 %	146,671,401,896	73,498,523,387	43,085,205,681						60 %	47,393,726,249	
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Ketersediaannya Gedung Pemerintah	90 %		51 %	60 %	60 %	146,671,401,896	73,498,523,387	43,085,205,681						60 %	47,393,726,249	
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	16 unit	146,671,401,896	73,498,523,387	43,085,205,681	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Persentase Ketersediaannya Gedung Pemerintah	16 unit	47,393,726,249	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata	%		%	50 %	50 %	3,675,156,555	0	805,559,000						50 %	4,042,672,210	
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di		5,5 %		4,57 %	5 %	5 %	3,675,156,555	0	805,559,000						5 %	4,042,672,210	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Daerah Kabupaten/Kota	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan																
1 03 09 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	470,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawas an perkotaan	1 Dokumen	517,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				3 Kawasan	3 Kawasan	3,205,156,555	0	805,559,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawas an perkotaan	3 Kawasan	3,525,672,210	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) Tingkat Kemantapan Jalan	% 43,00 Persen		% 39,03 Persen	41.5 % 41,50 Persen	41.5 % 41,50 Persen	8,179,940,306	73,264,950,677	55,908,200,677						41.5 % 41,50 Persen	69,199,295,745	
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%		%	41.5 %	41.5 %	8,179,940,306	73,264,950,677	55,908,200,677						41.5 %	69,199,295,745	
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				1 Dokumen	1 Dokumen	770,000,000	2,477,158,600	2,004,658,600	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	1 Dokumen	2,724,874,460	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				0.6 KM	0.6 KM	1,259,940,306	11,689,373,450	8,532,873,450	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	0.6 KM	12,858,310,795	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				0.75 KM	0.75 KM	1,500,000,000	28,732,345,400	27,207,095,400	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	0.75 KM	31,605,579,940	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik						
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				0.83 KM	3 KM	1,500,000,000	25,864,645,060	14,958,145,060	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	3 KM	16,453,959,566	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				1.1 KM	1.1 KM	550,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	1.1 KM	605,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				7.5 M	7.5 M	1,500,000,000	3,696,000,000	2,400,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	7.5 M	4,065,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				5 M	5 M	1,100,000,000	805,428,167	805,428,167	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	5 M	885,970,984	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Jasa Konstruksi yang handal dan dapat diandalkan	50,00 Persen		n/a Persen	27,50 Persen	27,50 Persen	473,407,540	469,877,000	508,479,500						27,50 Persen	604,864,700	
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlatihnya tenaga terampil kontruksi	210 Orang		50 Orang	50 Orang	50 Orang	170,000,000	146,100,000	146,100,000						50 Orang	160,710,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				50 Orang	50 Orang	170,000,000	146,100,000	146,100,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Persentase terlatihnya tenaga terampil kontruksi	50 Orang	160,710,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi	100 %		100 %	100 %	100 %	200,000,000	118,500,000	118,500,000					100 %	218,350,000		
1 03 11 2.02 07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Peng gunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan				1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000	118,500,000	118,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Jasa kontruksi yang handal dan dapat diandalkan	1 Dokumen	130,350,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 2.02 08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Jasa kontruksi yang handal dan dapat diandalkan	1 Dokumen	88,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pengawasan dan evaluasi pekerjaan fisik	100 %		100 %	100 %	100 %	103,407,540	205,277,000	243,879,500					100 %	225,804,700		
1 03 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				3 Laporan	3 Laporan	103,407,540	205,277,000	243,879,500	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Jasa kontruksi yang handal dan dapat diandalkan	3 Laporan	225,804,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Cakupan informasi Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rinciannya melalui peta digital dan peta analog	%		%	20 %	20 %	314,487,940	1,871,949,800	1,871,949,800					20 %	2,059,144,780		
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	50 %		n/a %	20 %	20 %	78,621,985	50,000,000	50,000,000					20 %	55,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	78,621,985	50,000,000	50,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan informasi Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rinciannya melalui peta digital dan peta analog	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian materi teknis dari bantuan teknis RDTR	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	78,621,985	951,949,800	951,949,800					1 Dokumen	1,047,144,780		
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	78,621,985	951,949,800	951,949,800	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan informasi Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rinciannya melalui peta digital dan peta analog	5 Dokumen	1,047,144,780	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	78,621,985	490,000,000	490,000,000					12 Bulan	539,000,000		
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	39,310,993	175,000,000	175,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan informasi Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rinciannya melalui peta digital dan peta analog	1 Dokumen	192,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	39,310,992	315,000,000	315,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan informasi Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rinciannya melalui peta digital	1 Dokumen	346,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														dan peta analog				
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan terhadap RTRW	50 %		n/a %	20 %	20 %	78,621,985	380,000,000	380,000,000					20 %	418,000,000		
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	78,621,985	380,000,000	380,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Cakupan informasi Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rinciannya melalui peta digital dan peta analog	1 Dokumen	418,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							8,459,930,875	3,793,727,305	3,793,727,305					4,230,809,116			
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	2,388,393,748	2,298,109,000	2,298,109,000					90,00 Persen	2,625,029,900		
1 04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	60 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	4,398,000	4,398,000	4,398,000					12 bulan	4,837,800		
1 04 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	898,000	898,000	898,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	2 Dokumen	987,800	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	4 Laporan	3,850,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	60 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	1,535,722,300	1,771,177,400	1,771,177,400					12 bulan	1,948,295,140		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	1,529,422,300	1,764,877,400	1,764,877,400	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	14 bulan	1,941,365,140	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	1 Laporan	2,200,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	12 Laporan	3,850,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	800,000	800,000	800,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	1 Dokumen	880,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	60 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	20,000,000	20,000,000	20,000,000						12 bulan	22,000,000	
1 04 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	4 Orang	22,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	60 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	279,626,448	275,369,600	291,009,600						12 bulan	302,906,560	
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				89 Paket	0 Paket	9,066,200	4,809,600	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	0 Paket	5,290,560	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	1 Paket	27,500,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50,160,248	50,160,000	50,609,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah	Aparatur	12 Paket	55,176,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				144 Dokumen	144 Dokumen	14,400,000	14,400,000	14,400,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah	Aparatur	144 Dokumen	15,840,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah	Aparatur	11 Laporan	12,100,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	55 Laporan	170,000,000	170,000,000	190,000,600	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah	Aparatur	55 Laporan	187,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pendukung Kinerja	60 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	256,866,000	71,400,000	71,400,000						12 bulan	127,650,000	
1 04 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				45 Unit	45 Unit	49,110,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah	Aparatur	45 Unit	49,110,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	207,756,000	71,400,000	71,400,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah	Aparatur	9 Unit	78,540,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	60 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	179,361,000	65,774,000	65,054,000						12 bulan	120,351,400	
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah	Aparatur	12 Laporan	48,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum	Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
1 04 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	122,000,000	57,000,000	57,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	3 Unit	62,700,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9,361,000	8,774,000	8,054,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	12 Laporan	9,651,400	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang dalam Kondisi Baik	60 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	112,420,000	89,990,000	75,070,000					12 bulan	98,989,000		
1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	64,000,000	64,000,000	64,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	2 Unit	70,400,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	0 Unit	1,000,000	1,000,000	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	0 Unit	1,100,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	16 Unit	47,420,000	24,990,000	11,070,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	16 Unit	27,489,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							327,281,364	189,850,000	189,850,000						169,434,080		
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							0	0	100,000,000						0		
1 04 02 2.01 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota					5 Dokumen	0	0	100,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana				5 Dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah									Semua Kelurahan	Alokasi Umum					Permukiman	
1 04 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	60 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	70,599,080	0	0					12 bulan	70,599,080		
1 04 02 2.02 04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				5 Orang	5 Orang	70,599,080	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Masyarakat /Fasilitator	5 Orang	70,599,080	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	60 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	60,000,000	100,000,000	0					12 bulan	0		
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit	0 Unit	60,000,000	100,000,000	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Masyarakat	0 Unit	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Cakupan Pengelolaan Rumah Susun	60 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	40,572,676	23,052,000	23,052,000					12 bulan	25,357,200		
1 04 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				12 Laporan	12 Laporan	40,572,676	23,052,000	23,052,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	12 Laporan	25,357,200	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	60 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	156,109,608	66,798,000	66,798,000					12 bulan	73,477,800		
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				27 Laporan	27 Laporan	156,109,608	66,798,000	66,798,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur dan Masyarakat	27 Laporan	73,477,800	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Permukiman Layak Huni	50,00 Persen		n/a Persen	38,75 Persen	38,75 Persen	561,818,800	307,173,400	307,173,400					38,75 Persen	337,890,740		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	60 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	561,818,800	307,173,400	307,173,400						12 bulan	337,890,740	
1 04 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	364,120,000	124,430,000	124,430,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	136,873,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03 2.02 08	Penyusunan/Revie w/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi				2 Dokumen	2 Dokumen	197,698,800	182,743,400	182,743,400	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Masyarakat	2 Dokumen	201,017,740	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	persentase permukiman yang tertata	60,00 Persen		n/a Persen	40,00 Persen	40,00 Persen	4,509,076,963	211,132,000	211,132,000						40,00 Persen	232,245,200	
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	60 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	4,509,076,963	211,132,000	211,132,000						12 bulan	232,245,200	
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				8 Unit Rumah	8 Unit Rumah	4,509,076,963	211,132,000	211,132,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Masyarakat	8 Unit Rumah	232,245,200	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana umum	60,00 Persen		n/a Persen	40,00 Persen	40,00 Persen	673,360,000	787,462,905	787,462,905						40,00 Persen	866,209,196	
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan Yang Sudah dilengkapi PSU	60 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	673,360,000	787,462,905	787,462,905						12 bulan	866,209,196	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1 Lokasi	1 Lokasi	673,360,000	787,462,905	787,462,905	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	UPTD	1 Lokasi	866,209,196	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							8,423,774,568	3,940,171,000	1,540,171,000					4,362,311,300			
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	jumlah kepala keluarga penerimaan akses reformasi agraria	5.000 kepala keluarga		n/a kepala keluarga	5.000 kepala keluarga	5.000 kepala keluarga	28,123,200	0	0					5.000 kepala keluarga	28,123,200		
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Sangketa Tanah	60 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	28,123,200	0	0					12 bulan	28,123,200		
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Berita Acara	4 Berita Acara	28,123,200	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Masyarakat	4 Berita Acara	28,123,200	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rasio luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	11,50 Persen		9,43 Persen	10,50 Persen	10,50 Persen	7,882,219,768	3,786,391,000	1,386,391,000					10,50 Persen	4,165,030,100		
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Kerugian	60 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	7,882,219,768	3,786,391,000	1,386,391,000					12 bulan	4,165,030,100		
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah				4 Lokasi	3 Dokumen 3 Lokasi	7,882,219,768	3,786,391,000	1,386,391,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	3 Dokumen 3 Lokasi	4,165,030,100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kabupaten/Kota																
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan pemanfaatan tanah kosong	1,00 Persen		n/a Persen	1,85 Persen	1,85 Persen	513,431,600	153,780,000	153,780,000					1,85 Persen	169,158,000		
2 10 08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	60 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	513,431,600	153,780,000	153,780,000					12 bulan	169,158,000		
2 10 08 2.02 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. Jumlah Sertifikat Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				0 Laporan 80 Sertifikat	0 Laporan 80 Sertifikat	513,431,600	153,780,000	153,780,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aset Tanah Pemerintah Daerah	0 Laporan 80 Sertifikat	169,158,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5,387,208,269	4,463,439,400	4,463,439,400					4,807,955,700			
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	2,847,939,169	2,549,120,300	2,569,120,300					90,00 Persen	2,832,366,600		
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	6,203,200	0	0					100 Persen	6,203,200		
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,650,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Dokumen	1,650,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4,553,200	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	4 Laporan	4,553,200	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedia gaji dan tunjangan asn	%		%	100 %	100 %	1,961,517,969	2,063,439,400	2,063,439,400					100 %	2,077,882,500		
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	1,947,074,869	2,063,439,400	2,063,439,400	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur Negara	14 Bulan	2,063,439,400	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kelurahan	Umum						
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,776,600	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur Negara	1 Laporan	5,776,600	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6,666,500	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur Negara	12 Laporan	6,666,500	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	2,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur Negara	4 Dokumen	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	141,000,000	81,000,000	81,000,000					100 Persen	141,000,000		
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				89 stell	89 stell	91,000,000	81,000,000	81,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	89 stell	81,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				19 Orang	19 Orang	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	19 Orang	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya administrasi umum	persen		persen	100 persen	100 persen	270,600,000	145,713,900	145,713,900					100 persen	196,313,900		
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,600,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur Negara	1 Paket	9,600,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24,000,000	13,156,900	13,156,900	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat 4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya	Aparatur Negara	12 Paket	13,156,900	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
														Masyarakat				
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur Negara	1 Paket	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	36,000,000	15,557,000	15,557,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur Negara	12 Paket	15,557,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				120 Eksemplar	120 Eksemplar	12,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat 4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur Negara	120 Eksemplar	12,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianyan fasilitasi tamu				11 bulan	11 bulan	24,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur Negara	11 bulan	24,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	140,000,000	92,000,000	92,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur Negara	12 Bulan	92,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	92,000,000	0	0						100 Persen	92,000,000	
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	42,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Unit	42,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	10 Unit	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Listrik, air dan sewa kantor dan sewa Kendaraan dan mesin	persen		persen	100 persen	100 persen	85,897,000	111,897,000	111,897,000					100 persen	111,897,000		
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	11,600,000	9,600,000	9,600,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur Negara	12 bulan	9,600,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	65,000,000	101,000,000	101,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur Negara	12 bulan	101,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	9,297,000	1,297,000	1,297,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur Negara	12 bulan	1,297,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelihara barang milik daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	290,721,000	147,070,000	167,070,000					100 persen	207,070,000		
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	218,228,000	142,720,000	162,720,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur Negara	5 Unit	142,720,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				4 Laporan	4 Laporan	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur Negara	4 Laporan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	12,493,000	4,350,000	4,350,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur Negara	6 Unit	4,350,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur Negara	1 Unit	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	2,017,209,100	1,404,259,100	1,320,529,100					100 Persen	1,465,529,100		
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%		%	100 %	100 %	1,920,057,200	1,359,957,200	1,276,227,200					100 %	1,421,227,200		
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Terlaksana Piket Pengamanan Kantor /rumah dinas, pengawasan pejabat vvip dan pengamanan trantibum				0 Kasus 12 bulan	0 Kasus 12 bulan	1,906,957,200	1,346,857,200	1,196,857,200	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat 4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	aparatur	0 Kasus 12 bulan	1,346,857,200	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					30 Orang	0	0	61,270,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	aparatur	30 Orang	61,270,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	2 Dokumen	8,000,000	8,000,000	13,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	aparatur	2 Dokumen	8,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 02 2.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani tersedia layanan atas dampak dari pelaksanaan penegakan perda				0 Laporan 1 LS	0 Laporan 1 LS	5,100,000	5,100,000	5,100,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	aparatur	0 Laporan 1 LS	5,100,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase gangguan tribum yang terselesaikan	100 %		100 %	100 %	100 %	57,151,900	35,151,900	35,151,900					100 %	35,151,900		
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				12 bulan	12 bulan	57,151,900	35,151,900	35,151,900	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	aparatur negara	12 bulan	35,151,900	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	terlaksana kesekretariatan PPNS	100 %		100 %	100 %	100 %	40,000,000	9,150,000	9,150,000					100 %	9,150,000		
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	9,150,000	9,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	aparatur	12 Bulan	9,150,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan kebakaran	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	522,060,000	510,060,000	573,790,000					100 Persen	510,060,000		
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan pemadam dan penyelamatan kebakaran	100 %		100 %	100 %	100 %	522,060,000	510,060,000	573,790,000					100 %	510,060,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota operasi pemadaman dan penyelamatan atas kebakran				0 Laporan 12 bulan	12 Laporan 12 bulan	522,060,000	510,060,000	573,790,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	aparatur	12 Laporan 12 bulan	510,060,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							2,922,391,263	3,273,486,900	3,273,486,900						3,214,630,389		
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	1,755,446,458	2,595,986,900	2,595,986,900						90,00 Persen	1,930,991,104	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	5,800,000	5,800,000	5,800,000						100 Persen	6,380,000	
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Dokumen	1,650,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	700,000	700,000	700,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Dokumen	770,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	700,000	700,000	700,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Dokumen	770,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	700,000	700,000	700,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Dokumen	770,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	700,000	700,000	700,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Dokumen	770,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	2 Laporan	1,650,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan yang Ada	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	1,107,813,800	2,026,986,900	2,026,986,900					100 Persen	1,218,595,180		
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1,104,313,800	2,023,486,900	2,023,486,900	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	14 Orang/bulan	1,214,745,180	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Laporan	1,100,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	18 Laporan	1,650,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Dokumen	1,100,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	50,000,000	30,000,000	30,000,000					100 Persen	55,000,000		
1 05 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				12 Orang	12 Orang	50,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	12 Orang	55,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	194,813,658	196,093,000	196,093,000					100 Persen	214,295,024		
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,514,600	11,326,600	11,326,600	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Paket	12,666,060	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Paket	27,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,763,000	16,763,000	16,763,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Paket	16,239,300	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	10 Dokumen	13,200,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	11 Laporan	12,100,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120,536,058	120,003,400	120,003,400	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	12 Laporan	132,589,664	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	121,139,000	139,687,000	139,687,000					100 Persen	133,252,900		
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16,440,000	13,080,000	13,080,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	12 Laporan	18,084,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	92,000,000	107,000,000	107,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	3 Laporan	101,200,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12,699,000	19,607,000	19,607,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	12 Laporan	13,968,900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Mllik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	275,880,000	197,420,000	197,420,000					100 Persen	303,468,000		
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	51,880,000	38,920,000	38,920,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Unit	57,068,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	156,000,000	108,500,000	108,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	14 Unit	171,600,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	18,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	10 Unit	19,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	2 Unit	55,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	cakupan penanggulangan bencana daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	1,166,944,805	677,500,000	677,500,000					100 Persen	1,283,639,285		
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	62,672,000	79,522,000	79,522,000					100 Persen	68,939,200		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				30 Orang	30 Orang	62,672,000	79,522,000	79,522,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	30 Orang	68,939,200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	651,786,000	377,207,000	377,207,000					100 Persen	716,964,600		
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	270,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat	1 Dokumen	297,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				40 Orang	40 Orang	30,522,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat	40 Orang	33,574,200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				2 Kawasan	2 Kawasan	122,159,000	215,559,000	215,559,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat	2 Kawasan	134,374,900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah paket bahan material				0 12 paket	0 12 paket	199,648,000	161,648,000	161,648,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat	0 12 paket	219,612,800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				25 Orang	25 Orang	29,457,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat	25 Orang	32,402,700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	452,486,805	220,771,000	220,771,000					100 Persen	497,735,485		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah bulan respon cepat Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				12 bulan 0 Dokumen	12 bulan 0 Dokumen	130,821,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat	12 bulan 0 Dokumen	143,903,100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				10 Orang	10 Orang	144,621,000	98,271,000	98,271,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat	10 Orang	159,083,100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				10 Orang	10 Orang	177,044,805	122,500,000	122,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat	10 Orang	194,749,285	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							6,671,114,100	6,929,770,100	6,929,770,100						8,545,625,510		
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	2,215,242,000	2,507,458,100	2,507,458,100					90,00 Persen	2,436,766,200		
1 06 01 2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	6,400,000	6,400,000	6,400,000					100 %	7,040,000		
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1,400,000	1,400,000	1,400,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	2 Dokumen	1,540,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	2 Laporan	5,500,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	1,571,876,300	2,047,870,100	2,047,870,100					100 %	1,729,063,930		
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1,566,376,300	2,042,370,100	2,042,370,100	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	18 Orang/bulan	1,723,013,930	Dinas Sosial
1 06 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Laporan	2,750,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Laporan	2,200,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Dokumen	1,100,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100 %		100 %	100 %	100 %	277,736,700	221,398,000	221,398,000					100 %	305,510,370		
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,443,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Paket	4,887,300	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Paket	27,500,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40,293,700	53,398,000	53,398,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Paket	44,323,070	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	10 Dokumen	13,200,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	11 Laporan	12,100,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	185,000,000	120,000,000	120,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	12 Laporan	203,500,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Prasarana pendukung kinerja	100 %		100 %	100 %	100 %	54,000,000	26,000,000	26,000,000						100 %	59,400,000	
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	54,000,000	26,000,000	26,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	6 Unit	59,400,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100 %		100 %	100 %	100 %	178,845,000	112,720,000	112,720,000						100 %	196,729,500	
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	12 Laporan	19,800,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	157,000,000	97,000,000	97,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	6 Laporan	172,700,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3,845,000	720,000	720,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	12 Laporan	4,229,500	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100 %		100 %	100 %	100 %	126,384,000	93,070,000	93,070,000						100 %	139,022,400	
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	58,464,000	58,400,000	58,400,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	2 Unit	64,310,400	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	53,420,000	24,920,000	24,920,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	4 Unit	58,762,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	14 Unit	14,500,000	9,750,000	9,750,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	14 Unit	15,950,000	Dinas Sosial
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Terdatanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	312,536,400	205,177,000	205,177,000						100 Persen	343,790,040	
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas bagi PSKS	100 %		100 %	100 %	100 %	312,536,400	205,177,000	205,177,000						100 %	343,790,040	
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Lembaga	1 Lembaga	312,536,400	205,177,000	205,177,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Petugas sosial	1 Lembaga	343,790,040	Dinas Sosial
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Sosial	100 Persen		4,83 Persen	100 Persen	100 Persen	3,398,065,200	3,952,109,000	3,952,109,000						100 Persen	4,945,271,720	
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Persentase PMKS yang menerima bantuan	100 %		100 %	100 %	100 %	454,065,200	165,000,000	165,000,000						100 %	499,471,720	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pengemis di Luar Panti Sosial																	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				119 Orang	119 Orang	195,065,200	82,045,000	82,045,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Penyandan g Masalah Kesejahtera an Sosial (PMKS)	119 Orang	214,571,720	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				22 Orang	22 Orang	185,000,000	70,584,000	70,584,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Penyandan g Masalah Kesejahtera an Sosial (PMKS)	22 Orang	203,500,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	74,000,000	12,371,000	12,371,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Penyandan g Masalah Kesejahtera an Sosial (PMKS)	10 Orang	81,400,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	100 %		100 %	100 %	100 %	2,944,000,000	3,787,109,000	3,787,109,000						100 %	4,445,800,000	
1 06 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	1000 Orang	190,000,000	98,850,000	98,850,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Penyandan g Masalah kesejahtera an sosial (PMKS)	1000 Orang	209,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	1000 Orang	54,000,000	10,859,000	10,859,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Penyandan g Masalah kesejahtera an sosial (PMKS)	1000 Orang	59,400,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.02 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	2,700,000,000	3,677,400,000	3,677,400,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Penyandan g Masalah kesejahtera an sosial (PMKS)	3 Dokumen	4,177,400,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Perlindungan Sosial Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	454,190,900	213,339,000	213,339,000					100 Persen	499,609,990		
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100 %		100 %	100 %	100 %	454,190,900	213,339,000	213,339,000					100 %	499,609,990		
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				117000 Orang	117000 Orang	263,000,000	130,043,000	130,043,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Fakir Miskin	117000 Orang	289,300,000	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				21000 Keluarga	21000 Keluarga	25,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Fakir Miskin	21000 Keluarga	27,500,000	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				11687 Keluarga	11687 Keluarga	166,190,900	83,296,000	83,296,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Fakir Miskin	11687 Keluarga	182,809,990	Dinas Sosial
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Pemenuhan Pasca Bencana	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	291,079,600	51,687,000	51,687,000					100 Persen	320,187,560		
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS yang memeproleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100 %		100 %	100 %	100 %	169,500,000	0	0					100 %	186,450,000		
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	169,500,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	fakir miskin	25 Orang	186,450,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	100 %		100 %	100 %	100 %	121,579,600	51,687,000	51,687,000					100 %	133,737,560		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	121,579,600	51,687,000	51,687,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	30 Orang	133,737,560	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1,731,203,600	2,288,800,000	2,288,800,000						3,458,936,580		
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	150,000,000	770,645,000	770,645,000						100 Persen	990,000,000	
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya Pengetahuan tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	100 %	150,000,000	20,645,000	20,645,000						100 %	165,000,000	
2 08 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Kecamatan	11 Kecamatan	150,000,000	20,645,000	20,645,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	11 Kecamatan	165,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							0	750,000,000	750,000,000							825,000,000	
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Kelompok	15 Kelompok	0	750,000,000	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas			15 Kelompok	825,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	215,965,000	101,947,000	101,947,000						100 Persen	237,561,500	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		pengaduan																
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100 %		100 %	100 %	100 %	120,000,000	27,351,000	27,351,000						100 %	132,000,000	
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Kasus	10 Kasus	120,000,000	27,351,000	27,351,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	10 Kasus	132,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Data serta Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan dan TPPO	100 %		100 %	100 %	100 %	95,965,000	74,596,000	74,596,000						100 %	105,561,500	
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				2 Kali	2 Kali	95,965,000	74,596,000	74,596,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	2 Kali	105,561,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							76,500,000	750,000,000	750,000,000							825,000,000	
2 08 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							76,500,000	750,000,000	750,000,000							825,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 04 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Kelompok	15 Kelompok	76,500,000	750,000,000	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas		15 Kelompok	825,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan terhadap Anak	50,00 Persen		16,67 Persen	33,33 Persen	33,33 Persen	386,938,600	329,355,000	329,355,000					33,33 Persen	425,632,460		
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengetahuan tentang Pemenuhan Hak-hak Anak Menuju kabupaten Layak Anak	100 %		100 %	100 %	100 %	386,938,600	329,355,000	329,355,000					100 %	425,632,460		
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				800 Poin	800 Poin	386,938,600	329,355,000	329,355,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	800 Poin	425,632,460	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan pendampingan anak yang membutuhkan perlindungan khusus	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	901,800,000	336,853,000	336,853,000					100 Persen	980,742,620		
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersampainya Informasi tentang kekerasan Terhadap Anak pada 700 Anak di 5 Kecamatan	100 %		100 %	100 %	100 %	601,800,000	109,700,000	109,700,000					100 %	650,742,620		
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				700 Orang	700 Orang	601,800,000	109,700,000	109,700,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	700 Orang	650,742,620	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Persentase Pengaduan Kasus Anak yang terlayani	100 %		100 %	100 %	100 %	300,000,000	227,153,000	227,153,000					100 %	330,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota																	
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Kasus	11 Kasus	200,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	11 Kasus	220,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang menjadi Pendamping Pengaduan pada Tingkat Pekon dan Kelurahan Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				560 Anak 0 Layanan	560 Anak 0 Layanan	100,000,000	227,153,000	227,153,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	560 Anak 0 Layanan	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							8,268,796,400	8,374,391,400	8,374,391,400						10,555,343,570		
2 14 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	3,955,169,300	4,247,324,400	4,247,324,400						90,00 Persen	4,802,604,960	
2 14 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	22,824,000	22,824,000	22,824,000						100 %	23,464,000	
2 14 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	1,400,000	1,400,000	1,400,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	0 Dokumen 2 Dokumen	1,540,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	4,106,000	4,106,000	4,106,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	0 Dokumen 1 Dokumen	4,106,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 14 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	4,106,000	4,106,000	4,106,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	0 Dokumen 1 Dokumen	4,106,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	4,106,000	4,106,000	4,106,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	0 Dokumen 1 Dokumen	4,106,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	4,106,000	4,106,000	4,106,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	0 Dokumen 1 Dokumen	4,106,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan 0 Laporan	2 Laporan 0 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	2 Laporan 0 Laporan	5,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	3,188,002,100	3,608,930,400	3,608,930,400						100 %	3,969,823,440	
2 14 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan 0 Orang/bulan	14 Bulan 0 Orang/bulan	3,182,502,100	3,603,430,400	3,603,430,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	14 Bulan 0 Orang/bulan	3,963,773,440	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan 0 Laporan	1 Laporan 0 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	1 Laporan 0 Laporan	2,750,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 14 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan 0 Laporan	18 Laporan 0 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	18 Laporan 0 Laporan	2,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen 1 Laporan	0 Dokumen 1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	0 Dokumen 1 Laporan	1,100,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparaturnya yg berkinerja baik	100 %		100 %	100 %	100 %	10,000,000	0	0					100 %	11,000,000		
2 14 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas				2 Orang	2 Orang	10,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	2 Orang	11,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100 %		100 %	100 %	100 %	164,591,200	172,442,000	213,242,000					100 %	225,930,320		
2 14 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 % 0 Paket	100 % 0 Paket	4,225,000	4,225,000	4,225,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	100 % 0 Paket	4,647,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas				1 Kali	1 Kali	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	1 Kali	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	12 Bulan 0 Paket	25,366,200	33,217,000	33,217,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	12 Bulan 0 Paket	27,902,820	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang				0 Dokumen 10 SKHU	0 Dokumen 10 SKHU	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas	0	0 Dokumen 10 SKHU	13,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	undangan	Disediakan Jumlah SKHU									Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berdaya Saing	dan Kuantitas				Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Layanan Jasa Penyediaaan Makanan dan Minuman				0 Laporan 11 Bulan	0 Laporan 11 Bulan	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	0 Laporan 11 Bulan	12,100,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor				12 Bulan	12 Bulan	87,000,000	87,000,000	127,800,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	12 Bulan	140,580,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100 %		100 %	100 %	100 %	194,764,000	121,140,000	120,140,000					100 %	231,180,400		
2 14 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor				100 %	100 %	90,024,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	100 %	99,026,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	16 Unit	104,740,000	121,140,000	120,140,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	16 Unit	132,154,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100 %		100 %	100 %	100 %	169,888,000	144,888,000	105,088,000					100 %	115,596,800		
2 14 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan				12 Bulan	12 Bulan	19,200,000	19,200,000	14,400,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	12 Bulan	15,840,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas				28 Unit	4 Unit	147,000,000	122,000,000	87,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	4 Unit	95,700,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 14 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tagihan				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	3,688,000	3,688,000	3,688,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatarn Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	0 Laporan 12 Bulan	4,056,800	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100 %		100 %	100 %	100 %	205,100,000	177,100,000	177,100,000					100 %	225,610,000		
2 14 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit 0 Unit	28 Unit 0 Unit	198,100,000	170,100,000	170,100,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatarn Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	28 Unit 0 Unit	217,910,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan 0 Unit	12 Bulan 0 Unit	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatarn Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	12 Bulan 0 Unit	7,700,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,92 Persen		1,06 Persen	0,98 Persen	0,98 Persen	431,550,900	208,200,000	208,200,000					0,98 Persen	567,220,490		
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	100 %		100 %	100 %	100 %	75,667,900	0	0					100 %	83,234,690		
2 14 02 2.01 09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Terlaksananya Pembentuknya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)				5 SSK	5 SSK	75,667,900	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatarn Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	5 SSK	83,234,690	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Indikator Program Bangga Kencana dalam Kebijakan Pembangunan	100 %		100 %	100 %	100 %	355,883,000	208,200,000	208,200,000						100 %	483,985,800	
2 14 02 2.02 08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk				15 Unit	15 Unit	167,360,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	15 Unit	184,096,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.02 09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				12 Laporan	12 Laporan	77,718,000	64,200,000	64,200,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	12 Laporan	85,489,800	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				11 Kecamatan	11 Kecamatan	2,805,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	11 Kecamatan	3,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				11 Faskes	11 Faskes	0	84,000,000	84,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	11 Faskes	92,400,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				10 Dokumen	10 Dokumen	108,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	10 Dokumen	118,800,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate	2,10 Angka		2,26 Angka	2,19 Angka	2,19 Angka	2,636,978,300	2,643,395,000	2,643,395,000						2,19 Angka	3,419,910,430	
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Program KKBPK	100 %		100 %	100 %	100 %	716,615,000	934,500,000	934,500,000						100 %	764,840,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Budaya Lokal																	
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				2.19 Organisasi	2.19 Organisasi	4,375,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	2.19 Organisasi	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Program KKBPK				550 Orang	550 Orang	25,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	550 Orang	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				11 Dokumen	11 Dokumen	70,640,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	11 Dokumen	77,740,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				11 Laporan	11 Laporan	171,600,000	143,000,000	143,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	11 Laporan	171,600,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				2.19 Laporan	2.19 Laporan	405,000,000	481,500,000	481,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	2.19 Laporan	445,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 14 03 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				11 Laporan	11 Laporan	40,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	11 Laporan	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terbinanya PPKBD Kabupaten Pesisir Barat	100 %		100 %	100 %	100 %	489,900,000	388,000,000	388,000,000					100 %	706,090,000		
2 14 03 2.02 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				76 Tenaga Penggerak	76 Tenaga Penggerak	0	152,000,000	152,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	76 Tenaga Penggerak	167,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				2.19 Orang	2.19 Orang	489,900,000	236,000,000	236,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	2.19 Orang	538,890,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendistribusian Alkon di Fasilitas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	100 %	797,891,300	877,895,000	877,895,000					100 %	876,480,430		
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Terwujudnya Pendistribusian Alkon di Fasilitas Kesehatan				0 Laporan 12 Faskes	0 Laporan 12 Faskes	5,400,000	11,700,000	11,700,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	0 Laporan 12 Faskes	5,400,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				11 Kecamatan	11 Kecamatan	223,562,300	529,948,000	529,948,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	11 Kecamatan	245,918,530	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Khusus Non Fisik					Berencana	
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				9 Faskes	9 Faskes	50,000,000	246,913,000	246,913,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	9 Faskes	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				0 Laporan 1100 Orang	0 Laporan 1100 Orang	6,600,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	0 Laporan 1100 Orang	6,600,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.03 10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				200 Orang	200 Orang	114,400,800	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB- BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	200 Orang	125,840,880	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1720 Laporan	1720 Laporan	397,928,200	84,834,000	84,834,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	1720 Laporan	437,721,020	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kader dan Kelompok kerja (pokja) yang terbentuk dan terbina di kampung KB	100 %		100 %	100 %	100 %	632,572,000	443,000,000	443,000,000					100 %	1,072,500,000		
2 14 03 2.04 01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta				0 Organisasi	0 Organisasi	149,572,000	434,000,000	434,000,000		Dana Transfer Khusus-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas	0	0 Organisasi	531,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Berdaya Saing	dan Kuantitas				Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.04 02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				30 Orang	30 Orang	0	9,000,000	9,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	30 Orang	9,900,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terwujudnya Pendistribusian Alkon di Fasilitas Kesehatan				12 Faskes	12 Faskes	483,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	12 Faskes	531,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	64,00 Angka		53,57 Angka	58,00 Angka	58,00 Angka	1,245,097,900	1,275,472,000	1,275,472,000					58,00 Angka	1,765,607,690		
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Forum Generasi Berencana, Kelompok BKB-HI, Forum Asosiasi Kelompok UPPKS dan Kader Poktan PKB dan PPKBD yang mendapatkan pembinaan tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta tim pendamping keluarga yang mendapatkan biaya operasional	100 %		100 %	100 %	100 %	828,877,300	1,275,472,000	1,275,472,000					100 %	1,307,765,030		
2 14 04 2.01 01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Jumlah Forum genre kelompok BKB HI				1 Forum 22 Kelompok	1 Forum 22 Kelompok	262,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	1 Forum 22 Kelompok	288,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	(UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																	
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				20 Unit	20 Unit	0	360,000,000	360,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	20 Unit	396,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader UPPKA yang dibina Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				88 Orang 0 Orang	88 Orang 0 Orang	88,652,000	71,272,000	71,272,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	88 Orang 0 Orang	97,517,200	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah tim pendamping keluarga (TPK) yang mendapatkan biaya operasional				0 Orang 402 Orang	0 Orang 402 Orang	395,225,300	844,200,000	844,200,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	0 Orang 402 Orang	434,747,830	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 04 2.01 06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB tim TPPS Kabupaten yang mendapat biaya operasional dalam Kegiatan Penurunan Stunting				11 Kelompok 33 Orang	11 Kelompok 33 Orang	83,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	11 Kelompok 33 Orang	91,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi	Persentase Pekon, Kecamatan yang mengikuti Lomba Kesra, serta Kader	100 %		100 %	100 %	100 %	416,220,600	0	0					100 %	457,842,660		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Perempuan yang mendapat Pembinaan P3KSS dan GSI																
2 14 04 2.02 03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kecamatan yang di Bina Jumlah Pekon				11 Kecamatan 11 Pekon	11 Kecamatan 11 Pekon	296,220,600	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	11 Kecamatan 11 Pekon	325,842,660	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 04 2.02 04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Kader Perempuan yang di Bina				100 Orang	100 Orang	120,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	100 Orang	132,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							8,741,812,754	6,781,460,300	6,781,460,300						8,140,332,330		
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	7,448,695,154	6,288,024,300	6,288,024,300						90,00 Persen	7,248,962,730	
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	10,000,000	5,000,000	5,000,000						100 %	7,700,000	
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	2 Dokumen	3,300,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	2 Laporan	2,200,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Kelurahan							
2 09 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	2,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	0 Laporan	2,200,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	6,316,595,154	5,624,724,300	5,624,724,300					100 %	6,207,502,730		
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	6,310,595,154	5,618,724,300	5,618,724,300	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	14 bulan	6,200,902,730	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Laporan	2,200,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	2 Laporan	2,750,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Dokumen	1,650,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yg berkinerja baik	100 %		n/a %	100 %	100 %	145,500,000	0	0					100 %	160,050,000		
2 09 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	45,500,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	0 Paket	50,050,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 09 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	100,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	0 Orang	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100 %		100 %	100 %	100 %	419,800,000	308,800,000	308,800,000					100 %	348,460,000		
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,800,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Paket	1,960,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Kali 0 Paket	1 Kali 0 Paket	40,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Kali 0 Paket	27,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55,000,000	37,000,000	37,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Paket	40,700,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				10 Dokumen/SKHU	10 Dokumen/SKHU	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	10 Dokumen/SKHU	13,200,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman				0 Laporan 11 Bulan	0 Laporan 11 Bulan	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	0 Laporan 11 Bulan	12,100,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di Luar Kantor Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan 2 Laporan	12 Bulan 2 Laporan	300,000,000	222,000,000	222,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Bulan 2 Laporan	253,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %		100 %	100 %	100 %	90,000,000	0	0					100 %	99,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 09 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	90,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	0 Unit	99,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100 %		100 %	100 %	100 %	246,000,000	183,500,000	183,500,000					100 %	201,850,000		
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Pembayaran Tagihan				1 Laporan 12 Bulan	1 Laporan 12 Bulan	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Laporan 12 Bulan	82,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Sewa Kantor, Rumah dinas, Gudang Pertanian dan Kendaraan Operasional Dinas				1 Laporan 12 Bulan	1 Laporan 12 Bulan	167,000,000	107,000,000	107,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Laporan 12 Bulan	117,700,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tagihan				1 Laporan 12 Bulan	1 Laporan 12 Bulan	4,000,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Laporan 12 Bulan	1,650,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100 %		100 %	100 %	100 %	220,800,000	166,000,000	166,000,000					100 %	224,400,000		
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37,500,000	37,500,000	37,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Unit	41,250,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	29 Unit	145,300,000	128,500,000	128,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	29 Unit	141,350,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 09 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				34 Unit	34 Unit	38,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	34 Unit	41,800,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	28,000 Ton		27.752,48 Ton	28,000 Ton	28,000 Ton	919,937,500	268,346,000	268,346,000					28,000 Ton	643,770,600		
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)	%		%	84.98 %	84.98 %	63,110,000	31,250,000	31,250,000					84.98 %	34,375,000		
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dokumen Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Dokumen 2 Laporan	1 Dokumen 2 Laporan	63,110,000	31,250,000	31,250,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	1 Dokumen 2 Laporan	34,375,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	100 %		9 %	20 %	20 %	354,358,800	28,596,000	28,596,000					20 %	388,845,600		
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				0 Ton	0 Ton	324,900,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	0 Ton	357,390,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 03 2.02 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara Tersedianya Biaya Rekonsiliasi cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota				34 Ton 25.07 Ton	34 Ton 25.07 Ton	29,458,800	28,596,000	28,596,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	34 Ton 25.07 Ton	31,455,600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	%		%	87.8 %	87.8 %	502,468,700	208,500,000	208,500,000					87.8 %	220,550,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Gizi																	
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	442,468,700	173,000,000	173,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	1 Laporan	181,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 03 2.04 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	35,500,000	35,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	1 Laporan	39,050,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	5,00 Persen		7,00 Persen	7,00 Persen	7,00 Persen	267,365,750	190,090,000	190,090,000						7,00 Persen	209,099,000	
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan Informasi Daerah Rawan Pangan	100 %		100 %	100 %	100 %	68,525,000	38,861,000	38,861,000						100 %	42,747,100	
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	68,525,000	38,861,000	38,861,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	42,747,100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Daerah Rawan Pangan	4 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	198,840,750	151,229,000	151,229,000						1 Lokasi	166,351,900	
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dalam rangka penanganan Kerawanan Pangan				2 Laporan 2 Kali	2 Laporan 2 Kali	198,840,750	151,229,000	151,229,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	2 Laporan 2 Kali	166,351,900	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	60,00 Persen		n/a Persen	60,00 Persen	60,00 Persen	105,814,350	35,000,000	35,000,000						60,00 Persen	38,500,000	
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100 %		n/a %	100 %	100 %	105,814,350	35,000,000	35,000,000						100 %	38,500,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota																	
2 09 05 2.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	57,727,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	48,087,350	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	27,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							6,186,111,300	2,228,764,000	2,228,764,000						5,271,064,480		
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani	102,30 Angka		94,73 Angka	98,51 Angka	98,51 Angka	2,334,568,700	1,310,180,000	1,310,180,000						98,51 Angka	2,030,749,380	
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	0.3 %		0.3 %	0.3 %	0.3 %	219,121,200	60,000,000	60,000,000						0.3 %	125,533,320	
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Luasan Areal Pengembangan/Rehab /Intensifikasi Tembakau Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				0 Hektar 0 Laporan	0 Hektar 0 Laporan	54,121,200	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah 2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani Kios Pupuk dan Aparatur	0 Hektar 0 Laporan	59,533,320	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Laporan KP3 dan Pendampingan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2 Dokumen 2 Laporan	2 Dokumen 2 Laporan	165,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani Kios Pupuk dan Aparatur	2 Dokumen 2 Laporan	66,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian	0.5 %		0.5 %	0.5 %	0.5 %	1,315,850,000	845,020,000	845,020,000						0.5 %	1,058,306,700	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Bibit Komoditi Perkebunan Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian				21700 Batang 0 VUB	21700 Batang 0 VUB	673,933,000	440,000,000	440,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	21700 Batang 0 VUB	484,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Luas Areal Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan Benih Padi Unggul Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				0 Hektar 0 Dokumen	0 Hektar 0 Dokumen	117,077,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	0 Hektar 0 Dokumen	128,784,700	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Luas Areal Pengembangan Komoditi Hortikultura Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				53 Hektar 1 Dokumen	53 Hektar 1 Dokumen	524,840,000	405,020,000	405,020,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	53 Hektar 1 Dokumen	445,522,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Populasi Ternak yang bersumber dari dalam daerah	3 %		3 %	3 %	3 %	237,430,000	0	0					3 %	261,173,000		
3 27 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia Jumlah Bibit Ternak Yang Bersumber Dari Dalam Daerah (Ternak Sapi Krui)				0 Ton 0 Ekor	0 Ton 0 Ekor	237,430,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	0 Ton 0 Ekor	261,173,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan Populasi Ternak	3 %		3 %	3 %	3 %	562,167,500	405,160,000	405,160,000					3 %	585,736,360		
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				1655 Ekor	1655 Ekor	434,890,000	405,160,000	405,160,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1655 Ekor	445,731,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
3 27 02 2.06 02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				0 Ton	0 Ton	127,277,500	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	0 Ton	140,005,360	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	0 Ton		126.350 Ton	146.872 Ton	146.872 Ton	2,345,352,000	314,779,000	314,779,000					146.872 Ton	2,432,487,200		
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan data, informasi dan kajian lingkup pertanian	100 %		100 %	100 %	100 %	59,102,000	8,779,000	8,779,000					100 %	65,012,200		
3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	59,102,000	8,779,000	8,779,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani dan Aparatur	1 Dokumen	65,012,200	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun dan ber kondisi baik	85 %		n/a %	82 %	82 %	2,286,250,000	306,000,000	306,000,000					82 %	2,367,475,000		
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	440,000,000	306,000,000	306,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	2 Unit	336,600,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 03 2.02 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	194,250,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	0 Unit	213,675,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	222,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	0 Unit	244,200,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 03 2.02 04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	385,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	0 Unit	423,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 03 2.02 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	1,045,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	0 Unit	1,149,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	90,00 Persen		80,00 Persen	84,00 Persen	84,00 Persen	237,243,600	125,000,000	125,000,000					84,00 Persen	137,500,000		
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terproteksinya ternak dan HPR dari penyakit hewan menular	90 %		80 %	84 %	84 %	162,404,000	85,789,500	85,789,500					84 %	94,368,450		
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Penanganan Penyakit Hewan dan Ternak Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				3000 Ekor 1 Laporan	3000 Ekor 1 Laporan	162,404,000	85,789,500	85,789,500	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani, Peternak dan Kesmavet	3000 Ekor 1 Laporan	94,368,450	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Terjaminnya Keamanan daging yang beredar di masyarakat	100 %		100 %	100 %	100 %	74,839,600	39,210,500	39,210,500					100 %	43,131,550		
3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Sampel Daging dan Produk Hewan				1 Laporan 450 Sampel	1 Laporan 450 Sampel	74,839,600	39,210,500	39,210,500	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani, Pedagang dan Kesmavet	1 Laporan 450 Sampel	43,131,550	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN	Persentase Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT)	90,00 Persen		80,00 Persen	84,00 Persen	84,00 Persen	396,310,800	25,000,000	25,000,000					84,00 Persen	2,750,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penurunan persentase gangguan OPT/ Kegagalan panen pada komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	10 %		10 %	10 %	10 %	396,310,800	25,000,000	25,000,000						10 %	2,750,000	
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Gerakan Pengendalian OPT Komoditi Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				6 Kali 0 Ha	6 Kali 0 Ha	396,310,800	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	6 Kali 0 Ha	2,750,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	995 Poktan		n/a Poktan	965 Poktan	965 Poktan	872,636,200	453,805,000	453,805,000						965 Poktan	667,577,900	
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kualitas SDM Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian yang ditingkatkan	90 %		70 %	80 %	80 %	872,636,200	453,805,000	453,805,000						80 %	667,577,900	
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan Kualitas SDM				11 Unit 11 Kecamatan	11 Unit 11 Kecamatan	413,795,200	338,805,000	338,805,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	11 Unit 11 Kecamatan	372,685,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Petani dan Kelembagaan Petani yang Ditingkatkan Kualitas SDM				2 Unit 11 Kecamatan	2 Unit 11 Kecamatan	305,777,000	115,000,000	115,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	2 Unit 11 Kecamatan	126,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0 Kecamatan	0 Kecamatan	54,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	0 Kecamatan	59,400,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 07 2.01 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				0 Unit	0 Unit	99,064,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	0 Unit	108,992,400	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							6,576,629,549	5,204,691,800	5,204,691,800						6,995,294,216		
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup	90,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	3,235,351,019	2,992,391,800	2,992,391,800						90,00 Persen	3,540,004,116	
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	11,663,000	7,163,000	7,163,000						100 %	12,634,793	
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2,163,000	2,163,000	2,163,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	2 Dokumen	2,184,793	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	2 Dokumen	2,200,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	1 Dokumen	550,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	2 Dokumen	1,650,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	1 Dokumen	550,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	2 Laporan	5,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	1,845,600,000	2,011,191,800	2,011,191,800					100 %	2,030,160,000		
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1,839,100,000	2,004,691,800	2,004,691,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	18 Orang/bulan	2,023,010,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	1 Laporan	2,750,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	18 Laporan	3,300,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	1 Dokumen	1,100,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yg berkinerja baik	100 %		100 %	100 %	100 %	200,000,000	0	0					100 %	216,000,000		
2 11 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	150,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkup Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	1 Paket	165,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan				2 Orang	2 Orang	50,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	2 Orang	51,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		dan Pelatihan									Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Bencana Dan Perubahan Iklim					
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	%		%	100 %	100 %	306,457,019	240,187,400	272,044,200					100 %	334,773,910		
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,158,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	1 Paket	1,169,739	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	1 Paket	25,275,250	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	56,471,600	52,187,400	54,987,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	1 Paket	62,118,760	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	10 Dokumen	13,200,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	11 Laporan	12,100,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	200,827,419	140,000,000	169,056,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	80 Laporan	220,910,161	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Prasarana dan prasarana pendukung kinerja	100 %		100 %	100 %	100 %	100,392,000	0	0					100 %	110,431,200		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				33 Unit	33 Unit	50,392,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	33 Unit	55,431,200	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	5 Unit	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100 %		100 %	100 %	100 %	135,109,000	131,500,000	125,000,000					100 %	147,767,609		
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	5,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	aparatur	12 Laporan	13,200,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	114,500,000	112,000,000	112,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	aparatur	12 Laporan	125,950,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8,609,000	7,500,000	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	aparatur	12 Laporan	8,617,609	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100 %		100 %	100 %	100 %	636,130,000	602,349,600	576,992,800					100 %	688,236,604		
2 11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	50,400,000	55,650,000	55,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	2 Unit	55,220,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan				13 Unit	13 Unit	443,480,000	424,610,000	383,810,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	13 Unit	487,828,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya									Semua Kelurahan		Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim					
2 11 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	114,004,000	90,200,000	110,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	1 Unit	114,118,004	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	18,246,000	16,889,600	12,332,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	1 Unit	20,070,600	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	15,000,000	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	1 Unit	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	100 Persen	493,245,405	325,000,000	325,000,000					100 Persen	542,569,946		
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Terintegrasiny a RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten /kota	100 %		100 %	100 %	100 %	93,245,405	0	0					100 %	102,569,946		
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	93,245,405	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	102,569,946	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan dokumen KLHS dalam K/R/P	100 %		100 %	100 %	100 %	400,000,000	325,000,000	325,000,000					100 %	440,000,000		
2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	1 Dokumen	220,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	325,000,000	325,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur	1 Dokumen	220,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan		Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim					
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,86 Angka		68,50 Angka	73,87 Angka	73,87 Angka	311,403,805	25,000,000	25,000,000					73,87 Angka	122,427,900		
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	100 %		100 %	100 %	100 %	311,403,805	25,000,000	25,000,000					100 %	122,427,900		
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3 Dokumen	3 Dokumen	253,104,805	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur, Masyarakat	3 Dokumen	58,299,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	58,299,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	64,128,900	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persatuan Luas Wilayah	5,50 Persen		4,52 Persen	5,00 Persen	5,00 Persen	202,274,405	0	0					5,00 Persen	222,501,846		
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan RTH	100 %		n/a %	100 %	100 %	202,274,405	0	0					100 %	222,501,846		
2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	58,299,405	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	64,129,346	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Ha	3 Ha	143,975,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur, Masyarakat	3 Ha	158,372,500	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan Pengendalian terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbasis lingkungan hidup (PUULH)	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	100 Persen	125,014,405	0	0						100 Persen	137,515,846	
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan penangung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	100 %		100 %	100 %	100 %	125,014,405	0	0						100 %	137,515,846	
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				10 Dokumen	10 Dokumen	125,014,405	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur, Masyarakat, Pelaku Usaha	10 Dokumen	137,515,846	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat	40,00 Persen		n/a Persen	30,00 Persen	30,00 Persen	106,710,105	0	0						30,00 Persen	117,381,116	
2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	100 %		n/a %	100 %	100 %	106,710,105	0	0						100 %	117,381,116	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 07 2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	1 Dokumen	106,710,105	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah 3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Mayarakat	1 Dokumen	117,381,116	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan	60,30 Persen		45,00 Persen	52,09 Persen	52,09 Persen	2,102,630,405	1,862,300,000	1,862,300,000					52,09 Persen	2,312,893,446		
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen		Persen	19.23 Persen	19.23 Persen	2,102,630,405	1,862,300,000	1,862,300,000					19.23 Persen	2,312,893,446		
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				1 Laporan	1 Laporan	112,489,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur, Masyarakat, Pelaku Usaha	1 Laporan	123,737,900	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				3297 Ton	3297 Ton	1,890,141,405	1,862,300,000	1,862,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur, Masyarakat, Pelaku Usaha	3297 Ton	2,079,155,546	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				3 Unit	3 Unit	100,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Aparatur, Masyarakat, Pelaku Usaha	3 Unit	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL							5,338,636,901	3,185,806,400	3,185,806,400					5,535,737,790			
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	4,579,397,401	2,651,403,400	2,651,403,400					100 %	4,709,543,740		
2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan		laporan	4 laporan	4 laporan	210,100,000	6,624,000	6,624,000					4 laporan	224,096,400		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Tepat Waktu																
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja				2 laporan	2 laporan	11,000,000	4,624,000	4,624,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	2 laporan	5,086,400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	39,600,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Dokumen	43,560,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	33,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Dokumen	36,300,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30,800,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Dokumen	33,880,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Dokumen	12,100,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja				2 Laporan	2 Laporan	2,200,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	2 Laporan	2,420,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	82,500,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Laporan	90,750,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	1,848,480,100	2,006,306,400	2,006,306,400						100 %	2,206,937,040	
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS				12 bulan	12 bulan	1,842,980,100	2,000,806,400	2,000,806,400	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	2,200,887,040	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 12 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Laporan	2,750,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan, laporan triwulan dan laporan semester				4 triwulan	4 triwulan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	4 triwulan	2,200,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				2 Laporan	2 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	2 Laporan	1,100,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	peningkatan aparatur yang berkinerja baik	%		%	100 %	100 %	746,500,000	0	0						100 %	821,150,000	
2 12 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	71,500,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Paket	78,650,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	15,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	2 Orang	16,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				600 Orang	600 Orang	385,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	600 Orang	423,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				120 Orang	120 Orang	275,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	120 Orang	302,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kinerja	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	858,243,501	199,903,000	199,903,000						1 tahun	824,893,300	
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kanto				12 bulan	12 bulan	3,745,000	3,745,000	3,745,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	4,119,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	550,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Paket	605,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas				1 kali	1 kali	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 kali	27,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak, penggandaan dan kebutuhan ATK				12 bulan	12 bulan	36,498,501	33,158,000	33,158,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	36,473,800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan media cetak				12 bulan	12 bulan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	13,200,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman				11 bulan	11 bulan	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	11 bulan	12,100,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor				12 bulan	12 bulan	220,000,000	115,000,000	115,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	126,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	%		%	100 %	100 %	558,870,000	85,000,000	85,000,000					100 %	202,400,000		
2 12 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				7 Unit	7 Unit	459,870,000	85,000,000	85,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	7 Unit	93,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2 set	2 set	99,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	2 set	108,900,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya layanan Pendukung	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	1 TAHUN	194,423,800	228,190,000	228,190,000					1 TAHUN	251,009,000		
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	61,200,000	94,966,200	94,966,200	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	104,462,820	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan rumah dinas, gedung kantor dan kendaraan dinas				12 bulan	12 bulan	129,000,000	129,000,000	129,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	141,900,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 bulan	12 bulan	4,223,800	4,223,800	4,223,800	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	4,646,180	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	162,780,000	125,380,000	125,380,000					1 tahun	179,058,000		
2 12 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan				12 bulan	12 bulan	55,800,000	55,800,000	55,800,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	61,380,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 bulan	12 bulan	43,300,000	43,300,000	43,300,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	47,630,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	37,400,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	2 Unit	41,140,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				12 bulan	12 bulan	26,280,000	26,280,000	26,280,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	28,908,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Lainnya										Kelurahan	Umum						
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan	persen		persen	100 persen	100 persen	459,613,000	346,890,000	346,890,000					100 persen	514,049,800		
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksanakannya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	115,000,000	59,800,000	59,800,000					1 tahun	115,280,000		
2 12 02 2.01 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	masyarakat	1 Dokumen	49,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen atas Pendaftaran Penduduk				1 tahun	1 tahun	70,000,000	59,800,000	59,800,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	masyarakat	1 tahun	65,780,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Terlaksanakannya Penataan Pendaftaran Penduduk	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	213,585,000	219,990,000	219,990,000					1 tahun	241,989,000		
2 12 02 2.02 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk				1 tahun	1 tahun	213,585,000	219,990,000	219,990,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	masyarakat	1 tahun	241,989,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksanakanya penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	55,600,000	67,100,000	67,100,000					1 tahun	73,810,000		
2 12 02 2.03 02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				1 tahun	1 tahun	55,600,000	67,100,000	67,100,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	masyarakat	1 tahun	73,810,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	90 persen		90 persen	90 persen	90 persen	75,428,000	0	0					90 persen	82,970,800		
2 12 02 2.04 03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	75,428,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Laporan	82,970,800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	persen		persen	100 persen	100 persen	108,399,000	85,267,000	85,267,000					100 persen	93,793,700		
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksanakanya Pelayanan Pencatatan Sipil	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	50,100,000	40,170,000	40,170,000					1 tahun	44,187,000		
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksanakannya Pelayanan Pencatatan Sipil				1 tahun	1 tahun	50,100,000	40,170,000	40,170,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	masyarakat	1 tahun	44,187,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksanakannya penyelenggaraan Pencatatan Sipil	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	58,299,000	45,097,000	45,097,000					1 tahun	49,606,700		
2 12 03 2.02 04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil				1 tahun	1 tahun	58,299,000	45,097,000	45,097,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	masyarakat	1 tahun	49,606,700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	persen		persen	100 persen	100 persen	92,803,500	56,650,000	56,650,000					100 persen	104,066,050		
2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	92,803,500	56,650,000	56,650,000					1 tahun	104,066,050		
2 12 04 2.01 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 tahun	1 tahun	37,955,500	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	masyarakat	1 tahun	41,751,050	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 2.01 02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan				16 Dokumen	16 Dokumen	54,848,000	56,650,000	56,650,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	masyarakat	16 Dokumen	62,315,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Kependudukan Skala Kabupaten dalam 1 Tahun	persen		persen	100 persen	100 persen	98,424,000	45,596,000	45,596,000					100 persen	114,284,500		
2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	98,424,000	45,596,000	45,596,000					1 tahun	114,284,500		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 12 05 2.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Agregat dan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Pesisir Barat				75 Dokumen	75 Dokumen	40,125,000	45,596,000	45,596,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	masyarakat	75 Dokumen	50,155,600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 05 2.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	58,299,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	masyarakat	1 Dokumen	64,128,900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							9,639,362,400	6,203,032,710	6,203,032,710						10,915,498,640		
2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	2,859,362,400	2,504,793,800	2,516,893,800						90,00 Persen	2,947,498,640	
2 13 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	7,040,000	7,040,000	7,040,000						100 %	7,744,000	
2 13 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1,540,000	1,540,000	1,540,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	2 Dokumen	1,694,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,500,000	5,500,000	5,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	1 Laporan	6,050,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100 100		100 100	100 100	100 100	2,104,322,770	1,940,988,400	1,940,988,400						100 100	2,314,755,047	
2 13 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	2,098,272,770	1,934,938,400	1,934,938,400	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	14 Bulan	2,308,100,047	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 13 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,750,000	2,750,000	2,750,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	1 Laporan	3,025,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,200,000	2,200,000	2,200,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	2 Laporan	2,420,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,100,000	1,100,000	1,100,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	1 Dokumen	1,210,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	100 %		0 %	100 %	100 %	20,000,000	0	0					100 %	22,000,000		
2 13 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	20,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	4 Orang	22,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100 %		100 %	100 %	100 %	282,864,630	247,211,400	290,331,400					100 %	311,151,093		
2 13 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3,581,000	3,581,000	3,581,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	12 Paket	3,939,100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	1 Paket	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Bulan	28,536,420	30,732,620	40,377,820	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	12 Bulan	31,390,062	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 13 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	10 Dokumen	13,200,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	11 Laporan	12,100,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Bulan	202,747,210	164,897,780	198,372,580	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	12 Bulan	223,021,931	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	%		%	100 %	100 %	218,000,000	91,500,000	91,500,000					100 %	42,000,000		
2 13 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	18,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	6 Unit	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	200,000,000	91,500,000	91,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	10 Unit	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100 %		100 %	100 %	100 %	145,900,000	136,819,000	105,799,000					100 %	160,490,000		
2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Bulan	32,400,000	32,400,000	7,100,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	12 Bulan	35,640,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Bulan	105,000,000	97,000,000	92,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	12 Bulan	115,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 13 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Bulan	8,500,000	7,419,000	6,699,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	12 Bulan	9,350,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100 %		100 %	100 %	100 %	81,235,000	81,235,000	81,235,000					100 %	89,358,500		
2 13 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	64,845,000	64,845,000	64,845,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	2 Unit	71,329,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	16,390,000	16,390,000	16,390,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	11 Unit	18,029,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa Berkembang	70 Pekon		53 Pekon	60 Pekon	60 Pekon	900,000,000	400,000,000	400,000,000					60 Pekon	1,500,000,000		
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Berkembang	66 Desa		53 Desa	69 Desa	69 Desa	900,000,000	400,000,000	400,000,000					69 Desa	1,500,000,000		
2 13 02 2.01 06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				1 Unit	1 Unit	900,000,000	400,000,000	400,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Desa di Kabupaten Pesisir Barat	1 Unit	1,500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pekon Tertib Administrasi	116 Pekon		n/a Pekon	95 Pekon	95 Pekon	2,580,000,000	1,701,743,480	1,689,643,480					95 Pekon	2,838,000,000		
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pekon Tertib Administrasi	%		%	100 %	100 %	2,580,000,000	1,701,743,480	1,689,643,480					100 %	2,838,000,000		
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	1,270,000,000	1,182,639,480	1,182,639,480	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Pekon di Kabupaten Pesisir Barat	12 Dokumen	1,397,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 13 04 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				116 Dokumen	116 Dokumen	150,000,000	110,000,000	110,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Pekon di Kabupaten Pesisir Barat	116 Dokumen	165,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				116 Dokumen	116 Desa	200,000,000	196,799,800	208,624,800	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Pekon di Kabupaten Pesisir Barat	116 Desa	220,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				116 Orang	116 Orang	100,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Pekon di Kabupaten Pesisir Barat	116 Orang	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				2 Dokumen	84 BUMDes	300,000,000	111,000,400	116,000,400	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Pekon di Kabupaten Pesisir Barat	84 BUMDes	330,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 04 2.01 10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Pekon di Kabupaten Pesisir Barat	1 Laporan	66,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 04 2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				116 Orang	116 Orang	100,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Pekon di Kabupaten Pesisir Barat	116 Orang	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 04 2.01 16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Pekon di Kabupaten Pesisir Barat	1 Laporan	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Laporan	300,000,000	101,303,800	72,378,800	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Pekon di Kabupaten Pesisir Barat	1 Laporan	330,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	116 Pekon		n/a Pekon	95 Pekon	95 Pekon	3,300,000,000	1,596,495,430	1,596,495,430						95 Pekon	3,630,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100 %		100 %	100 %	100 %	3,300,000,000	1,596,495,430	1,596,495,430					100 %	3,630,000,000		
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				90 Lembaga	90 Lembaga	1,300,000,000	891,500,000	891,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Lembaga Kemasyarak atan di Desa	90 Lembaga	1,430,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Lembaga Kemasyarak atan di Desa	1 Dokumen	330,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Lembaga Kemasyarak atan di Desa	1 Laporan	220,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 05 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	500,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Lembaga Kemasyarak atan di Desa	1 Laporan	550,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				12 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000,000	704,995,430	704,995,430	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Lembaga Kemasyarakatan di Desa	12 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							3,125,170,480	5,684,891,200	5,684,891,200						5,902,371,200		
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Perhubungan	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	1,979,900,200	2,608,051,200	2,608,051,200						90,00 Persen	2,660,367,200	
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	2 Dokumen 2 Laporan	2 Dokumen 2 Laporan	6,400,000	6,400,000	6,400,000						2 Dokumen 2 Laporan	7,040,000	
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1,400,000	1,400,000	1,400,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Pegawai	3 Dokumen	1,540,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Pegawai	3 Laporan	5,500,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akhir tahun Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan semesteran Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Laporan Laporan Laporan Bulan		Laporan Laporan Laporan Bulan	1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 14 Bulan	1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 14 Bulan	1,356,391,200	2,090,391,200	2,090,391,200						1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 14 Bulan	2,090,941,200	
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1,350,891,200	2,084,891,200	2,084,891,200	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Pegawai	13 Orang/bulan	2,084,891,200	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Pegawai	3 Laporan	2,750,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Pegawai	3 Laporan	2,200,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3 Dokumen	3 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Pegawai	3 Dokumen	1,100,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	300,000,000	55,000,000	55,000,000					100 Persen	60,500,000		
2 15 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	13 Orang	300,000,000	55,000,000	55,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Pegawai	13 Orang	60,500,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Aktivitas Jumlah ATK Jumlah Koordinasi di luar kantor Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah SKHU Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Kali Bulan Bulan Bulan SKHU Bulan		Kali Bulan Bulan Bulan SKHU Bulan	1 Kali 12 Bulan 12 Bulan 11 Bulan 10 SKHU 12 Bulan	1 Kali 12 Bulan 12 Bulan 11 Bulan 10 SKHU 12 Bulan	104,609,000	170,960,000	170,960,000					1 Kali 12 Bulan 12 Bulan 11 Bulan 10 SKHU 12 Bulan	188,056,000		
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Pegawai	12 Paket	3,300,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Pegawai	12 Paket	27,500,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25,009,000	25,130,800	25,130,800	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Pegawai	12 Paket	27,643,880	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Pegawai	10 Dokumen	13,200,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Pegawai	11 Laporan	12,100,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30,600,000	94,829,200	94,829,200	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Pegawai	12 Laporan	104,312,120	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas Jumlah Pembayaran Tagihan Jumlah Tagihan	Unit Bulan Bulan		Unit Bulan Bulan	6 Unit 12 Bulan 12 Bulan	6 Unit 12 Bulan 12 Bulan	90,000,000	117,300,000	117,300,000					6 Unit 12 Bulan 12 Bulan	129,030,000		
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18,000,000	19,800,000	19,800,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Pegawai	12 Laporan	21,780,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	67,000,000	92,500,000	92,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Pegawai	3 Laporan	101,750,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Pegawai	12 Laporan	5,500,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit Bulan		Unit Bulan	5 Unit 12 Bulan	5 Unit 12 Bulan	122,500,000	168,000,000	168,000,000					5 Unit 12 Bulan	184,800,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit 2 Unit	3 Unit 2 Unit	120,000,000	163,000,000	163,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Pegawai	3 Unit 2 Unit	179,300,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2,500,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Pegawai	1 Unit	5,500,000	Dinas Perhubungan
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat	74,00 Persen		66,00 Persen	70,00 Persen	70,00 Persen	1,036,360,280	2,940,520,000	2,940,520,000					70,00 Persen	3,092,052,000		
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan	Unit		Unit	20 Unit	20 Unit	950,000,000	993,920,000	993,920,000					20 Unit	1,093,312,000		
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				20 Unit	20 Unit	950,000,000	993,920,000	993,920,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Masyarakat	20 Unit	1,093,312,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	17,000,000	151,599,600	151,599,600					3 Laporan	166,759,560		
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	17,000,000	151,599,600	151,599,600	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Masyarakat	3 Laporan	166,759,560	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transportasi pedesaan	Unit		Unit	7 Unit	7 Unit	69,360,280	295,000,400	295,000,400					7 Unit	331,980,440		
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar				7 Unit	7 Unit	6,800,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Masyarakat	7 Unit	7,480,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia									Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah				
2 15 02 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Transportasi Pedesaan				1 Laporan 7 Unit	1 Laporan 7 Unit	62,560,280	295,000,400	295,000,400	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Masyarakat	1 Laporan 7 Unit	324,500,440	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							0	1,500,000,000	1,500,000,000						1,500,000,000		
2 15 02 2.16 03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	0	1,500,000,000	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah		3 Laporan	1,500,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Cakupan Wilayah yang terlayani Angkutan Laut	65,00 Persen		50,00 Persen	55,00 Persen	55,00 Persen	108,910,000	136,320,000	136,320,000					55,00 Persen	149,952,000		
2 15 03 2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan laut	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	108,910,000	136,320,000	136,320,000					5 Unit	149,952,000		
2 15 03 2.06 02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya				2 Laporan	2 Laporan	108,910,000	136,320,000	136,320,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	3. Pembangunan Infrastruktur dan Akseibilitas Daerah	Masyarakat	2 Laporan	149,952,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota									Kelurahan		Pemerataan					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7,049,022,864	6,656,205,700	6,656,205,700						6,486,838,410		
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	3,979,998,364	4,542,041,300	4,542,041,300						90,00 Persen	3,690,254,360	
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	3,118,500	6,400,000	6,400,000						100 %	3,318,500	
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1,056,000	1,400,000	1,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Dokumen	1,256,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,062,500	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan	2,062,500	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	1,521,319,000	1,598,901,700	1,598,901,700						100 %	1,673,170,400	
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS				0 Orang/bulan 14 Bulan	0 Orang/bulan 14 Bulan	1,517,867,600	1,595,705,300	1,595,705,300	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Orang/bulan 14 Bulan	1,669,654,360	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				1 Laporan	1 Laporan	1,320,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	1,320,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Kuangan Akhir Tahun SKPD									Kelurahan		Pelayanan Publik					
2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,485,000	1,350,000	1,350,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan	1,485,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	646,400	646,400	646,400	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	711,040	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	%		%	100 %	100 %	2,145,306,864	1,995,183,600	1,796,885,600					100 %	1,611,586,060		
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik				51 Buah	51 Buah	3,275,800	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	51 Buah	3,275,800	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Unit 0 Paket	2 Unit 0 Paket	202,000,000	265,298,000	67,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Unit 0 Paket	110,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Terlaksananya Pameran Pembangunan Pesisir Barat				0 Paket 1 Kali	0 Paket 1 Kali	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Paket 1 Kali	27,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Terpenuhnya Barang Cetak, Penggandaan dan Kebutuhan ATK				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	281,816,600	259,348,600	259,348,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Paket 12 Bulan	182,398,260	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	1,333,714,464	1,212,960,000	1,212,960,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Dokumen 12 Bulan	1,157,662,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	39,500,000	33,000,000	33,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	11 Laporan	40,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di Luar Kantor Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan 0 Laporan	12 Bulan 0 Laporan	260,000,000	199,577,000	199,577,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Bulan 0 Laporan	90,750,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	198,298,000						260,000,000		
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					34 Unit	0	0	198,298,000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik		34 Unit	260,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	%		%	100 %	100 %	65,254,000	845,556,000	845,556,000					100 %	58,579,400		
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	49,200,000	840,000,000	840,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	54,120,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	16,054,000	5,556,000	5,556,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Bulan	4,459,400	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	245,000,000	96,000,000	96,000,000					100 %	83,600,000		
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Bulan	12 Bulan	106,000,000	52,500,000	52,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Bulan	39,600,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Bulan	12 Bulan	98,000,000	37,500,000	37,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Bulan	19,800,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					4 Unit	0	0	6,000,000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	4 Unit	12,100,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan	12 Bulan	41,000,000	6,000,000	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Bulan	12,100,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik	85,00 Persen		78,00 Persen	80,00 Persen	80,00 Persen	1,877,630,500	1,831,292,500	1,831,292,500					80,00 Persen	1,278,893,550		
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah masyarakat yang menerima informasi publik dari saluran resmi pemerintah daerah	orang		orang	1000 orang	1000 orang	1,877,630,500	1,831,292,500	1,831,292,500					1000 orang	1,278,893,550		
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah yang didesiminasikan sesuai strategi komunikasi				1 Dokumen 100 Persen	1 Dokumen 100 Persen	245,553,000	370,803,000	370,803,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen 100 Persen	270,108,300	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh dinas provinsi dan kab/kota sesuai amanat				0 Dokumen 100 Persen	0 Dokumen 100 Persen	72,800,000	72,800,000	72,800,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Dokumen 100 Persen	80,080,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		UU no.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik																
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik persentase pelayanan informasi publik di kabupaten pesisir barat				0 Dokumen 100 Porsen	0 Dokumen 100 Porsen	63,477,500	128,677,500	128,677,500	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Dokumen 100 Porsen	14,825,250	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media jumlah Media Yang Bekerjasama				0 Layanan 100 Media	0 Layanan 100 Media	1,420,800,000	1,259,012,000	1,259,012,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Layanan 100 Media	913,880,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0 Orang	75,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Orang	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	85,00 Porsen		77,00 Porsen	80,00 Porsen	80,00 Porsen	1,191,394,000	282,871,900	282,871,900					80,00 Porsen	1,517,690,500		
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penyediaan informasi digital di lingkup pemerintah daerah	Porsen		Porsen	100 Porsen	100 Porsen	7,200,000	0	0					100 Porsen	0		
2 16 03 2.01 01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				0 Domain	0 Domain	7,200,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Domain	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pemerintah Secara Digital	%		%	100 %	100 %	1,184,194,000	282,871,900	282,871,900					100 %	1,517,690,500		
2 16 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Daerah Kabupaten/Kota	dan Diseminasi Data Statistik Sektoral									Kelurahan	Umum						
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola Operasional Pengolaahan Data				5 VM 12 Bulan	5 VM 12 Bulan	258,753,500	174,867,900	174,867,900	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	5 VM 12 Bulan	340,250,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 03 2.02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	396,162,200	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	42 Perangkat Daerah	396,162,200	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				5 Unit	5 Unit	204,000,000	79,000,000	79,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	5 Unit	300,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	59,387,300	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	45,387,300	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	235,891,000	29,004,000	29,004,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	435,891,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							131,545,000	41,045,000	41,045,000						45,699,500		
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	131,545,000	41,045,000	41,045,000						2 Dokumen	45,699,500	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pengelolaan data statistik sektoral	%		%	100 %	100 %	131,545,000	41,045,000	41,045,000						100 %	45,699,500	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	1 Dokumen	91,545,000	41,045,000	41,045,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	45,699,500	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 20 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang				0 Orang	0 Orang	40,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Orang	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Daerah yang Terintegrasi	Terintegrasi									Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik					
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							156,800,000	182,300,000	182,300,000					84,480,000			
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							156,800,000	182,300,000	182,300,000					84,480,000			
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000	47,500,000	47,500,000					0			
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	50,000,000	47,500,000	47,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik		39 Perangkat Daerah	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan keamanan informasi daerah	%		%	100 %	100 %	106,800,000	134,800,000	134,800,000					100 %	84,480,000		
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi terlaksananya operasi jaringan sandi komunikasi informasi pemerintahan daerah melalui menara telekomunikasi selular da radio				39 Perangkat Daerah 12 Bulan	39 Perangkat Daerah 12 Bulan	106,800,000	134,800,000	134,800,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	39 Perangkat Daerah 12 Bulan	84,480,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							3,690,486,400	3,132,843,600	3,132,843,600					3,767,010,110			
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	2,768,909,000	2,318,645,600	2,318,645,600					90,00 Persen	2,799,510,110		
2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	7,000,000	10,162,500	10,162,500					12 Bulan	11,178,750		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000	5,162,500	5,162,500	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	2 Dokumen	5,678,750	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Laporan	5,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,897,437,600	1,756,316,600	1,756,316,600					12 Bulan	2,088,831,360		
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1,891,937,600	1,749,316,600	1,749,316,600	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	13 Orang/bulan	2,081,131,360	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Laporan	2,750,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	2,000,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	18 Laporan	2,750,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Dokumen	2,200,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	10,000,000	10,000,000					12 Bulan	15,000,000		
2 17 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	10,000,000	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	5 Orang	15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	348,026,400	255,352,000	255,352,000					12 Bulan	296,500,000		
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	2,840,000	1,388,000	1,388,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Bulan	2,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Paket	27,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	42,186,400	35,964,000	35,964,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Bulan	40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	17,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Bulan	15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Bulan	11 Bulan	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	11 Bulan	12,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	250,000,000	170,000,000	170,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Bulan	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Disediakan	unit		unit	5 unit	5 unit	135,000,000	1,410,000	1,410,000					5 unit	65,000,000		
2 17 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	2 Unit	57,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 17 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	85,000,000	1,410,000	1,410,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Unit	7,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tagihan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	190,795,000	98,854,500	98,854,500					12 Bulan	133,000,000		
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83,400,000	24,600,000	24,600,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Laporan	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	102,000,000	72,000,000	72,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Bulan	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	5,395,000	2,254,500	2,254,500	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Bulan	3,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	165,650,000	186,550,000	186,550,000					12 Bulan	190,000,000		
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Bulan	12 Bulan	115,400,000	133,550,000	133,550,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Bulan	135,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan	12 Bulan	50,250,000	53,000,000	53,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Bulan	55,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	55,00 Persen		49,00 Persen	50,00 Persen	50,00 Persen	42,186,400	63,828,000	63,828,000					50,00 Persen	65,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	Kecamatan		Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	42,186,400	63,828,000	63,828,000						11 Kecamatan	65,000,000	
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Kecamatan	11 Kecamatan	42,186,400	63,828,000	63,828,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	11 Kecamatan	65,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten	60,00 Persen		n/a Persen	45,00 Persen	45,00 Persen	479,391,000	520,370,000	520,370,000						45,00 Persen	550,000,000	
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan yang Diikuti oleh Pengurus Koperasi dan Pelaku UKM	Kali		Kali	7 Kali	7 Kali	479,391,000	520,370,000	520,370,000						7 Kali	550,000,000	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Perkoperasian dan UMKM				7 Kali	7 Kali	479,391,000	520,370,000	520,370,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	7 Kali	550,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	2,29 Persen		1,71 Persen	1,98 Persen	1,98 Persen	400,000,000	230,000,000	230,000,000						1,98 Persen	352,500,000	
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan	Lembaga		Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	400,000,000	230,000,000	230,000,000						1 Lembaga	352,500,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kepentingan																	
2 17 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	50,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	50 Unit Usaha	57,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Lembaga Penerima Hibah				1 Lembaga	1 Lembaga	250,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	1 Lembaga	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2 17 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Penyelenggaraan Pekan Festival UMKM				5 Kali	5 Kali	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	5 Kali	45,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							693,994,058	936,843,000	936,843,000						1,300,770,000		
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	1,59 Persen		11,53 Persen	11,55 Persen	11,55 Persen	113,811,058	490,453,000	490,453,000						11,55 Persen	520,000,000	
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Difasilitasi	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	113,811,058	490,453,000	490,453,000						2 Lokasi	520,000,000	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Lokasi	2 Lokasi	55,000,000	389,642,000	389,642,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	2 Lokasi	400,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2 Lokasi	2 Lokasi	58,811,058	100,811,000	100,811,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	2 Lokasi	120,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	70,00 Persen		n/a Persen	40,00 Persen	40,00 Persen	319,183,000	95,390,000	95,390,000						40,00 Persen	380,770,000	
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Jumlah aktivitas monitoring	Kali		Kali	48 Kali	48 Kali	34,351,000	60,358,000	60,358,000						48 Kali	65,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																	
3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				48 Laporan	48 Laporan	34,351,000	60,358,000	60,358,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	48 Laporan	65,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas pemantauan	Kali		Kali	52 Kali	52 Kali	260,032,000	35,032,000	35,032,000						52 Kali	287,250,000	
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				52 Laporan	52 Laporan	45,032,000	35,032,000	35,032,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	52 Laporan	40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	215,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	5 Laporan	247,250,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas Pengawasan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	24,800,000	0	0						12 Bulan	28,520,000	
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	12 Laporan	24,800,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	12 Laporan	28,520,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Ekspor Barang dan Jasa	43,227 juta/rupee		43,012 juta/rupee	43,098 juta/rupee	43,098 juta/rupee	261,000,000	351,000,000	351,000,000						43,098 juta/rupee	400,000,000	
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang	Jumlah Pameran Dagang	Kali		Kali	2 Kali	2 Kali	261,000,000	351,000,000	351,000,000						2 Kali	400,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang yang Terselenggara				2 Pameran	2 Pameran	261,000,000	351,000,000	351,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	2 Pameran	400,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							5,473,010,397	5,746,294,900	5,746,294,900						7,255,245,839		
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	2,775,719,547	2,719,205,900	2,719,205,900						90,00 Persen	3,077,476,490	
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	12,400,000	10,400,000	10,400,000						2 dokumen	11,440,000	
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7,400,000	5,400,000	5,400,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	5,940,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	5,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,882,312,600	1,994,298,900	1,994,298,900						12 Bulan	2,193,728,790	
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	1,876,508,600	1,988,494,900	1,988,494,900	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	14 bulan	2,187,344,390	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2,304,000	2,304,000	2,304,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	3 Laporan	2,534,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 18 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	18 Laporan	2,750,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	1,100,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terciptanya peningkatan SDM yang berdaya saing	8 Orang		2 Orang	4 Orang	4 Orang	25,000,000	25,000,000	25,000,000						4 Orang	27,500,000	
2 18 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	5 Orang	27,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertibnya administrasi SKPD	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	564,005,947	469,726,000	469,726,000						12 Bulan	517,248,600	
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	550,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	27,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	65,505,947	66,726,000	30,726,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	12 bulan	73,398,600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	12 Dokumen	13,200,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	11 Laporan	12,100,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kelurahan		dan Berkeadilan				Pintu	
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	450,000,000	355,000,000	391,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	12 Bulan	390,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya barang milik daerah	14 Unit		12 Unit	12 Unit	12 Unit	85,000,000	84,750,000	84,750,000					12 Unit	142,725,000		
2 18 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	45,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	8 Unit	49,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	40,000,000	84,750,000	84,750,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	12 Unit	93,225,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	140,051,000	59,331,000	59,331,000					12 Bulan	98,264,100		
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	30,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	12 bulan	33,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	107,000,000	57,000,000	57,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	62,700,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3,051,000	2,331,000	2,331,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	2,564,100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	tersedianya barang milik daerah	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	66,950,000	75,700,000	75,700,000					12 Bulan	86,570,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Daerah																	
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	61,850,000	73,100,000	73,100,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	4 Unit	80,410,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	2,100,000	2,600,000	2,600,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	4 Unit	2,860,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	3,300,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)	750 Perusahaan/Perorangan		729 Perusahaan/Perorangan	730 Perusahaan/Perorangan	730 Perusahaan/Perorangan	340,999,405	0	0					730 Perusahaan/Perorangan	375,099,346		
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	340,999,405	0	0					12 Bulan	375,099,346		
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	340,999,405	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah 2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	375,099,346	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA	6,55 Persen		4,05 Persen	5,55 Persen	5,55 Persen	735,331,205	1,437,000,000	1,437,000,000					5,55 Persen	1,580,700,000		
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peminat investasi	150 Pengunjung		100 Pengunjung	110 Pengunjung	110 Pengunjung	735,331,205	1,437,000,000	1,437,000,000					110 Pengunjung	1,580,700,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	735,331,205	1,437,000,000	1,437,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha dan Masyarakat	1 Dokumen	1,580,700,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	17,49 Persen		14,99 Persen	16,49 Persen	16,49 Persen	628,960,230	903,959,000	903,959,000					16,49 Persen	1,467,227,003		
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	628,960,230	903,959,000	903,959,000					12 Bulan	1,467,227,003		
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				600 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha	124,762,000	856,742,500	856,742,500	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat dan Pengusaha	600 Pelaku Usaha	942,416,750	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	132,516,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat dan Pengusaha	1 Kegiatan Usaha	145,767,600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengaduan yang ditidaklanjuti				10 pengaduan	10 pengaduan	74,314,500	47,216,500	47,216,500	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat dan Pengusaha	10 pengaduan	51,938,150	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	297,367,730	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat dan Pengusaha	1 Kegiatan Usaha	327,104,503	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap ketentuan Perizinan	90,00 Persen		80,00 Persen	80,00 Persen	80,00 Persen	671,204,605	580,130,000	580,130,000						80,00 Persen	638,143,000	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	671,204,605	580,130,000	580,130,000						12 Bulan	638,143,000	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				1 Kegiatan Usaha.	1 Kegiatan Usaha.	175,988,605	50,000,000	50,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha	1 Kegiatan Usaha.	55,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	311,456,000	349,190,000	349,190,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	384,109,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	183,760,000	180,940,000	180,940,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha	1 Kegiatan Usaha	199,034,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Data Laporan Perizinan dan Non Perizinan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	320,795,405	106,000,000	106,000,000						5 Laporan	116,600,000	
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	320,795,405	106,000,000	106,000,000						5 Dokumen	116,600,000	
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berdasarkan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	320,795,405	106,000,000	106,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	116,600,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan									Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							6,476,365,725	6,692,047,900	6,692,047,900					6,476,365,725			
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	2,336,565,900	2,385,693,100	2,385,693,100					90,00 Persen	2,336,565,900		
2 19 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja SDM	%		%	100 %	100 %	6,400,000	6,400,000	6,400,000					100 %	6,400,000		
2 19 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1,400,000	1,400,000	1,400,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	4 Dokumen	1,400,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	1 Laporan	5,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja SDM	%		%	100 %	100 %	1,831,552,900	1,830,680,100	1,830,680,100					100 %	1,831,552,900		
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1,814,920,700	1,814,047,900	1,814,047,900	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	11 Orang/bulan	1,814,920,700	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	11,132,200	11,132,200	11,132,200	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	1 Dokumen	11,132,200	Dinas Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 19 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	1 Laporan	2,500,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	2 Laporan	2,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	1 Dokumen	1,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terciptanya pemuda yang bermoral,prestatif,Inovatif dan Mandiri Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja SDM	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	13,500,000	35,000,000	35,000,000						100 % 100 %	13,500,000	
2 19 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	13,500,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	2 Orang	13,500,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja SDM	%		%	100 %	100 %	219,143,000	275,143,000	275,143,000						100 %	219,143,000	
2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,004,000	5,004,000	5,004,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	1 Paket	5,004,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	1 Paket	25,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,451,000	14,451,000	14,451,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	1 Paket	14,451,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	10 Dokumen	12,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	1 Laporan	12,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150,688,000	200,688,000	200,688,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	1 Laporan	150,688,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja SDM	%		%	100 %	100 %	144,748,000	126,480,000	126,480,000						100 %	144,748,000	
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	42,000,000	23,732,000	23,732,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	1 Laporan	42,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	97,000,000	97,000,000	97,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	1 Laporan	97,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5,748,000	5,748,000	5,748,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	1 Laporan	5,748,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja SDM	%		%	100 %	100 %	121,222,000	111,990,000	111,990,000						100 %	121,222,000	
2 19 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	68,672,000	69,890,000	69,890,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	1 Unit	68,672,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	13,950,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	2 Unit	13,950,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	27,600,000	27,600,000	27,600,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	2 Unit	27,600,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	1 Unit	5,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur ASN	1 Unit	6,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	60,00 Persen		n/a Persen	55,00 Persen	55,00 Persen	1,675,000,000	1,936,354,800	1,936,354,800						55,00 Persen	1,675,000,000	
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,	Terciptanya pemuda yang bermoral,prestatif,Inovatif% dan Mandiri			%	100 %	100 %	650,000,000	941,354,800	941,354,800						100 %	650,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																	
2 19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				1 Dokumen 10 Orang	1 Dokumen 10 Orang	51,000,000	151,354,800	151,354,800	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Masyarakat Pesisir Barat	1 Dokumen 10 Orang	51,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				10 Orang	10 Orang	17,000,000	90,000,000	90,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Masyarakat Pesisir Barat	10 Orang	17,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				0 Orang 40 Orang	0 Orang 40 Orang	582,000,000	700,000,000	700,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Masyarakat Pesisir Barat	0 Orang 40 Orang	582,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Dan pengembangan Organisasi Kepemudaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,025,000,000	995,000,000	995,000,000						100 Persen	1,025,000,000	
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				44 Dokumen	44 Dokumen	1,025,000,000	995,000,000	995,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	0	44 Dokumen	1,025,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Cakupan Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	60,00 Persen		n/a Persen	45,00 Persen	45,00 Persen	2,464,799,825	2,370,000,000	2,370,000,000						45,00 Persen	2,464,799,825	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	KEOLAHRAGAAN																	
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya olahraga yang berkualitas,berprestasi, memasyarakat dan membudaya	%		%	100 %	100 %	80,000,000	100,000,000	100,000,000						100 %	80,000,000	
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				100 Unit	100 Unit	80,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Masyarakat Pesisir Barat	100 Unit	80,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya olahraga yang berkualitas,berprestasi, memasyarakat dan membudaya	%		%	100 %	100 %	61,112,011	150,000,000	150,000,000						100 %	61,112,011	
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	61,112,011	150,000,000	150,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Masyarakat Pesisir Barat	1 Dokumen	61,112,011	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terciptanya olahraga yang berkualitas,berprestasi, memasyarakat dan membudaya	%		%	100 %	100 %	154,285,954	275,000,000	275,000,000						100 %	154,285,954	
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				10 Orang	10 Orang	154,285,954	275,000,000	275,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Masyarakat Pesisir Barat	10 Orang	154,285,954	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pelaksanaan Kegiatan pembinaan Dan Bantuan Operasional Organisasi Keolahragaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,119,018,540	1,745,000,000	1,745,000,000						100 Persen	2,119,018,540	
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				20 Organisasi	20 Organisasi	2,119,018,540	1,745,000,000	1,745,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas	Masyarakat	20 Organisasi	2,119,018,540	Dinas Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														dan Kuantitas				
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terciptanya olahraga yang berkualitas,berprestasi, memasyarakat dan membudaya	%		%	100 %	100 %	50,383,320	100,000,000	100,000,000						100 %	50,383,320	
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	1 Dokumen	50,383,320	100,000,000	100,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Masyarakat Pesisir Barat	1 Dokumen	50,383,320	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							5,008,837,421	4,780,498,500	4,780,498,500						5,584,604,911		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Perikanan	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	3,173,671,640	2,661,983,460	2,640,983,460						90,00 Persen	3,153,877,836	
3 25 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terpenuhinya dokumen perencanaan, evaluasi kinerja perangkat daerah	93 persen		90 persen	90 persen	90 persen	6,464,000	6,464,000	6,464,000						90 persen	7,040,000	
3 25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1,414,000	1,414,000	1,414,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	2 Dokumen	1,540,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,050,000	5,050,000	5,050,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan	100 Persen		90 Persen	100 Persen	100 Persen	2,249,281,262	1,999,871,500	1,999,871,500						100 Persen	2,249,788,300	
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	2,239,888,262	1,990,498,500	1,990,498,500	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	aparatur	13 Orang/bulan	2,239,888,300	Dinas Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 25 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 laporan	1 laporan	2,525,000	2,525,000	2,525,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	aparatur	1 laporan	2,750,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,333,000	3,333,000	3,333,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	aparatur	1 Laporan	3,400,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2,020,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	aparatur	3 Laporan	2,100,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 laporan	1 laporan	1,515,000	1,515,000	1,515,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	aparatur	1 laporan	1,650,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan retribusi daerah dinas perikanan	93 Persen		90 Persen	90 Persen	90 Persen	8,079,998	0	0						90 Persen	8,159,184	
3 25 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8,079,998	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	8,159,184	Dinas Perikanan
3 25 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas SDM	10 Orang		2 Orang	2 Orang	2 Orang	57,570,000	15,000,000	15,000,000						2 Orang	57,600,000	
3 25 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	57,570,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	aparatur	2 Orang	57,600,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Kantor	95 Persen		90 Persen	90 Persen	90 Persen	339,821,469	242,507,552	338,037,960						90 Persen	341,411,800	
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				12 bulan	12 bulan	4,019,800	4,019,800	4,019,800	Kab. Pesisir Barat, Semua	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 bulan	4,020,000	Dinas Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan									Kecamatan, Semua Kelurahan		Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	25,250,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Bulan	25,500,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	34,821,669	27,487,752	27,487,752	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Bulan	34,821,800	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	12,120,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 bulan	13,200,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi				11 bulan	11 bulan	11,110,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	11 bulan	11,120,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	12 bulan	252,500,000	163,000,000	258,530,408	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 bulan	252,750,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pemenuhan Sarana dan Prasarana SDM	95 Persen		90 Persen	93 Persen	93 Persen	74,050,503	45,410,000	45,410,000						93 Persen	50,500,000	
3 25 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	41,410,000	5,410,000	5,410,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Unit	5,500,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	32,640,503	40,000,000	40,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	7 Unit	45,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 Persen		90 Persen	90 Persen	90 Persen	77,770,000	76,450,000	76,450,000						90 Persen	77,854,985	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Daerah																	
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	15,150,000	14,400,000	14,400,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 laporan	15,299,985	Dinas Perikanan
3 25 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57,570,000	57,000,000	57,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Laporan	57,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5,050,000	5,050,000	5,050,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Laporan	5,555,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	95 Persen		90 Persen	90 Persen	90 Persen	360,634,408	276,280,408	159,750,000						90 Persen	361,523,567	
3 25 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	21,210,000	21,000,000	21,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Unit	21,419,979	Dinas Perikanan
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	279,834,408	220,880,408	104,350,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	11 Unit	280,394,408	Dinas Perikanan
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30,300,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Unit	30,360,600	Dinas Perikanan
3 25 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	21 Unit	29,290,000	19,400,000	19,400,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	21 Unit	29,348,580	Dinas Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	15.002 Ton		10.980 Ton	14.136 Ton	14.136 Ton	612,264,065	753,259,760	753,259,760						14.136 Ton	803,513,031	
3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	meningkatnya produksi perikanan tangkap di danau sungai waduk, rawa, genangan air lainnya	15002 Ton		0 Ton	14136 Ton	14136 Ton	425,264,065	650,000,000	650,000,000						14136 Ton	699,513,031	
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				11 Dokumen	11 Dokumen	31,128,565	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Usaha Bersama	11 Dokumen	34,421,422	Dinas Perikanan
3 25 03 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				2 Unit 49 Unit	2 Unit 49 Unit	157,594,250	454,000,000	454,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Usaha Bersama	2 Unit 49 Unit	460,000,000	Dinas Perikanan
3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				28 Unit	28 Unit	236,541,250	196,000,000	196,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Usaha Bersama	28 Unit	205,091,609	Dinas Perikanan
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya kemampuan Nelayan	360 kelompok		0 kelompok	245 kelompok	245 kelompok	187,000,000	103,259,760	103,259,760						245 kelompok	104,000,000	
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				245 Kelompok	245 Kelompok	187,000,000	103,259,760	103,259,760	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Kelompok Usaha Bersama	245 Kelompok	104,000,000	Dinas Perikanan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton		Ton	215 Ton	215 Ton	592,099,655	672,125,280	693,125,280						215 Ton	597,750,651	
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya kemampuan pembudidaya ikan	375 Orang		0 Orang	55 Orang	55 Orang	148,759,780	121,356,280	142,356,280						55 Orang	153,830,780	
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti				6 Kelompok 55 orang	6 Kelompok 55 orang	48,957,880	72,708,000	72,708,000	Kab. Pesisir Barat, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Pembudida ya Ikan	6 Kelompok 55 orang	53,583,668	Dinas Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Pengembangan Kapasitas Jumlah Pembudi Daya Ikan Kecil									Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
3 25 04 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				6 Kelompok	8 Kelompok	99,801,900	48,648,280	69,648,280	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Pembudida ya Ikan	8 Kelompok	100,247,112	Dinas Perikanan
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Sarana prasarana Perikanan Budidaya	60 Kelompok		0 Kelompok	11 Kelompok	11 Kelompok	443,339,875	550,769,000	550,769,000					11 Kelompok	443,919,871		
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50 Unit	50 Unit	443,339,875	550,769,000	550,769,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah 2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	50 Unit	443,919,871	Dinas Perikanan
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batas biologis yang aman	0,033 Angka		0,030 Angka	0,032 Angka	0,032 Angka	160,660,206	44,528,000	44,528,000					0,032 Angka	126,133,404		
3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	terciptanya kepatuhan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Perikanan	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	160,660,206	44,528,000	44,528,000					1 laporan	126,133,404		
3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	80,330,103	44,528,000	44,528,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah 2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat Perikanan	1 Dokumen	45,000,000	Dinas Perikanan
3 25 05 2.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat				4 Dokumen	4 Dokumen	80,330,103	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat Perikanan	4 Dokumen	81,133,404	Dinas Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	dalam Kabupaten/Kota	Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tukar Nelayan	105 Angka		103,7 Angka	103 Angka	103 Angka	470,141,855	648,602,000	648,602,000					103 Angka	903,329,989		
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	terselenggaranya kegiatan gelar produk dan pemasaran hasil perikanan Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan	5 Kali Kali		0 Kali Kali	1 Kali 1 Kali	1 Kali 1 Kali	96,812,265	73,602,000	73,602,000					1 Kali 1 Kali	96,812,300		
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Produk hasil pengolahan ikan				3 jenis	3 jenis	96,812,265	73,602,000	73,602,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah 2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	3 jenis	96,812,300	Dinas Perikanan
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Ketersediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	kg		kg	6000 kg	6000 kg	373,329,590	575,000,000	575,000,000					6000 kg	806,517,689		
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6000 Ton	6000 Ton	164,216,152	575,000,000	575,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Pemasar dan Pengolah Hasil Perikanan	6000 Ton	600,000,000	Dinas Perikanan
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	209,113,438	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Pemasar dan Pengolah Hasil Perikanan	20 Pelaku Usaha	206,517,689	Dinas Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							5,557,874,702	9,193,044,100	9,193,044,100					5,964,007,560			
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pariwisata	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	3,708,476,242	3,468,451,700	3,468,451,700					90,00 Persen	4,079,323,866		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 26 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	25 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	17,057,020	18,468,000	18,468,000						5 Dokumen	18,762,722	
3 26 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7,239,780	7,400,000	7,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	4 Dokumen	7,963,758	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,817,240	6,068,000	6,068,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Dokumen	5,298,964	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	2 Laporan	5,500,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Pembayaran Gaji dan Administrasi Perkantoran	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,809,105,530	1,908,887,100	1,908,887,100						12 Bulan	1,990,016,083	
3 26 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1,785,562,500	1,878,044,100	1,878,044,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	14 Orang/bulan	1,964,118,750	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	18,043,030	25,343,000	25,343,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Dokumen	19,847,333	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Laporan	2,750,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi				18 Laporan	18 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	18 Laporan	2,200,000	Dinas Pariwisata

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD									Kelurahan		dan Berkeadilan					
3 26 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	1 Dokumen	1,100,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	57 Orang		6 Orang	12 Orang	12 Orang	84,500,000	75,000,000	75,000,000					12 Orang	92,950,000		
3 26 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Buah	70 Buah	24,500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	70 Buah	26,950,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	60,000,000	75,000,000	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Orang	66,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perkantoran	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	484,333,200	424,643,600	428,643,600					12 Bulan	532,766,520		
3 26 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,577,000	2,500,000	2,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Paket	1,734,700	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Paket	27,500,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	12 Bulan 0 Paket	179,256,200	138,643,600	138,643,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Bulan 0 Paket	197,181,820	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	10 Dokumen	13,200,000	Dinas Pariwisata

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 26 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	16,500,000	16,500,000	16,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	11 Laporan	18,150,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250,000,000	230,000,000	234,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Laporan	275,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Tetap	29 Paket		13 Paket	9 Paket	9 Paket	465,532,000	51,230,000	87,230,000					9 Paket	512,085,200		
3 26 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	7 Unit	50,236,000	0	36,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	7 Unit	55,259,600	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				44 Unit	44 Unit	415,296,000	51,230,000	51,230,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	44 Unit	456,825,600	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUmlah Layanan Umum Kantor	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	670,578,492	764,893,000	724,893,000					12 Bulan	737,636,341		
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150,000,000	111,000,000	111,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Laporan	165,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	67,000,000	67,000,000	67,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	3 Laporan	73,700,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	453,578,492	586,893,000	546,893,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	12 Laporan	498,936,341	Dinas Pariwisata

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	177,370,000	225,330,000	225,330,000						12 Bulan	195,107,000	
3 26 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	112,910,000	134,870,000	134,870,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	5 Unit	124,201,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha- bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				32 Unit	32 Unit	64,460,000	90,460,000	90,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	32 Unit	70,906,000	Dinas Pariwisata
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	3,38 Persen		2,38 Persen	2,78 Persen	2,78 Persen	730,465,640	90,000,000	90,000,000						2,78 Persen	803,512,204	
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Terbangun dan Terpelihara Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pengelolaan Destinasi Wisata	Lokasi Persen		Lokasi Persen	5 Lokasi 2.78 Persen	5 Lokasi 2.78 Persen	730,465,640	90,000,000	90,000,000						5 Lokasi 2.78 Persen	803,512,204	
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	2 Lokasi	229,664,640	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Destinasi Wisata	2 Lokasi	252,631,104	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeli- haraan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				3 Lokasi 0 Unit	3 Lokasi 0 Unit	500,801,000	90,000,000	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah 2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Destinasi Wisata	3 Lokasi 0 Unit	550,881,100	Dinas Pariwisata
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan Wisatawan	780.748 Orang		50.730 Orang	394.735 Orang	394.735 Orang	613,932,820	5,452,400,000	5,452,400,000						394.735 Orang	525,671,490	
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang		Orang	394735 Orang	394735 Orang	613,932,820	5,452,400,000	5,452,400,000						394735 Orang	525,671,490	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	308,776,920	152,400,000	152,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	190,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Laporan	2 Laporan	190,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	209,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	115,155,900	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	126,671,490	Dinas Pariwisata
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	50,00 Persen		10,00 Persen	20,00 Persen	20,00 Persen	505,000,000	182,192,400	182,192,400						20,00 Persen	555,500,000	
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Pariwisata	90 Persen		10 Persen	30 Persen	30 Persen	505,000,000	182,192,400	182,192,400						30 Persen	555,500,000	
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Aparatur dan Tenaga Ahli Kepariwisataan Yang Profesional				1 Kegiatan	1 Kegiatan	89,743,200	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	SMD Pariwisata	1 Kegiatan	98,717,520	Dinas Pariwisata
3 26 05 2.01 03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Pelatihan Kepariwisataan kepada Masyarakat Pariwisata				1 Laporan	1 Laporan	115,617,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	SMD Pariwisata	1 Laporan	127,178,700	Dinas Pariwisata
3 26 05 2.01 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan 0 Laporan	1 Laporan 0 Laporan	100,000,000	182,192,400	182,192,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	SMD Pariwisata	1 Laporan 0 Laporan	110,000,000	Dinas Pariwisata

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif																
3 26 05 2.01 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekraf				1 Laporan	1 Laporan	199,639,800	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	SMD Pariwisata	1 Laporan	219,603,780	Dinas Pariwisata
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							2,700,130,537	2,748,903,300	2,748,903,300						5,030,748,577		
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	2,143,130,537	2,085,903,300	2,085,903,300						90,00 Persen	4,374,048,577	
2 07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	8,500,000	7,500,000	7,500,000						100 Persen	9,350,000	
2 07 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	2 Dokumen	3,850,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Serai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	2 Laporan	5,500,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	1,492,834,700	1,684,099,800	1,684,099,800						100 Persen	1,920,244,370	
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1,476,834,700	1,674,099,800	1,674,099,800	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	aparatur	19 Orang/bulan	1,902,644,370	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				2 Laporan	1 Laporan	3,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas	aparatur	1 Laporan	3,850,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berdaya Saing	dan Kuantitas				Perindustrian
2 07 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7,500,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Serai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	aparatur	12 Laporan	8,250,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Serai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	aparatur	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	30,000,000	0	0						100 Persen	33,000,000	
2 07 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	4 Orang	33,000,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	263,495,837	196,803,500	196,803,500						100 Persen	2,032,204,207	
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,500,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Serai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	aparatur	1 Paket	8,250,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Serai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	aparatur	1 Paket	27,500,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	CAKUPAN PEMENUHAN PENUNJANG KINERJA PERANGKAT DAERAH Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 % 1 Paket	100 % 1 Paket	32,000,000	26,403,500	26,403,500	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Serai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	aparatur	100 % 1 Paket	35,200,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 07 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 SKHU	12,000,000	14,400,000	14,400,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	aparatur	10 SKHU	13,200,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman				1 Laporan	11 Bulan	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Serai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	aparatur	11 Bulan	12,100,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12 Bulan	175,995,837	120,000,000	120,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Serai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	aparatur	12 Bulan	1,935,954,207	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	136,000,000	56,000,000	56,000,000					100 Persen	149,600,000		
2 07 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				25 Unit	4 Unit	136,000,000	56,000,000	56,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	4 Unit	149,600,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	121,300,000	74,500,000	74,500,000					100 Persen	133,400,000		
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16,800,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Serai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	12 Laporan	18,450,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	97,000,000	72,000,000	72,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Serai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	1 Laporan	106,700,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Serai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	1 Laporan	8,250,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	91,000,000	67,000,000	67,000,000						100 Persen	96,250,000	
2 07 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	70,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Serai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	jumlah barang	2 Unit	77,000,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	11,000,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Serai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	jumlah barang	15 Unit	8,250,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Serai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	jumlah barang	1 Unit	11,000,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,21 Persen		3,41 Persen	2,80 Persen	2,80 Persen	250,000,000	545,000,000	545,000,000						2,80 Persen	275,000,000	
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							200,000,000	0	0							220,000,000	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				30 Orang	30 Orang	200,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Masyarakat	30 Orang	220,000,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 03 2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Laporan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	545,000,000	545,000,000						1 Dokumen	55,000,000	
2 07 03 2.05 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	545,000,000	545,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Masyarakat	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Sebelumnya						
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75,54 Persen		70,54 Persen	73,04 Persen	73,04 Persen	180,000,000	73,000,000	73,000,000						73,04 Persen	242,000,000	
2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota							110,000,000	0	0							165,000,000	
2 07 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				200 Orang	200 Orang	110,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Mayarakat	200 Orang	165,000,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar	orang		orang	1000 orang	1000 orang	70,000,000	73,000,000	73,000,000						1000 orang	77,000,000	
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Besaran Tenaga kerja yang terdaftar				2000 orang	2000 orang	70,000,000	73,000,000	73,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	masyarakat	2000 orang	77,000,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	80,00 Persen		n/a Persen	65,00 Persen	65,00 Persen	127,000,000	45,000,000	45,000,000						65,00 Persen	139,700,000	
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100 Persen		60 Persen	65 Persen	65 Persen	127,000,000	45,000,000	45,000,000						65 Persen	139,700,000	
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				2 Perkara	2 Perkara	62,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Perusahaan	2 Perkara	68,200,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
2 07 05 2.02 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				10 Orang	10 Orang	65,000,000	45,000,000	45,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Perusahaan	10 Orang	71,500,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							554,000,000	984,744,500	984,744,500							609,400,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	45,00 Persen		35,00 Persen	37,00 Persen	37,00 Persen	479,000,000	984,744,500	984,744,500						37,00 Persen	526,900,000	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan usaha Industri kecil menengah	kelompok		kelompok	20 kelompok	20 kelompok	479,000,000	984,744,500	984,744,500						20 kelompok	526,900,000	
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	190,000,000	770,124,500	770,124,500	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	209,000,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	190,000,000	214,620,000	214,620,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan Ekonomi Daerah 2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	209,000,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
3 31 02 2.01 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	99,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	108,900,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							75,000,000	0	0							82,500,000	
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							75,000,000	0	0							82,500,000	
3 31 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Ekonomi Daerah		1 Dokumen	82,500,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							404,000,000	440,452,000	440,452,000							165,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementrian dan direvitalisasi	44,00 Angka		n/a Angka	42,03 Angka	42,03 Angka	255,000,000	440,452,000	440,452,000						42,03 Angka	165,000,000	
3 32 03 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Transimigrasi	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	255,000,000	440,452,000	440,452,000						80 Persen	165,000,000	
3 32 03 2.01 05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				40 Orang 0 Kepala Keluarga	40 Orang 0 Kepala Keluarga	60,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Masyarakat	40 Orang 0 Kepala Keluarga	0	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
3 32 03 2.01 06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	150,000,000	440,452,000	440,452,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Masyarakat	40 Orang	165,000,000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
3 32 03 2.01 20	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				1 Dokumen 0 Lokasi	1 Dokumen 0 Lokasi	45,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Masyarakat	1 Dokumen 0 Lokasi	0	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibina	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	149,000,000	0	0						1 Lokasi	0	
3 32 04 2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang di Bina	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	149,000,000	0	0						1 Lokasi	0	
3 32 04 2.01 01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				80 Kepala Keluarga	80 Kepala Keluarga	149,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Masyarakat	80 Kepala Keluarga	0	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							1,959,646,436	4,890,234,204	4,890,234,204					2,155,611,143			
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95,00 Persen		80,00 Persen	80,00 Persen	80,00 Persen	1,959,646,436	4,890,234,204	4,890,234,204					80,00 Persen	2,155,611,143		
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	100 persen		100 persen	85 persen	85 persen	1,959,646,436	4,890,234,204	4,890,234,204					85 persen	2,155,611,143		
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4 Dokumen	4 Dokumen	1,723,701,760	1,407,289,528	1,407,289,528	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	4 Dokumen	1,896,072,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB jumlah peserta				0 Dokumen 32 peserta	0 Dokumen 32 peserta	164,537,516	3,411,537,516	3,411,537,516	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	0 Dokumen 32 peserta	180,991,267	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	71,407,160	71,407,160	71,407,160	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Dokumen	78,547,876	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							1,413,419,000	1,177,847,411	1,177,847,411					1,554,760,900			
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	95,00 Persen		80,00 Persen	80,00 Persen	80,00 Persen	1,413,419,000	1,177,847,411	1,177,847,411					80,00 Persen	1,554,760,900		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 persen		100 persen	85 persen	85 persen	1,224,117,000	1,040,395,440	1,040,395,440						85 persen	1,346,528,700	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah koordinasi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	106,572,600	105,169,360	105,169,360	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Kegiatan	117,229,860	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	964,188,800	756,595,480	756,595,480	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	3 Laporan	1,060,607,680	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah perencanaan				0 Dokumen 1 Kegiatan	0 Dokumen 1 Kegiatan	153,355,600	178,630,600	178,630,600	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	0 Dokumen 1 Kegiatan	168,691,160	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 persen		100 persen	85 persen	85 persen	189,302,000	137,451,971	137,451,971						85 persen	208,232,200	
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	41,729,080	34,479,080	34,479,080	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Dokumen	45,901,988	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	38,949,080	31,449,080	31,449,080	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Dokumen	42,843,988	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan				1 Dokumen	1 Dokumen	108,623,840	71,523,811	71,523,811	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Dokumen	119,486,224	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Permukiman, Pertanahan																
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							1,098,756,000	1,913,827,855	1,913,827,855						1,208,631,600		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	25,000,000	25,000,000	25,000,000						90,00 Persen	27,500,000	
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 persen		100 persen	90 persen	90 persen	25,000,000	25,000,000	25,000,000						90 persen	27,500,000	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Dokumen	5,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Dokumen	5,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Dokumen	5,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Dokumen	5,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Dokumen	5,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	95,00 Persen		80,00 Persen	80,00 Persen	80,00 Persen	1,073,756,000	1,888,827,855	1,888,827,855						80,00 Persen	1,181,131,600	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan laporan fasilitasi pelaksanaan administrasi pembangunan yang tersedia	100 persen		100 persen	90 persen	90 persen	1,073,756,000	1,888,827,855	1,888,827,855					90 persen	1,181,131,600		
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	246,011,000	619,957,832	619,957,832	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	3 Dokumen	270,612,100	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	454,864,000	821,712,000	821,712,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Laporan	500,350,400	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	372,881,000	447,158,023	447,158,023	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	4 Laporan	410,169,100	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							886,505,000	514,319,000	514,319,000						975,155,500		
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	95,00 Persen		80,00 Persen	80,00 Persen	80,00 Persen	886,505,000	514,319,000	514,319,000					80,00 Persen	975,155,500		
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase pelaksanaan pelelangan pengadaan barang/jasa secara elektronik	100 persen		100 persen	85 persen	85 persen	886,505,000	514,319,000	514,319,000					85 persen	975,155,500		
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Paket Barang dan Jasa				0 Dokumen 150 paket	0 Dokumen 150 paket	231,950,000	121,837,000	121,837,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	0 Dokumen 150 paket	255,145,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah paket Layanan Pengadaan Secara Elektronik				0 Dokumen 150 paket	0 Dokumen 150 paket	461,430,000	355,408,000	355,408,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	0 Dokumen 150 paket	507,573,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Orang	4 Orang	193,125,000	37,074,000	37,074,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	4 Orang	212,437,500	Sekretariat Daerah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							126,592,105	35,074,110	35,074,110						139,261,310		
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	50,00 Persen		20,00 Persen	25,00 Persen	25,00 Persen	126,592,105	35,074,110	35,074,110						25,00 Persen	139,261,310	
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	indeks pembangunan manusia	100 persen		100 persen	90 persen	90 persen	126,592,105	35,074,110	35,074,110						90 persen	139,261,310	
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				8 Berkas	8 Berkas	63,296,052	16,999,590	16,999,590	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	aparatur	8 Berkas	69,635,652	Sekretariat Daerah
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah opd				0 Laporan 39 opd	0 Laporan 39 opd	63,296,053	18,074,520	18,074,520	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	aparatur	0 Laporan 39 opd	69,625,658	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							46,919,092,720	60,672,935,640	47,411,335,640						51,611,001,992		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	46,919,092,720	60,672,935,640	47,411,335,640						90,00 Persen	51,611,001,992	
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100 persen		100 persen	90 persen	90 persen	23,709,275,020	20,085,670,500	20,085,670,500						90 persen	26,080,202,522	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	23,708,429,020	20,081,350,500	20,081,350,500	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 Orang/bulan	26,079,271,922	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	282,000	1,440,000	1,440,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Laporan	310,200	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	282,000	1,440,000	1,440,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	2 Laporan	310,200	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	282,000	1,440,000	1,440,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Dokumen	310,200	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100 persen		100 persen	95 persen	95 persen	270,000,000	521,936,400	521,936,400					95 persen	297,000,000		
4 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah pengamanan barang milik daerah				12 bulan	12 bulan	245,000,000	500,000,000	500,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	269,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	21,936,400	21,936,400	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Laporan	27,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yg berkinerja baik	100 persen		100 persen	98 persen	98 persen	40,000,000	225,936,400	225,936,400					98 persen	44,000,000		
4 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	20,000,000	45,936,400	45,936,400	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Unit	22,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas				12 bulan	12 bulan	20,000,000	180,000,000	180,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	22,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100 persen		100 persen	90 persen	90 persen	1,068,916,970	2,305,651,260	2,305,651,260					90 persen	1,175,808,667		
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalansi listrik				12 bulan	12 bulan	14,822,000	27,122,000	27,122,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	16,304,200	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah aktivitas				12 bulan	12 bulan	34,764,970	328,658,400	328,658,400	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	38,241,467	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah aktivitas				12 bulan	12 bulan	25,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	27,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	84,330,000	275,010,000	275,010,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 Paket	92,763,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah SKHU				12 bulan	12 bulan	510,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	561,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	400,000,000	574,860,860	574,860,860	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 Laporan	440,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100 persen		100 persen	90 persen	90 persen	266,456,000	2,242,420,000	2,242,420,000					90 persen	293,101,600		
4 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Unit	55,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25,000,000	1,860,980,000	1,860,980,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Unit	27,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	45,000,000	150,980,000	150,980,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	10 Unit	49,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pengadaan peralatan dan mesin lainnya				12 bulan	12 bulan	96,456,000	130,980,000	130,980,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	106,101,600	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50,000,000	99,480,000	99,480,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	10 Unit	55,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100 persen		100 persen	90 persen	90 persen	17,513,992,030	30,795,640,000	17,534,040,000					90 persen	19,265,391,233		
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan				100 Persen	100 Persen	666,192,030	1,332,400,000	1,332,400,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	100 Persen	732,811,233	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan				12 bulan	12 bulan	612,000,000	910,000,000	910,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	673,200,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelayanan				12 bulan	12 bulan	16,235,800,000	28,553,240,000	15,291,640,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	17,859,380,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi bai	100 persen		100 persen	90 persen	90 persen	2,124,700,000	2,390,000,000	2,390,000,000					90 persen	2,337,170,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan				12 bulan	12 bulan	1,122,000,000	876,800,000	876,800,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	1,234,200,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan				12 bulan	12 bulan	769,900,000	1,071,200,000	1,071,200,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	846,890,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	lama pemeliharaan				12 bulan	12 bulan	156,800,000	337,000,000	337,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	172,480,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung				12 bulan	12 bulan	6,000,000	105,000,000	105,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	6,600,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	70,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	10 Unit	77,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan penyediaan administrasi dan keuangan dan operasional KDH/WKDH	100 persen		100 persen	90 persen	90 persen	496,904,100	493,089,500	493,089,500					90 persen	546,594,510		
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	171,904,100	168,089,500	168,089,500	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 Orang/Bulan	189,094,510	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	2 Orang	27,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 Orang/Bulan	330,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kepala Daerah	Daerah dan Wakil Kepala Daerah									Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	yang Baik				
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang disediakan	100 persen		100 persen	90 persen	90 persen	1,428,848,600	1,612,591,580	1,612,591,580					90 persen	1,571,733,460		
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	pelayanan kerumahtanggaan				12 bulan	12 bulan	697,441,800	739,709,200	739,709,200	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	767,185,980	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	jumlah pelayanan				12 bulan	12 bulan	512,441,800	569,709,200	569,709,200	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	563,685,980	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	jumlah pelayanan				12 bulan	12 bulan	218,965,000	303,173,180	303,173,180	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	240,861,500	Sekretariat Daerah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							173,948,001	145,112,916	145,112,916						191,342,800		
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan Daerah yang dikelola	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	173,948,001	145,112,916	145,112,916						1 Lokasi	191,342,800	
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	indeks pembangunan manusia	100 persen		100 persen	90 persen	90 persen	77,702,569	70,968,000	70,968,000					90 persen	85,472,825		
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				116 Perpustakaan	116 Perpustakaan	55,168,823	48,443,000	48,443,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	aparatur	116 Perpustakaan	60,685,705	Sekretariat Daerah
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	22,533,746	22,525,000	22,525,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	aparatur	1 Eksemplar	24,787,120	Sekretariat Daerah
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	indeks pembangunan manusia	100 persen		100 persen	85 persen	85 persen	96,245,432	74,144,916	74,144,916					85 persen	105,869,975		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				194 Perpustakaan	194 Perpustakaan	96,245,432	74,144,916	74,144,916	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	aparatur	194 Perpustakaan	105,869,975	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							701,200,000	392,233,000	392,233,000						771,320,000		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	701,200,000	392,233,000	392,233,000						90,00 Persen	771,320,000	
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Cakupan Pengelolaan Organisasi Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	100 persen		100 persen	80 persen	80 persen	701,200,000	392,233,000	392,233,000						80 persen	771,320,000	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				50 Dokumen	50 Dokumen	207,660,000	101,775,000	101,775,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	50 Dokumen	228,426,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				50 Laporan	50 Laporan	348,450,000	137,396,000	137,396,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	50 Laporan	383,295,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				55 Dokumen	55 Dokumen	61,450,000	104,812,000	104,812,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	55 Dokumen	67,595,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				50 Dokumen	50 Dokumen	61,640,000	40,250,000	40,250,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	50 Dokumen	67,804,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	22,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Dokumen	24,200,000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							1,867,913,805	1,471,909,840	1,471,909,840						2,054,705,184		
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan	95,00 Persen		80,00 Persen	80,00 Persen	80,00 Persen	1,867,913,805	1,471,909,840	1,471,909,840						80,00 Persen	2,054,705,184	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	RAKYAT	Kesejahteraan Rakyat																
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaporan administrasi tata pemerintahan Tepat Waktu	100 persen		100 persen	95 persen	95 persen	1,409,504,331	1,286,483,840	1,286,483,840						95 persen	1,550,454,763	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan jumlah kegiatan				0 Dokumen 26 kegiatan	0 Dokumen 26 kegiatan	923,213,225	843,398,000	843,398,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	0 Dokumen 26 kegiatan	1,015,534,547	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				4 Dokumen	4 Dokumen	318,314,306	284,604,000	284,604,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	4 Dokumen	350,145,736	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah buku Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				20 buku 0 Dokumen	20 buku 0 Dokumen	167,976,800	158,481,840	158,481,840	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	20 buku 0 Dokumen	184,774,480	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	cakupan pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah	100 persen		100 persen	95 persen	95 persen	458,409,474	185,426,000	185,426,000						95 persen	504,250,421	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	adanya kerjasama				12 bulan	12 bulan	458,409,474	185,426,000	185,426,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 bulan	504,250,421	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							1,016,836,500	1,106,153,142	1,106,153,142						1,118,520,150		
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95,00 Persen		80,00 Persen	80,00 Persen	80,00 Persen	1,016,836,500	1,106,153,142	1,106,153,142						80,00 Persen	1,118,520,150	
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan fasilitasi dan koordinasi hukum	100 persen		100 persen	85 persen	85 persen	1,016,836,500	1,106,153,142	1,106,153,142						85 persen	1,118,520,150	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	751,056,700	560,857,200	560,857,200	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	3 Dokumen	826,162,370	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	jumlah peserta				150 peserta	150 peserta	181,136,200	486,034,342	486,034,342	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	150 peserta	199,249,820	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				2 Dokumen	2 Dokumen	84,643,600	59,261,600	59,261,600	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	2 Dokumen	93,107,960	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							3,796,014,071	2,165,774,514	2,165,774,514						4,175,617,477		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	3,796,014,071	2,165,774,514	2,165,774,514						90,00 Persen	4,175,617,477	
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yg berkinerja baik	100 persen		100 persen	98 persen	98 persen	376,356,000	374,648,000	374,648,000						98 persen	413,991,600	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				320 Paket	320 Paket	376,356,000	374,648,000	374,648,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	320 Paket	413,991,600	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							95,700,000	95,700,000	95,700,000							105,272,000	
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	95,700,000	95,700,000	95,700,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik		1 Paket	105,272,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Fasilitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen		100 persen	95 persen	95 persen	3,323,958,071	1,695,426,514	1,695,426,514						95 persen	3,656,353,877	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	1,538,803,155	813,738,514	813,738,514	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Laporan	1,692,683,470	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	1,340,245,720	652,688,000	652,688,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Laporan	1,474,270,292	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	444,909,196	229,000,000	229,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan	aparatur	1 Laporan	489,400,115	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kecamatan, Semua Kelurahan		Transformasi Pelayanan Publik	yang Baik				
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 02	SEKRETARIAT DPRD							31,830,187,450	32,004,893,700	32,004,893,700						35,013,206,194		
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat DPRD	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	20,218,082,200	20,592,788,450	20,591,367,600					90,00 Persen	22,239,890,419		
4 02 01 2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi Dokumen Perencanaan, Pengggaran, dsan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	6,400,000	6,400,000	6,400,000					100 %	7,040,000		
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1,400,000	1,400,000	1,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Dokumen	1,540,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan	5,500,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	15,041,254,500	1,745,556,900	1,745,556,900					100 %	16,545,379,950		
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS dan DPRD setiap bulannya				0 Orang/bulan 14 bulan	0 Orang/bulan 14 bulan	15,035,754,500	1,740,056,900	1,740,056,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Orang/bulan 14 bulan	16,539,329,950	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	2,750,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan	2,200,000	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD									Kelurahan							
4 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	1,100,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang berkinerja baik	100 %		100 %	100 %	100 %	800,000,000	800,000,000	700,000,000					100 %	880,000,000		
4 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				125 Stel	125 Stel	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	125 Stel	330,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 bulan	12 bulan	500,000,000	500,000,000	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 bulan	550,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100 %		100 %	100 %	100 %	1,423,509,223	1,654,606,663	1,754,606,663					100 %	1,565,860,145		
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	27,152,900	32,590,400	32,590,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 bulan	29,868,190	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	18,320,000	21,780,000	21,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 bulan	20,152,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 kali	1 kali	45,680,000	45,680,000	45,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 kali	50,248,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	215,114,700	231,497,263	231,497,263	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 bulan	236,626,170	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	500,000,000	700,000,000	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 bulan	550,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 bulan	11 bulan	347,500,000	347,500,000	347,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	11 bulan	382,250,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	12 bulan	269,741,623	275,559,000	375,559,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 bulan	296,715,785	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100 %		100 %	100 %	100 %	569,000,000	469,280,000	669,280,000					100 %	625,900,000		
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				32 Unit	37 Unit	149,000,000	229,780,000	429,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	37 Unit	163,900,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	420,000,000	239,500,000	239,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Tahun	462,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100 %		100 %	100 %	100 %	652,223,000	652,223,000	655,223,000					100 %	717,445,300		
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	288,000,000	288,000,000	291,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 bulan	316,800,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	57,000,000	57,000,000	57,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 bulan	62,700,000	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	307,223,000	307,223,000	307,223,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 bulan	337,945,300	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang dalam kondisi baik	100 %		100 %	100 %	100 %	1,156,303,247	1,130,493,247	927,493,247					100 %	1,271,933,571		
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	215,700,000	215,700,000	215,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	7 Unit	237,270,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 bulan	12 bulan	803,431,447	752,651,447	549,651,447	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 bulan	883,774,591	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 bulan	12 bulan	137,171,800	162,141,800	162,141,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 bulan	150,888,980	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %		100 %	100 %	100 %	270,500,000	13,835,336,800	13,835,336,800					100 %	297,550,000		
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	0	13,564,836,800	13,564,836,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas	Aparatur	25 Orang/Bulan	0	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	270,500,000	270,500,000	270,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	25 Orang	297,550,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang Terpenuhi	100 %		100 %	100 %	100 %	298,892,230	298,891,840	297,470,990					100 %	328,781,453		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat - alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota				0 Laporan 34 Kali	0 Laporan 0 Kali	66,421,080	66,420,850	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Laporan 0 Kali	73,063,188	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				60 kali	70 kali	232,471,150	232,470,990	297,470,990	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	70 kali	255,718,265	Sekretariat DPRD
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersusun dan Terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	11,612,105,250	11,412,105,250	11,413,526,100					100 Persen	12,773,315,775		
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang Sesuai Regulasi	100 %		100 %	100 %	100 %	576,455,720	576,455,720	576,455,720					100 %	634,101,292		
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 kali	1 kali	16,355,720	16,355,720	16,355,720	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 kali	17,991,292	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				4 Ranperda	4 Ranperda	560,100,000	560,100,000	560,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	4 Ranperda	616,110,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Rapat Pembahasan Anggaran	100 %		100 %	100 %	100 %	405,350,000	405,350,000	405,350,000					100 %	445,885,000		
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				6 Kali	6 Kali	62,898,000	62,898,000	62,898,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	6 Kali	69,187,800	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				6 Kali	6 Kali	62,898,000	62,898,000	62,898,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar,	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	6 Kali	69,187,800	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan		Pelayanan Publik					
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Jumlah Hasil Pembahasan APBD				0 Dokumen 6 Kali	0 Dokumen 6 Kali	91,286,000	91,286,000	91,286,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Dokumen 6 Kali	100,414,600	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				6 Kali	6 Kali	91,286,000	91,286,000	91,286,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	6 Kali	100,414,600	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				9 Kali	9 Kali	96,982,000	96,982,000	96,982,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	9 Kali	106,680,200	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %		100 %	100 %	100 %	2,599,609,700	2,609,609,700	2,441,609,700					100 %	2,859,570,670		
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				5 Kali	6 Kali	2,057,339,200	2,067,339,200	2,094,339,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	6 Kali	2,263,073,120	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				4 Orang	0 Orang	195,000,000	195,000,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Orang	214,500,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	6 Orang	347,270,500	347,270,500	347,270,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	6 Orang	381,997,550	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan Pokir yang terealisasi	100 %		100 %	100 %	100 %	1,150,875,350	1,100,875,350	1,150,875,350					100 %	1,265,962,885		
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				36 Kali	36 Kali	180,000,000	130,000,000	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur, Masyarakat	36 Kali	198,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				0 Dokumen 1 Kali	0 Dokumen 1 Kali	27,152,750	27,152,750	27,152,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar,	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan	Aparatur, Masyarakat	0 Dokumen 1 Kali	29,868,025	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun									Semua Kelurahan		Transformasi Pelayanan Publik	yang Baik				
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Kali	3 Kali	943,722,600	943,722,600	993,722,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur, Masyarakat	3 Kali	1,038,094,860	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Peningkatan Kerja sama Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	250,000,000	240,000,000	98,000,000					100 Persen	275,000,000		
4 02 02 2.07 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	240,000,000	98,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	275,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terintegrasi Program- program DPRD untuk Melaksanakan fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100 %		100 %	100 %	100 %	6,629,814,480	6,479,814,480	6,741,235,330					100 %	7,292,795,928		
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				28 Kali	30 Kali	6,600,000,000	6,450,000,000	6,711,420,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	30 Kali	7,260,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				0 Dokumen 12 Kali	0 Dokumen 12 Kali	29,814,480	29,814,480	29,814,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Dokumen 12 Kali	32,795,928	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 01	PERENCANAAN							9,265,893,080	7,242,902,100	7,242,902,100						9,564,684,280		
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	3,676,948,000	3,966,256,100	3,966,256,100					90,00 Persen	3,975,739,200		
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen		90 Persen	100 Persen	100 Persen	28,693,600	28,693,000	28,693,000					100 Persen	31,562,960		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Tepat Waktu																
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4,025,600	4,025,000	4,025,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Dokumen	4,428,160	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,106,000	4,106,000	4,106,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	4,516,600	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,106,000	4,106,000	4,106,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	4,516,600	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,106,000	4,106,000	4,106,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	4,516,600	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,106,000	4,106,000	4,106,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	4,516,600	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,152,000	4,152,000	4,152,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	4,567,200	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkar Daerah/ Lakip Bappelitbangda				1 Dokumen	1 Dokumen	4,092,000	4,092,000	4,092,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	4,501,200	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen		90 Persen	100 Persen	100 Persen	2,593,436,400	2,672,145,100	2,672,145,100						100 Persen	2,852,780,040	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	2,579,399,200	2,658,109,100	2,658,109,100	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	14 Bulan	2,837,339,120	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,130,400	4,130,000	4,130,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	4,543,440	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,834,400	5,834,000	5,834,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan	6,417,840	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4,072,400	4,072,000	4,072,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	4,479,640	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	100 Persen		90 Persen	100 Persen	100 Persen	43,600,000	166,000,000	166,000,000						100 Persen	45,100,000	
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Olahraga				42 Stell	42 Stell	28,600,000	21,000,000	21,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	42 Stell	28,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	15,000,000	145,000,000	145,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	20 Orang	16,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100 Persen		90 Persen	100 Persen	100 Persen	473,494,000	721,648,000	721,648,000						100 Persen	485,899,800	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,058,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	4,463,800	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	27,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	124,436,000	114,648,000	114,648,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Paket	124,436,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan/ SKHU				10 Dokumen	10 Dokumen	84,000,000	96,000,000	96,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	10 Dokumen	92,400,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	11 Laporan	12,100,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	225,000,000	475,000,000	475,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan	225,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja	100 Persen		90 Persen	100 Persen	100 Persen	36,000,000	18,000,000	18,000,000						100 Persen	36,000,000	
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	36,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	36,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100 Persen		90 Persen	100 Persen	100 Persen	324,954,000	216,000,000	216,000,000						100 Persen	357,449,400	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	34,800,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	38,280,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	286,000,000	216,000,000	216,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	7 Laporan	314,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4,154,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	4,569,400	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik	100 Persen		90 Persen	100 Persen	100 Persen	176,770,000	143,770,000	143,770,000					100 Persen	166,947,000		
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	143,250,000	135,250,000	135,250,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	5 Unit	157,575,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	8,520,000	8,520,000	8,520,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Unit	9,372,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan terhadap Dokumen Penganggaran	100 Persen		87,43 Persen	100 Persen	100 Persen	2,868,331,600	1,632,651,000	1,632,651,000					100 Persen	2,868,331,600		
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100 Persen		89,57 Persen	100 Persen	100 Persen	1,648,658,960	930,294,000	930,294,000					100 Persen	1,648,658,960		
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJPD dan Dokumen LKPJ				2 Dokumen	2 Dokumen	375,416,400	248,574,000	248,574,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Dokumen	375,416,400	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	122,691,360	100,808,000	100,808,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	122,691,360	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik / Teknokratik RPJMD				1 Berita Acara	1 Berita Acara	242,313,200	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Berita Acara	242,313,200	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah / Capaian Sosialisasi				1 Laporan	1 Laporan	73,500,320	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	73,500,320	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	342,619,520	214,807,000	214,807,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Berita Acara	342,619,520	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen LAKIP Kabupaten				1 Dokumen	1 Dokumen	176,995,520	84,263,000	84,263,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	176,995,520	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD /RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	315,122,640	281,842,000	281,842,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Dokumen	315,122,640	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	837,317,640	285,778,000	285,778,000					100 Persen	837,317,640		
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	2 Dokumen	565,800,640	163,042,000	163,042,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Dokumen	565,800,640	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				39 Orang	39 Orang	138,432,000	122,736,000	122,736,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	39 Orang	138,432,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	133,085,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan	Aparatur	1 Buku	133,085,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	yang Baik			Pengembangan Daerah	
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 Persen		87,43 Persen	100 Persen	100 Persen	382,355,000	416,579,000	416,579,000					100 Persen	382,355,000		
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	174,850,000	144,089,000	144,089,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	174,850,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	207,505,000	272,490,000	272,490,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	4 Laporan	207,505,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Konsistensi Keselarasan Program Prioritas Daerah Terhadap Program Prioritas Pusat	100,00 Persen		80,00 Persen	85,00 Persen	85,00 Persen	2,720,613,480	1,643,995,000	1,643,995,000					85,00 Persen	2,720,613,480		
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-Rata Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	70 Persen		70 Persen	70 Persen	70 Persen	1,259,753,880	833,995,000	833,995,000					70 Persen	1,259,753,880		
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	156,055,620	146,656,000	146,656,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	156,055,620	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	137,585,160	131,139,000	131,139,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	137,585,160	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	172,019,360	144,017,000	144,017,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	172,019,360	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	161,948,160	133,075,000	133,075,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	161,948,160	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	159,550,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	159,550,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	150,454,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	150,454,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	148,680,260	139,335,000	139,335,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	148,680,260	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	173,461,320	139,773,000	139,773,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	173,461,320	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-Rata Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	70 Persen		70 Persen	70 Persen	70 Persen	725,823,200	260,794,000	260,794,000						70 Persen	725,823,200	
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen				1 Laporan	1 Laporan	181,287,500	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua	Dana Transfer Umum-		5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan	Aparatur	1 Laporan	181,287,500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum		yang Baik			Pengembangan Daerah	
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	181,278,200	130,062,000	130,062,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	181,278,200	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	181,622,500	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	181,622,500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	181,635,000	130,732,000	130,732,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	181,635,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-Rata Capaian Kinerja Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan	70 Persen		70 Persen	70 Persen	70 Persen	735,036,400	549,206,000	549,206,000					70 Persen	735,036,400		
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	190,462,800	190,460,000	190,460,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	190,462,800	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	182,049,700	131,218,000	131,218,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	182,049,700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	181,255,700	96,491,000	96,491,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	181,255,700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	181,268,200	131,037,000	131,037,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	181,268,200	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							1,749,354,000	3,752,617,500	3,752,617,500						1,749,354,000			
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Angka	Sangat Inovatif	Angka	Sangat Inovatif	Angka	1,749,354,000	3,752,617,500	3,752,617,500					Sangat Inovatif	Angka	1,749,354,000	
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	80 Persen		80 Persen	80 Persen	80 Persen	465,354,000	2,346,030,500	2,346,030,500					80 Persen	465,354,000			
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	1 Laporan	107,791,000	193,667,500	193,667,500	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	107,791,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 05 02 2.01 04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	127,743,000	131,227,000	131,227,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	127,743,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 05 02 2.01 05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				4 Laporan	4 Laporan	125,000,000	1,884,762,000	1,884,762,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	4 Laporan	125,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	104,820,000	136,374,000	136,374,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	104,820,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	80 Persen		80 Persen	80 Persen	80 Persen	642,000,000	755,615,000	755,615,000					80 Persen	642,000,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				2 Dokumen	2 Dokumen	320,000,000	429,916,000	429,916,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Dokumen	320,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 2.02 02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1 Dokumen	1 Dokumen	322,000,000	325,699,000	325,699,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	322,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	80 Persen		80 Persen	80 Persen	80 Persen	642,000,000	650,972,000	650,972,000					80 Persen	642,000,000		
5 05 02 2.03 11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	323,000,000	325,289,000	325,289,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	323,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 2.03 13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	1 Dokumen	319,000,000	325,683,000	325,683,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	319,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							6,987,216,781	5,006,434,900	5,006,434,900					7,687,718,036			
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	3,917,599,150	3,137,871,050	3,137,871,050					90,00 Persen	4,307,949,492		
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	%		%	92.5 %	92.5 %	13,150,760	13,150,500	13,150,500					92.5 %	14,465,836		
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7,703,320	7,703,250	7,703,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Dokumen	8,473,652	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				2 Laporan	2 Laporan	5,447,440	5,447,250	5,447,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan	5,992,184	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	95,00 %		90 %	90 %	90 %	2,416,451,960	2,462,883,050	2,462,883,050					90 %	2,658,097,156		
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	2,410,003,800	2,456,434,900	2,456,434,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	14 Bulan	2,651,004,180	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,628,200	2,628,200	2,628,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan	2,891,020	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,436,200	2,436,200	2,436,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan	2,679,820	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,383,760	1,383,750	1,383,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	1,522,136	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	95,00 %		90 %	90 %	90 %	35,000,000	15,000,000	15,000,000					90 %	38,500,000		
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	35,000,000	15,000,000	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Orang	38,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	95,00 %		90 %	90 %	90 %	342,356,430	320,827,500	320,827,500					90 %	376,182,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	8,382,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,620,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	27,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	82,363,640	81,827,500	81,827,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Paket	90,600,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	10 Dokumen	13,200,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	22,000,000	22,000,000	22,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	24,200,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	193,372,790	180,000,000	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	212,300,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	95,00 %		90 %	90 %	90 %	300,000,000	10,000,000	10,000,000					90 %	330,000,000		
5 02 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	300,000,000	10,000,000	10,000,000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	10 Unit	330,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	95,00 %		90 %	90 %	90 %	405,320,000	185,760,000	185,760,000					90 %	445,002,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	36,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	39,600,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	363,500,000	180,000,000	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	399,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5,820,000	5,760,000	5,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	6,402,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	95,00 %		90 %	90 %	90 %	405,320,000	130,250,000	130,250,000					90 %	445,702,500		
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	155,450,000	112,750,000	112,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	8 Unit	170,922,500	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	2,800,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	5 Unit	3,080,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	35,000,000	10,000,000	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	38,500,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	44,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	172,070,000	7,500,000	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	10 Unit	189,200,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	5,08 Persen Persen		2,65 Persen Persen	3,50 Persen 3.50 Persen	3,50 Persen 3.50 Persen	3,069,617,631	1,868,563,850	1,868,563,850					3,50 Persen 3.50 Persen	3,379,768,544		
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%		%	3.5 %	3.5 %	3,069,617,631	1,868,563,850	1,868,563,850					3.5 %	3,379,768,544		
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	164,602,040	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Selaku Wajib Pajak Daerah	2 Dokumen	180,100,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	116,092,087	287,274,000	287,274,000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Selaku Wajib Pajak Daerah	1 Dokumen	132,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	230,864,000	398,605,000	398,605,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Selaku Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	253,950,400	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				10 Unit	10 Unit	608,526,624	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Selaku Wajib Pajak Daerah	10 Unit	664,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	178,918,000	122,905,600	122,905,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Selaku Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	185,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data				12 Laporan	12 Laporan	1,069,556,000	476,974,000	476,974,000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Selaku Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	1,180,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Pajak Daerah											Pelayanan Publik					
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	153,587,840	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Selaku Wajib Pajak Daerah	1 Dokumen	182,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	226,430,240	134,200,000	134,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Selaku Wajib Pajak Daerah	12 Dokumen	249,073,264	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	156,040,800	241,000,450	241,000,450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Selaku Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	171,644,880	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	165,000,000	207,604,800	207,604,800		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Masyarakat Selaku Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	181,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							164,950,880,800	177,279,255,289	175,779,255,289						186,706,122,790		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	11,326,783,700	18,615,944,569	18,615,944,569						90,00 Persen	13,917,901,580	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	15,500,000	15,500,000	15,500,000						100 Persen	17,050,000	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	2,200,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	2,200,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	2,200,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										Alokasi Umum	Pelayanan Publik					
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	2,200,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	2,200,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3,500,000	3,500,000	3,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	3,850,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	2,200,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji,Tunjangan PNS, luran Jaminan Kesehatan ASN, Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dan luran Tapera ASN Kabupaten Pesisir Barat	persen		persen	100 persen	100 persen	9,587,249,900	16,220,584,569	16,220,584,569					100 persen	11,784,414,400		
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	9,581,685,500	16,215,584,569	16,215,584,569		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	14 Bulan	11,778,293,560	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,564,400	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	2,820,840	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan	2,200,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	1,100,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	persen		persen	100 persen	100 persen	150,000,000	500,000,000	500,000,000					100 persen	165,000,000		
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				22 Orang	22 Orang	150,000,000	500,000,000	500,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	22 Orang	165,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	793,637,800	1,087,000,000	1,129,500,000					100 persen	873,001,580		
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				761 Buah	761 Buah	15,637,800	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	761 Buah	17,201,580	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas				1 Kali	1 Kali	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Kali	27,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK, Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	300,000,000	390,000,000	390,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Bulan	330,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	17,000,000	72,000,000	72,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	10 Dokumen	18,700,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman				11 Bulan	11 Bulan	150,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan	Aparatur	11 Bulan	165,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	yang Baik				
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Di Luar Kantor Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan 0 Laporan	286,000,000	450,000,000	492,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Bulan 0 Laporan	314,600,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	325,000,000	320,000,000						275,000,000		
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	24 Unit	0	325,000,000	320,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Ekonomi Daerah		24 Unit	275,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	510,876,000	266,660,000	229,160,000					100 Persen	561,963,600		
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan jumlah pembayaran tagihan				12 bulan	0 Laporan 0 bulan	96,000,000	37,500,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Laporan 0 bulan	105,600,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bangunan dan kendaraan dinas				6 unit	6 unit	383,000,000	221,160,000	221,160,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	6 unit	421,300,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tagihan				12 bulan	12 bulan	31,876,000	8,000,000	8,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 bulan	35,063,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	269,520,000	201,200,000	201,200,000					100 persen	241,472,000		
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	jumlah kendaraan				7 unit	7 unit	140,350,000	140,350,000	140,350,000		Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan	Aparatur	7 unit	154,385,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	yang Baik				
5 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan sarana dan prasarana kantor				12 bulan	12 bulan	79,170,000	60,850,000	60,850,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 bulan	87,087,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Tata Kelola Keuangan Daerah Sesuai Aturan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	152,196,357,500	156,418,921,120	154,851,421,120					100 Persen	169,971,737,650		
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan dokumen penganggaran daerah tepat waktu	100 Persen		85 Persen	100 Persen	100 Persen	2,598,400,000	3,376,150,000	3,376,150,000					100 Persen	2,858,240,000		
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	297,549,960	357,549,960	357,549,960		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Dokumen	327,304,956	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	298,632,800	358,632,800	358,632,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Dokumen	328,496,080	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	74,285,060	103,285,060	103,285,060		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	81,713,566	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	72,535,060	101,785,060	101,785,060		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	79,788,566	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	24,668,620	89,268,620	89,268,620		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	27,135,482	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	25,692,500	90,292,500	90,292,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	28,261,750	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	819,340,000	896,990,000	896,990,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Dokumen	901,274,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	829,168,000	901,818,000	901,818,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Dokumen	912,084,800	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	156,528,000	476,528,000	476,528,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Dokumen	172,180,800	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan tata kelola keuangan daerah sesuai aturan	100 Persen		91 Persen	100 Persen	100 Persen	724,000,000	3,223,748,520	3,223,748,520					100 Persen	1,702,144,400		
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Kasda, Rekap Dokumen SP2D dan Daftar Gaji Pemerintah Daerah				36 Dokumen	0 Dokumen 36 Dokumen	284,729,400	1,553,929,400	1,653,929,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Dokumen 36 Dokumen	313,202,340	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0	181,606,000	181,606,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	2 Dokumen	199,766,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Laporan Sinkronisasi Pendapatan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	356,909,120	424,909,120	424,909,120		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Dokumen	392,600,032	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	12 Dokumen	82,361,480	421,506,000	421,506,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Dokumen	90,597,628	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				78 Orang	78 Orang	0	641,798,000	541,798,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	78 Orang	705,977,800	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan tata kelola keuangan daerah sesuai aturan	100 Persen		98 Persen	100 Persen	100 Persen	794,860,400	837,460,400	769,960,400					100 Persen	874,346,440		
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				2 Laporan	2 Laporan	40,991,000	90,431,000	90,431,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan	45,090,100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	530,334,400	523,494,400	480,994,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	583,367,840	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	188,535,000	188,535,000	188,535,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Dokumen	207,388,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	35,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	38,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pemenuhan penunjang pengelolaan keuangan daerah	100 Persen		36 Persen	100 Persen	100 Persen	147,744,097,100	148,484,956,200	146,984,956,200					100 Persen	164,168,506,810		
5 02 02 2.04 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	0 Laporan	0	1,500,000,000	0		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	0 Laporan	1,650,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Belanja Tak Terduga Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Bulan 0 Laporan	12 Bulan 0 Laporan	6,300,000,000	6,615,000,000	6,615,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Bulan 0 Laporan	6,930,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				12 Bulan	12 Bulan	141,444,097,100	140,369,956,200	140,369,956,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah Dana Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Bulan	155,588,506,810	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Cakupan penggunaan SIPD dalam keuangan daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	335,000,000	496,606,000	496,606,000					100 Persen	368,500,000		
5 02 02 2.05 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembinaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				12 Bulan	12 Bulan	335,000,000	496,606,000	496,606,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Bulan	368,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Tata Kelola Barang Milik Daerah sesuai Aturan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	1,427,739,600	2,244,389,600	2,311,889,600					100 Persen	2,816,483,560		
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pencatatan aset daerah	100 Persen		99 Persen	100 Persen	100 Persen	1,427,739,600	2,244,389,600	2,311,889,600					100 Persen	2,816,483,560		
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	441,805,600	306,051,600	306,051,600			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	485,986,160	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
												Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen LBMD Pemerintah Daerah dan LBMD SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen 0 Laporan	665,924,000	628,324,000	836,824,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Dokumen 0 Laporan	1,026,106,400	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	320,010,000	444,214,000	415,714,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	352,011,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	459,800,000	392,300,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Laporan	505,780,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	406,000,000	361,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Dokumen	446,600,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 03	KEPEGAWAIAN							4,332,338,953	4,242,024,200	4,242,024,200						4,697,206,620		
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	2,599,735,981	2,554,991,200	2,554,991,200					90,00 Persen	2,841,470,320		
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50		6	11	11	7,000,000	7,000,000	7,000,000					11	7,700,000		
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum	0	4 Dokumen	2,200,000	Badan Kepegawaian dan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Perangkat Daerah										Kecamatan, Semua Kelurahan		Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan yang Baik				Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	4 Laporan	5,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95		0	19	19	1,806,199,581	1,968,868,200	1,968,868,200					19	2,165,755,020		
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	1,800,699,581	1,963,368,200	1,963,368,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	14 bulan	2,159,705,020	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	1 Laporan	2,750,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	2 Laporan	2,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	2 Dokumen	1,100,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	169		1	42	42	50,000,000	10,000,000	10,000,000					42	11,000,000		
5 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	50,000,000	10,000,000	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	1 Orang	11,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	356		0	74	74	339,526,400	297,505,000	329,455,000					74	327,255,500		
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,022,000	1,224,000	1,224,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	1 Paket	1,346,400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	1 Paket	27,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49,504,400	49,880,400	49,880,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	1 Paket	54,868,440	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	10 Dokumen	13,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	11 Laporan	12,100,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	240,000,000	198,400,600	230,350,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	12 Laporan	218,240,660	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	403		0	88	88	97,728,000	0	30,980,000					88	30,980,000		
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	49,664,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	0 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	3 Unit	48,064,000	0	30,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	3 Unit	30,980,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa	180		0	36	36	212,152,000	195,168,000	157,868,000					36	214,684,800		
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	30,000,000	12,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	12 Laporan	33,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	177,000,000	157,000,000	142,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	1 Laporan	172,700,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5,152,000	8,168,000	3,368,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	1 Laporan	8,984,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	15		2	3	3	87,130,000	76,450,000	50,820,000					3	84,095,000		
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	1 Unit	60,100,000	60,100,000	35,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	1 Unit	66,110,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	16 Unit	25,200,000	14,520,000	15,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	16 Unit	15,972,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	1,830,000	1,830,000	610,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	3 Unit	2,013,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	77,27 Persen		n/a Persen	71,75 Persen	71,75 Persen	1,732,602,972	1,687,033,000	1,687,033,000					71,75 Persen	1,855,736,300		
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tercapainya Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	7511		0	1514	1514	326,137,600	697,481,800	718,521,600					1514	767,229,980		
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	68,513,800	516,040,800	537,080,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	1 Dokumen	567,644,880	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	56,989,000	33,889,000	33,889,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	1 Dokumen	37,277,900	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	72,848,000	46,344,000	46,344,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	1 Lembaga	50,978,400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	86,774,000	81,974,000	81,974,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	1 Dokumen	90,171,400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	41,012,800	19,234,000	19,234,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	1 Dokumen	21,157,400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Tercapainya Mutasi dan Promosi ASN	44		0	9	9	1,068,358,000	735,921,400	735,921,400					9	809,513,540		
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	468,358,000	220,363,800	444,855,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	3 Dokumen	242,400,180	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	600,000,000	515,557,600	291,065,600	Semua Kab/Kota, Semua	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan	0	1 Dokumen	567,113,360	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kecamatan, Semua Kelurahan		Transformasi Pelayanan Publik	yang Baik				Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tercapainya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5835		0	1157	1157	338,107,372	253,629,800	232,590,000					1157	278,992,780		
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1 Laporan	84,393,000	79,677,000	79,677,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	1 Laporan	87,644,700	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				1000 Orang	1000 Orang	176,511,000	116,483,000	116,483,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	1000 Orang	128,131,300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	5 Orang	77,203,372	57,469,800	36,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	5 Orang	63,216,780	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							2,603,531,288	687,944,000	687,944,000						756,738,400		
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN telah yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan	22,87 Persen		21,76 Persen	22,20 Persen	22,20 Persen	2,603,531,288	687,944,000	687,944,000					22,20 Persen	756,738,400		
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Tercapainya Pengembangan Kompetensi Teknis	1800		0	360	360	400,000,000	0	0					360	0		
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				0 Orang	0 Orang	400,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	0 Orang	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tercapainya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	797		0	165	165	2,203,531,288	687,944,000	687,944,000					165	756,738,400		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3 Laporan	3 Laporan	2,203,531,288	687,944,000	687,944,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	0	3 Laporan	756,738,400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6 01	INSPEKTORAT DAERAH							7,431,880,000	6,797,370,900	6,797,370,900						8,229,618,400		
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	4,574,128,900	4,666,550,400	4,516,550,400						90,00 Persen	4,849,863,350	
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Jumlah Laporan Capaian Kinerja	dokumen laporan		dokumen laporan	2 dokumen 2 laporan	2 dokumen 2 laporan	7,684,000	6,716,000	6,716,000						2 dokumen 2 laporan	7,387,600	
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,342,000	1,716,000	1,716,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	1,887,600	Inspektorat
6 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,342,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	5,500,000	Inspektorat
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	laporan laporan laporan bulan		laporan laporan laporan bulan	1 laporan 1 laporan 18 laporan 14 bulan	1 laporan 1 laporan 18 laporan 14 bulan	3,272,399,900	3,252,804,900	3,252,804,900						1 laporan 1 laporan 18 laporan 14 bulan	3,272,943,300	
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	3,266,965,900	3,247,370,900	3,247,370,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	14 Bulan	3,266,965,900	Inspektorat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik					
6 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Laporan	2,750,000	Inspektorat
6 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,934,000	1,934,000	1,934,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	2 Laporan	2,127,400	Inspektorat
6 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Dokumen	1,100,000	Inspektorat
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	orang		orang	20 orang	20 orang	163,385,000	128,520,000	128,520,000					20 orang	141,372,000		
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sesuai Tugas dan Fungsi				12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 Bulan	110,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	63,385,000	28,520,000	28,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	1 Kegiatan	31,372,000	Inspektorat
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Koordinasi di luar kantor Jumlah bulan pemenuhan ATK Jumlah bulan pemenuhan Komponen Instalasi Listrik Jumlah Layanan Jasa Penyediaaan Makanan dan Minuman Jumlah SKHU selama 1 tahun	bulan bulan bulan bulan SKHU		bulan bulan bulan bulan SKHU	12 bulan 12 bulan 12 bulan 11 bulan 120 SKHU	12 bulan 12 bulan 12 bulan 11 bulan 120 SKHU	447,248,000	431,248,000	481,968,000					12 bulan 12 bulan 12 bulan 11 bulan 120 SKHU	474,372,800		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	5,599,000	5,599,000	2,775,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Paket 12 Bulan	6,158,900	Inspektorat
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	107,649,000	116,649,000	116,649,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Bulan	128,313,900	Inspektorat
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terpenuhinya Langganan 10 Buah Surat Kabar				12 Bulan	12 Bulan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Bulan	13,200,000	Inspektorat
6 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu				11 Bulan	11 Bulan	22,000,000	22,000,000	22,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	11 Bulan	24,200,000	Inspektorat
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Dalam dan Luar Daerah				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	300,000,000	275,000,000	328,544,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Laporan 12 Bulan	302,500,000	Inspektorat
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebeleur Jumlah Peralatan dan Mesin	UNIT UNIT		UNIT UNIT	8 UNIT 20 UNIT	8 UNIT 20 UNIT	225,000,000	193,721,500	193,721,500						8 UNIT 20 UNIT	213,093,650	
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	1,500,000	1,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	APARATUR	1 Paket	1,650,000	Inspektorat
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				44 Unit	44 Unit	200,000,000	192,221,500	192,221,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	APARATUR	44 Unit	211,443,650	Inspektorat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas Jumlah bulan Pembayaran Tagihan Jumlah bulan Tagihan	unit bulan bulan		unit bulan bulan	7 unit 12 bulan 12 bulan	7 unit 12 bulan 12 bulan	300,262,000	309,440,000	308,720,000					7 unit 12 bulan 12 bulan	357,184,000		
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16,800,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 Laporan	16,800,000	Inspektorat
6 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	275,000,000	280,000,000	280,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	12 Bulan	308,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	8,462,000	29,440,000	28,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	0 Laporan 12 Bulan	32,384,000	Inspektorat
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Meubeleur Jumlah peralatan dan mesin	unit unit		unit unit	10 unit 20 unit	10 unit 20 unit	158,150,000	344,100,000	144,100,000					10 unit 20 unit	383,510,000		
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpelihara Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan terbayarnya pajak kendaraan				12 Bulan	12 Bulan	39,800,000	39,800,000	39,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Bulan	43,780,000	Inspektorat
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan dan terbayarnya kendaraan dinas milik daerah di inspektorat				12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	84,500,000	288,500,000	88,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Unit 12 Bulan	317,350,000	Inspektorat
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	28,850,000	15,800,000	15,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar,	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan	Aparatur	12 Bulan	17,380,000	Inspektorat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kelurahan		Transformasi Pelayanan Publik	yang Baik				
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	5,000,000	Inspektorat
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Cakupan Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang- undangan	100 Persen		88,50 Persen	100 Persen	100 Persen	1,916,181,100	1,552,317,500	1,702,317,500					100 Persen	2,243,044,050		
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	jumlah bulan pelaksanaan kerjasama pengawasan internal jumlah laporan jumlah laporan hasil pengawasan desa jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah jumlah laporan hasil reviu keuangan jumlah laporan hasil reviu kinerja	bulan laporan LHP LHP LHP LHR LHR		bulan laporan LHP LHP LHP LHR LHR	12 bulan 12 laporan 116 LHP 100 LHP 100 LHP 5 LHR 1 LHR	12 bulan 12 laporan 116 LHP 100 LHP 100 LHP 5 LHR 1 LHR	1,447,316,100	966,320,500	1,016,320,500					12 bulan 12 laporan 116 LHP 100 LHP 100 LHP 5 LHR 1 LHR	1,598,447,350		
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	tersusunnya laporan hasil pengawasan kinerja (internal berkala 70 LHP dan Evaluasi LPPD 1 Laporan hasil)				71 Laporan	71 Laporan	270,440,000	170,874,000	170,874,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	71 Laporan	187,961,400	Inspektorat
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	tersusunnya laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Kas opname 60 LHP dan Monev dana BOS 30 LHP)				90 Laporan	90 Laporan	270,440,000	128,095,000	128,095,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	90 Laporan	300,000,000	Inspektorat
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				0 Laporan 4 Laporan	0 Laporan 4 Laporan	129,977,000	74,499,000	74,499,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Laporan 4 Laporan	150,000,000	Inspektorat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				8 Laporan	8 Laporan	132,713,000	205,743,000	205,743,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	8 Laporan	226,317,300	Inspektorat
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				116 Laporan	116 Laporan	316,258,100	137,637,000	137,637,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	116 Laporan	350,000,000	Inspektorat
6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal				12 Bulan	12 Bulan	175,694,000	77,501,000	77,501,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Bulan	195,000,000	Inspektorat
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut				12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	151,794,000	171,971,500	221,971,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Dokumen 12 Bulan	189,168,650	Inspektorat
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan LHP		Laporan LHP	2 Laporan 30 LHP	2 Laporan 30 LHP	468,865,000	585,997,000	685,997,000						2 Laporan 30 LHP	644,596,700	
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Terlaksananya penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	148,795,000	76,447,000	126,447,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Laporan 12 Bulan	84,091,700	Inspektorat
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				20 Laporan	20 Laporan	320,070,000	509,550,000	559,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	20 Laporan	560,505,000	Inspektorat
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Kondistensi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terhadap kepatuhan Peraturan perundang-undangan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	100 Persen	941,570,000	578,503,000	578,503,000						100 Persen	1,136,711,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	jumlah laporan hasil koordinasi perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pengawasan jumlah laporan hasil koordinasi perumusan kebijakan di bidang pengawasan	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	222,929,000	78,995,000	78,995,000					12 bulan 12 bulan	270,000,000		
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan				100 Persen	100 Persen	147,929,000	48,995,000	48,995,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	100 Persen	170,000,000	Inspektorat
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan				100 Persen	100 Persen	75,000,000	30,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	aparatur	100 Persen	100,000,000	Inspektorat
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	jumlah presentase capaian pemenuhan rencana aksi KPK RI jumlah presentase capaian pemenuhan Survey Penilaian Integritas KPK RI level capaian skor SPIP	% % level		% % level	100 % 100 % 3 level	100 % 100 % 3 level	718,641,000	499,508,000	499,508,000					100 % 100 % 3 level	866,711,000		
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah				12 Bulan	12 Bulan	388,641,000	291,214,000	291,214,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Bulan	425,000,000	Inspektorat
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	110,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	8 perangkat daerah	150,000,000	Inspektorat
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 Bulan	12 Bulan	110,000,000	147,010,000	147,010,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Bulan	161,711,000	Inspektorat
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas				12 Bulan	12 Bulan	110,000,000	61,284,000	61,284,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Bulan	130,000,000	Inspektorat
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01	KECAMATAN							710,200,000	805,700,000	805,700,000						781,220,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Kecamatan Bangkunt	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	667,524,540	763,015,500	763,015,500						90,00 Persen	734,276,994	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	5,000,000						100 %	5,500,000	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	5,500,000	Kecamatan Bangkunt
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	415,700,000	511,200,000	511,200,000						100 %	457,270,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	410,200,000	505,700,000	505,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Orang/bulan	451,220,000	Kecamatan Bangkunt
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	2,750,000	Kecamatan Bangkunt
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	2,200,000	Kecamatan Bangkunt
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	1,100,000	Kecamatan Bangkunt

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	%		%	100 %	100 %	141,800,040	141,791,000	141,791,000					100 %	155,980,044		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,141,000	6,141,000	6,141,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	6,755,100	Kecamatan Bangkunt
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,629,040	21,620,000	21,620,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	23,791,944	Kecamatan Bangkunt
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24,300,000	24,300,000	24,300,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	26,730,000	Kecamatan Bangkunt
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,730,000	21,730,000	21,730,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	23,903,000	Kecamatan Bangkunt
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	13,200,000	Kecamatan Bangkunt
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	18,000,000	18,000,000	18,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	19,800,000	Kecamatan Bangkunt

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	38,000,000	38,000,000	38,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	41,800,000	Kecamatan Bangkunt
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	%		%	100 %	100 %	28,534,500	28,534,500	28,534,500					100 %	31,387,950		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,533,000	3,533,000	3,533,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	3,886,300	Kecamatan Bangkunt
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6,600,000	6,600,000	6,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	7,260,000	Kecamatan Bangkunt
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	11,000,000	Kecamatan Bangkunt
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8,401,500	8,401,500	8,401,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	9,241,650	Kecamatan Bangkunt
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	76,490,000	76,490,000	76,490,000					100 %	84,139,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50,550,000	50,550,000	50,550,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	55,605,000	Kecamatan Bangkunt
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang				1 Unit	1 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan	Aparatur	1 Unit	22,000,000	Kecamatan Bangkunt

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Dipelihara/Direhabilitasi										Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	yang Baik				
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,940,000	5,940,000	5,940,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	6,534,000	Kecamatan Bangkunt
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Kecamatan Bangkunt	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	100 Persen	42,675,460	42,684,500	42,684,500					100 Persen	46,943,006		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pengembangan Pemuda	%		%	100 %	100 %	42,675,460	42,684,500	42,684,500					100 %	46,943,006		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	42,675,460	42,684,500	42,684,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Siswa	1 Dokumen	46,943,006	Kecamatan Bangkunt
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							648,600,000	752,400,000	752,400,000						713,460,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Kecamatan Ngaras	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	606,147,540	709,715,500	709,715,500					90,00 Persen	666,762,294		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	5,023,000	5,000,000	5,000,000					100 %	5,525,300		
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,023,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	5,525,300	Kecamatan Ngaras
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	354,150,000	457,900,000	457,900,000					100 %	389,565,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	348,600,000	452,400,000	452,400,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	14 bulan	383,460,000	Kecamatan Ngaras
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	2,750,000	Kecamatan Ngaras
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan	2,200,000	Kecamatan Ngaras
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,050,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	1,155,000	Kecamatan Ngaras
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	%		%	100 %	100 %	141,950,040	141,791,000	141,791,000					100 %	156,145,044		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,141,000	6,141,000	6,141,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	6,755,100	Kecamatan Ngaras
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,629,040	21,620,000	21,620,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	23,791,944	Kecamatan Ngaras
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,150,000	24,300,000	24,300,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	27,665,000	Kecamatan Ngaras

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21,030,000	21,730,000	21,730,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Paket	23,133,000	Kecamatan Ngaras
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	13,200,000	Kecamatan Ngaras
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	19,800,000	Kecamatan Ngaras
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	38,000,000	38,000,000	38,000,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	41,800,000	Kecamatan Ngaras
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	%		%	100 %	100 %	28,534,500	28,534,500	28,534,500					100 %	31,387,950		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,533,000	3,533,000	3,533,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	3,886,300	Kecamatan Ngaras
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6,600,000	6,600,000	6,600,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	7,260,000	Kecamatan Ngaras
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	11,000,000	Kecamatan Ngaras
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8,401,500	8,401,500	8,401,500	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	9,241,650	Kecamatan Ngaras

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	76,490,000	76,490,000	76,490,000					100 %	84,139,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	50,550,000	50,550,000	50,550,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	3 Unit	55,605,000	Kecamatan Ngaras
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				1 paket	1 paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 paket	22,000,000	Kecamatan Ngaras
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				1 paket	1 paket	5,940,000	5,940,000	5,940,000	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 paket	6,534,000	Kecamatan Ngaras
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Kecamatan Ngaras	n/a Persen		n/a Persen	n/a Persen	n/a Persen	42,452,460	42,684,500	42,684,500					n/a Persen	46,697,706		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pengembangan Pemuda	%		%	100 %	100 %	42,452,460	42,684,500	42,684,500					100 %	46,697,706		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	42,452,460	42,684,500	42,684,500	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Siswa	1 Dokumen	46,697,706	Kecamatan Ngaras
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							697,600,000	792,700,000	792,700,000					697,600,000			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Kecamatan Ngambur	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	654,925,200	750,025,200	750,025,200					90,00 Persen	654,925,200		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	%		%	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	5,000,000					100 %	5,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu																
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Ngambur
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	403,100,000	498,200,000	498,200,000						100 %	403,100,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	397,600,000	492,700,000	492,700,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	14 bulan	397,600,000	Kecamatan Ngambur
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	2,500,000	Kecamatan Ngambur
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan	2,000,000	Kecamatan Ngambur
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	1,000,000	Kecamatan Ngambur
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	%		%	100 %	100 %	141,800,700	141,800,700	141,800,700						100 %	141,800,700	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,141,000	6,141,000	6,141,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	6,141,000	Kecamatan Ngambur

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,629,700	21,629,700	21,629,700	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	21,629,700	Kecamatan Ngambur
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,150,000	25,150,000	25,150,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	25,150,000	Kecamatan Ngambur
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20,880,000	20,880,000	20,880,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Paket	20,880,000	Kecamatan Ngambur
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Ngambur
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	18,000,000	18,000,000	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	18,000,000	Kecamatan Ngambur
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	38,000,000	38,000,000	38,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	38,000,000	Kecamatan Ngambur
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	%		%	100 %	100 %	28,534,500	28,534,500	28,534,500						100 %	28,534,500	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,533,000	3,533,000	3,533,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	3,533,000	Kecamatan Ngambur
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6,600,000	6,600,000	6,600,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	6,600,000	Kecamatan Ngambur

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Ngambur
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8,401,500	8,401,500	8,401,500	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	8,401,500	Kecamatan Ngambur
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	76,490,000	76,490,000	76,490,000					100 %	76,490,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	50,550,000	50,550,000	50,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	3 Unit	50,550,000	Kecamatan Ngambur
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	20,000,000	Kecamatan Ngambur
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,940,000	5,940,000	5,940,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	5,940,000	Kecamatan Ngambur
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Kecamatan Ngambur	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	100 Persen	42,674,800	42,674,800	42,674,800					100 Persen	42,674,800		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pengembangan Pemuda	%		%	100 %	100 %	42,674,800	42,674,800	42,674,800					100 %	42,674,800		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	42,674,800	42,674,800	42,674,800	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Siswa	1 Dokumen	42,674,800	Kecamatan Ngambur

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							949,000,000	820,000,000	820,000,000						1,039,265,300		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Kecamatan Pesisir Selatan	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	890,693,640	790,948,400	790,948,400						90,00 Persen	975,128,304	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	5,000,000	4,519,800	4,519,800						100 %	5,500,000	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,519,800	4,519,800	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	5,500,000	Kecamatan Pesisir Selatan
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	405,900,000	525,342,600	525,342,600						100 %	446,490,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	400,400,000	520,000,000	520,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	14 bulan	440,440,000	Kecamatan Pesisir Selatan
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,413,800	2,413,800	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	2,750,000	Kecamatan Pesisir Selatan
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	1,930,800	1,930,800	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan	2,200,000	Kecamatan Pesisir Selatan
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	998,000	998,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	1,100,000	Kecamatan Pesisir Selatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	%		%	100 %	100 %	168,806,300	163,524,000	163,524,000					100 %	181,052,230		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,630,000	6,048,000	6,048,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	7,293,000	Kecamatan Pesisir Selatan
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51,496,300	50,946,000	50,946,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	52,011,230	Kecamatan Pesisir Selatan
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	27,500,000	Kecamatan Pesisir Selatan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22,780,000	20,530,000	20,530,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Paket	25,058,000	Kecamatan Pesisir Selatan
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	13,200,000	Kecamatan Pesisir Selatan
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	25,900,000	24,000,000	24,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	28,490,000	Kecamatan Pesisir Selatan
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	27,500,000	Kecamatan Pesisir Selatan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	%		%	100 %	100 %	36,594,500	35,813,000	35,813,000					100 %	40,253,950		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,605,000	3,605,000	3,605,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	3,965,500	Kecamatan Pesisir Selatan
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6,600,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	7,260,000	Kecamatan Pesisir Selatan
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	11,000,000	Kecamatan Pesisir Selatan
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16,389,500	16,208,000	16,208,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	18,028,450	Kecamatan Pesisir Selatan
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	274,392,840	61,749,000	61,749,000					100 %	301,832,124		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	60,200,000	40,950,000	40,950,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	3 Unit	66,220,000	Kecamatan Pesisir Selatan
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	207,792,840	14,399,000	14,399,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	228,572,124	Kecamatan Pesisir Selatan
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6,400,000	6,400,000	6,400,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	7,040,000	Kecamatan Pesisir Selatan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 Persen		n/a Persen	100 Persen	100 Persen	58,306,360	29,051,600	29,051,600					100 Persen	64,136,996		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Kecamatan Pesisir Selatan																
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pengembangan Pemuda	%		%	100 %	100 %	58,306,360	29,051,600	29,051,600						100 %	64,136,996	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	58,306,360	29,051,600	29,051,600	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Siswa	1 Dokumen	64,136,996	Kecamatan Pesisir Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							685,000,000	771,900,000	771,900,000						753,500,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Krui Selatan	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	642,325,200	729,225,200	729,225,200						90,00 Persen	706,557,720	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	5,000,000						100 %	5,500,000	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	3 Laporan	5,500,000	Kecamatan Krui Selatan
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	390,500,000	477,400,000	477,400,000						100 %	429,550,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	385,000,000	471,900,000	471,900,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Orang/bulan	423,500,000	Kecamatan Krui Selatan
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Pesisir Barat,	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum	Aparatur	1 Laporan	2,750,000	Kecamatan Krui Selatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Akhir Tahun SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									Krui Selatan, Semua Kelurahan		Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan yang Baik				
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	3 Laporan	2,200,000	Kecamatan Krui Selatan
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	1,100,000	Kecamatan Krui Selatan
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	%		%	100 %	100 %	141,800,700	141,800,700	141,800,700					100 %	155,980,770		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,141,000	6,141,000	6,141,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	6,755,100	Kecamatan Krui Selatan
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,629,700	21,629,700	21,629,700	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	23,792,670	Kecamatan Krui Selatan
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Paket	27,500,000	Kecamatan Krui Selatan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	21,030,000	21,030,000	21,030,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	4 Paket	23,133,000	Kecamatan Krui Selatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	13,200,000	Kecamatan Krui Selatan
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	19,800,000	Kecamatan Krui Selatan
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan 0 Laporan	2 Laporan 0 Laporan	38,000,000	38,000,000	38,000,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan 0 Laporan	41,800,000	Kecamatan Krui Selatan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	%		%	100 %	100 %	28,534,500	28,534,500	28,534,500					100 %	31,387,950		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,533,000	3,533,000	3,533,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	3,886,300	Kecamatan Krui Selatan
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	6,600,000	6,600,000	6,600,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan	7,260,000	Kecamatan Krui Selatan
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	11,000,000	Kecamatan Krui Selatan
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8,401,500	8,401,500	8,401,500	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	9,241,650	Kecamatan Krui Selatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	76,490,000	76,490,000	76,490,000						100 %	84,139,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	50,550,000	50,550,000	50,550,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Unit	55,605,000	Kecamatan Krui Selatan
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	22,000,000	Kecamatan Krui Selatan
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,940,000	5,940,000	5,940,000	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	6,534,000	Kecamatan Krui Selatan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Kecamatan Krui Selatan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	100 Persen	42,674,800	42,674,800	42,674,800						100 Persen	46,942,280	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pengembangan Pemuda	%		%	100 %	100 %	42,674,800	42,674,800	42,674,800						100 %	46,942,280	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	42,674,800	42,674,800	42,674,800	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Siswa	1 Dokumen	46,942,280	Kecamatan Krui Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							648,600,000	752,400,000	752,400,000							1,213,722,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Kecamatan pada Way Krui	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	648,600,000	752,400,000	752,400,000						90,00 Persen	1,213,722,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	3,692,000	3,692,000	3,692,000					100 %	4,061,200		
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,692,000	3,692,000	3,692,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	4,061,200	Kecamatan Way Krui
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	360,438,500	464,238,500	464,238,500					100 %	396,482,350		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7 Orang/bulan	7 Orang/bulan	348,600,000	452,400,000	452,400,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	7 Orang/bulan	383,460,000	Kecamatan Way Krui
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,255,000	4,255,000	4,255,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	4,680,500	Kecamatan Way Krui
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3,261,500	3,261,500	3,261,500	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	3 Laporan	3,587,650	Kecamatan Way Krui
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3 Dokumen	3 Dokumen	4,322,000	4,322,000	4,322,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	3 Dokumen	4,754,200	Kecamatan Way Krui
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	%		%	100 %	100 %	168,894,500	168,894,500	168,894,500					100 %	686,045,950		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	7,113,000	7,113,000	7,113,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	7 Paket	7,824,300	Kecamatan Way Krui
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7,100,000	7,100,000	7,100,000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	3 Paket	7,810,000	Kecamatan Way Krui
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28,150,000	28,150,000	28,150,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	30,965,000	Kecamatan Way Krui
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	50,531,500	50,531,500	50,531,500	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	14 Paket	555,846,650	Kecamatan Way Krui
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Dokumen	13,200,000	Kecamatan Way Krui
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	16,000,000	16,000,000	16,000,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	17,600,000	Kecamatan Way Krui
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	48,000,000	48,000,000	48,000,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	52,800,000	Kecamatan Way Krui
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	%		%	100 %	100 %	37,475,000	37,475,000	37,475,000						100 %	41,222,500	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	4,597,000	4,597,000	4,597,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	3 Laporan	5,056,700	Kecamatan Way Krui

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	3 Laporan	7,920,000	Kecamatan Way Krui
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	3 Laporan	16,500,000	Kecamatan Way Krui
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan 0 Laporan	3 Laporan 0 Laporan	10,678,000	10,678,000	10,678,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	3 Laporan 0 Laporan	11,745,800	Kecamatan Way Krui
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	78,100,000	78,100,000	78,100,000					100 %	85,910,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	53,100,000	53,100,000	53,100,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	4 Unit	58,410,000	Kecamatan Way Krui
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	27,500,000	Kecamatan Way Krui
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							648,600,000	752,400,000	752,400,000					713,460,000			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Kecamatan Karya Penggawa	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	648,600,000	752,400,000	752,400,000					90,00 Persen	713,460,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	3,092,000	3,092,000	3,092,000						100 %	3,401,200	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3,092,000	3,092,000	3,092,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	4 Laporan	3,401,200	Kecamatan Karya Penggawa
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	358,274,200	462,074,200	462,074,200						100 %	394,101,620	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	9 Orang/bulan	348,600,000	452,400,000	452,400,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	9 Orang/bulan	383,460,000	Kecamatan Karya Penggawa
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,359,800	3,359,800	3,359,800	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	3,695,780	Kecamatan Karya Penggawa
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2,571,400	2,571,400	2,571,400	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	4 Laporan	2,828,540	Kecamatan Karya Penggawa
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	3,743,000	3,743,000	3,743,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Dokumen	4,117,300	Kecamatan Karya Penggawa
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	%		%	100 %	100 %	178,061,300	178,061,300	178,061,300						100 %	195,867,430	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7,981,000	7,981,000	7,981,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Paket	8,779,100	Kecamatan Karya Penggawa
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8,050,000	8,050,000	8,050,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Paket	8,855,000	Kecamatan Karya Penggawa
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,600,000	25,600,000	25,600,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	28,160,000	Kecamatan Karya Penggawa
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	57,430,300	57,430,300	57,430,300	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Paket	63,173,330	Kecamatan Karya Penggawa
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Dokumen	13,200,000	Kecamatan Karya Penggawa
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	16,000,000	16,000,000	16,000,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	11 Laporan	17,600,000	Kecamatan Karya Penggawa
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	51,000,000	51,000,000	51,000,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	56,100,000	Kecamatan Karya Penggawa
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	%		%	100 %	100 %	22,722,500	22,722,500	22,722,500						100 %	24,994,750	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5,012,000	5,012,000	5,012,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	5,513,200	Kecamatan Karya Penggawa
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	7,920,000	Kecamatan Karya Penggawa
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10,510,500	10,510,500	10,510,500	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	11,561,550	Kecamatan Karya Penggawa
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	86,450,000	86,450,000	86,450,000						100 %	95,095,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	61,450,000	61,450,000	61,450,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Unit	67,595,000	Kecamatan Karya Penggawa
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	27,500,000	Kecamatan Karya Penggawa
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							711,600,000	839,500,000	839,500,000						772,507,850		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Kecamatan Pesisir Utara	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	668,924,540	796,824,540	796,824,540					90,00 Persen	725,564,844		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	5,000,000					100 %	5,500,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Tepat Waktu																
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	5,500,000	Kecamatan Pesisir Utara
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	417,100,000	545,000,000	545,000,000					100 %	458,810,000		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	411,600,000	539,500,000	539,500,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	13 Orang/bulan	452,760,000	Kecamatan Pesisir Utara
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	2,750,000	Kecamatan Pesisir Utara
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan	2,200,000	Kecamatan Pesisir Utara
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	1,100,000	Kecamatan Pesisir Utara
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	%		%	100 %	100 %	141,800,040	141,800,040	141,800,040					100 %	152,877,044		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,141,000	6,141,000	6,141,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	6,755,100	Kecamatan Pesisir Utara

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,629,040	21,629,040	21,629,040	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	23,791,944	Kecamatan Pesisir Utara
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	27,500,000	Kecamatan Pesisir Utara
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21,030,000	21,030,000	21,030,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Paket	21,030,000	Kecamatan Pesisir Utara
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Pesisir Utara
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Pesisir Utara
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	38,000,000	38,000,000	38,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	41,800,000	Kecamatan Pesisir Utara
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	%		%	100 %	100 %	28,534,500	28,534,500	28,534,500					100 %	29,887,800		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,533,000	3,533,000	3,533,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	3,886,300	Kecamatan Pesisir Utara

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6,600,000	6,600,000	6,600,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	6,600,000	Kecamatan Pesisir Utara
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	11,000,000	Kecamatan Pesisir Utara
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8,401,500	8,401,500	8,401,500	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	8,401,500	Kecamatan Pesisir Utara
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	76,490,000	76,490,000	76,490,000						100 %	78,490,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit	3 unit	50,550,000	50,550,000	50,550,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	3 unit	50,550,000	Kecamatan Pesisir Utara
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	22,000,000	Kecamatan Pesisir Utara
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,940,000	5,940,000	5,940,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	5,940,000	Kecamatan Pesisir Utara
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Kecamatan Pesisir Utara	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	100 Persen	42,675,460	42,675,460	42,675,460						100 Persen	46,943,006	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pengembangan Pemuda	%		%	100 %	100 %	42,675,460	42,675,460	42,675,460						100 %	46,943,006	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	42,675,460	42,675,460	42,675,460	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Siswa	1 Dokumen	46,943,006	Kecamatan Pesisir Utara
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							703,200,000	775,800,000	775,800,000						772,421,100		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Kecamatan Lemong	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	660,500,040	732,604,800	732,604,800						90,00 Persen	725,451,144	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	5,000,050	5,000,050	5,000,050						100 %	5,500,055	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5,000,050	5,000,050	5,000,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	4 Laporan	5,500,055	Kecamatan Lemong
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	408,700,450	481,300,450	481,300,450						100 %	448,471,595	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	403,200,000	475,800,000	475,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	16 Orang/bulan	443,520,000	Kecamatan Lemong
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,550	2,500,550	2,500,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	2,750,605	Kecamatan Lemong

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1,999,900	1,999,900	1,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	2,199,890	Kecamatan Lemong
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Dokumen	1,100	Kecamatan Lemong
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	%		%	100 %	100 %	141,875,040	141,982,300	141,982,300					100 %	156,062,544		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,141,000	6,244,500	6,244,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	6,755,100	Kecamatan Lemong
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,679,040	21,679,040	21,679,040		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	23,846,944	Kecamatan Lemong
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,150,000	25,150,000	25,150,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	27,665,000	Kecamatan Lemong
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,905,000	20,908,760	20,908,760		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	22,995,500	Kecamatan Lemong
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Dokumen	13,200,000	Kecamatan Lemong
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	18,000,000	18,000,000	18,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	19,800,000	Kecamatan Lemong

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	38,000,000	38,000,000	38,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	41,800,000	Kecamatan Lemong
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	%		%	100 %	100 %	28,534,500	27,934,000	27,934,000					100 %	31,387,950		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3,533,000	3,533,000	3,533,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	3,886,300	Kecamatan Lemong
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6,600,000	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	7,260,000	Kecamatan Lemong
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	11,000,000	Kecamatan Lemong
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8,401,500	8,401,000	8,401,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	9,241,650	Kecamatan Lemong
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	76,390,000	76,388,000	76,388,000					100 %	84,029,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	50,450,000	50,450,000	50,450,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	3 Unit	55,495,000	Kecamatan Lemong
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	22,000,000	Kecamatan Lemong

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,940,000	5,938,000	5,938,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	6,534,000	Kecamatan Lemong
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Kecamatan Lemong	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	100 Persen	42,699,960	43,195,200	43,195,200					100 Persen	46,969,956		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pengembangan Pemuda	%		%	100 %	100 %	42,699,960	43,195,200	43,195,200					100 %	46,969,956		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	42,699,960	43,195,200	43,195,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Siswa	1 Dokumen	46,969,956	Kecamatan Lemong
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							638,800,000	735,500,000	735,500,000						702,680,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Kecamatan Pulau Pisang	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	596,100,040	690,900,300	690,900,300					90,00 Persen	655,710,044		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	5,000,000					100 %	5,500,000		
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	5,500,000	Kecamatan Pulau Pisang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	344,300,000	441,000,000	441,000,000					100 %	378,730,000		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6 Orang/bulan	6 Orang/bulan	338,800,000	435,500,000	435,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	6 Orang/bulan	372,680,000	Kecamatan Pulau Pisang
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	2,750,000	Kecamatan Pulau Pisang
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan	2,200,000	Kecamatan Pulau Pisang
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	1,100,000	Kecamatan Pulau Pisang
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	%		%	100 %	100 %	126,875,540	127,457,300	127,457,300					100 %	139,563,094		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6,141,000	6,195,700	6,195,700	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Paket	6,755,100	Kecamatan Pulau Pisang
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	22,129,040	22,656,100	22,656,100	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	5 Paket	24,341,944	Kecamatan Pulau Pisang
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	24,300,000	24,300,000	24,300,000	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	10 Paket	26,730,000	Kecamatan Pulau Pisang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	16,305,500	16,305,500	16,305,500	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	20 Paket	17,936,050	Kecamatan Pulau Pisang
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	0 Dokumen	13,200,000	Kecamatan Pulau Pisang
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	4 Laporan	19,800,000	Kecamatan Pulau Pisang
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	28,000,000	28,000,000	28,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	4 Laporan	30,800,000	Kecamatan Pulau Pisang
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	%		%	100 %	100 %	43,534,500	43,533,000	43,533,000					100 %	47,887,950		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3,533,000	3,533,000	3,533,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan	3,886,300	Kecamatan Pulau Pisang
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	6,600,000	6,600,000	6,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	3 Laporan	7,260,000	Kecamatan Pulau Pisang
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	4 Laporan	27,500,000	Kecamatan Pulau Pisang
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	8,401,500	8,400,000	8,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	2 Laporan	9,241,650	Kecamatan Pulau Pisang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	76,390,000	73,910,000	73,910,000						100 %	84,029,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50,450,000	46,350,000	46,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	55,495,000	Kecamatan Pulau Pisang
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	22,000,000	Kecamatan Pulau Pisang
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,940,000	7,560,000	7,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	6,534,000	Kecamatan Pulau Pisang
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Kecamatan Pulau Pisang	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	100 Persen	42,699,960	44,599,700	44,599,700						100 Persen	46,969,956	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pengembangan Pemuda	%		%	100 %	100 %	42,699,960	44,599,700	44,599,700						100 %	46,969,956	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	42,699,960	44,599,700	44,599,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Siswa	1 Dokumen	46,969,956	Kecamatan Pulau Pisang
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							1,345,000,000	2,037,100,000	2,037,100,000							1,972,324,420	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Kecamatan Pesisir Tengah	95,00 Persen		90,00 Persen	90,00 Persen	90,00 Persen	1,145,000,000	1,400,300,000	1,400,300,000						90,00 Persen	1,271,844,420	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	1,910,000	1,910,000	1,910,000					100 %	2,101,000		
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,910,000	1,910,000	1,910,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	2,101,000	Kecamatan Pesisir Tengah
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase elaoran Keuangan Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	739,490,200	954,790,200	954,790,200					100 %	813,439,440		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	735,000,000	950,300,000	950,300,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	16 Orang/bulan	808,500,000	Kecamatan Pesisir Tengah
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,377,800	1,377,800	1,377,800	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	1,515,800	Kecamatan Pesisir Tengah
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,635,600	2,635,600	2,635,600	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	2,899,160	Kecamatan Pesisir Tengah
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	476,800	476,800	476,800	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Dokumen	524,480	Kecamatan Pesisir Tengah
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	%		%	100 %	100 %	232,900,000	165,165,000	165,165,000					100 %	150,025,700		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,037,000	10,037,000	10,037,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Paket	11,040,700	Kecamatan Pesisir Tengah
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	98,423,000	62,831,000	62,831,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Bulan	2,101,000	Kecamatan Pesisir Tengah
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Ls	1 Ls	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Ls	27,500,000	Kecamatan Pesisir Tengah
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	42,640,000	27,497,000	27,497,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Bulan	46,904,000	Kecamatan Pesisir Tengah
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7,800,000	7,800,000	7,800,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Dokumen	8,580,000	Kecamatan Pesisir Tengah
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	19,000,000	19,000,000	19,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	20,900,000	Kecamatan Pesisir Tengah
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	13,000,000	13,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Laporan	33,000,000	Kecamatan Pesisir Tengah
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	%		%	100 %	100 %	96,193,000	203,928,000	203,928,000						100 %	224,320,800	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	96,193,000	203,928,000	203,928,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Kegiatan	224,320,800	Kecamatan Pesisir Tengah
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	%		%	100 %	100 %	48,600,000	48,600,000	48,600,000						100 %	53,460,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33,600,000	33,600,000	33,600,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	36,960,000	Kecamatan Pesisir Tengah
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	12 Laporan	16,500,000	Kecamatan Pesisir Tengah
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	25,906,800	25,906,800	25,906,800						100 %	28,497,480	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25,906,800	25,906,800	25,906,800	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Aparatur	1 Unit	28,497,480	Kecamatan Pesisir Tengah
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	100 Persen	200,000,000	636,800,000	636,800,000						100 Persen	700,480,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan		Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	200,000,000	636,800,000	636,800,000						2 Kelurahan	700,480,000	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	200,000,000	636,800,000	636,800,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	Masyarakat	12 Pokmas / Ormas	700,480,000	Kecamatan Pesisir Tengah
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							5,060,308,443	10,277,879,630	10,277,879,630						12,230,156,550		
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	persen		persen	90.00 persen	90.00 persen	2,746,182,581	2,077,456,500	2,077,456,500						90.00 persen	3,020,800,839	
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	4,000,000	3,482,500	3,482,500						90 Persen	4,400,000	
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000	1,962,750	1,962,750	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Apatur	2 Dokumen	2,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	1,519,750	1,519,750	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Apatur	2 Laporan	2,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	1,503,708,900	1,335,869,750	1,335,869,750						90 Persen	1,654,079,790	
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/Bulan	13 Orang/Bulan	1,498,208,900	1,332,209,500	1,332,209,500	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	13 Orang/Bulan	1,646,960,480	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	1,382,000	1,382,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Laporan	2,750,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					18 Laporan	18 Laporan	2,000,000	1,377,250	1,377,250	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	18 Laporan	2,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD																
8 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	901,000	901,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Dokumen	2,169,310	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yg berkinerja baik	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	30,000,000	0	0					90 Persen	33,000,000		
8 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	30,000,000	0	0	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	5 Orang	33,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	414,501,821	202,408,250	202,408,250					90 Persen	455,952,003		
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,758,400	1,888,000	1,888,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Paket	12,934,240	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55,600,000	28,850,000	28,850,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Paket	61,160,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	87,259,421	25,670,250	25,670,250	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	1 Paket	95,985,363	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	24,000,000	24,000,000	24,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	20 Dokumen	26,400,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Pasar Krui	Umum						
8 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	55,000,000	22,000,000	22,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	11 Laporan	60,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	180,884,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	200 Laporan	198,972,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Prasarana dan prasarana pendukung kinerja	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	30,000,000	27,500,000	27,500,000					90 Persen	33,000,000		
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	30,000,000	27,500,000	27,500,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	5 Unit	33,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	613,765,860	392,196,000	392,196,000					90 Persen	675,142,446		
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	339,600,000	207,000,000	207,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	12 Laporan	373,560,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	259,000,000	182,000,000	182,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	6 Laporan	284,900,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15,165,860	3,196,000	3,196,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	12 Laporan	16,682,446	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	150,206,000	116,000,000	116,000,000						90 Persen	165,226,600	
8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	97,500,000	94,000,000	94,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	3 Unit	107,250,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	14 Unit	52,706,000	22,000,000	22,000,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	14 Unit	57,976,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan	53,00 Persen		40,00 Persen	48,00 Persen	48,00 Persen	131,853,952	63,453,000	63,453,000						48,00 Persen	145,039,348	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Persentase Pelaksanaan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen 53,00 Persen		Persen 40,00 Persen	48 Persen 100 Persen	48 Persen 100 Persen	131,853,952	63,453,000	63,453,000						48 Persen 100 Persen	145,039,348	
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				70 Orang	70 Orang	49,589,520	0	0	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat 4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat 4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	70 Orang	54,548,472	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				150 Orang	150 Orang	82,264,432	63,453,000	63,453,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat 4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	150 Orang	90,490,876	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisiapasi Masyarakat Dalam Pemilu	85,00 Persen		84,08 Persen	84,08 Persen	84,08 Persen	562,234,801	533,333,130	533,333,130					84,08 Persen	639,999,356		
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Persen		Persen	84.08 Persen	84.08 Persen	562,234,801	533,333,130	533,333,130					84.08 Persen	639,999,356		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				9 partai politik	9 partai politik	333,970,767	333,637,130	333,637,130	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Partai Politik	9 partai politik	367,367,844	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				150 Orang	150 Orang	86,773,205	106,356,000	106,356,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat 4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Partai Politik	150 Orang	116,991,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	141,490,829	93,340,000	93,340,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Partai Politik	2 Laporan	155,639,912	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif	77,50 Persen		70,00 Persen	73,00 Persen	73,00 Persen	1,273,133,001	7,058,542,000	7,058,542,000						73,00 Persen	7,764,396,200	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen		Persen	73 Persen	73 Persen	1,273,133,001	7,058,542,000	7,058,542,000						73 Persen	7,764,396,200	
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				14 Orang	14 Orang	1,196,195,000	6,962,033,000	6,962,033,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarak atan	14 Orang	7,658,236,300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	100 Orang	76,938,001	96,509,000	96,509,000	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarak atan	100 Orang	106,159,900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	70,00 Persen		60,00 Persen	65,00 Persen	65,00 Persen	142,144,803	182,822,000	182,822,000						65,00 Persen	207,469,084	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Persen		Persen	65 Persen	65 Persen	142,144,803	182,822,000	182,822,000						65 Persen	207,469,084	
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan				150 Orang	150 Orang	60,062,803	42,822,000	42,822,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya	Masyarakat	150 Orang	66,069,084	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									Semua Kelurahan	Alokasi Umum		Masyarakat				
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	82,082,000	140,000,000	140,000,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat 4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat	100 Orang	141,400,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Koordinasi dan Peran Lembaga dan Elemen Masyarakat dalam Pencegahan terjadinya Konflik Sosial	80,00 Persen		70,00 Persen	70,00 Persen	70,00 Persen	204,759,305	362,273,000	362,273,000					70,00 Persen	452,451,723		
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi, Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	80,00 Persen		70,00 Persen	100 Persen	100 Persen	204,759,305	362,273,000	362,273,000					100 Persen	452,451,723		
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50 Orang	50 Orang	49,046,748	0	0	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat 4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	50 Orang	53,951,423	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				150 Orang	150 Orang	86,777,691	222,354,000	222,354,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	150 Orang	244,589,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	68,934,866	139,919,000	139,919,000	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur	12 Laporan	153,910,900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL								881,775,293,067	890,793,928,766	855,071,028,766							932,485,058,641	

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan, sub kegiatan perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan. Perubahan yang terjadi ini disebabkan oleh dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD Tahun 2023 ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara proses serta dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2023.

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan pada pelaksanaan sisa tahun anggaran 2023 yang memusatkan pada pencapaian Tujuan, Sasaran, Prioritas dan Tema Pembangunan Tahun 2023 dengan tetap mengacu pada Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat untuk tahun kedua RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026, Isu-isu Strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta pelaksanaannya melalui program, kegiatan dan sub kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah tersebut serta demi terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi kinerja pembangunan dari semua pemangku kepentingan, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023;
2. Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 sebagai landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan diharapkan dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai mitra ataupun sebagai salah satu unsur pemberi masukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program, kegiatan, sub kegiatan;
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan melalui penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan melalui upaya pengendalian internal dan melaporkannya secara triwulan kepada Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat;
5. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat melakukan evaluasi, verifikasi serta pengendalian terhadap laporan triwulanan hasil pemantauan dan pengendalian dari Kepala Perangkat Daerah dan apabila dari hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah dimaksud;
6. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat;
7. Pada akhir pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2023 dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja terhadap target capaian kinerja tahunan dan lima tahunan serta target capaian keuangan

pelaksanaan pembangunan melalui pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Tahun 2023 dan disampaikan dalam bentuk Laporan Ikhtisar Keuangan Tahunan serta dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP).

Demikianlah Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan sebagai pedoman dalam menyusun KUPA dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2023, Perubahan RKA-Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2023 serta DPPA APBD TA 2023. Lebih lanjut, diharapkan dokumen ini dapat menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program, kegiatan, sub kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan daerah sebagaimana terangkum dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL